KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

# LAPORAN KEUANGAN

## KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


















2025

audited

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

# Kata Pengantar



# KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta,  Mei 2026
Menteri Kelautan dan Perikanan

Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

# Daftar
# Isi



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... xx
DAFTAR LAMPIRAN ..... xxi
DAFTAR SINGKATAN ..... xxii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN ..... 1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN ..... 3
II. NERACA ..... 4
III. LAPORAN OPERASIONAL ..... 7
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ..... 8
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ..... 9
A. PENJELASAN UMUM ..... 9
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 101
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA ..... 208
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL ..... 355
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS . 395
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA ..... 413

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

# Pernyataan Tanggung **Jawab**



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

# PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana terlampir, merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun dengan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran serta posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2026
Menteri Kelautan dan Perikanan

Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

# Daftar Tabel



## PENJELASAN UMUM


TABEL A.1 PETA STRATEGIS KKP TAHUN 2025-2029 ..... 21

TABEL A.2 RINCIAN PEGAWAI KKP BERDASARKAN STATUS PER 31 DESEMBER 2025 ..... 57

TABEL A. 3 INDIKATOR KINERJA TUJUAN KKP TAHUN 2025-2029 ..... 64

TABEL A.4 INDIKATOR KINERJA SS KKP TAHUN 2025-2029 ..... 65

TABEL A. 5 CAPAIAN KINERJA KKP TAHUN 2025 ..... 67

TABEL A. 6 JUMLAH PEJABAT PERBENDAHARAAN PER JENIS KEWENANGAN SATKER ..... 68

TABEL A. 7 REKENING PEMERINTAH PADA KKP BERDASARKAN JENIS REKENING ..... 69

TABEL A.8 REKENING PEMERINTAH PADA KKP BERDASARKAN JENIS BANK ..... 69

TABEL A.9 DAFTAR SATKER BADAN LAYAANAN UMUM KKP ..... 70

TABEL A.10 JUMLAH ENTITAS AKUNTANSI PER 31 DESEMBER 2025 ..... 71

TABEL A.11 PENYISIHAN PIUTANG ..... 80

TABEL A.12 PENGGOLONGAN MASA MANFAAT ASET TETAP ..... 81

TABEL A.13 MASA MANFAAT ASET TAK BERWUJUD ..... 83


## LAPORAN REALISASI ANGGARAN


TABEL B.1 PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN MENURUT UNIT ESELON I TA 2025 ..... 101

TABEL B.2 BLOKIR ANGGARAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN MENURUT UNIT ESELON I PER JENIS BELANJA TA 2025 ..... 103

TABEL B.3 JUMLAH SATKER YANG MEMILIKI DIPA MENURUT UNIT ESELON I PER KEWENANGAN TA 2025 ..... 103

TABEL B.4 PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN MENURUT UNIT ESELON I PER JENIS BELANJA TA 2025 (*AUDITED*) ..... 104

TABEL B.5 PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN MENURUT KEWENANGAN SATKER PER JENIS BELANJA TA 2025 (*AUDITED*) ..... 104

TABEL B.6 RINCIAN REALISASI PNBP PER AKUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 ..... 105

TABEL B.7 RINCIAN REALISASI PNBP PER UNIT ESELON I UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 ..... 106

TABEL B.8 RINCIAN REALISASI PNBP PER AKUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 ..... 106

TABEL B.9 RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN PERIKANAN PER AKUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 107

TABEL B.10 RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024113

TABEL B.11 RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN HASIL KERJA SAMA BLU UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024116

TABEL B.12 RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN BLU LAINNYA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024..... 119

TABEL B.13 PERBANDINGAN RINCIAN PNBP LAINNYA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024..... 123

TABEL B.14 RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN PENDAPATAN DARI PENJUALAN, PENGELOLAAN BMN, IURAN BADAN USAHA AND PENERIMAAN KLAIM ASURANSI BMN PER AKUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024..... 124

TABEL B.15 RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN PENDAPATAN DARI PENJUALAN, PENGELOLAAN BMN, IURAN BADAN USAHA DAN PENERIMAAN KLAIM ASURANSI BMN PADA MASING-MASING UNIT ESELON I UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024..... 125

TABEL B.16 RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM PER AKUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024..... 145

TABEL B.17 RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM PADA MASING-MASING UNIT ESELON I UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 ..... 146

TABEL B.18 RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN KESEHATAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN KEAGAMAAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023..... 150

TABEL B.19 RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN PENDIDIKAN, BUDAYA, RISET, DAN TEKNOLOGI PER AKUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024..... 151

TABEL B.20 RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN PENDIDIKAN, BUDAYA, RISET, DAN TEKNOLOGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024..... 151

TABEL B.21 RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN JASA LAINNYA PER AKUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024152

TABEL B.22 RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN JASA LAINNYA PADA MASING-MASING UNIT ESELON I UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024..... 153

TABEL B.23 RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PER AKUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024..... 156

TABEL B.24 RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 ..... 156

TABEL B.25 RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN DENDA PER AKUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024..... 159

TABEL B.26 RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN DENDA PADA MASING-MASING UNIT ESELON I UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024..... 159

TABEL B.27 RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN LAIN-LAIN PER AKUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024..... 163

TABEL B.28 RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN LAIN-LAIN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 ..... 163

TABEL B.29 RINCIAN PAGU DAN REALISASI BELANJA PER JENIS BELANJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 ..... 172

TABEL B.30 RINCIAN PAGU DAN REALISASI BELANJA PADA MASING-MASING UNIT ESELON I UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025..... 172

TABEL B.31 RINCIAN PERBANDINGAN REALISASI BELANJA PER JENIS BELANJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024..... 173

TABEL B.32 RINCIAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025..... 173

TABEL B.33 RINCIAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI MENURUT UNIT ESELON I UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025..... 174

TABEL B.34 RINCIAN PERBANDINGAN REALISASI BELANJA PEGAWAI PER AKUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024..... 174

TABEL B.35 RINCIAN PERBANDINGAN REALISASI BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN MENURUT UNIT ESELON I UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024..... 175

TABEL B.36 RINCIAN PERBANDINGAN REALISASI BELANJA HONORARIUM/LEMBUR/TUNJANGAN KHUSUS & BELANJA PEGAWAI TRANSITO MENURUT UNIT ESELON I UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024..... 176

TABEL B.37 RINCIAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA BARANG PER AKUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 ..... 176

TABEL B.38 RINCIAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA BARANG UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 ..... 177

TABEL B.39 RINCIAN PERBANDINGAN REALISASI BELANJA BARANG PER AKUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 ..... 177

TABEL B.40 RINCIAN PERBANDINGAN REALISASI BELANJA BARANG MENURUT UNIT ESELON I UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 ..... 178

TABEL B.41 RINCIAN PERBANDINGAN REALISASI BELANJA JASA MENURUT UNIT ESELON I UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024180

TABEL B.42 RINCIAN PERBANDINGAN REALISASI BELANJA PEMELIHARAAN MENURUT UNIT ESELON I UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 ..... 182

TABEL B.43 RINCIAN PERBANDINGAN REALISASI BELANJA PERJALANAN DINAS MENURUT UNIT ESELON I UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 ..... 184

TABEL B.44 RINCIAN PERBANDINGAN REALISASI BELANJA BLU MENURUT UNIT ESELON I UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024186

TABEL B.45 RINCIAN BELANJA BARANG BLU BBPBAP JEPARA BELUM DISAHKAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 ..... 189

TABEL B.46 RINCIAN PERBANDINGAN REALISASI BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA MENURUT UNIT ESELON I UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 ..... 190

TABEL B.47 RINCIAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 ..... 191

TABEL B.48 RINCIAN REALISASI BELANJA MODAL MENURUT UNIT ESELON I UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 ..... 192

TABEL B.49 RINCIAN PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL PER AKUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 ..... 193

TABEL B.50 RINCIAN PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL TANAH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 ..... 194

TABEL B.51 RINCIAN PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 ..... 194

TABEL B.52 RINCIAN PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 ..... 196

TABEL B.53 RINCIAN PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 ..... 198

TABEL B.54 RINCIAN PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL LAINNYA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024..... 199

TABEL B.55 RINCIAN PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL BLU UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 ..... 200

## NERACA

TABEL C.1 RINCIAN SALDO ASET LANCAR PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 208

TABEL C.2 RINCIAN SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 209

TABEL C.3 RINCIAN SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PADA MASING-MASING ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 209

TABEL C.4 RINCIAN SALDO KAS LAINNYA DAN SETARA KAS PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024..... 210

TABEL C.5 RINCIAN SALDO KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN PADA MASING-MASING ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024..... 210

TABEL C.6 RINCIAN SALDO KAS LAINNYA DI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DARI HIBAH PADA MASING-MASING ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 211

TABEL C.7 RINCIAN SALDO KAS DI K/L DARI HIBAH PER *PHASE* PADA SATKER BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA PER 31 DESEMBER 2024 DAN PER 31 DESEMBER 2024 ..... 212

TABEL C.8 RINCIAN SALDO KAS DI K/L DARI HIBAH PER REKENING PADA SATKER BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA PER 31 DESEMBER 2025..... 213

TABEL C.9 RINGKASAN MUTASI KAS LAINNYA DI K/L DARI HIBAH PADA PROYEK SKPT JICA PER 31 DESEMBER 2025 ..... 213

TABEL C.10 RINCIAN PEMBAYARAN KE PIHAK KETIGA DARI REKENING RUPIAH YANG BELUM DISAHKAN PER FASE PER 31 DESEMBER 2025 (REKENING KORAN) . 214

TABEL C.11 RINCIAN MUTASI KAS LAINNYA DI K/L DARI HIBAH PADA PROYEK GEF(6 PER 31 DESEMBER 2025 ..... 215

TABEL C.12 RINCIAN SALDO KAS LAINNYA DI BADAN LAYANAN UMUM PADA MASING-MASING ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024..... 217

TABEL C.13 RINCIAN SALDO KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 218

TABEL C.14 RINCIAN SALDO KAS DAN BANK BLU PER SATKER PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 218

TABEL C.15 RINCIAN SALDO REKENING OPERASIONAL BLU PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 219

TABEL C.16 PERBANDINGAN SALDO KAS DAN BANK BLU PADA NERACA DENGAN SALDO REKENING BLU PER 31 DESEMBER 2025 ..... 220

TABEL C.17 RINCIAN SALDO KAS DAN BANK-BLU YANG BELUM DISAHKAN PER SATKER PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 221

TABEL C.18 RINCIAN SALDO INVESTASI JANGKA PENDEK(BADAN LAYANAN UMUM PADA MASING-MASING ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 222

TABEL C.19 RINCIAN SALDO DEPOSITO BLU PADA MASING-MASING ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 222

TABEL C.20 RINCIAN SALDO BELANJA BARANG DIBAYAR DIMUKA PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 223

TABEL C.21 RINCIAN SALDO UANG MUKA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 226

TABEL C.22 RINCIAN SALDO PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA PADA MASING-MASING ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 227

TABEL C.23 RINCIAN SALDO PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA PPSNZ PER 31 DESEMBER 2025 ..... 228

TABEL C.24 RINCIAN SALDO PIUTANG BUKAN PAJAK PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 230

TABEL C.25 RINCIAN SALDO PIUTANG PNBP PADA PPS NIZAM ZACHMAN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 232

TABEL C.26 *TIMELINE* PENAGIHAN PAGAR LAUT ..... 235

TABEL C. 27 RINCIAN SEWA PASAR IKAN MODERN MUARA BARU TAHUN 2025 ..... 236

TABEL C.28 RINCIAN SALDO PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH-PIUTANG BUKAN PAJAK PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 247

TABEL C.29 RINCIAN SALDO PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH-PIUTANG BUKAN PAJAK BERDASARKAN KUALITAS PIUTANG PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 247

TABEL C.30 RINCIAN SELISIH SALDO PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH-PIUTANG BUKAN PAJAK ANTARA NERACA SALDO AKRUAL DENGAN *SUBLEDGER* (MODUL PIUTANG) PER 31 DESEMBER 2025 ..... 248

TABEL C.31 RINCIAN SALDO PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 249

TABEL C.32 RINCIAN SALDO PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG KEGIATAN OPERASIONAL BLU PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 251

TABEL C.33 RINCIAN SALDO PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH- PIUTANG BLU PENGELOLAAN DANA BERGULIR BERDASARKAN KUALITAS PER 31 DESEMBER 2025 ..... 252

TABEL C.34 RINCIAN SALDO PERSEDIAAN PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 253

TABEL C.35 RINCIAN SALDO PERSEDIAAN DALAM KONDISI USANG DAN RUSAK PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 ..... 254

TABEL C.36 RINCIAN SALDO PERSEDIAAN UNTUK OPERASIONAL PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 255

TABEL C.37 DAFTAR BARANG PERSEDIAAN UNTUK OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2025 ..... 255

TABEL C.38 RINGKASAN MUTASI PERSEDIAAN UNTUK OPERASIONAL PER JENIS TRANSAKSI PER 31 DESEMBER 2025 ..... 257

TABEL C.39 RINCIAN SALDO PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL ATAU DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 261

TABEL C.40 RINGKASAN MUTASI PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT PER JENIS TRANSAKSI PER 31 DESEMBER 2025 ..... 262

TABEL C.41 RINCIAN SALDO INVESTASI JANGKA PANJANG NONPERMANEN LAINNYA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 266

TABEL C.42 RINCIAN SALDO ASET TETAP PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 267

TABEL C.43 RINCIAN SALDO TANAH PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 267

TABEL C.44 RINGKASAN MUTASI TANAH PER JENIS TRANSAKSI PER 31 DESEMBER 2025 ..... 268

TABEL C.45 RINCIAN TANAH DIKUASAI DAN/ATAU BERSENGKETA DENGAN PIHAK LAIN PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 ..... 270

TABEL C.46 RINCIAN SALDO PERALATAN DAN MESIN PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 274

TABEL C.47 DAFTAR RINCI NILAI TERCATAT PERALATAN DAN MESIN PER BIDANG BARANG PER 31 DESEMBER 2025 ..... 274

TABEL C.48 RINGKASAN MUTASI PERALATAN DAN MESIN PER JENIS TRANSAKSI PER 31 DESEMBER 2025 ..... 275

TABEL C.49 RINCIAN SALDO GEDUNG DAN BANGUNAN PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 280

TABEL C.50 DAFTAR RINCI NILAI TERCATAT GEDUNG DAN BANGUNAN PER BIDANG BARANG PER 31 DESEMBER 2025 ..... 281

TABEL C.51 RINGKASAN MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN PER JENIS TRANSAKSI PER 31 DESEMBER 2025 ..... 281

TABEL C.52 RINCIAN SALDO JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 286

TABEL C.53 DAFTAR RINCI NILAI TERCATAT JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PER BIDANG BARANG PER 31 DESEMBER 2025 ..... 286

TABEL C.54 RINGKASAN MUTASI JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PER JENIS TRANSAKSI PER 31 DESEMBER 2025 ..... 287

TABEL C.55 RINCIAN SALDO ASET TETAP LAINNYA PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 290

TABEL C.56 DAFTAR RINCI NILAI TERCATAT ASET TETAP LAINNYA PER AKUN PER BIDANG BARANG PER 31 DESEMBER 2025 ..... 290

TABEL C.57 RINGKASAN MUTASI ASET TETAP LAINNYA PER JENIS TRANSAKSI PER 31 DESEMBER 2025 ..... 292

TABEL C.58 RINCIAN SALDO KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 295

TABEL C.59 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN BERDASARKAN STATUS KEBERLANJUTANNYA PER 31 DESEMBER 2025 ..... 296

TABEL C.60 RINGKASAN MUTASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER JENIS TRANSAKSI PER 31 DESEMBER 2025 ..... 298

TABEL C.61 RINCIAN SALDO AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 301

TABEL C.62 RINGKASAN NILAI PENYUSUTAN ASET TETAP PER AKUN PER BIDANG BARANG PER 31 DESEMBER 2025 ..... 301

TABEL C.63 RINCIAN SALDO PROPERTI INVESTASI PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 303

TABEL C.64 DAFTAR RINCI PROPERTI INVESTASI PER BIDANG BARANG PER 31 DESEMBER 2025 ..... 304

TABEL C.65 RINCIAN SALDO AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 304

TABEL C.66 RINCIAN SALDO PIUTANG JANGKA PANJANG PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 305

TABEL C.67 RINCIAN SALDO PIUTANG TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 306

TABEL C.68 KUALITAS PIUTANG TP/TGR PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2024 ..... 307

TABEL C.69 RINCIAN SALDO PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PIUTANG TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024.. 308

TABEL C.70 RINCIAN SALDO PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 308

TABEL C.71 KUALITAS PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 ..... 309

TABEL C.72 RINCIAN SALDO PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH(PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA PADA MASING-MASING ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 309

TABEL C.73 RINCIAN SALDO ASET LAINNYA PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 310

TABEL C.74 RINCIAN SALDO KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 311

TABEL C.75 RINGKASAN MUTASI KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA PER JENIS TRANSAKSI PER 31 DESEMBER 2025 ..... 311

TABEL C.76 RINCIAN SALDO ASET TAK BERWUJUD PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 312

TABEL C.77 DAFTAR RINCI ASET TAK BERWUJUD PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025..... 313

TABEL C.78 RINGKASAN MUTASI ASET TAK BERWUJUD PER JENIS TRANSAKSI PER 31 DESEMBER 2025 ..... 314

TABEL C.79 RINCIAN SALDO ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024.. 316

TABEL C.80 RINGKASAN MUTASI ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN PER JENIS TRANSAKSI PER 31 DESEMBER 2025 ..... 317

TABEL C.81 RINCIAN SALDO DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 319

TABEL C.82 RINCIAN SALDO DANA REKENING PENAMPUNGAN-K/L PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024.. 320

TABEL C.83 RINGKASAN DAN MUTASI DANA DI REKENING PENAMPUNGAN PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025..... 320

TABEL C. 84 RINGKASAN PENYELESAIAN RPATA TANPA PEMBERIAN PERPANJANGAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 8 MEI 2026 ..... 321

TABEL C.85 RINGKASAN PENYELESAIAN RPATA YANG DISELESAIKAN PADA TAHUN 2026 PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 8 MEI 2026 ..... 321

TABEL C.86 RINCIAN SALDO ASET LAIN-LAIN PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 324

TABEL C.87 RINCIAN ASET TETAP LAIN-LAIN PER GOLONGAN BARANG PER 31 DESEMBER 2025 ..... 326

TABEL C.88 RINGKASAN MUTASI ASET LAIN-LAIN PER JENIS TRANSAKSI PER 31 DESEMBER 2025 ..... 326

TABEL C.89 RINCIAN SALDO AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 329

TABEL C.90 RINGKASAN NILAI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA PER AKUN PER BIDANG BARANG PER 31 DESEMBER 2025 ..... 329

TABEL C.91 RINCIAN SALDO KEWAJIBAN JANGKA PENDEK PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 331

TABEL C.92 RINCIAN SALDO UTANG KEPADA PIHAK KETIGA PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 332

TABEL C.93 RINCIAN SALDO BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 332

TABEL C.94 RINCIAN SALDO BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 335

TABEL C.95 RINCIAN SALDO BELANJA MODAL YANG MASIH HARUS DIBAYAR PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 345

TABEL C.96 RINCIAN SALDO UTANG KEPADA PIHAK KETIGA LAINNYA PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 .. 346

TABEL C.97 RINCIAN SALDO UTANG KEPADA PIHAK KETIGA BERDASARKAN JENIS BAST PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 ..... 346

TABEL C.98 RINCIAN SALDO DANA PIHAK KETIGA BLU PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 347

TABEL C.99 RINCIAN SALDO PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 349

TABEL C.100 RINCIAN PENDAPATAN SEWA DITERIMA DIMUKA PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 349

TABEL C.101 RINCIAN SALDO PENDAPATAN BUKAN PAJAK LAINNYA DITERIMA DIMUKA PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 351

TABEL C.102 RINCIAN SALDO PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA BLU PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 352

TABEL C.103 RINCIAN SALDO UANG MUKA KPPN PADA MASING-MASING ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 354

TABEL C.104 RINCIAN SALDO UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 354

TABEL C.105 RINCIAN SALDO UTANG PAJAK BENDAHARA PENGELUARAN YANG BELUM DISETOR PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 355

## LAPORAN OPERASIONAL

TABEL D.1 RINCIAN PENDAPATAN-LO PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 356

TABEL D.2 RINCIAN SALDO PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 356

TABEL D.3 RINCIAN SALDO PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 361

TABEL D.4 RINCIAN SALDO PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK BERDASARKAN UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 362

TABEL D.5 RINCIAN SALDO PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 362

TABEL D.6 RINCIAN SALDO PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM BERDASARKAN UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 363

TABEL D.7 RINCIAN SALDO PENDAPATAN HASIL KERJA SAMA LEMBAGA/BADAN USAHA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 364

TABEL D.8 PENDAPATAN PENYEDIAAN BENIH BENING LOBSTER PER MASING *JOINT VENTURE* PER 31 DESEMBER 2025 ..... 364

TABEL D.9 PENDAPATAN JASA LAYANAN PERBANKAN BLU PER 31 DESEMBER 2025 ..... 365

TABEL D.10 RINCIAN BEBAN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 366

TABEL D.11 RINCIAN SALDO BEBAN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 . 367

TABEL D.12 RINCIAN SALDO BEBAN PEGAWAI BERDASARKAN UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 368

TABEL D.13 PERBEDAAN SALDO BEBAN PEGAWAI PER 31 DESEMBER 2024 PADA LRA DAN LO ..... 369
TABEL D.14 RINCIAN PERBEDAAN SALDO BEBAN PEGAWAI PER 31 DESEMBER 2024 PADA LRA DAN LO ..... 369
TABEL D.15 RINCIAN SALDO BEBAN PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 369
TABEL D.16 RINCIAN SALDO BEBAN PERSEDIAAN BERDASARKAN UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 370
TABEL D.17 RINCIAN SALDO BEBAN BARANG DAN JASA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 371
TABEL D.18 RINCIAN BEBAN BEBAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 372
TABEL D.19 RINCIAN SALDO BEBAN PEMELIHARAAN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 373
TABEL D.20 RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN BERDASARKAN UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 373
TABEL D.21 RINCIAN SALDO BEBAN PERJALANAN DINAS PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 379
TABEL D.22 RINCIAN BEBAN PERJALANAN DINAS BERDASARKAN UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 380
TABEL D.23 RINCIAN SALDO BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 381
TABEL D.24 RINCIAN BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 381
TABEL D.25 PERBEDAAN SALDO BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT PER 31 DESEMBER 2025 PADA LRA DAN LO ..... 382
TABEL D.26 RINCIAN PERBEDAAN SALDO BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT PER 31 DESEMBER 2025 PADA LRA DAN LO ..... 382
TABEL D.27 RINCIAN SALDO BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 384
TABEL D.28 RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI BERDASARKAN UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 385
TABEL D.29 RINCIAN SALDO BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 386
TABEL D.30 RINCIAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH BERDASARKAN UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 387

TABEL D.31 PERBEDAAN SALDO BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH PER 31 DESEMBER 2025 PADA LRA DAN LO ..... 387

TABEL D.32 RINCIAN PERBEDAAN SALDO BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH PER 31 DESEMBER 2025 PADA LRA DAN LO ..... 388

TABEL D.33 RINCIAN SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 388

TABEL D.34 RINCIAN SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 389

TABEL D.35 RINCIAN SALDO BEBAN PENDAPATAN PELEPASAN ASET NON LANCAR PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 389

TABEL D.36 RINCIAN PENDAPATAN PELEPASAN ASET NON LANCAR BERDASARKAN UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 390

TABEL D.37 RINCIAN BEBAN PELEPASAN ASET NON LANCAR BERDASARKAN UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 391

TABEL D.38 RINCIAN SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 391

TABEL D.39 RINCIAN PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 392

TABEL D.40 RINCIAN PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA BERDASARKAN UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 393

TABEL D.41 RINCIAN SALDO BEBAN DARI KEGIATAN NON OPERASONAL LAINNYA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 393

TABEL D.42 RINCIAN BEBAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA BERDASARKAN UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 394

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TABEL E.1 RINCIAN SALDO AWAL EKUITAS PADA MASING-MASING ESELON I PER 1 JANUARI 2025 DAN 1 JANUARI 2024 ..... 395

TABEL E.2 PERBANDINGAN SURPLUS/DEFISIT LO PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 396

TABEL E.3 RINCIAN SALDO KOREKSI NILAI PERSEDIAAN PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 396

TABEL E.4 RINCIAN SALDO KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 397

TABEL E.5 RINCIAN SALDO KOREKSI ASET NON REVALUASI PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 398

TABEL E.6 RINCIAN SALDO KOREKSI ASET NON REVALUASI PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 398

TABEL E.7 RINCIAN SALDO KOREKSI LAIN-LAIN PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 400

TABEL E.8 RINCIAN SALDO TRANSAKSI ANTAR ENTITAS PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 401

TABEL E.9 RINCIAN SALDO TRANSAKSI ANTAR ENTITAS PER UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 401

TABEL E.10 RINCIAN SALDO DITERIMA DARI ENTITAS LAIN PER UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 402

TABEL E.11 RINCIAN SALDO DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN PER UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 403

TABEL E.12 RINCIAN SALDO TRANSFER KELUAR TRANSFER MASUK PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 404

TABEL E.13 RINCIAN SALDO TRANSFER KELUAR TRANSFER MASUK PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 ..... 404

TABEL E.14 RINCIAN SALDO TRANSFER KELUAR TRANSFER MASUK DARI KEMENTERIAN LAINNYA PADA MASING-MASING ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 ..... 405

TABEL E.15 RINCIAN SALDO PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG PER AKUN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 406

TABEL E.16 RINCIAN SALDO PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG PADA MASING-MASING UNIT ESELON I PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 406

TABEL E.17 PERBANDINGAN SALDO EKUITAS AKHIR PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 ..... 411

## PENGUNGKAPAN LAINNYA

TABEL F. 1 ALOKASI ANGGARAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH PER JENIS BELANJA TAHAP I TAHUN 2025 ..... 415

TABEL F.2 ALOKASI ANGGARAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH PER JENIS BELANJA TAHAP II TAHUN 2025 ..... 416

TABEL F.3 REALISASI BELANJA KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH PER JENIS BELANJA PER 31 DESEMBER 2025 ..... 416

TABEL F.4 RINCIAN PEMBAYARAN TERMIN I DAN II PADA KNMP ..... 418

TABEL F.5 RINCIAN PEMBERIAN KESEMPATAN PERTAMA PADA KNMP TAHUN 2025 ..... 420

TABEL F.6 RINCIAN BAST TERMIN III PADA KNMP TAHUN 2025 ..... 422

TABEL F.7 RINCIAN UANG MUKA PADA KNMP TAHUN 2025 ..... 422

TABEL F.8 RINCIAN TUNGGAKAN ATAS KNMP TAHUN 2025 PADA DITJEN PDSPKP ..... 423
TABEL F.9 RINCIAN PLN MFISS TAHUN 2025 BERDASARKAN LENDER ..... 448
TABEL F.10 RINCIAN PAGU DAN REALISASI PADA ATAS KEGIATAN MFISS PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PER 31 DESEMBER 2025 ..... 452
TABEL F.11 DATA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PER 31 DESEMBER 2025 ..... 457
TABEL F.12 USULAN PENETAPAN INFORMASI KERUGIAN NEGARA PERIODE SEMESTER II TAHUN 2025 ..... 458
TABEL F.13 REKAPITULASI TINDAK LANJUT LHP ATAS LK KKP 2024 ATAS NILAI KEUANGAN SAMPAI DENGAN SEMESTER II TAHUN 2025 ..... 460
TABEL F.14 ATURAN DASAR PENETAPAN BLU DAN TARIF LAYANAN BLU LINGKUP KKP ... 479
TABEL F.15 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BLU KKP PER 31 DESEMBER 2025 ..... 480
TABEL F.16 RINCIAN PENYELESAIAN REKOMENDASI ATAS HASIL MONEV PPK BLU PER 31 DESEMBER 2025 ..... 482
TABEL F.17 JUMLAH OUTSTANDING POKOK, TUNGGAKAN POKOK, DAN BUNGA LPMUKP PER 31 DESEMBER 2025 ..... 484
TABEL F.18 KONDISI PIUTANG BLU LPMUKP PER 31 DESEMBER 2025 ..... 484
TABEL F.19 RENAKSI PENANGANAN PIUTANG BERMASALAH TAHUN 2025 ..... 485
TABEL F.20 HASIL PENANGANAN PIUTANG BERMASALAH TAHUN 2025 ..... 486
TABEL F.21 DAFTAR PENYELESAIAN PIUTANG BERMASALAH TAHUN 2025 ..... 487
TABEL F.22 SURAT SOMASI LPMUKP SELAMA TAHUN 2025 ..... 488
TABEL F.23 RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA BARANG PADA BLU BBPBAP JEPARA YANG BELUM DISAHKAN ..... 491
TABEL F.24 REKAP PENYERAPAN ANGGARAN BOPPJ TA 2025 ..... 496
TABEL F.25 RINCIAN BELANJA MODAL ISDB TA 2025 ..... 499
TABEL F.26 RINCIAN BELANJA PERALATAN DAN MESIN ISDB TA 2025 ..... 500
TABEL F.27 SISA BBM DALAM TANGKI PER 31 DESEMBER 2025 ..... 502
TABEL F.28 RINCIAN ASET YANG TERBENTUK DI SABANG PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PER 31 DESEMBER 2025 ..... 514
TABEL F.29 RINCIAN ASET YANG TERBENTUK DI PENGANDARAN PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PER 31 DESEMBER 2025 ..... 515
TABEL F.30 RINCIAN ASET YANG TERBENTUK DI KARIMUN JAWA PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PER 31 DESEMBER 2025 ..... 515
TABEL F.31 DAFTAR TRANSAKSI RESIPROKAL BELANJA TA 2025 ..... 517
TABEL F. 32 DAFTAR TRANSAKSI RESIPROKAL PENDAPATAN TA 2025 ..... 518

TABEL F.33 DAFTAR KASUS HUKUM TA 2025 ..... 521
TABEL F.34 DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP 2025 526
TABEL F.35 DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP 2025 537

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

# Daftar Gambar



# DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 PETA STRATEGIS KKP TAHUN 2025-2029 ..... 16
GAMBAR 2 PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, DAN KEGIATAN PRIORITAS TERKAIT KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RPJMN 2025-2029 ..... 20
GAMBAR 3 PEDEKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI BIRU ..... 23
GAMBAR 4 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029 ..... 23
GAMBAR 5 STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ..... 56
GAMBAR 6 PROSES BISNIS PENYUSUNAN LK MENGGUNAKAN APLIKASI SAKTI ..... 91
GAMBAR 7 KOMPOSISI REALISASI BELANJA MODAL KKP TAHUN 2025 ..... 192
GAMBAR 8 SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN KNMP TAHAP I (65 LOKASI) ..... 413
GAMBAR 9 SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN KNMP TAHAP II (35) LOKASI) ..... 414
GAMBAR 10 MILESTONE PROYEK BINS KARAWANG ..... 424
GAMBAR 11 PROGRES ALIH STATUS PENGGUNAAN BMN YANG BELUM DISETUJUI ..... 507

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

# Daftar
# Lampiran



# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Aplikasi di Lingkungan KKP
2. Rekening Pemerintah pada Satker di Lingkungan KKP
3. Daftar Piutang di Lingkungan KKP
4. Daftar Piutang yang dserahkan ke PUPN di Lingkungan KKP
5. Daftar Capaian RO Prioritas Nasional
6. Daftar Properti Investasi
7. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada KKP
8. RPATA
9. Bioflok
10. Telaah LK
11. *Printout* MonSakti

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

# Daftar
# Singkatan



# DAFTAR SINGKATAN

| | | |
|---|---|---|
| APBN | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| SAKTI | : | Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi |
| DPR | : | Dewan Perwakilan Rakyat |
| RPJMN | : | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional |
| Renstra | : | Rencana Strategis |
| PDB | : | Pendapatan Domestik Bruto |
| SDM | : | Sumber Daya Manusia |
| RB | : | Reformasi Birokrasi |
| RPJPN | : | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional |
| SDA | : | Sumber Daya Alam |
| ASN | : | Aparatur Sipil Negara |
| GRK | : | Gas Rumah Kaca |
| PIT | : | Penangkapan Ikan Terukur |
| CITES | : | *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* |
| WPPNRI | : | Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia |
| BBM | : | Bahan Bakar Minyak |
| VMS | : | Vessel Monitoring System |
| KKPRL | : | Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut |
| SPBE | : | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik |
| TPB | : | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
| UNCLOS | : | *United Nations Convention on the Law of the Sea* |
| PPN | : | Pelabuhan Perikanan Nusantara |
| PP | : | Pelabuhan Perikanan |
| SKPT | : | Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu |
| SPM | : | Surat Perintah Membayar |
| SP2D | : | Surat Perintah Pencairan Dana |
| SP2B BLU | : | Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum |
| SP3B BLU | : | Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum |
| BLU | : | Badan Layanan Umum |
| UP | : | Uang Persediaan |
| TUP | : | Tambahan Uang Persediaan |
| LRA | : | Laporan Realisasi Anggaran |
| LO | : | Laporan Operasional |
| SAI | : | Sistem Akuntansi Instansi |
| KKP | : | Kementerian Kelautan dan Perikanan |

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

# RINGKASAN



# RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara bersih sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.405.257.866.891,00 atau mencapai 83,18% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.891.505.212.000,00. Sedangkan Realisasi Belanja Negara Bersih sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.969.246.147.229,00 atau mencapai 79,51% dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar Rp10.023.336.496.000,00.

## 2. NERACA

Neraca menyajikan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp29.427.445.066.516,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.569.572.365.883,00; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp15.573.140.686,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp24.383.010.269.492,00; Properti Investasi (netto) sebesar Rp651.869.293.138,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp141.854.330,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp1.807.278.142.987,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.061.830.393.537,00 dan Rp28.365.614.672.979,00.

## 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.483.005.869.084,00 sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp5.390.403.764.087,00; sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp2.907.397.895.003,00.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp13.480.476.048,00; Dengan demikian, entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp2.920.878.371.051,00.

## 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar 25.220.160.346.839,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp2.920.878.371.051,00, kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp81.396.663.892,00 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp6.147.729.361.083,00 sehingga ekuitas akhir per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp28.365.614.672.979,00.

## 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN



# I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

## KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
## LAPORAN REALISASI ANGGARAN
## UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

*(Dalam Rupiah)*

| URAIAN | CATATAN | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | % | ANGGARAN | REALISASI | % |
| **PENDAPATAN** | **B.1** | | | | | | |
| 1. Pendapatan Sumber Daya Alam | B.1.1 | 1.627.603.382.000 | 1.026.499.638.986 | 63,07 | 3.500.000.000.000 | 951.819.466.723 | 27,19 |
| 2. Pendapatan BLU | B.1.2 | 98.460.368.000 | 277.653.623.384 | 282,00 | 100.206.621.000 | 182.656.387.734 | 182,28 |
| 3. Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya | B.1.3 | 1.165.441.462.000 | 1.101.104.604.521 | 94,48 | 879.327.074.000 | 1.073.849.165.581 | 122,12 |
| **Jumlah Pendapatan** | | **2.891.505.212.000** | **2.405.257.866.891** | **83,18** | **4.479.533.695.000** | **2.208.325.020.038** | **49,30** |
| | | | | | | | |
| **BELANJA** | **B.2** | | | | | | |
| 1. Belanja Pegawai | B.2.1 | 2.014.373.667.000 | 1.981.998.452.037 | 98,39 | 1.899.944.432.000 | 1.891.758.893.702 | 99,57 |
| 2. Belanja Barang | B.2.2 | 4.727.315.788.000 | 3.767.428.525.803 | 79,69 | 4.469.224.914.000 | 3.885.910.376.345 | 86,95 |
| 3. Belanja Modal | B.2.3 | 3.281.647.041.000 | 2.219.819.169.389 | 67,64 | 879.142.264.000 | 522.328.316.434 | 59,41 |
| **Jumlah Belanja Netto** | | **10.023.336.496.000** | **7.969.246.147.229** | **79,51** | **7.248.311.610.000** | **6.299.997.586.481** | **86,92** |

Jakarta, Mei 2026
Menteri Kelautan dan Perikanan

Ditandatangani Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

# NERACA



# II. NERACA

## KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
## NERACA
## PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

*(Dalam Rupiah)*

| URAIAN | | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 |
|---|---|---|---|
| **ASET** | | | |
| **ASET LANCAR** | **C.1** | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | C.1.1 | 67.600.000 | 215.583.279 |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | C.1.2 | 196.422.234.131 | 247.271.846.142 |
| Kas pada Badan Layanan Umum | C.1.3 | 260.370.997.622 | 210.657.196.390 |
| Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum | C.1.4 | 139.850.000.000 | 23.450.000.000 |
| Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) | C.1.5 | 14.076.352.496 | 853.731.100 |
| Uang Muka Belanja (*Prepayment*) | C.1.6 | 909.984.470.455 | 0 |
| Pendapatan yang Masih Harus Diterima | C.1.7 | 21.943.695.912 | 21.667.904.525 |
| Piutang Bukan Pajak | C.1.8 | 158.364.411.690 | 58.098.228.477 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak | C.1.9 | (101.236.262.482) | (37.330.326.609) |
| **PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)** | | **57.128.149.208** | **20.767.901.868** |
| Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | C.1.10 | 316.018.435 | 105.339.479 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | C.1.11 | (1.580.092) | (526.698) |
| **BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)** | | **314.438.343** | **104.812.781** |
| Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum | C.1.12 | 45.941.839.872 | 40.334.387.105 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU | C.1.13 | (31.537.795.721) | (28.682.135.319) |
| **PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)** | | **14.404.044.151** | **11.652.251.786** |
| Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum | C.1.14 | 0 | 19.780.175 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU | C.1.15 | 0 | (98.901) |
| **PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)** | | **0** | **19.681.274** |
| Persediaan | C.1.16 | 955.010.383.565 | 159.570.028.616 |
| **JUMLAH ASET LANCAR** | | **2.569.572.365.883** | **696.230.937.761** |
| **INVESTASI JANGKA PANJANG** | **C.2** | | |
| Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya | C.2.1 | 15.643.578.233 | 0 |
| Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya | C.2.2 | (70.437.547) | 0 |

| URAIAN | | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 |
|---|---|---|---|
| **JUMLAH INVASTASI JANGKA PANJANG** | | **15.573.140.686** | **0** |
| **ASET TETAP** | **C.3** | | |
| Tanah | C.3.1 | 16.360.961.084.032 | 15.853.798.190.884 |
| Peralatan dan Mesin | C.3.2 | 6.483.872.129.707 | 6.284.712.692.903 |
| Gedung dan Bangunan | C.3.3 | 5.413.469.993.250 | 5.261.675.168.922 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | C.3.4 | 4.139.015.306.911 | 4.053.129.578.585 |
| Aset Tetap Lainnya | C.3.5 | 211.745.434.245 | 211.154.575.775 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | C.3.6 | 846.375.146.080 | 183.735.627.793 |
| Akumulasi Penyusutan | C.3.7 | (9.072.428.824.733) | (8.471.089.435.393) |
| **JUMLAH ASET TETAP** | | **24.383.010.269.492** | **23.377.116.399.469** |
| **Properti Investasi** | **C.4** | | |
| Properti Investasi | C.4.1 | 703.415.221.038 | 898.573.434.043 |
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi | C.4.2 | (51.545.927.900) | (81.513.026.434) |
| **JUMLAH PROPERTI INVESTASI** | | **651.869.293.138** | **817.060.407.609** |
| **PIUTANG JANGKA PANJANG** | **C.5** | | |
| Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | C.5.1 | 299.391.711 | 516.201.823 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | C.5.2 | (157.537.381) | (158.621.431) |
| **Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (NETTO)** | | **141.854.330** | **357.580.392** |
| Piutang Jangka Panjang lainnya | C.5.3 | 2.855.976.110 | 101.011.615.666 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya | C.5.4 | (2.855.976.110) | (505.058.070) |
| **PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA (NETTO)** | | **0** | **100.506.557.596** |
| **JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG** | | **141.854.330** | **100.864.137.988** |
| **ASET LAINNYA** | **C.6** | | |
| Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | C.6.1 | 0 | 103.876.004.000 |
| Aset Tak Berwujud | C.6.2 | 265.007.176.461 | 256.859.024.246 |
| Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan | C.6.3 | 0 | 235.822.950 |
| Dana Yang Dibatasi Penggunaannya | C.6.4 | 1.609.133.804.062 | 78.880.988.327 |
| Aset Lain-lain | C.6.5 | 416.816.583.236 | 390.301.200.894 |
| Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya | C.6.6 | (483.679.420.772) | (496.394.725.995) |
| **JUMLAH ASET LAINNYA** | | **1.807.278.142.987** | **333.758.314.422** |
| **JUMLAH ASET** | | **29.427.445.066.516** | **25.325.030.197.249** |
| **KEWAJIBAN** | | | |
| **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | **C.7** | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | C.7.1 | 1.043.576.675.989 | 94.174.913.102 |
| Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan | C.7.2 | 0 | 44.885.401 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | C.7.3 | 18.158.167.776 | 10.255.464.006 |
| Uang Muka dari KPPN | C.7.4 | 67.600.000 | 215.583.279 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | C.7.5 | 27.949.772 | 179.004.622 |
| **JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | | **1.061.830.393.537** | **104.869.850.410** |

| URAIAN | | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 |
|---|---|---|---|
| **JUMLAH KEWAJIBAN** | | **1.061.830.393.537** | **104.869.850.410** |
| **EKUITAS** | **C.8** | | |
| Ekuitas | C.8.1 | 28.365.614.672.979 | 25.220.160.346.839 |
| **JUMLAH EKUITAS** | | **28.365.614.672.979** | **25.220.160.346.839** |
| **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | | **29.427.445.066.516** | **25.325.030.197.249** |

Jakarta, Mei 2026
Menteri Kelautan dan Perikanan

Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

# LAPORAN OPERASIONAL



# III. LAPORAN OPERASIONAL

## KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
## LAPORAN OPERASIONAL
## UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

*(Dalam Rupiah)*

| URAIAN | CATATAN | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 |
|---|---|---|---|
| **KEGIATAN OPERASIONAL** | | | |
| **PENDAPATAN** | D.1 | | |
| Pendapatan Sumber Daya Alam | D.1.1 | 1.023.503.649.076 | 954.494.968.076 |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | D.1.2 | 1.178.327.558.962 | 1.060.883.227.384 |
| Pendapatan Badan Layanan Umum | D.1.3 | 281.174.661.046 | 192.598.593.229 |
| **JUMLAH PENDAPATAN** | | **2.483.005.869.084** | **2.207.976.788.689** |
| **BEBAN** | D.2 | | |
| Beban Pegawai | D.2.1 | 1.993.845.112.181 | 1.912.227.733.739 |
| Beban Persediaan | D.2.2 | 91.702.626.670 | 147.530.974.235 |
| Beban Barang dan Jasa | D.2.3 | 1.634.539.511.419 | 2.009.908.942.375 |
| Beban Pemeliharaan | D.2.4 | 250.057.375.591 | 341.035.450.066 |
| Beban Perjalanan Dinas | D.2.5 | 266.436.344.507 | 835.505.791.460 |
| Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | D.2.6 | 347.004.118.903 | 619.256.772.699 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D.2.7 | 745.895.188.330 | 758.048.674.328 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | D.2.8 | 60.923.486.486 | 6.078.261.264 |
| **JUMLAH BEBAN** | | 5.390.403.764.087 | 6.629.592.600.166 |
| **SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL** | D.3 | **(2.907.397.895.003)** | **(4.421.615.811.477)** |
| **KEGIATAN NON OPERASIONAL** | | | |
| Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar | D.4 | (133.415.807.061) | (114.278.615.674) |
| Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | D.5 | 119.935.331.013 | 185.680.801.054 |
| **JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL** | | **(13.480.476.048)** | **71.402.185.380** |
| **SURPLUS/(DEFISIT) LO** | | **(2.920.878.371.051)** | **(4.350.213.626.097)** |

Jakarta, Mei 2026
Menteri Kelautan dan Perikanan

Ditandatangani Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



# IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
## UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

*(Dalam Rupiah)*

| Uraian | CATATAN | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 |
|---|---|---|---|
| **EKUITAS AWAL** | **E.1** | **25.220.160.346.839** | **25.529.221.392.262** |
| SURPLUS/(DEFISIT) LO | E.2 | (2.920.878.371.051) | (4.350.213.626.097) |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR | | - | - |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | E.3 | (81.396.663.892) | (25.028.983.106) |
| Koreksi Nilai Persediaan | E.3.1 | (2.983.385.417) | 44.567.008.171 |
| Koreksi Atas Reklasifikasi | E.3.2 | 207.733.800 | 360.018.554 |
| Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi | E.3.3 | 22.701.866.192 | (64.588.272.232) |
| Koreksi Lain-Lain | E.3.4 | (101.322.878.467) | (5.367.737.599) |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | E.4 | 6.147.729.361.083 | 4.066.181.563.780 |
| **KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS** | | **3.145.454.326.140** | **(309.061.045.423)** |
| **EKUITAS AKHIR** | **E.5** | **28.365.614.672.979** | **25.220.160.346.839** |

Jakarta, Mei 2026
Menteri Kelautan dan Perikanan

Ditandatangani Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



# PENJELASAN UMUM

Catatan atas Laporan Keuangan



# V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## A. PENJELASAN UMUM

### A.1 Pendahuluan

*Pendahuluan*

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban disampaikan berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Berkenaan dengan pertanggungjawaban keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2025 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi mengamanatkan Kementerian/Lembaga untuk menyelenggarakan sistem akuntansi instansi (SAI) secara berjenjang untuk menghasilkan Laporan Keuangan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara periodik menyusun Laporan Keuangan berdasarkan penyelenggaraan SAI seluruh unit akuntansi di lingkungan KKP. Laporan Keuangan KKP ini, merupakan hasil kompilasi dari Laporan Keuangan satuan kerja (Satker) di lingkungan KKP. Laporan Keuangan KKP ini disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai salah satu bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada tingkat tertinggi lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### A.2 Dasar Hukum

*Dasar Hukum*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.01/2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;

15. Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Rekening Penampungan;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

22. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;

23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-13/PB/2024 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024;

24. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 29/MK.01/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SAKTI.

## A.3 Profil Entitas

*Profil Entitas*

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan orientasi pembangunan. Pada masa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya yang dapat diperbaharui seperti sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral.

Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya.

Besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan tersebut mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut. Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. KKP diharapkan mampu menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang dapat mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya:

Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumber daya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kedua, selama beberapa dasawarsa, pembangunan di negara ini lebih berorientasi pada sektor yang ada di darat, mengakibatkan sumber daya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan.

Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang.

Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumber daya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstrasi seperti industri, pemukiman, konservasi dan sebagainya.

### A.3.1 Visi

*Visi* Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam RPJMN 2025- 2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini menegaskan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Sebagai Kementerian yang membantu Presiden untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2025- 2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

KKP berkomitmen melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui: (1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) memastikan ketersediaan pangan biru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengendalian tekanan dan pembatasan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan; serta (3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan. Visi KKP tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden adalah ”Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

### A.3.2 Misi

*Misi* KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 7 (tujuh) dari 8 (delapan) Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut disusun untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;

2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;

3. “Meningkatkan Daya Saing SDM Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan

4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

### A.3.3 Tujuan

*Tujuan*

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra KKP tahun 2025-2029, meliputi:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;

2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;

3. Meningkatnya kompetensi sdm kelautan dan perikanan; dan

4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

### A.3.4 Sasaran Strategis (SS) KKP

*Sasaran Strategis (SS) KKP*

SS pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa sasaran program yang dilaksanakan, terdiri dari:

1. SS-1 Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut dengan indikator kinerja sebagai berikut:

    a. luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil dari 30 Juta ha pada tahun 2025 menjadi 32,5 Juta ha pada tahun 2029; dan

    b. persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut dari 1% pada tahun 2025 menjadi 70% pada tahun 2029.

2. SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator kinerja sebagai berikut:

    a. PDB perikanan dari Rp 595,06 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 718,98 triliun pada tahun 2029;

    b. volume produksi perikanan dari 24,58 juta ton pada tahun 2025 menjadi 30,16 juta ton pada tahun 2029;

    c. volume produksi garam dari 2,25 juta ton pada tahun 2025 menjadi 3 juta ton pada tahun 2029;

    d. indeks pembangunan pulau-pulau kecil (Skala 0-1) dari 0,49 pada tahun 2025 menjadi 0,61 pada tahun 2029;

    e. persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir dari 13,6% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2029;

    f. indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dari 82 pada tahun 2025 menjadi 86 (delapan puluh enam) pada tahun 2029; dan

    g. jumlah kelembagaan ekonomi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang terfasilitasi dari 4 (empat) lembaga pada tahun 2025 menjadi 53 (lima puluh tiga) lembaga pada tahun 2029.

3. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional dengan indikator kinerja sebagai berikut:

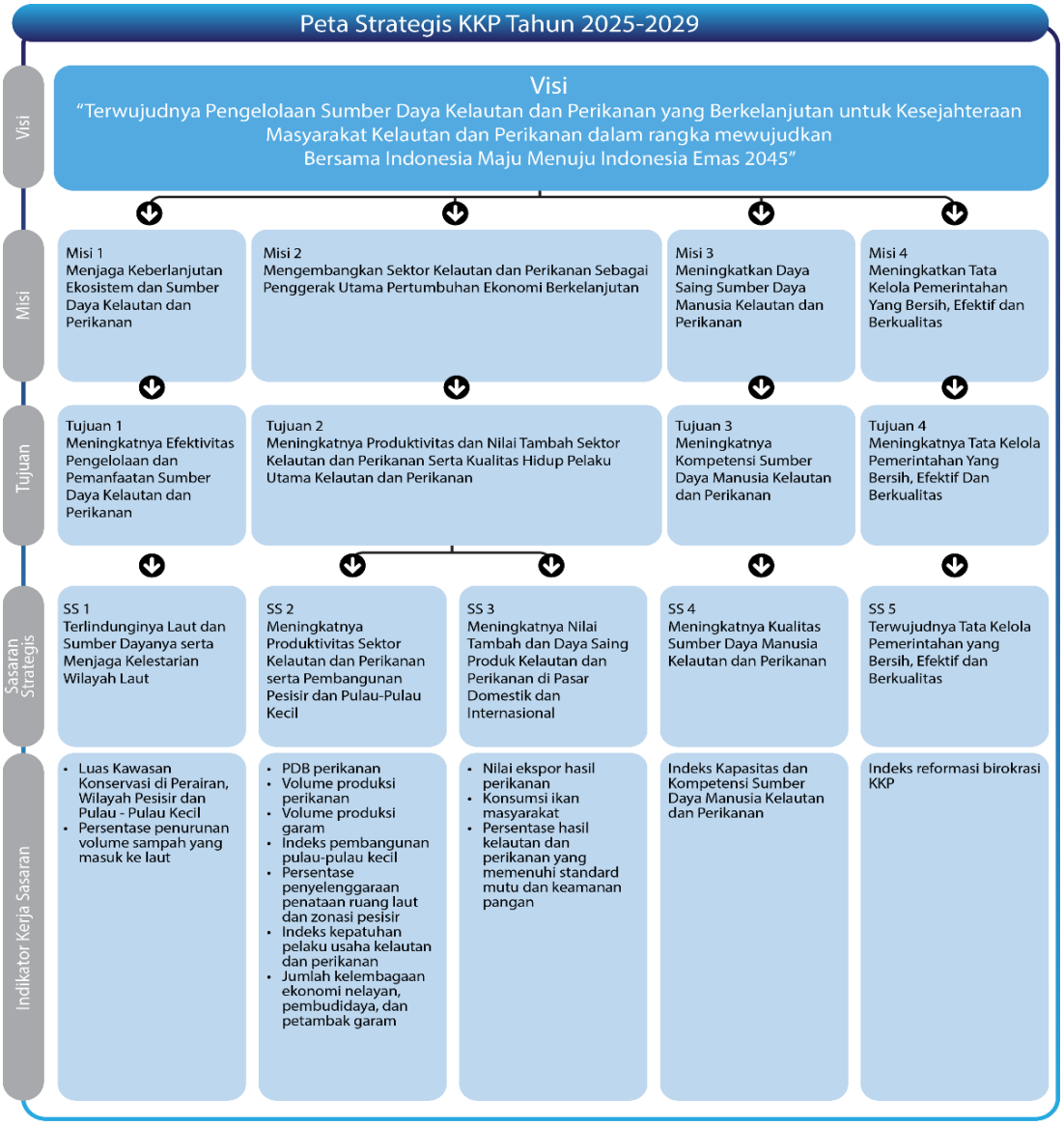
    a. nilai ekspor hasil perikanan dari USD 6,25 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 8,5 miliar pada tahun 2029;

    b. konsumsi ikan masyarakat dari 26,26 kg/kapita/tahun pada tahun 2025 menjadi 28,63 kg/kapita/tahun pada tahun 2029; dan

    c. persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dari 70% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2029.

4. SS-4 Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja: Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029.

5. SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas dengan indikator kinerja: Indeks RB KKP dari 90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029.




**Gambar 1**
**Peta Strategis KKP Tahun 2025-2029**

### A.3.5 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

*Arah Kebijakan dan Strategi Nasional*

RPJMN tahun 2025-2029 merupakan integrasi antara kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan visi, misi, dan program Presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 merupakan tahapan pembangunan yang berkesinambungan

dimana tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama Penguatan Transformasi. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diuraikan berbagai upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan wilayah dan prasarana sarana, serta kesinambungan pembangunan. Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I adalah:

1. Transformasi Sosial

   Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif

2. Transformasi Ekonomi

   Hilirisasi SDA unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa

3. Transformasi Tata Kelola

   Kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan menajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

   Pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila, transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai, sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan.

Selanjutnya, pengembangan diplomasi yang tangguh dan pertahanan berdaya gentar kawasan difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi. pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat dan mandiri.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

   Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

6. Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

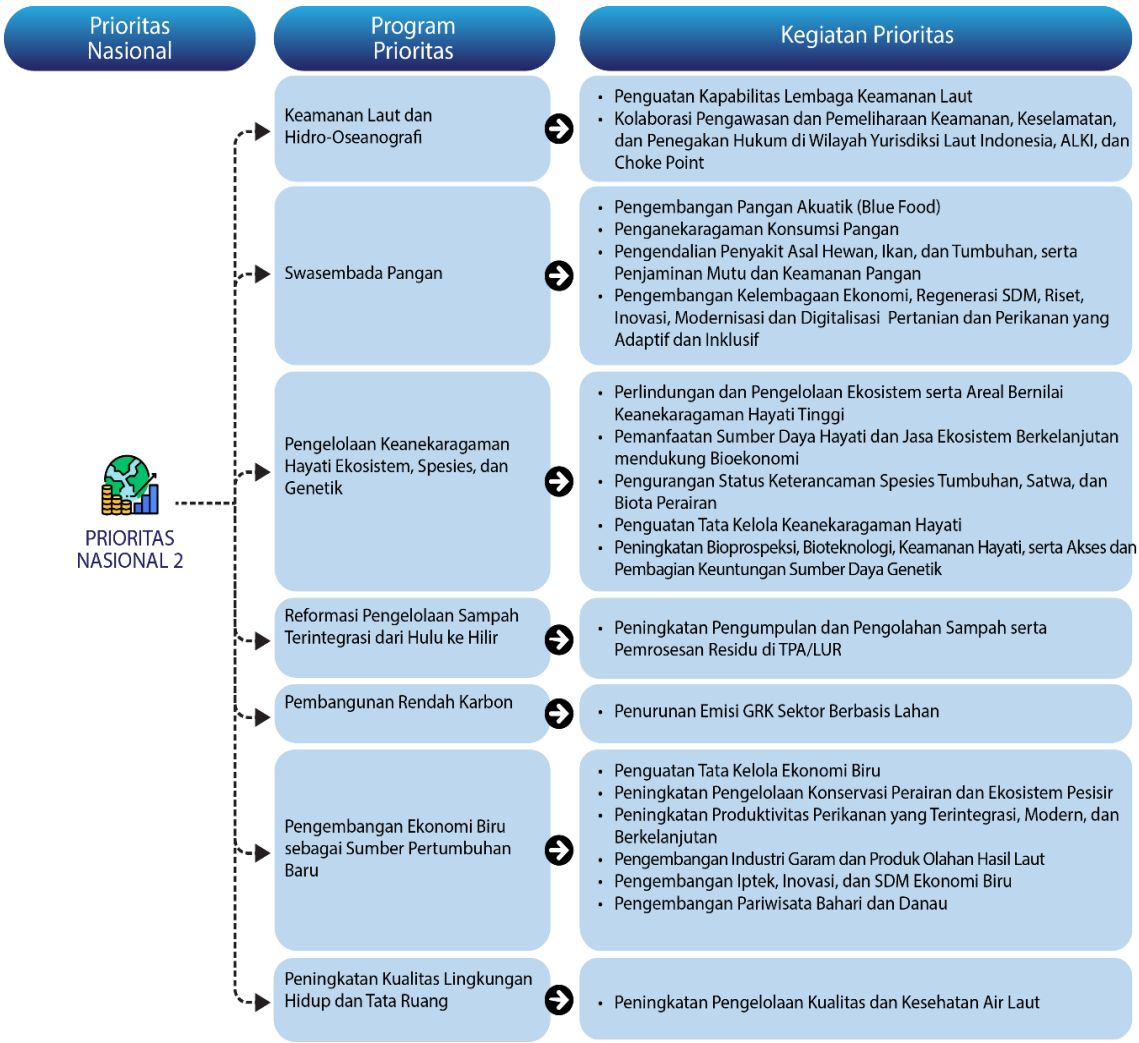
   Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah (*smart grid*). Sementara itu, dalam kerangka transisi energi, secara bertahap pembangunan island grid (dimulai di Sumatera) dan *national grid* (dimulai antara Sumatera-Jawa) untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Energi Baru dan Terbarukan. Selanjutnya, dilakukan percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai *backbone* logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital. Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN). Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan *micro grid*).

7. Kesinambungan Pembangunan

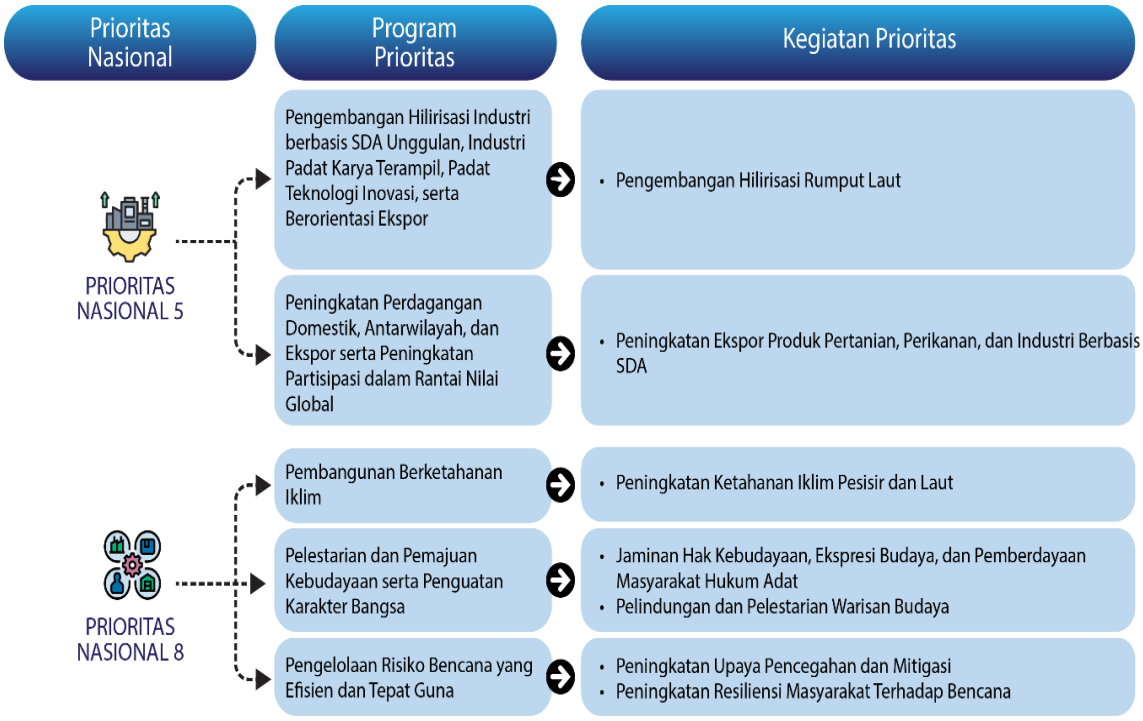
Reformasi tata kelola fiskal serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan nonpemerintah.

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan penggabungan antara Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I. RPJMN tahun 2025-2029 menetapkan delapan Prioritas Nasional sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung Asta Cita. Prioritas Nasional tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan arah kebijakan dan pelaksanaan strategi Rencana Strategis KKP 2025-2029.

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang menjadi kewenangan KKP dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:




**Gambar 2**
**Prioritas Nasional...**




**Gambar 2**
**Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Terkait Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2025-2029**

Selain itu, KKP juga berkontribusi dalam pencapaian kegiatan prioritas dalam RPJMN 2025-2029 pada Prioritas Nasional (Asta Cita) ke-3, 4, 6, dan 7 sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN), PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN tahun 2025-2029 khususnya program prioritas Presiden termasuk program hasil terbaik cepat terutama untuk meningkatkan kualitas SDM, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mendorong pemerataan pembangunan. PSN ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden. Penetapan PSN dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

KKP merupakan salah satu kementerian/lembaga yang melaksanakan PSN yaitu 1) pembangunan pelabuhan perikanan nusantara pengambengan di Bali dan 2) revitalisasi akuakultur berkelanjutan di Pantura dengan fokus area Jawa Barat yang bekerja sama dengan swasta, serta 3) pembangunan pelabuhan Ambon terpadu di Maluku yang bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel A.1**
**Peta Strategis KKP Tahun 2025-2029**

| No | Proyek Strategis Nasional | Lokasi | Pelaksana |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan | Bali | KKP dan swasta |
| 2 | Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura | Jawa Barat | KKP dan swasta |
| 3 | Pembangunan Pelabuhan Ambon Terpadu | Maluku | KKP dan Kementerian Perhubungan |

### A.3.6 Arah Kebijakan dan Strategi KKP

*Arah Kebijakan dan Strategi KKP*

Sejalan dengan RPJMN tahun 2025-2029, pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada transformasi pengelolaan sumber daya berbasis ekonomi biru yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam implementasinya ekonomi biru dijalankan secara terukur, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Pembangunan tidak lagi hanya mengejar peningkatan produksi, melainkan menempatkan perlindungan laut dan keberlanjutan ekosistem sebagai dasar dari seluruh kebijakan.

Kerangka pikir pembangunan ekonomi biru didasarkan pada empat aspek utama:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Sistem Utama Pembangunan Nasional

   Sektor kelautan dan perikanan diharapkan menjadi *engine growth* pertumbuhan ekonomi. Posisinya sebagai motor penggerak pembangunan nasional diharapkan mampu berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional, menggeliatkan ekonomi regional dan mensejahterakan rakyat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan lintas sektor.

2. Ekologi Sebagai Panglima

   Ekonomi biru memprioritaskan pada keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Perlindungan ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam memberikan ruang hidup bagi sumber daya di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan sumber pangan akuatik secara berkelanjutan.

3. Berorientasi Pasar (*Market Driven Oriented*)

   Ekonomi biru merupakan solusi untuk menjawab tantangan pasar domestik dan global. Dengan peningkatan produk yang memiliki daya saing kompetitif dan komparatif sesuai dengan preferensi konsumen yang terus berubah secara dinamis. Sehingga diharapkan dapat menguatkan rantai pasok produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global.

4. Teknologi, Inovasi, dan Digitalilasi

   Untuk menjawab perubahan yang cepat dan dinamis pada aspek ekologi, ekonomi dan sosial, peran teknologi, inovasi, dan digitalisasi menjadi kunci untuk akselerasi implementasi ekonomi biru. Dengan pengembangan inovasi teknologi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan akses informasi secara akurat, otomatisasi, *up to date*, dan *real-time*, serta mendorong nilai tambah pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan.

Selain itu, ekonomi biru juga berlandaskan empat pendekatan pembangunan yaitu:

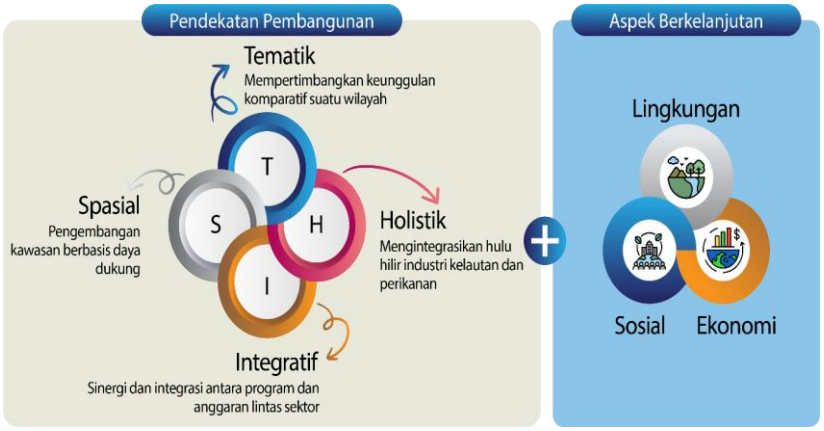
a. tematik, dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah;

b. holistik, dengan mengintegrasikan hulu-hilir industri kelautan dan perikanan;

c. integratif, melalui sinergi dan integrasi antara program dan anggaran lintas sektor; dan

d. spasial, pembangunan berbasis ruang dan wilayah, untuk memastikan pemerataan, keterpaduan antar wilayah, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya.

4 (empat) pendekatan ekonomi biru dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi diharapkan dapat mewujudkan keberlanjutan dalam pembangunan kelautan dan perikanan.




**Gambar 3**
**Pedekatan Pembangunan Ekonomi Biru**

Berdasarkan pendekatan dan kerangka pikir ekonomi biru, maka ditetapkan 5 (lima) arah kebijakan, yaitu:

1. Memperluas kawasan konservasi laut;
2. PIT berbasis kuota;
3. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.




**Gambar 4**
**Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029**

Berdasarkan pendekatan dan kerangka pikir ekonomi biru, maka ditetapkan 5 (lima) arah kebijakan, yaitu:

1. Memperluas Kawasan Konservasi Laut

   Memperluas kawasan konservasi laut bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga ekosistem pesisir, laut dan perairan umum, mecegah degradasi lingkungan, serta meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dampak positif dari kebijakan ini antara lain adalah terlindunginya habitat, menjaga struktur ekosistem, meningkatkan kemampuan penyerapan karbon, terlindunginya keanekaragaman hayati, dan meningkatkan potensi sumber daya ikan. Untuk menjalankan arah kebijakan memperluas kawasan konservasi laut, dilakukan strategi-strategi berikut:

   a. Mencadangkan dan menetapkan kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil melalui:

      1) mengalokasikan kawasan konservasi perairan dalam dokumen tata ruang; dan

      2) mengakselerasi penetapan kawasan konservasi perairan nasional dan daerah, termasuk peningkatan kawasan berdampak konservasi (*other effective area-based conservation measures*) yang inklusif dan berkelanjutan.

   b. Menyelenggarakan pengelolaan efektif konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil melalui:

      1) Mengintegrasikan peta kawasan konservasi perairan ke dalam peta laut Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (PUSHIDROSAL) untuk mencegah terjadi kerusakan, kecelakaaan, dan pencemaran di kawasan konservasi yang disebabkan oleh aktivitas pelayaran.

      2) Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan, termasuk infrastruktur serta prasarana dan sarana pengelolaan kawasan konservasi dalam pemanfaatan peluang ekonomi di dalam dan sekitar kawasan konservasi;

      3) Menyusun neraca sumber daya laut (*ocean accounting*) untuk menghitung perubahan aset ekosistem, aliran barang dan jasa, limbah, tata kelola, ekonomi kelautan, serta kekayaan laut;

4) Meningkatkan peran kelompok masyarakat penggerak konservasi dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi perairan, termasuk penguatkan kerja sama jejaring dan kemitraan konservasi ekosistem dan biota; dan

5) Mengembangkan pendanaan inovatif untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan secara efektif.

c. Mengelola konservasi biota perairan melalui:

1) Mereview status keterancaman biota perairan dan menetapkan status perlindungan biota perairan langka, endemik, dan terancam punah;

2) Mengendalikan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES melalui penetapan kuota penangkapan berbasis pengkajian stok;

3) Merehabilitasi habitat dan melakukan pengkayaan populasi biota perairan dilindungi dan terancam punah serta mengurangi hambatan jalur migrasi pemijahan biota perairan termasuk mengelola sumber daya genetik;

4) Mengelola dan memperkuat data biota dan lokasi konservasi habitat penting;

5) Menguatkan upaya pengelolaan Jenis Asing Invasif (JAI) yang mencakup penetapan daftar JAI, upaya mitigasi dampak, pengurangan populasi JAI di habitat alami dan pengendalian pemanfaatan JAI;

6) Mengoptimalkan penanganan kejadian biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi;

7) Menyediakan prasarana dan sarana penyelenggaraan konservasi biota perairan termasuk data dan sistem informasi konservasi biota perairan; dan

8) Meningkatkan peran kelompok masyarakat penggerak konservasi dalam menjaga kelestarian biota perairan.

d. Mengendalikan perizinan, penangkapan dan perdagangan biota dilindungi melalui:

1) Meningkatkan efektivitas perizinan dalam pengendalian pengelolaan biota terancam punah, mencakup optimalisasi pelayanan perizinan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES serta memenuhi ketentuan perdagangan internasional berdasarkan aspek legalitas, ketertelusuran, dan keberlanjutan; dan

2) Menurunkan perdagangan ilegal biota perairan dilindungi melalui harmonisasi regulasi pengawasan lintas kementerian/lembaga.

e. Mengelola karbon biru sektor kelautan melalui:

1) Melakukan integrasi upaya perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem karbon biru dalam penyusunan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi termasuk pengembangan sistem data;

2) Meningkatkan luasan kawasan perlindungan dan pelestarian ekosistem karbon biru termasuk upaya merehabilitasinya;

3) Melindungi, melestarikan, dan memperkaya keanekaragaman hayati laut di dalam ekosistem karbon biru;

4) Mengembangkan metode standardisasi data guna menetapkan angka dasar serta mendukung akurasi dalam perhitungan karbon biru;

5) Menyiapkan peta jalan perdagangan karbon biru dan mengakselerasi implementasi proyek karbon biru termasuk penyusunan prospektus karbon biru nasional;

6) Mendorong terbentuknya pasar karbon untuk meningkatkan manfaat ekonomi dari potenis karbon biru;

7) Mendorong terbentuknya mekanisme keuangan dan pendanaan inovatif sebagai dukungan terhadap transisi menuju ekonomi biru yang berkelanjutan, dengan memanfaatkan instrumen berbasis pasar karbon biru; dan

8) Memperkuat pelibatan pemangku kepentingan, jejaring kelembagaan dalam tata kelola, dan peningkatan nilai ekonomi karbon biru termasuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam kebijakan dan pengelolaan karbon biru.

f. Memperkuat pengawasan kawasan konservasi melalui:

1) Melakukan patroli rutin dan operasi pencegatan (*intercept*) di kawasan konservasi;

2) Mengembangkan *geofencing alert system* kawasan konservasi pada Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP);

3) Memantau aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi menggunakan sistem dan sarana penginderaan jauh (*drone*, pesawat, dan satelit) termasuk optimalisasi peran intelijen;

4) Memperkuat kapasitas Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dalam pengawasan kawasan konservasi;

5) Mendorong keterbukaan informasi pengawasan dan penegakan hukum di kawasan konservasi, kampanye media sosial, dan merespon pengaduan masyarakat cepat tanggap terkait pelanggaran di kawasan konservasi;

6) Membangun prasarana dan sarana pengawasan di kawasan konservasi;

7) Membangun sistem tilang elektronik (e-tilang) dalam penanganan pelanggaran di kawasan konservasi yang terintegrasi dengan sistem perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;

8) Meningkatkan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES serta JAI; dan

9) Melakukan kolaborasi dan sinergi antara aparat pengawasan dikawasan konservasi seperti operasi/patroli bersama.

Arah kebijakan ini untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan luas kawasan konservasi laut menjadi 30% pada tahun 2045 atau setara dengan 97,5 juta ha kawasan konservasi laut.

2. PIT Berbasis Kuota

PIT merupakan penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona PIT, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak positif dari kebijakan ini adalah terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan yang legal, diatur, dan dilaporkan, menjaga stok sumber daya ikan dan meningkatkan

kesejahteran masyarakat. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan ini dilaksanakan strategi sebagai berikut

a. Mendorong pemanfaatan sumber daya ikan yang optimal dengan mengedepankan kelestarian dan keberlanjutan melalui:

   1) Menerapkan strategi pemanfaatan (*harvest strategy*) dan sistem kuota berbasis hasil kajian stok ikan yang berkelanjutan, denganmelibatkan data ilmiah dan partisipasi pemangku kepentingan di setiap WPPNRI dan WPPNRI di perairan darat sebagai fondasi pengelolaan berbasis ekosistem;

   2) Menyusun dan memperkuat regulasi pengelolaan WPPNRI dan WPPNRI di perairan darat secara menyeluruh, yang bersifat komprehensif, terintegrasi lintas sektor, berbasis data, dan mampu menjawab tantangan dinamika kelautan dan perikanan nasional maupun global;

   3) Meningkatkan kepatuhan pelaporan data *log book* oleh nelayan dan optimalisasi peran observer dalam pengumpulan, verifikasi, dan pelaporan data secara berkala guna mendukung sistem pengawasan dan pengambilan kebijakan berbasis data di lapangan;

   4) Mendorong kolaborasi seluruh pihak dalam memanfaatkan sumber daya ikan yang berkelanjutan, serta menjamin keadilan distribusi manfaat bagi seluruh pelaku usaha perikanan, termasuk nelayan kecil dan perempuan pesisir; dan

   5) Mengembangkan sistem data perikanan yang terpadu, andal, dan *real-time* untuk mendukung perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya ikan secara adaptif dan responsif terhadap perubahan.

b. Meningkatkan efisiensi dan transparansi perizinan untuk mendukung iklim usaha yang sehat dan kompetitif bagi pelaku usaha perikanan tangkap melalui:

   1) Memperkuat sistem perizinan berusaha kegiatan usaha pada perikanan tangkap yang mudah, cepat, akuntabel, dan transparan dengan menyederhanakan rangkaian proses perizinan yang panjang dan pemanfaatan teknologi digital;

2) Memperkuat kerja sama dan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat proses perizinan melalui satu *platform* layanan publik yang terintegrasi;

3) Meningkatkan penyelesaian pengaduan layanan perizinan melalui komunikasi yang efektif; dan

4) Menyusun kebijakan perizinan yang berorientasi pada kesetaraan kesempatan, dengan memastikan akses yang adil bagi pelaku usaha kecil, menengah, maupun besar dalam mendapatkan layanan perizinan.

c. Meningkatkan aksesibilitas nelayan kecil terhadap sumber pendanaan dan sarana produksi untuk mendukung keberlanjutan usaha penangkapan melalui:

1) Meningkatkan akses nelayan terhadap sumber pembiayaan melalui berbagai instrumen legalitas dan pemberdayaan, termasuk fasilitasi penerbitan sertifikat hak atas tanah;

2) Memberdayakan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran berbasis perikanan tangkap antara lain melalui kemitraan usaha, kewirausahaan, penguatan kelembagaan, fasilitasi akses pembiayaan, literasi keuangan, dan penguatan manajemen pengelolaan keuangan; dan

3) Menyediakan prasarana dan sarana penangkapan ikan secara tepat sasaran, guna mendukung produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

d. Meningkatkan perlindungan dan akses pembiayaan bagi nelayan melalui:

1) Mengembangkan skema perlindungan sosial bagi nelayan yang komprehensif, mencakup jaminan keselamatan kerja, asuransi, serta jaring pengaman sosial dalam menghadapi risiko cuaca ekstrim dan krisis ekonomi;

2) Mendorong penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam praktik usaha perikanan, serta menegakkan perlindungan hukum dan keselamatan awak kapal perikanan di kapal nasional maupun kapal asing sesuai konvensi internasional;

3) Memfasilitasi akses pembiayaan usaha nelayan;

4) Meningkatkan literasi keuangan dan kapasitas usaha nelayan;

5) Mengembangkan kemitraan antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga keuangan; dan

6) Memanfaatkan teknologi digital untuk akses permodalan usaha.

e. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi perikanan tangkap melalui:

1) Mendorong transformasi armada penangkapan ikan nasional dengan penerapan teknologi, prinsip efisiensi, penghematan energi, dan keberlanjutan lingkungan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri perikanan tangkap; dan

2) Memfasilitasi penyediaan kapal pengangkut hasil tangkapan untuk memperkuat konektivitas dan efisiensi rantai pasok perikanan, terutama pada wilayah penangkapan di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan laut lepas yang jauh dari pangkalan.

f. Menciptakan ekosistem usaha perikanan tangkap yang adil dan efisien melalui:

1) Mendorong pembangunan kampung nelayan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan sektor (multisektor), berbasis potensi lokal, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup nelayan, dan mendukung ketahanan pangan antara lain melalui program kampung nelayan merah putih yang disinergikan dengan koperasi desa/kelurahan merah putih, program pemberdayaan masyarakat, dan program lainnya;

2) Mendorong terbentuknya kelembagaan nelayan berbasis koperasi modern dan model agromaritim yang terintegrasi dengan ekosistem usaha dari hulu ke hilir, untuk meningkatkan posisi tawar dan keberlanjutan ekonomi nelayan; dan

3) Meningkatkan aksesibilitas nelayan skala kecil terhadap BBM bersubsidi.

g. Mengembangkan pelabuhan perikanan sebagai simpul logistik yang efisien dan berwawasan lingkungan dalam ekosistem perikanan tangkap melalui:

1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelabuhan perikanan agar memenuhi standar internasional, berwawasan lingkungan yang terintegrasi dengan pasar dan industri termasuk pembangunan

pelabuhan pangkalan utama, pelabuhan perintis, serta prasarana dan sarana penunjang lainnya; dan

2) Membangun dan mengelola sentra kelautan dan perikanan terpadu untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan pada wilayah perbatasan dan terluar.

h. Meningkatkan kualitas layanan pelabuhan perikanan melalui:

1) Mengoptimalkan operasional pelabuhan perikanan melalui penerapan standar pelayanan prima; dan

2) Mengembangkan sistem layanan pelabuhan perikanan berbasis digital dan otomatisasi untuk mendorong efisiensi operasional.

i. Meningkatkan ekspor, konsumsi ikan domestik, hilirisasi, logistik, dan investasi produk perikanan tangkap berkelanjutan melalui:

1) Meningkatkan ekspor komoditas perikanan tangkap bernilai ekonomis tinggi;

2) Mengatasi hambatan nontarif produk perikanan tangkap melalui kerja sama, diplomasi perdagangan, dan pemenuhan persyaratan pasar;

3) Menurunkan tarif pada produk ekspor perikanan tangkap melalui negosiasi tarif dagang, diplomasi ekonomi, penyelesaian sengketa dagang, dan perjanjian kerja sama dengan negara mitra strategis;

4) Memperkuat peran data dan kemampuan intelijen pasar ekspor dan domestik;

5) Memperkuat strategi promosi produk perikanan Indonesia di pasar ekspor;

6) Diversifikasi pasar dan perluasan perdagangan ekspor produk perikanan tangkap melalui kesepakatan perdagangan bilateral maupun multilateral seperti kerja sama ekonomi dengan negara mitra dan kerja sama perdagangan strategis lainnya;

7) Penumbuhan eksportir baru termasuk penyelesaian moratorium penambahan eksportir di negara tujuan ekspor;

8) Hilirisasi dan industrialisasi komoditas perikanan tangkap termasuk penguatan industri pangan berbasis sumber daya laut dan perairan serta penyediaan prasarana dan sarana;

9) Mengelola importasi hasil perikanan tangkap untuk menjaga daya saing produksi perikanan dalam negeri;

10) Memperluas akses pasar dalam negeri melalui peningkatan dan pemerataan konsumsi ikan masyarakat, berperan aktif dalam penanggulangan *stunting*, serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG);

11) Memperkuat sistem logistik ikan nasional untuk menjamin ketersediaan bahan baku serta memenuhi konsumsi ikan dalam negeri;

12) Meningkatkan investasi melalui fasilitasi perizinan dan kemudahan berusaha, penyiapan informasi peluang investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor, promosi investasi, dan pendampingan realisasi investasi; dan

13) Meningkatkan kelas usaha mikro dan kecil kelautan dan perikanan melalui fasilitasi literasi keuangan, akses pembiayaan, kemitraan usaha, kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

j. Memperkuat pengawasan PIT berbasis kuota melalui:

1) Memperluas akses layanan VMS bagi seluruh ukuran kapal perikanan;

2) Penguatan dan modernisasi prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

3) Mendorong keterbukaan informasi pengawasan dan penegakan hukum, edukasi dan literasi, serta kampanye media sosial;

4) Mengembangkan sistem pengaduan masyarakat cepat tanggap;

5) Meningkatkan kapasitas pengawasan melalui penambahan armada, peningkatan kapasitas personil, dan pengembangan kelembagaan pengawasan;

6) Meningkatkan patroli terkoordinasi dengan instansi terkait dan negara tetangga di wilayah perbatasan;

7) Memperkuat kapasitas Pokmaswas dalam pengawasan PIT berbasis kuota;

8) Meningkatkan efektivitas pengawasan secara berkesinambungan dari keberangkatan kapal perikanan, operasi penangkapan ikan di laut, kedatangan kapal perikanan di dermaga, dan saat pembongkaran sampai tujuan distribusi hasil perikanan;

9) Pembangunan *Maritime Intelligence System* (MIS) untuk penguatan informasi terkait indikasi pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;

10) Memperkuat implementasi pengenaan sanksi administrasi dan pidana pada subsektor penangkapan ikan dengan mengedepankan prinsip *ultimum remedium*;

11) Membangun sistem e-tilang dalam penanganan pelanggaran PIT yang terintegrasi dengan sistem perizinan kapal perikanan;

12) Mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko berdasarkan profil pelaku usaha;

13) Menerapkan pengawasan dengan pendekatan berbasis kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*); dan

14) Meningkatkan pengawasan terhadap ketertelusuran produk perikanan tangkap untuk memastikan kepatuhan regulasi dan mendukung daya saing produk di pasar domestik dan global.

k. Menata ruang laut untuk mendukung aktivitas usaha perikanan tangkap melalui:

1) Menyusun rencana tata ruang yang mengintegrasikan berbagai aktivitas di kawasan pesisir untuk perikanan tangkap;

2) Melakukan harmonisasi pemanfaatan ruang di kawasan pesisir dan laut untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan; dan

3) Kemudahan pengurusan perizinan KKPRL untuk mendukung implementasi PIT.

l. Memperkuat sistem jaminan mutu produk perikanan tangkap melalui:

1) Menjamin kualitas mutu produk perikanan tangkap yang memenuhi standar keamanan pangan (*food safety standard*);

2) Meningkatkan keberterimaan produk perikanan tangkap di pasar domestik dan global melalui harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan penanganan kasus mutu;

3) Menguatkan layanan inspeksi dan pengujian mutu produk perikanan tangkap dari hulu hingga hilir; dan

4) Menjamin konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan tangkap dari hulu hingga hilir.

3. Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan

Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan melalui praktik budi daya perikanan yang memperhatikan lingkungan dengan memastikan terjaganya keseimbangan ekosistem. Produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan menjadi peran kunci dalam penyediaan pangan akuatik selain perikanan tangkap.

Hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi perikanan budi daya dalam negeri diprioritaskan pada 5 (lima) komoditas unggulan bernilai ekonomis tinggi yaitu udang, tilapia, rumput laut, kepiting, dan lobster.

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan ini dilaksanakan strategi sebagai berikut:

a. Meningkatkan produktivitas perikanan budi daya secara berkelanjutan melalui:

1) Mengalokasikan kawasan pengembangan perikanan budi daya dalam dokumen tata ruang;

2) Melakukan pembangunan dan revitalisasi kawasan budi daya udang dan ikan lainnya sebagai model penerapan perikanan budi daya produktif dan berkelanjutan di pantura Jawa dan kawasan sentra produksi lainnya;

3) Membangun modeling kawasan produksi budi daya berbasis komoditas unggulan seperti udang, tilapia, rumput laut, kepiting, lobster, kakap putih, ikan hias, dan komoditas unggulan lainnya

termasuk modeling penyediaan benih, penyediaan induk unggul, dan pakan mandiri;

4) Membangun infrastruktur dan prasarana dan sarana perikanan budi daya berkelanjutan; dan

5) Meningkatkan layanan kesehatan ikan dan lingkungan yang didukung dengan sistem monitoring yang handal.

b. Meningkatkan akses dan adopsi teknologi di bidang budi daya perikanan melalui pengembangkan penerapan teknologi budi daya ikan yang modern, efisien, dan ramah lingkungan seperti sistem resirkulasi akuakultur (*recirculating aquaculture system*/RAS), bioflok, otomatisasi kontrol kualitas air seperti suhu, oksigen, salinitas, pH air, dan indikator lainnya yang berbasis digital.

c. Menciptakan ekosistem usaha perikanan budi daya yang adil dan efisien melalui:

1) Membangun kampung perikanan merah putih tematik komoditas perikanan budi daya sebagai sentra produksi pangan dan lumbung pangan desa yang disesuaikan dengan preferensi konsumsi ikan masyarakat lokal;

2) Meningkatkan perlindungan bagi pembudi daya ikan diantaranya melalui fasilitasi prasertifikasi lahan perikanan budi daya, peningkatan akses pelaku usaha untuk mendapatkan insentif pupuk, serta meningkatkan akses pembudi daya terhadap jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan nasional;

3) Meningkatkan kapasitas, kemitraan, dan kelembagaan pelaku usaha budi daya, termasuk pengembangan koperasi untuk memperkuat posisi tawar di setiap sentra produksi; dan

4) Memfasilitasi akses pembiayaan usaha pembudi daya dengan memanfaatkan teknologi digital.

d. Memperkuat sistem jaminan mutu perikanan budi daya melalui:

1) Menjamin kualitas mutu produk perikanan budi daya yang memenuhi standar keamanan pangan (*food safety standard*);

2) Meningkatkan keberterimaan produk perikanan budi daya di pasar domestik dan global melalui harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan penanganan kasus mutu;

3) Menguatkan layanan inspeksi dan pengujian mutu produk perikanan budi daya dari hulu hingga hilir; dan

4) Menjamin konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan budi daya dari hulu hingga hilir.

e. Meningkatkan ekspor, konsumsi dalam negeri, hilirisasi, investasi, dan logistik perikanan budi daya melalui:

1) Meningkatkan ekspor komoditas perikanan budi daya bernilai ekonomis tinggi;

2) Secara aktif terlibat dalam upaya negosiasi tarif dagang produk perikanan budi daya termasuk mendorong diplomasi ekonomi dan penyelesaian sengketa dagang;

3) Mengatasi hambatan nontarif produk perikanan budi daya melalui kerja sama, diplomasi perdagangan, dan pemenuhan persyaratan pasar;

4) Menurunkan tarif pada produk ekspor perikanan budi daya ekonomis tinggi melalui perjanjian kerja sama dengan negara mitra strategis;

5) Diversifikasi pasar dan perluasan perdagangan ekspor produk perikanan budi daya melalui kesepakatan perdagangan bilateral maupun multilateral;

6) Hilirisasi dan industrialisasi perikanan budi daya untuk meningkatkan nilai tambah berdasarkan prinsip nirlimbah serta penyediaan prasarana dan sarana;

7) Meningkatkan konsumsi ikan budi daya berbasis preferensi konsumsi lokal melalui edukasi dan kampanye gizi ikan kepada masyarakat, dan diversifikasi produk olahan termasuk penanganan stunting serta membangun model kuliner pangan berbasis ikan budi daya;

8) Meningkatkan akses pasar dalam negeri melalui modeling outlet pemasaran ikan dan pemasaran digital (*e-commerc*e ikan segar/olahan);

9) Mengembangkan sentra atau pusat industri pengolahan ikan budi daya skala mikro kecil;

10) Memperkuat distribusi, ketersediaan, dan aksesibilitas produk perikanan budi daya melalui implementasi sistem logistik ikan nasional termasuk dukungan terhadap penyediaan menu ikan pada program MBG;

11) Meningkatkan investasi dalam negeri melalui fasilitasi perizinan dan kemudahan berusaha, penyiapan peluang informasi investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor, promosi investasi, dan pendampingan realisasi investasi; dan

12) Meningkatkan kelas usaha mikro dan kecil kelautan dan perikanan melalui fasilitasi literasi keuangan, akses pembiayaan, kemitraan usaha, kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

f. Memperkuat pengawasan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan melalui:

1) Meningkatkan keterbukaan informasi publik terkait hasil pengawasan dan penegakan hukum serta menyelenggarakan kampanye digital melalui media sosial untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha perikanan budi daya;

2) Melibatkan masyarakat secara aktif dan memperkuat kapasitas Pokmaswas melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan sarana dalam pengawasan perikanan budi daya;

3) Mengembangkan sistem pengaduan masyarakat yang cepat tanggap, terintegrasi secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring), untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran perikanan budi daya secara efektif;

4) Menerapkan pengawasan berbasis risiko dengan indikator skala usaha dan riwayat pelanggaran serta mendorong penerapan kepatuhan sukarela pada unit usaha budi daya ikan;

5) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi berbasis digital, citra drone, dan sistem digitalisasi untuk pemantauan kawasan budi daya, termasuk deteksi dini terhadap perubahan lingkungan dan aktivitas ilegal;

6) Memperkuat intelijen pengawasan melalui pemanfaatan *open-source intelligence* (OSINT) dan *crowd data crawling* guna memperoleh informasi pelanggaran perikanan budi daya secara lebih komprehensif;

7) Melaksanakan pengawasan terpadu terhadap perizinan berusaha berbasis risiko pada kegiatan usaha perikanan budi daya air payau dan laut dengan melibatkan instansi terkait;

8) Memperkuat sistem ketertelusuran perikanan budi daya serta melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB);

9) Meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran di subsektor perikanan budi daya, dengan tetap mengedepankan prinsip ultimum remedium; dan

10) Meningkatkan kapasitas dan jumlah pengawas perikanan melalui rekrutmen, pendidikan, pelatihan, serta penguasaan teknologi guna memperkuat fungsi pengawasan perikanan budi daya.

4. Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk melindungi ekosistem pesisir, mencegah aktivitas ilegal, kerusakan lingkungan, dan mendukung pemanfaatan sumber daya berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan agar pemanfaatan ruang laut berlangsung secara tertib, sesuai daya dukung lingkungan, serta mampu mencegah konflik kepentingan antarpemangku kepentingan. Selain melindungi ekosistem, kebijakan ini juga mendorong pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemanfaatan ekonomi secara berkelanjutan. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan ini dilaksanakan strategi sebagai berikut:

a. Memastikan penataan ruang laut yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ekosistem perairan melalui:

1) Mengalokasikan rencana ruang laut umum dan rinci sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ekologi berprinsip ekonomi biru dan investasi berkelanjutan, keadilan dan inklusi sosial, resiliensi dan adaptasi perubahan iklim di pesisir dan pulau-pulau kecil;

2) Mengakselerasi integrasi perencanaan ruang laut dan darat serta mendorong kolaborasi multipihak dalam pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;

3) Modeling penataan ruang laut dan darat seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan eduwisata berbasis maritim;

4) Memberikan kepastian hukum kepada pengguna ruang laut sesuai dengan alokasi peruntukannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja;

5) Meningkatkan tata kelola pelayanan perizinan KKPRL yang efektif, efisien dan transparan;

6) Menetapkan standar pelayanan dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut;

7) Memperkuat sistem data dan informasi penataan ruang laut termasuk pengembangan *Ocean Monitoring System* (OMS);

8) Memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi; dan

9) Memastikan kepatuhan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut serta melakukan tindakan penanganan terhadap indikasi pelanggaran dan sengketa pemanfaatan ruang laut.

b. Mewujudkan swasembada garam nasional melalui:

1) Meningkatkan produktivitas produksi garam melalui program ekstensifikasi, intensifikasi, dan teknologi pada lahan terbatas;

2) Modernisasi teknologi produksi dan pengolahan garam berupa pembuatan air tua dan/atau penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman;

3) Meningkatkan kualitas garam rakyat untuk memenuhi persyaratan pasar garam industri;

4) Membangun kawasan sentra industri garam nasional;

5) Mengembangkan sistem informasi pasokan garam;

6) Mengimplementasikan sistem resi gudang dan penguatan manajemen stok di sentra garam nasional;

7) Meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta perlindungan kepada petambak garam;

8) Mendorong percepatan investasi dalam usaha pergaraman;

9) Menerapkan sistem jaminan mutu dalam rangka meningkatkan daya saing serta memenuhi persyaratan mutu produk garam;

10) Memfasilitasi akses pembiayaan usaha pergaraman; dan

11) Mengembangkan skema asuransi usaha garam untuk mitigasi risiko produksi.

c. Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan melalui:

1) Meningkatkan pemanfaatan biofarmakologi melalui pemetaan potensi biofarmakologi dan penyediaan sarana produksi biofarmakologi;

2) Meningkatkan pemanfataan benda muatan kapal tenggelam;

3) Meningkatkan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut;

4) Memanfaatkan air laut selain energi (alse) dan energi terbarukan;

5) Melaksanakan pelayanan perizinan berusaha bidang sumber daya kelautan; dan

6) Melakukan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan.

d. Mengembangkan jasa bahari melalui:

1) Mendorong peningkatan investasi pemanfaatan jasa bahari;

2) Memperkuat sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam optimalisasi pemanfaatan jasa bahari;

3) Memfasilitasi pelaksanaan reklamasi yang berkelanjutan;

4) Mengembangkan wisata bahari prioritas dan desa wisata bahari;

5) Melakukan pengendalian pemanfaatan jasa bahari;

6) Meningkatkan pemanfaatan bangunan dan instalasi laut seperti pemanfaatan bekas rig untuk perikanan;

7) Melaksanakan pelayanan perizinan berusaha bidang jasa bahari; dan

8) Meningkatkan nilai ekonomi karbon biru melalui mekanisme pembayaran berbasis kinerja dan perdagangan karbon.

e. Mengakselerasi pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui:

1) Mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;

2) Mendorong sinergitas dalam penyediaan layanan dasar seperti dermaga/tambat labuh, air bersih, dan listrik di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan pemangku kepentingan terkait;

3) Memfasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan;

4) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;

5) Menyediakan prospektus dari gugus pulau yang bernilai ekonomi tinggi berbasis pengelolaan konservasi berkelanjutan termasuk menyediakan rencana kelayakan dan pengelolaan data gugus pulau;

6) Menginisiasi kerja sama pengelolaan pulau-pulau kecil melalui kegiatan adopsi pulau bersifat kolaboratif dan inovatif;

7) Mendorong pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengelolaan lahan dan kerjasama investasi;

8) Memberdayakan masyarakat lokal melalui kegiatan pengembangan ekonomi kreatif berbasis sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

9) Memfasilitasi perlindungan masyarakat hukum adat (mha) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

10) Menguatkan kapasitas sdm mha di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil; dan

11) Memfasilitasi pelindungan pemanfaatan ruang laut bagi masyarakat lokal.

f. Adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui:

1) Meningkatkan ketangguhan kawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rawan bencana serta rentan perubahan iklim;

2) Melindungi dan merehabilitasi ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;

3) Mendorong upaya pengurangan emisi termasuk penerapan teknologi rendah emisi dan penggunaan energi baru terbarukan sektor kelautan dan perikanan;

4) Membangun infrastruktur kawasan wilayah pesisir dan pulau kecil yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim;

5) Meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana; dan

6) Mendorong pembiayaan berkelanjutan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana.

g. Memperkuat pengawasan dalam pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil melalui:

1) Mendorong keterbukaan informasi pengawasan dan penegakan hukum pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;

2) Kampanye media sosial dan edu-literasi pengawasan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkala;

3) Pelibatan dan penguatan kapasitas pokmaswas dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;

4) Pengembangan sistem pengaduan masyarakat cepat tanggap terkait pelanggaran pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;

5) Ikut mendorong pelaku usaha pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk mengurus perizinan berusaha berbasis risiko;

6) Mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil berdasarkan profil pelaku usaha; dan

7) Penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara nonlitigasi atau litigasi.

5. Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan

Sampah plastik di laut menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem laut, sumber daya perikanan, dan kesehatan masyarakat pesisir. Sebagian besar sampah plastik berasal dari aliran sungai, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, pelabuhan, serta aktivitas di laut. Untuk mengatasi persoalan ini, KKP menginisiasi laut bebas sampah melalui gerakan partisipasi nelayan, yaitu pendekatan kolaboratif yang melibatkan nelayan dan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan dalam pembersihan laut. Kebijakan ini diarahkan tidak hanya untuk menjaga kebersihan laut, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah plastik. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan ini dilaksanakan strategi sebagai berikut:

a. Mengurangi sampah yang masuk ke laut melalui:

1) Menguatkan regulasi pencegahan sampah masuk ke laut;

2) Membangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah plastik secara bersama-sama; dan

3) Melakukan pengendalian dan pemantauan penanganan sampah plastik di laut.

b. Mengelola sampah secara terintegrasi melalui:

1) Merancang basis data sebaran dan jumlah sampah yang berasal dari kawasan muara sungai, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan pelabuhan dan aktivitas di laut

2) Menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

3) Mendorong penerapan model ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah;

4) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengolahan sampah;

5) Menyusun kriteria penilaian kawasan bebas sampah; dan

6) Percontohan kawasan Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH).

Untuk menjamin keberhasilan strategi dalam mengimplementasikan arah kebijakan ekonomi biru, diperlukan strategi pendorong (*enabler*) yang dapat mengakselerasi pencapaian arah kebijakan tersebut. Strategi pendorong (*enabler*) tersebut mencakup pengembangan sistem infrastruktur ocean big data untuk memperkuat basis informasi dan pengambilan keputusan berbasis sains, pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang adaptif serta kompetitif, dan penguatan tata kelola melalui reformasi birokrasi KKP yang berkualitas. Ketiga strategi pendorong (*enabler*) tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Infrastruktur *Ocean Big Data*

   *Ocean Big Data* merupakan inisiatif strategis yang menggunakan teknologi canggih, antara lain sensor, drone, satelit, dan kecerdasan buatan, untuk memantau dan mengelola lautan secara efektif. Infrastruktur ini mencakup sistem pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data yang memungkinkan pemantauan real-time. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung ekonomi biru dan pelestarian ekosistem laut di Indonesia, dengan manfaat seperti peningkatan konservasi, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim.

2. Pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui:

   a. Mengembangkan *Ocean Institute of Indonesia* (OII) untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan melalui revitalisasi 11 (sebelas) satuan pendidikan tinggi vokasi kelautan dan perikanan, modernisasi prasarana dan sarana pendidikan, pengembangan kurikulum, penguatan kompetensi dosen/tenaga pendidik, penguatan riset, dan inovasi serta pengabdian kepada masyarakat;

   b. Meningkatkan kualitas pelatihan kelautan dan perikanan yang selaras dengan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995;

   c. Menyiapkan tenaga kerja yang ahli dan terampil di sektor kelautan dan perikanan yang sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;

   d. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja kelautan dan perikanan yang sudah ada agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar;

e. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh yang melakukan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan untuk mendorong terwujudnya profesionalisme dan keahlian penyuluh;

f. Memperkuat kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung tata kelola yang profesional, efektif, dan berintegritas; dan

g. Memperkuat standardisasi dan sertifikasi kompetensi bidang kelautan dan perikanan.

Pengembangan SDM yang dilakukan diseleraskan dengan kebutuhan tenaga kerja ataupun sektor yang sedang menjadi isu strategis di bidang kelautan dan perikanan. Diharapkan lembaga pengembangan SDM kelautan dan perikanan menjadi *leading* dan rujukan nasional (pusat keunggulan) serta satu langkah lebih dekat menuju *world class university*.

3. Penguatan tata kelola RB KKP melalui:

a. Meningkatkan sinergi perencanaan strategis lintas sektor dan lintas unit organisasi, serta mendorong keterpaduan antara perencanaan program, penganggaran, dan pengukuran kinerja organisasi agar selaras dengan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan nasional;

b. Mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran melalui perbaikan sistem pengendalian intern, serta optimalisasi pemanfaatan dan penatausahaan barang milik negara (bmn) secara tertib dan efisien;

c. Mendorong pembentukan aparatur yang profesional melalui penguatan implementasi manajemen talenta asn kkp sebagai human capital dan akselerasi program kkp, serta memperkuat implementasi reformasi birokrasi dengan fokus pada penyederhanaan proses bisnis, budaya kerja adaptif, dan pelayanan publik yang prima;

d. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, perjanjian nasional, serta produk hukum lainnya melalui proses perumusan yang partisipatif dan berbasis bukti, termasuk penguatan advokasi dan penyediaan informasi hukum yang responsif terhadap dinamika sektor kelautan dan perikanan;

e. Mengembangkan strategi komunikasi publik yang efektif, transparan, dan partisipatif untuk mendukung citra positif kkp, serta memperluas kerja sama internasional melalui diplomasi kelautan dan perikanan yang proaktif, sejalan dengan kepentingan nasional;

f. Meningkatkan efisiensi dukungan layanan internal seperti urusan rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, persuratan, dan kearsipan melalui pemanfaatan teknologi digital dan penerapan prinsip tata kelola yang baik;

g. Mengembangkan sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan strategis organisasi, serta mendorong partisipasi penyedia barang/jasa yang kompetitif dan berintegritas;

h. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern dalam menjaga kualitas pelaksanaan program prioritas nasional dan kinerja KKP melalui pengawasan berbasis manajemen risiko, pengembangan teknologi informasi manajemen pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur pengawasan, dan sinergi pengawasan dengan instansi lain;

i. Mewujudkan pengelolaan data statistik dan informasi yang andal, terintegrasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti serta mengembangkan SPBE untuk mendukung efisiensi layanan publik dan internal; dan

j. Menganalisis dan mensinergikan perumusan kebijakan serta mendiseminasikan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan efektivitas pembangunan dan partisipasi pemangku kepentingan.

Dalam melaksanakan kebijakan nasional, kebijakan KKP, serta kegiatan strategis nasional yang menjadi mandat RPJMN kepada KKP untuk periode 2025-2029, diperlukan kolaborasi dan sinergi lintas sektor yang kuat. Kolaborasi ini mencakup kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, pelaku usaha kelautan dan perikanan, organisasi masyarakat sipil, filantropi, akademisi, dan peneliti.

Beberapa arah kebijakan KKP yang membutuhkan dukungan lintas sektor antara lain:

1. Kebijakan memperluas kawasan konservasi laut memerlukan dukungan dari:

   a. Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan ekosistem pesisir yang terhubung, seperti mangrove;

b. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait integrasi tata ruang laut dan darat untuk memberikan kepastian hukum melalui RTRW;

c. Kementerian Dalam Negeri terkait memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk mempercepat penetapan Peraturan Daerah mengenai RZWP3K dan RTRW yang telah mengalokasikan ruang untuk konservasi;

d. Perguruan tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga penelitian lainnya terkait pelaksanaan penelitian ilmiah dan inovasi teknologi;

e. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Polisi Perairan dan Udara (POLAIRUD) terkait kerja sama pengawasan laut untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal dan merusak di dalam dan sekitar kawasan konservasi;

f. Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait perencanaan dan pembiayaan; dan

g. Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas lokal, dan sektor swasta terkait dukungan pengusulan, penetapan, dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), mengintegrasikan rencana zonasi kawasan konservasi ke dalam RTRW, pengelolaan berbasis masyarakat, dan pendanaan inovatif dan berkelanjutan melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR).

2. Kebijakan PIT berbasis kuota memerlukan dukungan dari:

a. Kementerian Perhubungan terkait pengaturan pelabuhan dan logistik;

b. Kementerian Keuangan terkait insentif fiskal dan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

c. Kementerian PPN/Bappenas terkait integrasi dalam perencanaan nasional;

d. Pemerintah Daerah terkait penyiapan dan penerbitan Peraturan Daerah yang selaras dengan kebijakan PIT dan pencegahan konflik sosial nelayan;

e. Perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait kajian stok sumber daya ikan, rekomendasi ilmiah mengenai Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebagai dasar penetapan kuota;

f. TNI AL, Bakamla, dan POLAIRUD terkait pengawasan dan penegakan hukum yang kuat di laut; dan

g. Sektor swasta dan LSM turut terlibat terkait integrasi hulu-hilir, pemantauan pelaksanaan, dan peningkatan kapasitas nelayan.

3. Kebijakan pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan memerlukan dukungan dari:

   a. Kementerian Lingkungan Hidup terkait izin lingkungan pengelolaan limbah dan perlindungan ekosistem penting seperti mangrove;

   b. Kementerian ATR/BPN terkait dukungan terhadap zonasi dan tata ruang yang tepat untuk kegiatan budi daya;

   c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait penyediaan infrastruktur dasar dan energi;

   d. perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait penelitian dan kemajuan teknologi budi daya;

   e. Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait penguatan rantai nilai dan kelembagaan pembudi daya;

   f. Badan Gizi Nasional terkait pemanfaatan komoditas perikanan budi daya sebagai sumber protein berkelanjutan untuk mendukung program MBG;

   g. Pemerintah Daerah terkait fasilitasi perizinan dan pendampingan teknis; dan

   h. LSM, komunitas lokal, sektor swasta, dan filantropi terkait edukasi, kemitraan komersial, dan pembiayaan bagi pembudi daya skala kecil.

4. Kebijakan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil memerlukan dukungan dari:

   a. Kementerian ATR/BPN terkait penataan ruang wilayah pesisir;

   b. Kementerian Dalam Negeri terkait untuk penguatan regulasi daerah;

   c. Kementerian Pariwisata terkait pengembangan potensi pariwisata bahari;

d. TNI AL, Bakamla, dan POLAIRUD terkait operasi patroli bersama untuk mencegah pelanggaran pemanfaatan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;

e. Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait penyediaan dukungan kebijakan nasional dan anggaran;

f. Perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait pelaksanaan penelitian terkait pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan

g. Keterlibatan masyarakat lokal, organisasi adat, LSM, serta dukungan sektor swasta dan filantropi terkait pemulihan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pendekatan berbasis komunitas.

5. Kebijakan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan memerlukan dukungan dari:

a. Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah dan sistem daur ulang sampah;

b. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terkait penguatan regulasi dan pengelolaan sampah di wilayah pesisir;

c. Swasta dan industri daur ulang terkait pengumpulan dan pengolahan sampah serta mewujudkan implementasi ekonomi sirkuler bagi nelayan;

d. LSM dan komunitas lokal terkait edukasi dan pemberdayaan;

e. Perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait inovasi pengolahan sampah dan pemantauan dampak lingkungan;

f. Kementerian PPN/Bappenas terkait pengintegrasian penanggulangan sampah plastik dalam rencana pembangunan nasional; dan

g. Kementerian Pekerjaan Umum terkait pengintegrasian program pengelolaan sampah dengan pembangunan infrastruktur pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penguatan sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi fragmentasi kelembagaan, meningkatkan efisiensi pendanaan, serta memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Seluruh kebijakan yang dikembangkan harus bersifat holistik, terintegrasi, dan sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden 2025-2029, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, serta berbagai komitmen global Indonesia seperti persetujuan *World Trade Organization* (WTO), UNCLOS 1982, dan ketentuan dalam *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO).

Dalam konteks perencanaan pembangunan, keberadaan pengarusutamaan menjadi instrumen penting untuk memastikan arah kebijakan tidak hanya fokus pada capaian sektoral, melainkan juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Melalui pengarusutamaan, diharapkan rencana program mampu mendorong terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan kelestarian ekosistem. Dengan demikian, pembangunan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap keadilan antargenerasi serta daya tahan bangsa dalam menghadapi tantangan global di masa depan.

Renstra KKP 2025-2029 menggunakan 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029. Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas manfaat dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 meliputi:

1. Gender dan Inklusi Sosial

   Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dimana Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PUG, agar setiap unit organisasi dapat menyusun perencanaan yang responsif gender melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup:

a. Memperkuat 7 (tujuh) prasyarat PUG, yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat;

b. Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);

c. Menyiapkan roadmap PUG;

d. Mengembangkan model pelaksanaan PUG terintegrasi antarunit organisasi eselon I di KKP dan antara pusat dan daerah;

e. Membuat profil gender;

f. Keberpihakan pemenuhan hak anak dan kaum rentan kelautan dan perikanan; dan

g. Pemantauan dan evaluasi serta pengawasan PUG KKP

2. TPB

TPB mencakup 17 (tujuh belas) tujuan dan dalam melaksanakan TPB diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan sehingga tidak dapat terpisahkan. KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 (empat belas), yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya:

a. Mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;

b. Meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan pengendalian terhadap perubahan iklim;

c. Mengelola dan melindungi ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;

d. Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut;

e. Mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;

f. Melestarikan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;

g. Mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;

h. Meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budi daya air, dan pariwisata berkelanjutan;

i. Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian, dan alih teknologi kelautan;

j. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan

k. Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya melalui penegakan hukum internasional yang tercermin dalam UNCLOS 1982.

KKP juga mendukung pencapaian target TPB, tujuan 1 ”Tanpa Kemiskinan” (*No Poverty*), tujuan 2 ”Tanpa Kelaparan” (*Zero Hunger*), tujuan 7 ”Energi Bersih dan Terjangkau” (*Affordable and Clean Energy*), tujuan 8 ”Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi” (*Decent Work and Economic Growth*), tujuan 9 ”Industri, Inovasi, dan Infrastruktur” (*Industry Innovation and Infrastructure*), tujuan 12 ”Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab” (*Responsible Consumption and Production*), tujuan 13 ”Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*), dan tujuan 17 ”Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan” (*Partnership for the Goals*).

3. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek kemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data penerapan SPBE KKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis web (*online*), serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

4. Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon merupakan pendekatan yang berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan, yakni dengan memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Indonesia telah menerapkan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, yang memberikan nilai ekonomi terhadap setiap unit emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dengan implementasi di berbagai sektor, termasuk sektor kelautan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, penyelenggaraan NEK di sektor kelautan dan perikanan dilakukan melalui mekanisme perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja. Adapun lingkup dari penyelenggaraan NEK di sektor kelautan dan perikanan antara lain pengelolaan karbon biru, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, dan kegiatan lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal ini diimplementasikan melalui Penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan untuk mendukung aktivitas pembangunan yang rendah emisi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari pemerintah dan nonpemerintah. Keterlibatan pihak nonpemerintah terus didorong melalui inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan, serta investasi hijau yang berkelanjutan.

5. Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan berketahanan iklim menjadi strategi utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menekan potensi penurunan PDB akibat dampak perubahan iklim yang bersifat jangka panjang, seperti kerusakan infrastruktur, penurunan hasil tangkapan nelayan, hilangnya mata pencaharian, dan meningkatnya penyakit sensitif iklim. Dalam sektor kelautan dan perikanan pelaksanaan pelaksanaan pembangunan berketahanan iklim telah diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan. Upaya adaptasi dan mitigasi difokuskan pada penguatan ketangguhan masyarakat dan infrastruktur pesisir melalui rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, padang lamun, dan

terumbu karang), penerapan teknologi rendah emisi, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan tata kelola, dan pendanaan berkelanjutan. Pendekatan ini mendorong kolaborasi multipemangku kepentingan untuk membangun kawasan pesisir yang adaptif dan tangguh menghadapi bencana serta perubahan iklim, sekaligus mempromosikan praktik pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan demi kesejahteraan jangka panjang.

### A.3.7 Kerangka Regulasi

*Arah Kebijakan dan Strategi KKP*

Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi yang disusun menjelaskan mengenai gambaran umum kebutuhan regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya dalam mendukung pencapaian SS. Pada periode 2025-2029 setidaknya terdapat 96 (sembilan puluh enam) kerangka regulasi yang akan disusun/direvisi oleh KKP, terdiri dari 5 (lima) Undang-Undang, 6 (enam) Peraturan Pemerintah, 18 (delapan belas) Peraturan Presiden, 1 (satu) Keputusan Presiden, dan 66 (enam puluh enam) Peraturan Menteri.

### A.3.8 Kerangka Kelembagaan

*Kerangka Kelembagaan*

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat KKP yang meliputi pengelolaan organisasi, tata kerja, dan SDM yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi KKP yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;

2. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, serta efektif, efisien, dan dinamis; dan

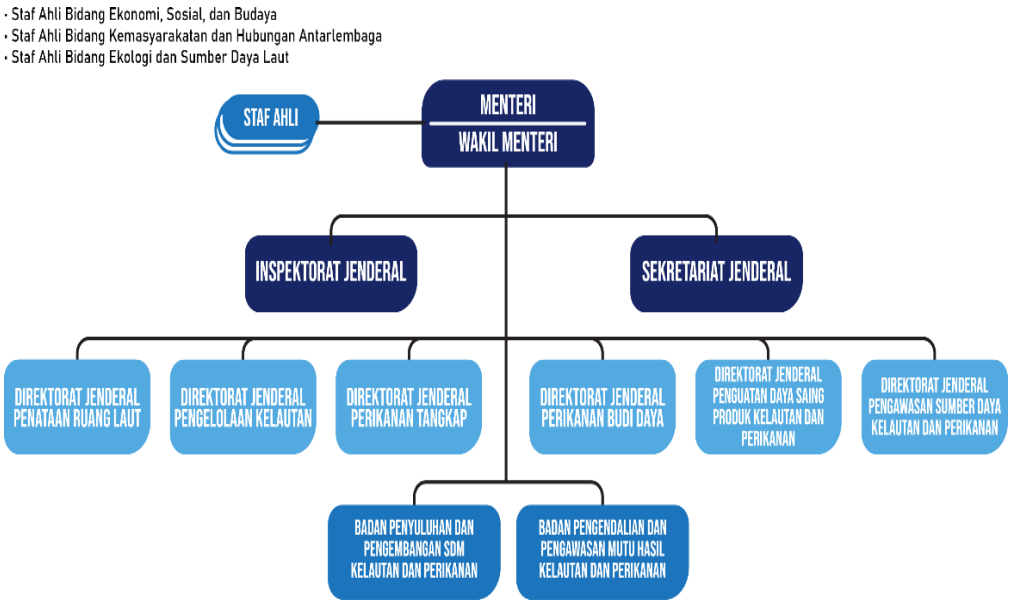
3. Optimalisasi SDM berbasis *human capital based management*.

Kerangka kelembagaan dalam perencanaan strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 difokuskan pada penataan organisasi KKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik unit organisasi organik maupun UPT KKP yang berfungsi untuk melaksanakan program-

program pembangunan. Kelembagaan yang dikembangkan harus tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adala mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diubah dengan Perpres No. 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka melaksanakan program dan kebijakan pembangunan KKP 2025-2029 diperlukan penataan kelembagaan agar dalam melaksanakan tugas tersebut dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien guna melahirkan organisasi yang proporsional, efektif, efisien, terukur, dan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penataan kelembagaan KKP akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, di samping itu KKP akan melakukan penataan kelembagaan UPT KKP sesuai dengan fungsinya.



**Gambar 5**
**Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis KKP, pengelolaan SDM menjadi aspek yang sangat krusial. SDM yang berkualitas dan tersedia dalam jumlah yang memadai merupakan pondasi utama dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan yang telah dirumuskan. Secara kualitas, pegawai KKP harus memiliki kompetensi yang relevan dengan *core business* kementerian yaitu di bidang kelautan dan perikanan. Namun tidak hanya kompetensi teknis saja yang dibutuhkan, tetapi dibutuhkan pula diantaranya kemampuan manajerial, kepemimpinan, digitalisasi, dan adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional maupun dinamika global yang saat ini telah menjadi suatu keharusan ditengah tuntutan digitalisasi layanan publik dan penguatan tata kelola berbasis data. Sementara itu, dari sisi kuantitas, kebutuhan pegawai juga harus disesuaikan dengan beban kerja dan kompleksitas tugas-tugas di unit organisasi.

Oleh karena itu, perencanaan SDM berbasis analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan peta jabatan menjadi kunci untuk memastikan penataan pegawai yang efektif

Selama ini, pengelolaan SDM di sektor publik sering kali berfokus pada aspek administratif, seperti pengangkatan, penempatan, dan penggajian. Namun, untuk menjawab tantangan zaman dan mendorong efektivitas birokrasi, KKP perlu bertransformasi ke arah pendekatan human capital based management yang menekankan pada optimalisasi potensi individu sebagai aset organisasi. Sebagaimana investasi dalam infrastruktur fisik, investasi dalam pengembangan modal manusia juga memiliki dampak jangka panjang. Selain itu, membangun *organizational learning culture* menjadi bagian penting dari pengembangan *human capital*. Organisasi yang terus belajar adalah organisasi yang mampu bertahan, berinovasi, dan berkembang dalam situasi apapun.

Dalam konteks KKP, human capital tidak hanya dipandang sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai *strategic enabler* yang mendukung implementasi kebijakan lintas sektor dan lintas skala. Pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan yang inklusif, pengelolaan ekosistem laut secara berkelanjutan, serta peningkatan daya saing produk perikanan nasional, seluruhnya membutuhkan SDM yang mampu berpikir strategis, bertindak responsif, dan berkolaborasi lintas unit organisasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas human capital menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kinerja organisasi yang adaptif dan berorientasi hasil.

Pengelolaan SDM berbasis *human capital* merupakan investasi strategis yang harus dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Fokus pengelolaan tidak hanya terbatas pada jumlah pegawai yang dibutuhkan, tetapi juga pada kualitas kompetensi yang mereka miliki, nilai tambah yang diberikan bagi organisasi, serta kemampuan untuk berkembang sesuai tantangan zaman. Dengan pendekatan ini, SDM KKP diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan besar kementerian, sekaligus memperkuat posisi sektor kelautan dan perikanan di tingkat nasional maupun global.

Berdasarkan data yang tercatat di Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah pegawai KKP dirinci sebagai berikut.

**Tabel A.2**
**Rincian Pegawai KKP Berdasarkan Status Per 31 Desember 2025**

| No. | Jenis Kelamin | CPNS | PNS | PPPK | DPK dari Inst. Lain | DPB dari Inst. Lain | DPK ke Inst. Lain | DPB ke Inst. Lain | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laki-Laki | 168 | 6.557 | 3.330 | 1 | 2 | 11 | 103 | 10.172 |
| 2 | Perempuan | 74 | 3.606 | 1.749 | 1 | | 1 | 11 | 5.442 |
| **Total** | | **242** | **10.163** | **5.057** | **2** | **2** | **12** | **114** | **15.614** |

***Sumber data: aplikasi e-pegawai KKP***

### A.3.9 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri pada KKP

*Pinjaman dan Hibah Luar Negeri pada KKP*

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pemerintah memiliki keterbatasan fiskal untuk membiayai seluruh program pembangunan berasal dari rupiah murni APBN. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber pembiayaan yang bersifat kolaboratif dan inovatif di luar APBN. Salah satu sumber pembiayaan adalah pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN).

Pada Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) jenis pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) yang diterima oleh KKP yaitu sebagai berikut:

1. Pinjaman Luar Negeri;
2. Hibah Luar Negeri Terencana;
3. Hibah Langsung Luar Negeri.

#### A.3.9.1 Pinjaman Luar Negeri

*Pinjaman Luar Negeri*

Per tanggal 31 Desember 2025, KKP mendapatkan pinjaman luar negeri sebanyak 8 (delapan) proyek yaitu sebagai berikut:

1. ***Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaqulture Project* (IISAP)/ Kawasan Budidaya Udang.**

   Proyek IISAP dibiayai melalui pinjaman yang diperoleh dari *Asian Deveompent Bank* (ADB) senilai JPY13.940.700.000,00 dengan durasi proyek selama 5 tahun 5 bulan sampai dengan 30 Juni 2028, Tujuan proyek ini untuk meningkatkan produksi dan produktivitas udang nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memiliki daya saing di pasar global. Ruang lingkup proyek ini antara lain berupa pembangunan *Broodstock Center*, pembangunan laboratorium kesehatan ikan, Pembangunan tambak, pembangunan tambak berbasis kawasan, pembangunan tambak berkelanjutan di masyarakat.

2. ***Outer Fishing Port Development Project (Eco Fishing Port)***

   Proyek *Eco Fishing Port* dibiayai melalui pinjaman yang diperoleh dari *Agence Francaise De Development* (AFD) senilai EUR 98.674.936,00 dengan durasi proyek selama 5 tahun 5 bulan sampai dengan 22 Desember 2028, Tujuan proyek ini mendukung peningkatan di 4 (empat) pelabuhan (PPS Bitung, PPS Kendari, PPS Belawan, dan PPS Cilacap) guna mencapai kinerja yang lebih baik, kepatuhan, dan keberlanjutan dalam rangka proses *eco-certification*. Ruang lingkup proyek ini antara lain berupa pengembangan dan organisasi area pelabuhan perikanan, implementasi pendekatan keberlanjutan pelabuhan perikanan dan penguatan kapasitas institusi di tingkat pusat dan di setiap pelabuhan.

3. ***Integrated Fishing Port and International Fish Market (Phase I)***

   Proyek *Integrated Fishing Port and International Fish Market* (*Phase I*) dibiayai melalui pinjaman yang diperoleh dari *Islamic Development Bank* (IsDB) senilai EUR100.000.000,00 dengan durasi proyek selama 4 tahun 2 bulan sampai dengan 26 Juni 2028, Tujuan proyek ini berkontribusi dalam pengembangan PPN Kejawanan dan PPN Pengambengan, serta penerapan standar internasional terbaik untuk integrasi/konektifitas pelabuhan perikanan dan peningkatan daya saing pasar produk perikanan di pasar internasional. Ruang lingkup proyek ini antara lain berupa pengembangan infrastruktur PPN Kejawanan dan PPN Pengambengan.

4. ***Ocean for Prosperity (Lautra)***

Proyek Lautra dibiayai melalui pinjaman yang diperoleh dari *World Bank* (IBRD) senilai USD200.000.000,00 dengan durasi proyek selama 4 tahun 10 bulan sampai dengan 31 Maret 2028, Tujuan proyek ini meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan terumbu karang yang berkelanjutan, dan akses ke peluang ekonomi bagi masyarakat lokal di daerah sasaran. Ruang lingkup proyek ini antara lain berupa infrastruktur dan penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan, perluasan peluang ekonomi di dalam dan sekitar kawasan konservasi serta pembiayaan berkelanjutan untuk kawasan konservasi dan mata pencaharian Masyarakat.

**5. *Integrated Fishing Port and International Fish Market-Phase II Preparation Project***

Proyek *Integrated Fishing Port and International Fish Market-Phase II Preparation Project* dibiayai melalui pinjaman yang diperoleh dari *Asian Development Bank* (ADB) senilai JPY15.545.000.000,00 dengan durasi proyek selama 2 tahun 6 bulan sampai dengan 31 Maret 2026, Tujuan proyek ini Berkontribusi dalam pengembangan 7 (tujuh) lokasi Pelabuhan perikanan (PPP Tegalsari, PP Teluk Awang, PPS Bungus, PPN Ambon, PP Mansapa, PP Bolok, dan PP Waiya Depapre) serta penerapan standar internasional terbaik untuk integrasi/konektifitas pelabuhan perikanan dan peningkatan daya saing pasar produk perikanan di pasar internasional. Ruang lingkup proyek ini antara lain berupa jasa konsultan manajemen.

**6. *Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)***

Proyek MFISS membangun kapal pengawas yang terdiri dari:

a. Pembangunan 4 unit kapal pengawas perikanan ukuran 70 meter dikerjakan oleh Astilleros Gondan, SA di Spanyol dengan lender berasal dari pemerintah Spanyol melalui ICO dan BBVA dengan durasi proyek selama 3 tahun sampai dengan 10 Februari 2028 di Spanyol.

b. Pembangunan 6 unit kapal pengawas perikanan ukuran 61 meter dikerjakan oleh PT Bandar Abadi selaku subkontraktor pada PT. Famindo Inovasi Teknologi di Batam. Lender berasal dari pemerintah Spanyol melalui BBVA dengan durasi proyek selama 2 tahun 9 bulan sampai dengan 23 Desember 2027. Tujuan proyek ini memperkuat kapasitas operasi keamanan maritim dan mengoperasikan sebuah sistem monitoring sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai pinjaman luar negeri untuk proyek MFISS dijelaskan pada bagian Pengungkapan Penting Lainnya.

**7. *Sector Loan for Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase I***

Proyek *Sector Loan For Integrated Fishing Ports and International Fish Markets phase I* dibiayai melalui pinjaman yang diperoleh dari *Japan International Cooperation Agency* (JICA) senilai JPY15.545.000.000,00 dengan durasi proyek selama 8 tahun sampai dengan 20 Mei 2033, Tujuan proyek ini berkontribusi dalam pengembangan 4 lokasi pelabuhan perikanan (PP Selat Lampa, PPN Merauke, PPN Pekalongan dan PP Karangsong), penerapan modeling Kalamo di MP Likupang serta penerapan standar internasional terbaik untuk integrasi/konektifitas pelabuhan perikanan dan peningkatan daya saing pasar produk perikanan di pasar internasional.

Ruang lingkup proyek ini antara lain berupa jasa konsultan manajemen dan pembangunan infrastuktur di PP Selat Lampa, PPN Merauke, PPN Pekalongan dan PP Karangsong.

### A.3.9.2 Hibah Luar Negeri Terencana

*Hibah Luar Negeri Terencana*

Per tanggal 31 Desember 2025, KKP mendapatkan hibah luar negeri terencana sebanyak 3 (tiga) proyek yaitu sebagai berikut:

**1. *Problue Grant and OMC Grant for Oceans for Prosperity Project (Lautra)***

Proyek *Problue Grant and OMC Grant for Oceans for Prosperity Project* didanai oleh World Bank (IBRD) senilai USD5.000.000,00 dengan durasi proyek sampai dengan 30 Juni 2027. Tujuan hibah ini adalah untuk memperkuat ketahanan pesisir Indonesia di 11 (sebelas) Provinsi sasaran.

**2. *Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia***

Proyek *Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia* didanai oleh *Asian Development Bank* (ADB)/(GEF-6) senilai USD2.892.200,00 dengan durasi proyek sampai dengan 30 September 2028. Tujuan hibah ini adalah berupa manajemen penyediaan pakan udang untuk mendukung proyek IISAP dan budidaya ikan Gabus untuk sumber bahan baku pakan.

**3. *Outer Ring Fishing Port Development***

Proyek *Outer Ring Fishing Port Development* didanai oleh *Agence Francaise De Development* (AFD) senilai EUR3.550.000,00 dengan durasi proyek

sampai dengan 31 Desember 2028. Tujuan hibah ini adalah pembangunan kapasitas SDM untuk mendukung proyek *Outer Ring Fishing Port*.

### A.3.9.3 Hibah Langsung Luar Negeri

*Hibah Langsung Luar Negeri*

Per tanggal 31 Desember 2025, KKP mendapat hibah langsung luar negeri sebanyak 16 (enam belas) proyek, antara lain sebagai berikut:

1. ***Program For Development of The Integrated Marine and Fisheries Center and Market in Outer Islands (Phase 1) dan The Programme for The Development of Fisheries Sector in Outer Islands (Phase 2)***

   Program ini didanai oleh Pemerintah Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Pelaksanaan Grant Agreement (GA) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) telah ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2018 untuk *Phase I* antara Sekjen KKP dengan *Chief Representative JICA Indonesia Office*. Kemudian dilanjutkan dengan *Phase II* yang ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2021 antara Sekjen KKP dengan *Chief Representative JICA Indonesia Office*. Salah satu butir kerja sama yang disepakati antara KKP dan Pemerintah Jepang adalah:

   a. Promosi industri perikanan dan masyarakat di 6 pulau terluar termasuk melalui pembangunan pelabuhan perikanan dan pasar ikan di 6 (enam) lokasi SKPT (Sabang, Natuna, Morotai, Saumlaki, Moa, and Biak);

   b. Hibah yang akan diterima sebesar JPY2.500.000.000 adalah Phase I dan untuk Phase II sebesar JPY3.000.000.000.

   Pembangunan SKPT melalui Hibah Pemerintah Jepang dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, antara lain:

   a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMENKP/2021 tentang Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang menjelaskan perihal ketentuan umum, strategi dan program, penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan, pendanaan, pelaporan, dan ketentuan peralihan;

   b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 125/KEPMENKP/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Koordinator

Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang menjelaskan bahwa koordinator pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;

c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 126/KEPMENKP/2021 tentang Tim Pengelola Bantuan Hibah Pemerintah Jepang Untuk Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/KEPMEN-KP/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Tim Pengelola Bantuan Hibah Pemerintah Jepang Untuk Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, dan;

d. Surat Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-50/PB.6/2020 tentang Perlakuan Akuntansi Hibah Langsung dari Jepang (JICA), tanggal 24 Maret 2020.

Program SKPT merupakan program prioritas KKP tahun 2019-2024 yang bertujuan untuk mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan. SKPT adalah upaya KKP untuk mempercepat tindakan pengembangan industri perikanan nasional dari hulu-hilir berbasis kawasan di pulau-pulau terluar. Upaya pengembangan SKPT tidak semata-mata bergantung pada penguatan sektor hulu (pasokan bahan baku perikanan), tetapi juga sektor hilir (sektor pengolahan) seperti prasarana dan sarana pendukung, seperti *Integrated Cold Storage* (ICS), Pabrik Es, *Ice Flake Machine* (IFM), dan lainnya, dan sistem manajemen sumber daya perikanan berkelanjutan. Untuk melakukan aksi pengembangan SKPT ini diharapkan dapat mempercepat personifikasi pulau-pulau kecil dan/atau kemandirian masyarakat daerah perbatasan.

**2. *The Eco-System Approach To Fisheries Management (EAFM) In Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA) 715, 717, 718) Components A, B, And D***

Proyek *The Eco-System Approach to Fisheries Management (EAFM) in Eastern* Indonesia dari hibah *Global Environmental Facility* (GEF-6) merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Kementerian Kelautan dan

Perikanan dengan WWF-US GEF Agency. Program ini merupakan bagian dari program perikanan global yang disebut CFI (*Coastal Fisheries Initiative*) yang mencakup 3 wilayah geografi, yaitu Amerika Latin, Afrika Barat dan Indonesia. Dengan demikian, program ini memberi kesempatan kapada setiap negara di wilayah ini untuk saling berbagi pengetahuan, inovasi, pengalaman, dan pembelajaran dalam pengelolaan perikanan pantai. Hibah GEF-6 CFI untuk Indonesia ini diawali dengan penandatanganan grant agreement antara Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai *Executing Agency* dengan WWF-US GEF sebagai *Implementing Agency* pada tanggal 23 Desember 2019.

Dalam dokumen *grant agreement* kegiatan GEF ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 28 Februari 2025. Poyek Hibah ini dilakasanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Implementasi EAFM (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*) di Indonesia Timur (Area Manajemen Perikanan (FMA) 715, 717 & 718), dimana dalam pelaksanan kegiatan ini terbagi atas 3 komponen, yaitu:

a. Komponen A: Penerapan EAFM pada FMA 715,717 & 718;

b. Komponen B: Penerapan Proyek Perbaikan Perikanan pada FMA 715,717 & 718; dan

c. Komponen D: Penerapan pengelolaan pengetahuan, Pengawasan dan Evaluasi perikanan pesisir yang berkelanjutan pada FMA 715, 717 & 718.

Total Hibah yang Diterima (dalam bentuk uang) sebesar USD7.375.690,00 dengan durasi proyek sampai dengan 31 Desember 2026.

**3. *The Establishment Of Marine And Fisheries Scientific And Technical Cooperation On Abandoned Oil And Gas Platform***

Proyek *The Establishment Of Marine And Fisheries Scientific And Technical Cooperation On Abandoned Oil And Gas Platform* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan *Korea Maritime And Ocean University Consorsium* (KMOUC). Tujuan proyek ini untuk mendukung kebijakan pengelolaan pesisir dalam rencana Tata Ruang maupun rencana Zonasi kawasan RZP di kawasan yang memiliki anjungan minyak dan gas lepas pantai pasca produksi. Total Hibah yang Diterima (dalam bentuk uang) sebesar KRW797.500.000,00 dengan durasi proyek sampai dengan 31 Maret 2028.

Selain 3 (tiga) hibah diatas terdapat 13 hibah langsung luar negeri lain yang uraian, besaran, jangka waktu dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

### A.3.10 Target Kinerja

*Target Kinerja*

Target kinerja KKP tahun 2025-2029 (termasuk sasaran dan indikator kinerja) dengan memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Reliable, and Time-bound* (SMART) yang meliputi indikator kinerja tujuan, indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan.

#### A.3.10.1 Indikator Kinerja Tujuan

*Indikator Kinerja Tujuan*

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi KKP yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Tujuan diukur menggunakan indikator kinerja tujuan sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

**Tabel A. 3**
**Indikator Kinerja Tujuan KKP Tahun 2025-2029**

| No | Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | | Target 2025-2029 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 1 | Persentase Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil (%) | 9,23 | 9,44 | 9,63 | 9,81 | 10 |
| 2 | Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing. | 2 | Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK) (%) | 4,00-6,00 | 4,00-6,00 | 5,00-6,00 | 5,00-7,00 | 6,00-7,00 |
| | | 3 | Persentase Peningkatan Produksi Garam (%) | 75 | 83 | 91 | 95 | 100 |
| | | 4 | Persentase Peningkatan Pengelolaan Ruang Laut (%) | 11 | 26 | 47 | 71 | 100 |
| | | 5 | Persentase Peningkatan Pembangunan Pulau - Pulau Kecil Menuju Maju (%) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| | | 6 | Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan (Indeks) | 76 | 77,7 | 80,2 | 81,7 | 83,8 |
| 3 | Meningkatnya Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan | 7 | Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan (Indeks) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 4 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas | 8 | Indeks RB KKP (Indeks) | 90,05 | 90,1 | 90,15 | 90,2 | 90,25 |

### A.3.10.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (SS)

SS yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. SS diukur menggunakan indikator kinerja SS. Indikator kinerja SS KKP adalah sebagai berikut:

**Tabel A.4**
**Indikator Kinerja SS KKP Tahun 2025-2029**

| No | Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | | Target 2025-2029 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | SS 1. Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut | 1 | Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (juta ha) | 30 | 30,7 | 31,3 | 31,9 | 32,5 |
| | | 2 | Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk ke Laut (%) | 1 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 2 | SS 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 3 | PDB Perikanan (triliun Rupiah) | 595,06 | 626,04 | 657,02 | 688 | 718,98 |
| | | 4 | Volume Produksi Perikanan (juta ton) | 24,58 | 25,84 | 27,25 | 28,73 | 30,16 |
| | | 5 | Volume Produksi Garam (juta ton) | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 2,85 | 3 |
| | | 6 | Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (Skala 0 - 1) | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 |
| | | 7 | Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (%) | 13,6 | 34,69 | 55,78 | 77,55 | 100 |
| | | 8 | Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (indeks) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| | | 9 | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, pembudi daya Ikan dan Petambak Garam yang Terfasilitasi (lembaga) | 4 | 23 | 27 | 45 | 53 |
| 3 | SS 3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional | 10 | Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar) | 6,25 | 6,7 | 7,2 | 7,8 | 8,5 |
| | | 11 | Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/tahun) | 26,26 | 26,85 | 27,44 | 28,04 | 28,63 |
| | | 12 | Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%) | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 |

| No | Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | | Target 2025-2029 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4 | SS 4. Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan | 13 | Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan (indeks) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 5 | SS 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas | 14 | Indeks RB KKP (indeks) | 90,05 | 90,1 | 90,15 | 90,2 | 90,25 |

### A.3.10.3 Nilai Kinerja Organisasi

Tahun 2025 merupakan tahun awal periode Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJMN) 2025-2029. Target Tahunan yang telah dirumuskan telah dituangkan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang disusun dengan mengusung tema akselerasi pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai strategi pencapaiannya, KKP telah menyusun Rencana Kinerja dan diterjemahkan ke dalam Perjanjian Kinerja KKP tahun 2025 memuat 5 Sasaran strategis dan 14 Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja KKP diturunkan/diselaraskan secara berjenjang sampai dengan Perjanjian Kinerja unit organisasi terkecil serta Sasaran Kinerja Pegawai untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam organisasi berkontribusi dalam pencapaian sasaran strategis organisasi. KKP menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan sengan peran tersebut KKP mempunyai peran memastikan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip pengelolaan berkelanjnutan berbasis ekonomi biru.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan kinerja dan pengelolaan anggaran Tahun 2025. Laporan Kinerja memuat capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagai implementasi dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Hasil pengukuran kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 menunjukkan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 104,29 dengan kategori Baik, yang diperoleh dari pencapaian 14 indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan kinerja organisasi dalam melaksanakan program dan

kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan sepanjang Tahun 2025, serta menjadi dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pencapaian sasaran strategis kementerian.

**Tabel A. 5**
**Capaian Kinerja KKP Tahun 2025**

| No | Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | | Target | Capaian 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | Nilai | % |
| 1 | SS 1. Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut | 1 | Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (juta ha) | 30 | 30,97 | 103,23 |
| | | 2 | Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk ke Laut (%) | 1 | 27,36 | 120 |
| 2 | SS 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 3 | PDB Perikanan (triliun Rupiah) | 595,06 | 610,74 | 102,64 |
| | | 4 | Volume Produksi Perikanan (juta ton) | 24,58 | 26,26 | 106,83 |
| | | 5 | Volume Produksi Garam (juta ton) | 2,25 | 1,04 | 46,22 |
| | | 6 | Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (Skala 0 - 1) | 0,49 | 0,49 | 100 |
| | | 7 | Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (%) | 13,6 | 17,01 | 120 |
| | | 8 | Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (indeks) | 82 | 87,8 | 107,07 |
| | | 9 | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, pembudi daya Ikan dan Petambak Garam yang Terfasilitasi (lembaga) | 4 | 4 | 100 |
| 3 | SS 3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional | 10 | Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar) | 6,25 | 6,27 | 100,32 |
| | | 11 | Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/tahun) | 26,26 | 26,08 | 99,31 |
| | | 12 | Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%) | 70 | 86,67 | 120 |
| 4 | SS 4. Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan | 13 | Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan (indeks) | 70 | 74 | 105,71 |
| 5 | SS 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas | 14 | Indeks RB KKP (indeks) | 90,05 | 91,70 | 101,83 |

### A.3.11 Teknologi Informasi yang Digunakan

*Teknologi Informasi yang Digunakan*

KKP menggunakan berbagai sistem aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokoknya. Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, s.d. Semester II Tahun 2025 KKP didukung oleh tersedianya 72 (tujuh puluh dua) aplikasi dengan berbagai platform teknologi informasi. Daftar aplikasi dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

### A.3.12 Pejabat Perbendaharaan

*Pejabat Perbendaharaan*

Untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, kompetensi pejabat perbendaharaan menjadi esensi yang sangat penting. Kompetensi pejabat perbendaharaan menjadi persyaratan mutlak dalam pengangkatan pejabat perbendaharaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2024 Pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jumlah Pejabat Perbendaharaan pada Satker di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebanyak 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) pejabat perbendaharaan dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel A. 6**
**Jumlah Pejabat Perbendaharaan Per Jenis Kewenangan Satker**

| No | Pejabat | Jenis Kewenangan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | KD | 137 |
| | | Pusat | 11 |
| | | Dekon/TP | 232 |
| 2 | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | KD | 159 |
| | | Pusat | 53 |
| | | Dekon/TP | 306 |
| 3 | Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) | KD | 137 |
| | | Pusat | 11 |
| | | Dekon/TP | 232 |
| 4 | Bendahara Pengeluaran | Pusat | 11 |
| | | Dekon/TP | 232 |
| | | KD | 117 |
| 5 | Bendahara Penerimaan | Pusat | 6 |
| | | Dekon/TP | 2 |
| | | KD | 51 |
| 6 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | Pusat | 47 |
| | | Dekon/TP | 0 |

### A.3.13 Rekening Pemerintah

*Rekening Pemerintah*

Rekening Pemerintah terdiri dari Rekening Pengeluaran, Rekening Pengeluaran Pembantu, Rekening Penerimaan, dan Rekening Lainnya. Rekening Penerimaan dan Rekening Lainnya merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga. Sedangkan Rekening Pengeluaran dan Rekening Pengeluaran Pembantu Merujuk dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga.

Jumlah rekening pemerintah milik satuan kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 612 (enam ratus dua belas) rekening yang terdiri dari 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) rekening pengeluaran, 129 (seratus dua puluh sembilan) rekening pengeluaran pembantu, 14 (empat belas) rekening penerimaan, dan 92 (sembilan puluh dua) rekening pemerintah lainnya. Rekening pemerintah milik satuan kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan jenis rekening adalah sebagai berikut:

**Tabel A. 7**
**Rekening Pemerintah Pada KKP Berdasarkan Jenis Rekening**

| No | Eselon I | Jenis Rekening | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengeluaran | Pengeluaran Pembantu | Penerimaan | Lainnnya | Jumlah |
| 1 | Setjen | 37 | 8 | 1 | 11 | 57 |
| 2 | Itjen | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | DJPT | 58 | 6 | 1 | 1 | 66 |
| 4 | DJPB | 50 | 6 | 0 | 15 | 71 |
| 5 | Ditjen PSDKP | 64 | 70 | 0 | 11 | 145 |
| 6 | Ditjen PDSPKP | 38 | 9 | 1 | 0 | 48 |
| 7 | Ditjen PKRL | 43 | 13 | 0 | 28 | 84 |
| 8 | BPPSDMKP | 42 | 4 | 11 | 26 | 83 |
| 9 | BPPMHKP | 44 | 7 | 0 | 0 | 51 |
| **Total** | | **377** | **129** | **14** | **92** | **612** |

Sedangkan rekening pemerintah milik satuan kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Bank adalah sebagai berikut:

**Tabel A.8**
**Rekening Pemerintah Pada KKP Berdasarkan Jenis Bank**

| No | Eselon I | Jenis Rekening | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BNI | Mandiri | BRI | BSI | BTN | Bank Pembangunan Daerah | Jumlah |
| 1 | Setjen | 30 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 57 |

| No | Eselon I | Jenis Rekening | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BNI | Mandiri | BRI | BSI | BTN | Bank Pembangunan Daerah | Jumlah |
| 2 | Itjen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | DJPT | 28 | 13 | 20 | 2 | 1 | 2 | 66 |
| 4 | DJPB | 16 | 22 | 18 | 3 | 7 | 5 | 71 |
| 5 | Ditjen PSDKP | 48 | 60 | 23 | 14 | 0 | 0 | 145 |
| 6 | Ditjen PDSPKP | 26 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| 7 | Ditjen PKRL | 26 | 17 | 20 | 20 | 0 | 1 | 84 |
| 8 | BPPSDMKP | 31 | 15 | 17 | 1 | 19 | 0 | 83 |
| 9 | BPPMHKP | 21 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 51 |
| **Total** | | **233** | **166** | **133** | **45** | **27** | **8** | **612** |

### A.3.14 Badan Layanan Umum

*Badan Layanan Umum*

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan Praktik Bisnis yang Sehat. BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.

Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan BLU, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya atau disebut Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU).

Instansi Pemerintah atau Satuan Kerja Lingkup KKP yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai keputusan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut:

**Tabel A.9**
**Daftar Satker Badan Layaanan Umum KKP**

| Kode Satker | Nama Satker | Keputusan Menteri Keuangan | Rumpun dan Layanan |
|---|---|---|---|
| 660056 | Lembaga Pengelola Modal Usaha (LPMU) KP | No. Penetapan : 710/KMK.05/2016<br>Tarif : | Penyedia Barang dan Jasa Lainnya<br>Pengelolaan Dana |

| Kode Satker | Nama Satker | Keputusan Menteri Keuangan | Rumpun dan Layanan |
|---|---|---|---|
| | | PMK 100/PMK.05/2016 | |
| 622035 | Politeknik (Poltek) KP Sidoarjo | No. Penetapan : 526/KMK.05/2021 Tarif : PMK 198/PMK.05/2022 | Pendidikan |
| 239188 | Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Tegal | No. Penetapan : 526/KMK.05/2021 Tarif : PMK 166/PMK.05/2022 | Pendidikan |
| 239192 | Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara | No. Penetapan : KMK 163 Tahun 2023 Tarif : PMK 139 Tahun 2023 | Penyedia Barang dan Jasa Lainnya |
| 445393 | Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang | No. Penetapan : KMK 163 Tahun 2023 Tarif : PMK 139 Tahun 2023 | Penyedia Barang dan Jasa Lainnya |
| 567350 | Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Situbondo | No. Penetapan : KMK 163 Tahun 2023 Tarif : PMK 139 Tahun 2023 | Penyedia Barang dan Jasa Lainnya |

## A.4 Pendekatan Penyusunan LK

*Pendekatan Penyusunan LK*

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KKP. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada KKP.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh satuan kerja yang secara struktural di bawah KKP.

Jumlah entitas akuntansi yang melakukan penyusunan atas Laporan Keuangan di lingkungan KKP dengan perbandingan antara tahun 2024 dan 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel A.10**
**Jumlah Entitas Akuntansi Per 31 Desember 2025**

| No | Eselon I | Aktif | | | | | Inaktif | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KP | KD | TP | Satkon | ∑ | KD | DK | TP | ∑ | |
| 1 | Setjen | 2 | 1 | | | 3 | | | 38 | 38 | 41 |
| 2 | Itjen | 1 | | | | 1 | | | | | 1 |

| No | Eselon I | Aktif | | | | | Inaktif | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KP | KD | TP | Satkon | ∑ | KD | DK | TP | ∑ | |
| 3 | DJPT | 1 | 23 | 25 | | 49 | | | 9 | 9 | 58 |
| 4 | DJPB | 1 | 15 | | | 16 | | 1 | 38 | 39 | 55 |
| 5 | Ditjen PSDKP | 1 | 14 | | | 15 | | 20 | 34 | 54 | 69 |
| 6 | Ditjen PDSPKP | 1 | 1 | 34 | | 36 | | | | | 36 |
| 7 | Ditjen PKRL | 1 | 8 | | | 9 | | | 34 | 34 | 43 |
| 8 | BPPSDMKP | 3 | 39 | | | 42 | | | | | 42 |
| 9 | BPPMHKP | 1 | 36 | | | 37 | 11 | | | 11 | 48 |
| 10 | Satkon | | | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| **Total** | | **12** | **137** | **59** | **1** | **209** | **11** | **21** | **153** | **185** | **394** |

Pada satker aktif termasuk satker yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum sebanyak 6 (enam) satker yang terdiri dari 1 (satu) satker KP dan 5 (lima) satker KD.

## A.5 Basis Akuntansi

*Basis Akuntansi*

Kementerian Keuangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## A.6 Dasar Pengukuran

*Dasar Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Keuangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.7 Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

### A.7.1 Pendapatan-LRA

*Pendapatan LRA*

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Kebijakan akuntansi terkait Pendapatan-LRA adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

2. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### A.7.2 Pendapatan-LO

*Pendapatan LO*

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau

telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) dan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### A.7.3 Belanja

*Belanja*

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kebijakan akuntansi terkait Belanja adalah sebagai berikut:

1. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

3. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### A.7.4 Beban

*Beban*

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Kebijakan akuntansi terkait Beban adalah sebagai berikut:

1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### A.7.5 Aset

*Aset*

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### A.7.5.1 Aset Lancar

*Aset Lancar*

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kebijakan akuntansi terkait Aset Lancar adalah sebagai berikut:

1. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs penutup pada tanggal neraca.

2. Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

3. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4. Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

    a. Piutang atas pemberian layanan publik oleh pemerintah yang belum dilunasi pada tanggal neraca;

    b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;

    c. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

6. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

7. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang pertama yang keluar. Saldo Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

    a. harga perolehan masing-masing, apabila diperoleh dengan pembelian;

    b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

    c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### A.7.5.2 Aset Tetap

*Aset Tetap*

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kebijakan akuntansi terkait Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

2. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

    a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

    b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

    c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

3. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

4. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-udangan di Bidang Pengelolaan BMN.

### A.7.5.3 Piutang Jangka Panjang

*Piutang Jangka Panjang*

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Kebijakan akuntansi terkait Piutang Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

1. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

3. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

    a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

    b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

### A.7.5.4 Aset Lainnya

*Aset Lainnya*

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan,

aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Kebijakan akuntansi terkait Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

2. Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud diakui jika dan hanya jika:

    a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

    b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

3. Untuk keseragaman penyajian dan pengungkapan ATB di seluruh satuan kerja di Pemerintah Pusat, tata cara penyajian dan pengungkapan ATB (sesuai Bultek SAP No.17) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

### A.7.5.5 Properti Investasi

*Properti Investasi*

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

2. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan akuntansi terkait Properti Investasi adalah sebagai berikut:

1. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

    a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke

entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

2. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut) atau nilai wajar pada tanggal perolehan.

3. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

4. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.

### A.7.6 Kewajiban

*Kewajiban*

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kebijakan akuntansi terkait Kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

   a. Kewajiban Jangka Pendek

      Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

      Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

   b. Kewajiban Jangka Panjang

      Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

2. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

### A.7.7 Ekuitas

*Ekuitas*

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### A.7.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan piutang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Lembaga dan Bendahara Umum Negara adalah sebagai berikut:

**Tabel A.11**
**Penyisihan Piutang**

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|---|---|---|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100% |
| | Piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara (PUPN) Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan | |

### A.7.9 Penyusutan Aset Tetap

*Penyusutan Aset Tetap*

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Kebijakan akuntansi terkait Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

    a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna

Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;

b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;

c. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan

d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.

2. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

3. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

4. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 266/KM.6/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut.

**Tabel A.12**
**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|---|---|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d. 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modem) | 4 tahun |

### A.7.10 Amortisasi Aset Tak Berwujud

*Amortisasi Aset Tak Berwujud*

Kebijakan akuntansi terkait Amortisasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

1. Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki Masa Manfaat terbatas, antara lain meliputi:

   a. Perangkat Lunak (*Software*) Komputer;

   b. Lisensi;

   c. Waralaba (*Franchise*);

d. Hak Cipta (*Copyright*); dan

e. Hak Paten.

2. Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

a. Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (*Copyright*) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan

b. Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/ atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.

3. Amortisasi pertama kali dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015, berdasarkan saldo pada tanggal 1 Januari 2016, dengan menggunakan nilai buku Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2015 yang telah dilakukan amortisasi.

4. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebelum tahun 2015 sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat diamortisasikan.

5. Hasil amortisasi pertama kali dibukukan pada tanggal 1 Januari 2016.

6. Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2015, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu.

7. Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

8. Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan mulai Tahun

Anggaran 2016.

9. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022, masa manfaat Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut.

**Tabel A.13**
**Masa Manfaat Aset Tak Berwujud**

| Kode Barang | Nama Barang | Tahun |
|---|---|---|
| 8010101001 | Software Komputer | 4 |
| 8010101002 | Lisensi | 10 |
| 8010101003 | Francise | 5 |
| 8010101004 | Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I | 70 |
| 8010101005 | Hak Paten Sederhana | 10 |
| 8010101008 | Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II | 50 |
| 8010101009 | Hak Cipta Karya Seni Terapan | 25 |
| 8010101010 | Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan | 50 |
| 8010101011 | Hak Ekonomi Produser Fonogram | 50 |
| 8010101012 | Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran | 20 |
| 8010101013 | Paten Biasa | 20 |
| 8010101014 | Merek | 10 |
| 8010101015 | Desain Industri | 10 |
| 8010101016 | Rahasia Dagang | 10 |
| 8010101017 | Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | 10 |
| 8010101018 | Perlindungan Varietas Tanaman Semusim | 20 |
| 8010101019 | Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 |

### A.7.11 Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan BLU

*Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan BLU*

Kebijakan akuntansi terkait Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan Pendapatan-LRA BLU diidentifikasi sebagai berikut:

   a. Timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih

      Sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan dan/atau hak BLU untuk menagihkan beban tagihan kepada alokasi APBN-DIPA Rupiah Murni berdasarkan peraturan perundang-undangan.

   b. Realisasi Pendapatan

      Realisasi pendapatan BLU yang secara hak telah diterima oleh BLU tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

2. Pendapatan LO pada BLU disajikan:

a. Nilai pendapatan dari alokasi APBN-DIPA RM sesuai dengan SP2D Belanja yang berasal dari pagu DIPA rupiah murni disajikan di LO sebagai Pendapatan dari Alokasi APBN dalam pos Pendapatan Operasional;

b. Nilai pendapatan umum PNBP sesuai dengan dokumen sumber setoran ke kas negara (SSBP dan/atau SSPB) atau dokumen LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional;

c. Nilai pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari masyarakat - DIPA PNBP; Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat-DIPA PNBP; Pendapatan hasil kerja sama-DIPA PNBP; dan Pendapatan BLU lainnya-DIPA PNBP yang telah disahkan sesuai dengan SP2B-BLU LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional;

d. Nilai pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat yang telah disahkan sesuai dengan SP2B-BLU LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional;

e. Pendapatan hibah bentuk barang dan/atau jasa dari masyarakat sesuai dengan berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen yang dipersamakan disajikan di LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional, sedangkan beban jasanya disajikan di LO sebagai beban sesuai definisi bebannya dalam pos Beban Operasional;

f. Pendapatan BLU secara transaksional kas yang belum dilakukan pengesahan transaksinya pada periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLU LO sebagai pendapatan BLU dalam pos PNBP Lainnya;

g. Pendapatan BLU secara transaksional non kas pada periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLU yang dicatat di buku pembantu pendapatan BLU non kas LO sebagai pendapatan BLU dalam pos PNBP Lainnya;

h. Pendapatan sehubungan dengan perhitungan akuntansi misalnya pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan pendapatan pelepasan aset disajikan di Laporan Operasional dalam pos Kegiatan Non Operasional.

3. Beban yang terdapat pada BLU adalah sebagai berikut:

a. Nilai beban sehubungan dengan adanya realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanjanya, nilai beban sehubungan dengan pengesahan belanja barang sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU, nilai beban sehubungan dengan beban transaksional secara kas belum dilakukan pengesahan belanjanya, dan nilai beban sehubungan dengan penyesuaian beban operasional BLU disajikan di Laporan Operasional dalam pos Beban Operasional;

b. Beban operasional BLU di Laporan Operasional disajikan menurut klasifikasi ekonomi, antara lain:

   i. Beban pegawai;

   ii. Beban barang dan jasa;

   iii. Beban persediaan;

   iv. Beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;

   v. Beban pemeliharaan;

   vi. Beban perjalanan dinas;

   vii. Penyisihan piutang tidak tertagih; dan

   viii. Beban penyusutan dan amortisasi.

c. Nilai beban sehubungan dengan penyetoran pendapatan PNBP untuk keuntungan rekening kas umum negara disajikan di Laporan Operasional sebagai Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara dalam pos Kegiatan Non-Operasional. Selain itu beban-beban yang disajikan dalam pos Kegiatan Non-Operasional misalnya beban sehubungan dengan kerugian persediaan rusak atau usang, kerugian pelepasan aset, kerugian selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan bank BLU, piutang BLU, dan utang BLU.

4. Kas dan setara kas yang dikelola BLU diakui sebagai berikut:

   a. Nilai Kas dan Bank BLU, Kas dan Bank BLU Belum Disahkan, Setara Kas BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas pada Badan Layanan Umum;

   b. Nilai Kas Lainnya di BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar

sebagai Kas Lainnya pada Kementerian;

c. Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran UP dan TUP disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.

5. Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal. Penyajian Investasi BLU, sebagai berikut:

   a. Pokok investasi BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Investasi Jangka Pendek;

   b. Hasil investasi berupa pendapatan bunga dan/atau bagi hasil yang diterima secara kas disajikan di LRA dan LO pada pos Pendapatan BLU Lainnya.

6. Piutang BLU diakui sebagai berikut:

   a. Piutang BLU atas layanan BLU diakui pada saat tagihan layanan BLU atau penetapan Piutang BLU terhadap layanan BLU yang belum dilunasi berdasarkan dokumen tagihan layanan BLU atau ketetapan piutang BLU atau yang dipersamakan;

   b. Piutang BLU atas kegiatan perikatan dan/atau kerjasama diakui pada saat penetapan Piutang BLU terhadap hak pendapatan yang belum diterima setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan;

   c. Piutang BLU atas penagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi diakui pada saat penetapan penjualan angsuran/tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi berdasarkan surat ketetapan piutang penagihan atau dokumen yang dipersamakan;

   d. Belanja dibayar di muka, uang muka belanja dan piutang BLU atas perhitungan akuntansi diakui pada saat akhir periode pelaporan keuangan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya.

7. Pengukuran Piutang Jangka Panjang BLU sebagai berikut:

   a. Investasi Non-Permanen Jangka Panjang BLU

      i. Investasi Non-Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan diukur sebesar nilai perolehannya berdasarkan

dokumen pembelian, kepemilikan atau yang dipersamakan;

ii. Investasi Non-Permanen dalam bentuk tagihan atas pemberian pinjaman dan/atau tagihan dana bergulir diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. Investasi Permanen Jangka Panjang BLU

Investasi Permanen Jangka Panjang BLU diukur sebesar nilai perolehan investasi dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi.

8. Pengakuan aset lainnya BLU sebagai berikut:

a. Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLU Aset berupa tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan bangunan BLU yang digunakan untuk diusahakan dalam kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat perjanjian kerjasama/kemitraan ditandatangani. Atas transaksi ini, dilakukan reklasifikasi aset dari Aset Tetap BLU dan/atau Aset Lainnya berupa Aset Tetap BLU yang tidak digunakan dalam Operasional BLU menjadi aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga-BLU;

b. Pengakuan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan diakui pada saat dana yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLU diterima oleh BLU dalam rekening bank dana kelolaan BLU atau yang dipersamakan, dan belum dilakukan perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLU;

c. Pengakuan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat dana operasional BLU atau kas dan Bank BLU yang disisihkan atau dana pihak ketiga atau trust fund yang dibentuk dengan tujuan tertentu untuk membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan diterima atau ditempatkan dalam rekening bank yang dibatasi penggunaannya atau yang dipersamakan, dan belum dilakukan penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan atas pembentukan kas yang dibatasi penggunaannya.

9. Pengakuan Kewajiban BLU antara lain sebagai berikut:

a. Utang Usaha BLU, Utang Usaha BLU diakui pada saat BLU menerima

dana dan/atau fasilitas pembiayaan jangka pendek, dan/atau diakui berdasarkan hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang BLU dari aktivitas pembiayaan pada periode pelaporan;

b. Utang Pihak Ketiga BLU Utang Pihak Ketiga diakui pada saat:

   i. Timbulnya kewajiban BLU berupa tagihan atas perjanjian/ kontrak/dokumen lain belanja yang dipersamakan terhadap barang dan jasa yang telah diterima; dan/atau

   ii. Diterima dana pihak ketiga berupa dana titipan pihak ketiga seperti honor pegawai yang belum dibayarkan kepada pegawai yang berhak, atau uang jaminan atau uang muka dari pengguna jasa BLU.

c. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

   Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor diakui pada saat Bendahara BLU memungut pajak namun belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara.

d. Belanja yang Masih Harus Dibayar

   Belanja yang Masih Harus Dibayar diakui pada saat timbulnya kewajiban berupa resume tagihan atas sejumlah belanja yang bersumber dari alokasi dana DIPA rupiah murni, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran oleh BLU dan/atau berupa perhitungan akrual biaya-biaya yang belum jatuh tempo.

e. Pendapatan Diterima di Muka

   Pendapatan Diterima di Muka diakui pada saat terdapat atau timbul klaim pihak ketiga kepada BLU terkait kas yang telah diterima BLU dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari BLU pada akhir periode pelaporan keuangan.

   Pendapatan Diterima di Muka diakui dengan menggunakan pendekatan pendapatan sehingga akun ini hanya muncul pada akhir tahun sebagai penyesuaian untuk memisahkan pendapatan yang benar-benar merupakan hak pada periode berjalan dari pendapatan yang sebenarnya baru menjadi hak pada periode berikutnya.

f. Utang Jangka Pendek Lainnya

   Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban BLU untuk membayar utang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam

Utang Usaha, Utang kepada Pihak Ketiga BLU, Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor, Belanja yang Masih Harus Dibayar, dan Pendapatan Diterima di Muka.

g. Utang Jangka Panjang BLU

Utang Jangka Panjang BLU diakui pada saat BLU menerima dana dan/atau fasilitas pembiayaan jangka panjang dan dilakukan pengesahan penerimaan pembiayaan sesuai dengan SP3B/ SP2B-BLU, dan/atau pada saat BLU menerima dana sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran BUN.

### A.7.12 Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran

*Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran*

Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang / jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

Secara garis besar proses bisnis RPATA dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pengisian RPATA

   Pengisian RPATA dilakukan melalui pembuatan dan penyampaian SPP-Penampungan dengan menghitung sisa pekerjaan yang belum diselesaikan, atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan, diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan akhir tahun anggaran yang menjadi dasar perhitungan pembayaran.

   Sisa pekerjaan di akhir tahun yang dimaksud termasuk porsi pekerjaan pemeliharaan. Dikecualikan dari mekanisme RPATA adalah pekerjaan dari kontrak yang dibiayai dari pendapatan BLU.

2. Pembayaran Kepada Penyedia

   Dalam rangka menjaga prinsip pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima, pencairan dana dari RPATA untuk dipindahbukukan ke rekening Penyedia dilakukan pada saat Penyedia berhak menerima pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan, melalui pengajuan

SPP/SPM-Pembayaran. Pembayaran kepada Penyedia dilakukan pada saat:

a. pekerjaan terselesaikan 100%;

b. masa penyelesaian pekerjaan di kontrak berakhir; atau

c. masa pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir.

Pengajuan SPP/SPM-Pembayaran hanya dilakukan dalam 1 kesempatan. Terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan di tanggal 31 Desember 2025 namun dilanjutkan penyelesaiannya ke TA berikutnya paling lama 90 hari kalender, maka prestasi yang telah dicapai s.d. tanggal 31 Desember 2025 belum dapat diajukan pembayaran terlebih dahulu. Pembayaran atas pekerjaan tersebut, dilakukan secara sekaligus pada saat batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan telah berakhir.

3. Penihilan RPATA atas Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan

Satker melakukan penelitian atas sisa dana yang ada di RPATA untuk disetor kembali ke RKUN/Rekening lainnya milik BUN, dalam hal terdapat sisa dana atas pekerjaan yang tidak terselesaikan, melalui pembuatan dan pengajuan SPP, SPM, SP2D Penihilan.

4. Penyelesaian Pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya

Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dapat diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya paling lama 90 hari kalender. Pemberian kesempatan tersebut paling banyak diberikan 2 kali, dengan akumulasi pemberian kesempatan tidak boleh melebihi 90 hari kalender.

Pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) diatur dalam Petunjuk Teknis Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

## A.8 Penerapan Aplikasi SAKTI

*Penereapan Aplikasi SAKTI*

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023.

Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang digunakan mulai periode penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada dengan fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada satker dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Proses penyusunan Laporan Keuangan menggunakan Aplikasi SAKTI adalah sebagai berikut:




Gambar 6
Proses Bisnis Penyusunan LK Menggunakan Aplikasi SAKTI

Selain Aplikasi SAKTI, Kementerian Keuangan juga telah mengembangkan Aplikasi MonSAKTI untuk keperluan proses monitoring dan rekonsiliasi.

## A.9 Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan

*Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan*

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) merupakan pengendalian secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan pada Pelaporan Keuangan/Kegiatan yang terkait dengan Keuangan Negara. Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian intern yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Penyelenggaraan PIPK dilaksanakan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Penyelengaraan PIPK terdiri dari:

1. Penerapan

   Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai.

2. Penilaian

   Penilaian PIPK bertujuan untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas

3. Reviu PIPK

   Reviu PIPK dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan melakukan penelaahan atas penilaian PIPK untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Sebagai salah satu entitas pelaporan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerapkan PIPK pada Tahun 2025. Penerapan PIPK tersebut telah dinilai dan juga telah direviu oleh Inspektorat Jenderal dengan hasil ”**efektif dengan pengecualian**”.

## A.10 Kebijakan Internal Kementarian Kelautan dan Perikanan

*Kebijakan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan*

### A.10.1 Kebijakan Manajemen SDM

**1. Kebijakan Mekanisme Kerja Penyederhanaan Birokrasi**

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**2. Kebijakan Jabatan dan Kelas Jabatan ASN**

Biro Sumber Daya Manuasia Aparatur dan Organisasi menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**3. Kebijakan Manajemen Talenta ASN**

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

**4. Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN**

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**5. Kebijakan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional**

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### A.10.2 Kebijakan Manajemen Hubungan dan Kerjasama

**1. Kebijakan pelaksanaan kerja sama dan penyusunan perjanjian**

Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**2. Kebijakan Penyelenggaraan Kehumasan**

Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan 43 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana pada Peraturan Menteri ini mengatur bahwa Penyelenggaraan Kehumasan di lingkungan Kementerian dilaksanakan dengan tahapan:

a. Perencanaan Kehumasan;

b. Pelaksanaan Kehumasan; dan

c. Audit Komunikasi.

### A.10.3 Kebijakan Manajemen Keuangan

**1. Kebijakan Pemblokiran Anggaran**

Pada tahun anggaran 2025 demi mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*) serta dalam rangka mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran hal Penyampaian Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Pemerintah melaksanakan kebijakan efisiensi atas anggaran belanja seluruh Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan sebagai berikut:

a. Instruksi Presiden Repubuk Indonesia Nomor I Tahun 2025 Tentang Efisiensi Beianja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025; dan

c. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

**2. Kebijakan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus**

Biro Perencanaan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2022.

**3. Kebijakan Tarif PNBP**

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara selaku Pembina dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PNBP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

Untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha pemanfaatan air laut selain energi dan pelaksanaan reklamasi dalam pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif ats Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan perubahan terhadap persyaratan dan tata cara pembayaran pengenaan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan air laut selain engergi dan kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut.

KKP kembali menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

**4. Kebijakan Penetapan Pengelola Keuangan**

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2020 tentang tata Cara Penetapan Pejabat Pengelolaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**5. Kebijakan Pengelolaan Kas Akhir Tahun**

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menerbitkan Surat Edaran Sekjen KKP Nomor B.1403/SJ/KU.510/XII/2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kas Pada Akhir Tahun 2025 di Lingkungan KKP

**6. Kebijakan Pembayaran Tunjangan Kinerja KKP**

Pada Bulan Mei 2025, Biro SDM dan Organisasi, serta Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

**7. Kebijakan Pedoman pelaksanaan Pengelolaan BMN**

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 15/Permen-Kp/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

**8. Kebijakan Pelimpahan sebagian Kewenangan Terkait BMN**

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/MEN-KP/PL.720/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat Tertentu Dalam Rangka Pengelolaan Aset berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara juga menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

**9. Kebijakan Tata Kelola BMN Penggunaan Kendaraan Dinas**

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2022 tentang Tata Kelola Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### A.10.4 Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sekretariat Jenderal menjadi *lead* dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data KKP yang akan didukung oleh Eselon I teknis lingkup KKP. Fungsi penyediaan data statistik di Sekretariat Jenderal berada pada Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin).

Langkah awal implementasi Kebijakan Satu Data KKP berdasarkan amanat Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 389 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi pada tanggal 10 Februari 2022, keluar Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.77/MEN-KP/II/2022 tentang Pencabutan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 389 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan). Terdapat 7 program yang telah seluruhnya dilaksanakan oleh PUSDATIN, yaitu:

1. Moratorium Sistem Informasi;
2. Persetujuan PUSDATIN untuk Pengadaan Sistem Informasi;
3. Anggaran Sistem Informasi KKP mulai tahun 2017 di PUSDATIN;
4. Alih Status Sistem Informasi dari unit eselon I KKP ke PUSDATIN;
5. Rasionalisasi Sistem Informasi;
6. Pendataan SDM Sistem Informasi; dan
7. Alih tugas SDM Sistem Informasi ke PUSDATIN.

Untuk penataan sistem dan tata kelola informasi yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga telah ditetapkan Peraturan Menteri Nomor 31/PERMEN-KP/2018 tentang *Master Plan* TI KKP; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Kelola TI di lingkungan KKP; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Satu Data KP, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Konten Portal Web dan Situs Web di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 14 November 2022.

Dalam rangka mendukung sistem informasi yang kuat dan mudah diakses, juga diperlukan Integrasi Infrastruktur Teknologi Informasi, seperti:

1. Pengelolaan *Data Center* yang terintegrasi, menjadi *Data Center* (DC) tunggal dan *Disaster Recovery Center* (DRC) tunggal;

2. Teknologi DC/ DRC berbasis virtualisasi dan fleksibel dalam alokasi sumberdaya;

3. Jaringan komunikasi terkonsolidasi dengan jaringan terpusat dan mendukung redundansi;

4. Anggaran *bandwith* 144 UPT di Pusat dan Daerah dialokasikan oleh Sekretariat Jenderal;

5. Monitoring atas jaringan terpusat dan mencakup seluruh aset jaringan dan sistem kritikal.

Di Bidang Pendataan Kelautan dan Perikanan, telah dibangun Aplikasi Satu Data dengan alamat: *https://satudata.kkp.go.id/*, dengan modul yang terdiri dari:

(a) Modul KUSUKA;

(b) Modul Pendataan Produksi;

(c) Modul Bantuan Pemerintah; dan

(d) e-Penyuluh.

Selain itu juga telah dibangun aplikasi *mobile* satu data untuk memudahkan pengolah data melakukan penginputan data.

Dengan diterapkannya Kebijakan Satu Data di Kementerian Kelautan dan Perikanan, beberapa nilai yang sangat strategis, yaitu:

1. Kualitas data yang dihasilkan lebih baik dan akurat;

2. Efisiensi anggaran;

3. Penataan BMN IT menjadi lebih tertata;

4. Revolusi Mental dan Manajemen Perubahan;

5. Pengembangan Organisasi *end to end* Proses Bisnis; dan

6. Pelayanan Publik yang lebih optimal terkait data kelautan dan perikanan.

Di bidang layanan Umum, sedang dibangun Aplikasi dalam satu portal KKP yang mudah diakses untuk memberikan informasi atas layanan umum dan dapat di akses di portal.kkp.go.id .

Upaya-upaya yang telah dilakukan ini sejalan dengan visi dan misi KKP menuju e-KKP untuk mewujudkan

1. Satu data KKP yang Standar, Berkualitas dan Berintegritas;
2. Tata Kelola Data dan Teknologi Informasi yang terpadu; dan
3. Aplikasi dan Infrastruktur yang Terintegrasi, Efisiensi dan Aman.

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



# PENJELASAN ATAS POS-POS LRA

Catatan atas Laporan Keuangan



## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Pagu Anggaran KKP Rp10.023.336.496.000,00*

Pada periode *Audited* tahun 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki alokasi pagu anggaran APBN yang terbagi ke dalam sembilan DIPA Induk untuk masing-masing Unit Eselon I lingkup KKP yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, lima Direktorat Jenderal, dan dua Badan. Berikut postur anggaran tahun 2025 menurut Unit Eselon I di lingkungan KKP.

**Tabel B.1**
**Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan**
**Menurut Unit Eselon I TA 2025**

| No. | Unit Eselon I | Pagu Anggaran |
|---|---|---|
| 1. | Setjen | 628.315.099.000 |
| 2. | Itjen | 50.150.274.000 |
| 3. | Ditjen PT | 2.664.335.557.000 |
| 4. | Ditjen PB | 1.435.421.390.000 |
| 5. | Ditjen PSDKP | 1.683.504.931.000 |
| 6. | Ditjen PDSPKP | 218.791.500.000 |
| 7. | Ditjen PKRL | 1.568.147.056.000 |
| 8. | BPPSDMKP | 1.418.309.833.000 |
| 9. | BPPMHKP | 356.360.856.000 |
| **TOTAL** | | **10.023.336.496.000** |

Pagu anggaran belanja KKP dibagi ke dalam tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2024 tanggal 29 Desember 2024 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2025. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajukan usulan blokir *Automatic Adjustment* melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/MEN-SJ/RC.420/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Usulan *Automatic Adjustment* Belanja KKP TA 2025.

Selama periode semester II 2025, pagu anggaran KKP mengalami beberapa pergerakan diantaranya:

1. Penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri berasal dari JICA di Biro Umum dan PBJ sebesar Rp35.317.381.000,00;

2. Penambahan pagu anggaran di Setditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp400.000.000.000,00 untuk program Budidaya Ikan Nila Salin;

3. Penambahan pagu anggaran di Setditjen Pengelolaan dan Kelautan Ruang Laut sebesar Rp853.275.066.000,00 untuk program Ekstensifikasi dan Intensifikasi Garam;

4. Penambahan pagu Saldo awal BLU di BBPBAP Jepara sebesar Rp2.000.000.000,00 dan BPBAP Situbondo sebesar Rp3.915.000.000,00;

5. Penambahan pagu di Setditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.340.576.083.000,00 untuk program Kampung Nelayan Merah Putih;

6. Penambahan pagu saldo awal BLU di Politeknik KP Sidoarjo sebesar Rp3.515.927.000,00;

7. Penambahan pagu BLU di BPPP Tegal sebesar Rp12.443.792.000,00;

8. Penambahan pagu Pinjaman Luar Negeri di Setditjen PSDKP dari sebesar Rp900.000.000.000,00 menjadi Rp910.901.554.000,00 untuk kegiatan MFISS;

9. Penambahan pagu Pinjaman Luar Negeri di Setditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp57.500.000.000,00 berupa kegiatan *Integrated Shrimp Farming* (ISF);

10. Penambahan pagu Pinjaman Luar Negeri di Setditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp50.000.000,00 berupa kegiatan *Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase I*;

11. Penambahan pagu Rupiah Murni Pendamping di Setditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp7.500.000.000,00 berupa kegiatan *Integrated Shrimp Farming* (*ISF*);

12. Penambahan pagu PNBP di Satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3.287.502.000,00 dan Satker lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp103.145.997.000,00; dan

13. Penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri berasal dari JICA di Biro Umum dan PBJ sebesar Rp21.748.900.000,00.

Pada akhir tahun anggaran 2025, KKP memiliki anggaran yang terblokir senilai Rp752.689.894.000,00. Blokir per jenis belanja pada masing-masing Unit Eselon I sebagai berikut.

**Tabel B.2**
**Blokir Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan**
**Menurut Unit Eselon I Per Jenis Belanja TA 2025**

| No. | Unit Eselon I | Blokir Pagu Belanja Pegawai | Blokir Pagu Belanja Barang | Blokir Pagu Belanja Modal | Total Blokir Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Setjen | 0 | 51.638.963.000 | 22.560.046.000 | 74.199.009.000 |
| **2.** | Itjen | 0 | 12.000 | 2.000 | 14.000 |
| **3.** | Ditjen PT | 0 | 67.649.186.000 | 35.253.858.000 | 102.903.044.000 |
| **4.** | Ditjen PB | 0 | 70.342.828.000 | 218.036.180.000 | 288.379.008.000 |
| **5.** | Ditjen PSDKP | 0 | 14.323.360.000 | 0 | 14.323.360.000 |
| **6.** | Ditjen PDSPKP | 0 | 63.935.836.000 | 26.000.000 | 63.961.836.000 |
| **7.** | Ditjen PKRL | 0 | 136.026.351.000 | 4.902.057.000 | 140.928.408.000 |
| **8.** | BPPSDMKP | 0 | 11.455.036.000 | 6.510.961.000 | 17.965.997.000 |
| **9.** | BPPMHKP | 0 | 49.329.218.000 | 700.000.000 | 50.029.218.000 |
| **TOTAL** | | **0** | **464.700.790.000** | **287.989.104.000** | **752.689.894.000** |

Pada akhir tahun 2025, jumlah Satker yang aktif (memiliki DIPA) sejumlah 208 Satker dengan komposisi sebagai berikut.

**Tabel B.3**
**Jumlah Satker yang Memiliki DIPA**
**Menurut Unit Eselon I Per Kewenangan TA 2025**

| Unit | Kantor Daerah | Kantor Pusat | Tugas Pembantuan |
|---|---|---|---|
| **Setjen** | 1 | 2 | 0 |
| **Itjen** | 0 | 1 | 0 |
| **Ditjen PT** | 23 | 1 | 25 |
| **Ditjen PB** | 15 | 1 | 0 |
| **Ditjen PSDKP** | 14 | 1 | 0 |
| **Ditjen PDSPKP** | 1 | 1 | 34 |
| **Ditjen PKRL** | 8 | 1 | 0 |
| **BPPSDMKP** | 39 | 3 | 0 |
| **BPPMHKP** | 36 | 1 | 0 |
| **TOTAL** | **137** | **12** | **59** |

Pada periode *audited*, terdapat penambahan pagu anggaran DIPA TA 2025 yaitu revisi pengesahan pendapatan BUBK Kebumen pada Satker 445393 - BLUPPB Karawang senilai Rp16.458.457.000,00 (Revisi ke 15, tanggal 21 April 2026) dan pagu pinjaman luar negeri untuk pengesahan pembayaran proyek MFISS pada Satker 449520 - Setditjen PSDKP senilai Rp10.901.554.000,00 (Revisi 12, tanggal 26 Maret 2026).

Sehubungan dengan adanya penambahan tersebut, pagu anggaran belanja KKP TA 2026 sebesar Rp10.023.336.496.000,00. Rincian per Unit Eselon I sebagai berikut.

**Tabel B.4**
**Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan**
**Menurut Unit Eselon I Per Jenis Belanja TA 2025 (*Audited*)**

| No. | Unit Eselon I | Pagu Belanja Pegawai | Pagu Belanja Barang | Pagu Belanja Modal | Total Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Setjen | 98.249.172.000 | 390.833.121.000 | 139.232.806.000 | 628.315.099.000 |
| **2.** | Itjen | 39.229.470.000 | 10.920.802.000 | 2.000 | 50.150.274.000 |
| **3.** | Ditjen PT | 247.371.621.000 | 1.871.462.328.000 | 545.501.608.000 | 2.664.335.557.000 |
| **4.** | Ditjen PB | 195.625.149.000 | 546.046.993.000 | 693.749.248.000 | 1.435.421.390.000 |
| **5.** | Ditjen PSDKP | 216.316.162.000 | 509.026.434.000 | 958.162.335.000 | 1.683.504.931.000 |
| **6.** | Ditjen PDSPKP | 70.633.574.000 | 142.109.350.000 | 6.048.576.000 | 218.791.500.000 |
| **7.** | Ditjen PKRL | 122.762.427.000 | 766.765.946.000 | 678.618.683.000 | 1.568.147.056.000 |
| **8.** | BPPSDM KP | 862.243.475.000 | 323.793.936.000 | 232.272.422.000 | 1.418.309.833.000 |
| **9.** | BPPMHKP | 161.942.617.000 | 166.356.878.000 | 28.061.361.000 | 356.360.856.000 |
| **TOTAL** | | **2.014.373.667.000** | **4.727.315.788.000** | **3.281.647.041.000** | **10.023.336.496.000** |

Pagu anggaran belanja menurut kewenangan Satker per Jenis Belanja periode *audited* disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.5**
**Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan**
**Menurut Kewenangan Satker Per Jenis Belanja TA 2025 (*Audited*)**

| No. | Kw | Pagu Belanja Pegawai | Pagu Belanja Barang | Pagu Belanja Modal | Total Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | KD | 1.526.435.471.000 | 1.166.226.448.000 | 657.586.870.000 | 3.350.248.789.000 |
| 3. | KP | 487.938.196.000 | 3.556.136.233.000 | 2.624.060.171.000 | 6.668.134.600.000 |
| 4. | TP | 0 | 4.953.107.000 | 0 | 4.953.107.000 |
| **TOTAL** | | **2.014.373.667.000** | **4.727.315.788.000** | **3.281.647.041.000** | **10.023.336.496.000** |

## B.1 Pendapatan

### B.1.1 Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA)

*Pendapatan SDA Rp2.405.257.866.891,00*

Pada tahun 2025 Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki nilai Estimasi PNBP sebesar Rp2.891.505.212.000,00. Realisasi PNBP untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.405.257.866.891,00 atau 83,18% dari estimasi PNBP yang telah ditetapkan sebesar Rp2.891.505.212.000,00. Rincian realisasi PNBP menurut jenis pendapatan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel B.6**
**Rincian Realisasi PNBP Per Akun**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

| Nama Akun | Estimasi | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM** | **1.627.603.382.000** | **1.026.499.638.986** | **63,07** |
| **Pendapatan Perikanan** | 1.627.603.382.000 | 1.026.499.638.986 | 63,07 |
| **PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM** | **98.460.368.000** | **277.653.623.384** | **282,00** |
| **Pendapatan Jasa Layanan Umum** | 53.827.060.000 | 62.574.822.017 | 116,25 |
| **Pendapatan Hasil Kerja Sama Blu** | 1.747.250.000 | 164.426.960.757 | 9.410,61 |
| **Pendapatan Blu Lainnya** | 42.886.058.000 | 50.651.840.610 | 118,11 |
| **PENDAPATAN PNBP LAINNYA** | **1.165.441.462.000** | **1.101.104.604.521** | **94,48** |
| **Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan Bmn, Iuran Badan Usaha Dan Penerimaan Klaim Asuransi Bmn** | 49.930.538.000 | 63.943.592.812 | 128,07 |
| **Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum** | 1.036.035.119.000 | 863.935.630.797 | 83,39 |
| **Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan** | 0 | 0 | 0,00 |
| **Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, Dan Teknologi** | 4.253.427.000 | 1.082.188.371 | 25,44 |
| **Pendapatan Jasa Lainnya** | 69.615.414.000 | 93.274.920.656 | 133,99 |
| **Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, Dan Pengelolaan Keuangan** | 0 | 54.391.248 | (100,00) |
| **Pendapatan Denda** | 5.606.964.000 | 70.748.977.441 | 1.261,81 |
| **Pendapatan Lain-Lain** | 0 | 8.064.903.196 | (100,00) |
| **Total** | **2.891.505.212.000** | **2.405.257.866.891** | **83,18** |

Rincian estimasi dan realisasi PNBP pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.7**
**Rincian Realisasi PNBP Per Unit Eselon I**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

| Nama Satker | Estimasi | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Setjen | 39.320.833.000 | 43.076.505.647 | 109,55 |
| Itjen | 0 | 70.674.934 | (100,00) |
| Ditjen PT | 1.273.494.061.000 | 1.130.545.512.488 | 88,78 |
| Ditjen PB | 50.589.862.000 | 219.506.674.207 | 433,89 |
| Ditjen PSDKP | 5.606.964.000 | 69.579.902.916 | 1.240,96 |
| Ditjen PDSPKP | 7.797.053.000 | 9.649.493.873 | 123,76 |
| Ditjen PK | 1.436.919.916.000 | 866.426.973.851 | 60,30 |
| Ditjen PRL | 0 | 0 | 0,00 |
| BPPSDMKP | 38.853.240.000 | 50.136.939.163 | 129,04 |
| BPPMHKP | 38.923.283.000 | 16.265.189.812 | 41,79 |
| **Total** | **2.891.505.212.000** | **2.405.257.866.891** | **83,18** |

### Realisasi Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Tahun Berjalan terhadap Realisasi Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Tahun Lalu (*Year on Year*)

Rincian perbandingan realisasi PNBP per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.8**
**Rincian Realisasi PNBP Per Akun**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM** | **1.026.499.638.986** | **951.819.466.723** | **74.680.172.263** | **7,85** |
| **Pendapatan Perikanan** | 1.026.499.638.986 | 951.819.466.723 | 74.680.172.263 | 7,85 |
| **PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM** | **277.653.623.384** | **182.656.387.734** | **94.997.235.650** | **52,01** |
| **Pendapatan Jasa Layanan Umum** | 62.574.822.017 | 55.032.771.602 | 7.542.050.415 | 13,70 |
| **Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU** | 164.426.960.757 | 70.992.576.247 | 93.434.384.510 | 131,61 |
| **Pendapatan BLU Lainnya** | 50.651.840.610 | 56.631.039.885 | (5.979.199.275) | (10,56) |
| **PENDAPATAN PNBP LAINNYA** | **1.101.104.604.521** | **1.073.849.165.581** | **27.255.438.940** | **2,54** |
| **Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN** | 63.943.592.812 | 64.754.057.946 | (810.465.134) | (1,25) |
| **Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum** | 863.935.630.797 | 868.465.662.961 | (4.530.032.164) | (0,52) |

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan** | 0 | 38.700.000 | (38.700.000) | -100,00 |
| **Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi** | 1.082.188.371 | 4.964.310.500 | (3.882.122.129) | (78,20) |
| **Pendapatan Jasa Lainnya** | 93.274.920.656 | 99.644.150.219 | (6.369.229.563) | (6,39) |
| **Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan** | 54.391.248 | 175.159.746 | (120.768.498) | (68,95) |
| **Pendapatan Denda** | 70.748.977.441 | 25.095.541.265 | 45.653.436.176 | 181,92 |
| **Pendapatan Lain-Lain** | 8.064.903.196 | 10.711.582.944 | (2.646.679.748) | (24,71) |
| **Total** | **2.405.257.866.891** | **2.208.325.020.038** | **196.932.846.853** | **8,92** |

Pendapatan Sumber Daya Alam Kementerian Kelautan dan Perikanan diperoleh dari Pendapatan Perikanan.

### Pendapatan Perikanan

*Pendapatan Perikanan Rp1.026.499.638.986,00*

Pendapatan Perikanan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.026.499.638.986,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp1.627.603.382.000,00 atau 63,07%. Realisasi Pendapatan Perikanan tanggal 31 Desember tahun 2024 adalah sebesar Rp951.819.466.723,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Perikanan per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.9**
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Perikanan Per Akun**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| **Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap** | 25.726 | 31.172 | 121,17 | 58.359 | 41.585 | 71,26 | (10.413) | (25,04) |
| **Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan** | 53 | 112 | 211,32 | 65 | 154 | 236,92 | (42) | (27,27) |
| **Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan** | 1.174.700 | 995.216 | 84,72 | 3.441.576 | 910.081 | 26,44 | 85.135 | 9,35 |

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| Pendapatan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut | 427.125 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Total** | **1.627.604** | **1.026.500** | **63,07** | **3.500.000** | **951.820** | **27,19** | **74.680** | **7,85** |

Realisasi Pendapatan Perikanan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp74.680.172.263,00 atau 7,85% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

Pendapatan Perikanan dihasilkan dari Ditjen Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang merupakan pendapatan terkait:

1. Pendapatan pungutan hasil perikanan sebesar Rp995.215.665.986,00. dari Estimasi sebesar Rp1.174.699.729.000,00;

2. Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan sebesar Rp31.283.973.000,00 dari Estimasi sebesar Rp25.778.653.000,00 yang terdiri dari:

    a. Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap sebesar Rp31.172.208.000,00 dari Estimasi Rp25.725.748.000,00.

    b. Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan sebesar Rp111.765.000,00 dari Estimasi sebesar Rp52.905.000,00.

3. Pendapatan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut sebesar Rp0,00 dari Estimasi sebesar Rp427.125.000.000,00.

Realisasi Pendapatan Perikanan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.026.499.638.986,00 dimana mengalami kenaikan sebesar Rp74.680.172.263,00 atau 7,85% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp951.819.466.723,00.

Pendapatan SDA Perikanan merupakan pendapatan yang diperoleh Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, namun atas pendapatan pemanfaatan

hasil sedimentasi yang diperoleh Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan sampai saat ini belum ada realisasinya dikarenakan izin atas Persetujuan Lingkungan (KLH) masih dalam proses sehingga izin atas pemanfaatan hasil sedimentasi belum dapat dikeluarkan dan secara otomatis pendapatan pemanfaatan hasil sedimentasi belum dapat dilakukan, namun memiliki potensi yang besar.

Pendapatan perikanan sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat kenaikan jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2024 yaitu sebesar Rp74.680.172.263,00. Kenaikan tersebut ada pada Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan Tangkap dimana adanya kenaikan produksi hasil tangkapan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan Perikanan yang dihasilkan dari Ditjen Perikanan Tangkap, yaitu:

1. Pendapatan pungutan pengusahaan perikanan bidang perikanan tangkap sebesar Rp31.172.208.000,00, Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Bidang Perikanan Tangkap (421521) merupakan pendapatan dari:

   - Penerbitan surat izin usaha Perikanan (SIUP) Penangkapan Ikan
   - Penerbitan SIUP pengangkutan ikan
   - Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

   Dapat dijelaskan sesuai batas ukuran kapal, yang dibagi atas:

   a. 5 s.d. 60 GT atas Pungutan Pengusahaan Perikanan Kapal Angkut Reguler sebesar Rp919.800.000,00 terdiri dari Kapal Pengangkut Ikan antar Pelabuhan Pangkalan, Kapal Pengangkut Ikan dari Daerah Penangkapan Ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan Kapal Pengangkut Ikan Segar/Beku ke Negara Tujuan;

   b. 60 s.d. 1.000 GT atas Pungutan Pengusahaan Perikanan Kapal Angkut Reguler sebesar Rp11.897.000.000,00 terdiri dari Kapal pengangkut Ikan antar Pelabuhan Pangkalan, Kapal Pengangkut Ikan dari Daerah Penangkapan Ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), Kapal Pengangkut Ikan di Laut Lepas, Kapal Pemgangkut Ikan Segar/Beku ke Negara Tujuan, dan Kapal Pengangkut Ikan Sewa untuk Ikan Hidup dari *Check Point* Ke Negara Tujuan (Berbendera Asing);

c. Diatas 1.000 GT atas Pungutan Pengusahaan Perikanan Kapal Angkut Reguler sebesar Rp691.400.000,00 berupa Kapal Pengangkut Ikan Sewa untuk Ikan Segar/Beku ke Negara Tujuan (Berbendera Asing);

d. Pungutan Pengusahaan Perikanan Reguler berupa Surat Ijin Usaha Perikanan sebesar Rp17.592.008.000,00;

e. Pungutan atas Surat Ijin Penempatan Rumpon sebesar Rp72.000.000,00.

2. Pendapatan pungutan pengusahaan perikanan bidang pembudidayaan ikan sebesar Rp111.765.000,00, Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Bidang Pembudidayaan Ikan (421522) merupakan pendapatan dari Penerbitan SIKPI untuk ikan hidup/budidaya

   Dapat dijelaskan sesuai batas ukuran kapal, yang dibagi atas:

   a. 5 s.d. 60 GT atas Pungutan Pengusahaan Perikanan Kapal Angkut Reguler sebesar Rp27.375.000,00 terdiri dari Kapal Pengangkut Ikan Hidup Antar Tempat Pembudidayaan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari Tempat Pembudidayaan/Pelabuhan Check Point Ke Negara Tujuan Eksport.

   b. 60 s.d. 1.000 GT atas Pungutan Pengusahaan Perikanan Kapal Angkut Reguler sebesar Rp57.390.000,00 terdiri dari Kapal Pengangkut Ikan Hidup Antar Tempat Pembudidayaan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari Tempat Pembudidayaan/Pelabuhan Check Point Ke Negara Tujuan Eksport.

   c. Pungutan Pengusahaan Perikanan Reguler berupa Surat Ijin Usaha Perikanan sebesar Rp27.000.000,00.

3. Pendapatan pungutan hasil perikanan sebesar Rp995.215.665.986,00, Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan/ PHP (421531) merupakan pendapatan yang didapat dari ikan hasil tangkapan dan dikenakan tarif setiap kali pendaratan ikan, berdasarkan batas ukuran kapal dan alat tangkapannya sesuai tarif dengan PP 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

   Dapat dijelaskan sesuai batas ukuran kapal dan alat tangkap, yang dibagi atas :

a. Pungutan hasil perikanan 5 s.d. 60 GT sebesar Rp232.770.541.493,00 terdiri dari:

- Bagan Berperahu Teri atau Bagan Apung Teri
- Bouke Ami
- Bubu
- Huhate
- Jala Jatuh Berkapal
- Jaring Hela Ikan Berkantong
- Jaring Insang Hanyut
- Jaring Insang Tetap
- Jaring Tarik Berkantong
- Pancing Cumi
- Pancing Ulur
- Pancing Ulur Tuna
- Pengangkut
- Pukat Cincin Pelagis Besar dengan Satu Kapal
- Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan Satu Kapal
- Rawai Dasar
- Rawai Tuna

b. Pungutan hasil perikanan pasca 60 s.d. 1.000 GT sebesar Rp762.445.124.493,00 terdiri dari:

- Bouke Ami
- Huhate
- Jala Jatuh Berkapal

- Jaring Hela Ikan Berkantong
- Jaring Hela Udang Berkantong
- Jaring Insang Hanyut
- Jaring Insang Tetap
- Jaring Tarik Berkantong
- Jaring Tarik Berkantong (Freezer)
- Pancing Berjoran
- Pancing Cumi
- Pancing Ulur
- Pancing Ulur Tuna
- Pengangkut
- Pukat Cincin Pelagis Besar dengan Satu Kapal
- Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan Satu Kapal
- Pukat Cincin Teri dengan Satu Kapal
- Pukat Labuh
- Rawai Dasar
- Rawai Tuna

### B.1.2 Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum, Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU, dan Pendapatan BLU Lainnya. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

#### Pendapatan Jasa Layanan Umum

*Pendapatan Jasa Layanan Umum Rp62.574.822,017,00*

Pendapatan jasa layanan umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp62.574.822.017,00 dan sebesar Rp55.032.771.602,00. Rincian estimasi dan realisasi pendapatan jasa layanan umum pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.10**
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| **Setjen** | 30.885 | 30.593 | 99,05 | 30.000 | 32.376 | 107,92 | (1.783) | (5,51) |
| **Ditjen PB** | 1.308 | 1.288 | 98,47 | 991 | 1.362 | 137,44 | (74) | (5,43) |
| **BPPSDMKP** | 21.634 | 30.694 | 141,88 | 18.903 | 21.294 | 112,65 | 9.400 | 44,14 |
| **Total** | **53.827** | **62.575** | **116,25** | **49.894** | **55.032** | **110,30** | **7.543** | **13,71** |

Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp62.574.822.017,00 atau sebesar 116,25% dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp53.827.060.000,00.

Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, mengalami kenaikan sebesar Rp7.542.050.415,00 atau 13,70%.

Penjelasan atas Pendapatan Jasa Layanan Umum pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp30.593.136.403,00 atau mencapai 99,06% dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp30.884.979.000,00. Tidak ada pengembalian pada Pendapatan Jasa Layanan Umum ini sehingga nilai realisasi bersih sama dengan nilai realisasi brutonya. Pendapatan Jasa Layaan Umum ini merupakan pendapatan pada satker Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP), yang merupakan imbalan atas jaya layanan dana bergulir dari BLU LPMUKP yang disalurkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan dan lembaga keuangan mikro. Rincian dari pendapatan jasa layanan umum sebagai berikut:

   a. Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral (424134) adalah Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan programdana bergulir sektoral berupa angsuran jasa layanan.Realisasi Pendapatan

Program Dana Bergulir Sektoral pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp28.119.224.150,00. Terdapat pada Rekening Operasional Penerimaan BRI sebesar Rp18.642.160.510,00 dan Rekening Operasional Penerimaan BNI sebesar Rp9.477.063.640,00.

b. Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya (424139) adalah Pendapatan provisi BLU dari pencairan Dana Bergulir selama tahun 2025. Realisasi Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.473.912.253,00. Terdapat pada Rekening Operasional Penerimaan BRI sebesar Rp1.333.951.171,00 dan Rekening Operasional Penerimaan BNI sebesar Rp1.139.961.082,00.

2. Ditjen Perikanan Budi Daya

Merupakan pendapatan dari BLU yang terdiri dari:

a. Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi (424113) berupa pendapatan dari kegiatan magang/ PKL/penelitian Mahasiswa/Siswa, dan pelatihan Bimbingan Teknis Perikanan Budidaya, pendapatan kegiatan kunjungan Mahasiswa/Siswa, pendapatan kegiatan penelitian, pendapatan kegiatan konsultasi teknis, dan pendapatan kegiatan koasistensi pada BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo dan BLUPPB Karawang sebesar Rp582.270.000,00.

b. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya (424119) berupa berupa layanan pengujian sampel laboratorium kesling, pendapatan pengujian sampel laboratorium nutrisi dan pendapatan pengujian sampel laboratorium nutrisi dan pendapatan pengujian sampel laboratorium pakan alami yang bersifat jasa layanan pada pada BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo dan BLUPPB Karawang sebesar Rp705.655.500,00, terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp3.750.000,00 dari 424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya dari Satker 239192/03204 dari Koreksi pengesahan pendapatan BLU dikarenakan kesalahan kode akun pada saat input SBS 868/SBS/239192/2025. Pengesahan pendapatan ke XIV pada SPM 259 tgl. 11 November 2025. Koreksi pendapatan BLU karena kesalahan input semula 424119 menjadi 424919 (pendapatan Benih Ikan Nila Salin).

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Merupakan pendapatan dari BLU yang terdiri dari:

a. Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (424112) sebesar Rp28.448.091.696,00 berupa:

   - Pendapatan yang berasal dari biaya pendidikan untuk taruna jalur mandiri, jalur umum dan untuk taruna jalur khusus, biaya pendaftaran penerimaan taruna baru, biaya seleksi penerimaan taruna baru, permakanan taruna, biaya sewa asrama, biaya pelatihan dan biaya wisuda taruna pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo sebesar Rp10.921.125.096,00.

   - Pendapatan biaya diklat BST, diklat BSTF, diklat Revalidasi BST, diklat upgrading SKK AN/ATKAPIN III, Ujian Upgrading SKKAN/ATKAPIN pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal sebesar Rp17.526.966.600,00.

b. Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi (424113) berupa pendapatan yang berasal dari jasa narasumber/ pelatihan yang dilakukan oleh pegawai/ dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo sebesar Rp748.500,00.

c. Pendapatan Jasa Pencetakan (424114) berupa merupakan jasa perbaikan sertifikat pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal sebesar Rp3.750.000,00.

d. Pendapatan Penyediaan Barang (424118) berupa:

   - Pendapatan yang berasal dari penjualan hasil budidaya ikan dan penjualan produk hasil pengolahan pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo sebesar Rp316.645.038,00.

   - Merupakan penyediaan jada paket catering, penjualan budidaya perikanan dan penjualan produk pengolahan pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal sebesar Rp1.159.093.870,00.

e. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya (424119) berupa:

   - Merupakan pendapatan yang berasal dari paket kunjungan edukatif (kegiatan outdoor learning untuk siswa TK/SD/SMP) dan pendapatan dari tiket masuk pemancingan pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo sebesar Rp476.741.010,00.

- Merupakan jasa pelayanan untuk surat keterangan sehat pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal sebesar Rp227.550.000,00.

f. Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah (424123) berupa pendapatan dari karcis masuk pulau cemara, SFV babakan dan sewa kayak pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal sebesar Rp61.140.000,00.

### Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU

*Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU Rp164.426.960.757,00*

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp164.426.960.757,00 dan sebesar Rp70.992.576.247,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.11**
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| **Ditjen PB** | 0 | 158.829 | (100,00) | 0 | 66.073 | (100,00) | 92.756 | 140,38 |
| **BPPSDMKP** | 1.747 | 5.598 | 320,44 | 0 | 4.919 | (100,00) | 679 | 13,80 |
| **Total** | **1.747** | **164.427** | **9.411,96** | **0** | **70.992** | **(100,00)** | **93.435** | **131,61** |

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp93.434.385,00 atau 131,61% dari realisasi tahun lalu. Pendapatan ini diantaranya:

1. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha (424312) pada:

   a. Ditjen Perikanan Budidaya

      Pada BPBAP Situbondo sebesar Rp158.828.863.000,00 berupa layanan *joint venture* untuk ekspor BBL dan dihentikan dari bulan September 2025 karena kebijakan yang ada.

   b. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

1) Pada BP3 tegal sebesar Rp5.027.752.757,00 dari:

- Pendapatan kerja sama dari sewa kapal Bawal Putih III oleh PT EOS Consultans senilai Rp834.000.000,00.
- Pendapatan dari kerjasama antara BPPP Tegal dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) senilai Rp2.189.000.000,00 untuk kegiatanproyek percontohan untuk peningkatan operasional efisiensi perikanan Bagan Saumlaki. Dimana proyek percontohan tsb bertujuan untuk mempromosikan pembangunan perikanan berkelanjutan di pulau-pulau terluar Indonesia.
- Pendapatan dari pemanfaatan aset peralatan riset kelautan dan perikanan oleh CV. Hidrooseano Indonesia Instrumentama senilai Rp37.250.000,00.
- Pendapatan dari kompensasi tetap Aquarium Indonesia senilai Rp96.230.306.
- Pendapatan dari sewa ATM Bank Tabungan Negara sejumlah Rp10.032.000 untuk periode Bulan Juli 2025 s.d Juli 2026;
- Pendapatan dari kerjasama antara BPPP Tegal dengan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal senilai Rp28.542.000 untuk kegiatan ujian ANKAPIN/ATKAPIN II;
- Pendapatan dari Sewa ruangan senilai Rp11.500.000 oleh Dharma Wanita BPPP Tegal;
- Pendapatan kerja sama antara Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp1.821.198.451 berasal dari pelaksanaan kegiatan paket pengadaan survei sosial ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana pada lokasi Kampung Nelayan Modern Tahun Anggaran 2025.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Pengadaan Survei Sosial Ekonomi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana di Lokasi KNMP Tahun Anggaran 2025 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,

diketahui terdapat kelebihan pembayaran kepada BPPP Tegal sebesar Rp617.741.032.

- Atas kelebihan pembayaran tersebut, BPPP Tegal akan melakukan penyetoran kembali ke Kas Negara pada Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Poltek KP Sidoarjo sebesar Rp250.000.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan UNIDO terkait kegiatan pengembangan kurikulum satuan pendidikan KKP (Termin II dan Termin III), untuk pembayaran Termin IV senilai Rp150.000.000,00 s.d akhir TA 2025 belum dibayarkan karena masih dalam proses review. Sehingga ada pendapatan yang masih harus diterima TA 2025 yang berasal dari kerjasama lembaga/ badan usaha senilai Rp150.000.000,00. Adapun rincian pendapatan hasil kerjasama lembaga/ badan usaha TA 2025.

2. Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan pada:

1) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal sebesar Rp84.263.000,00 merupakan Pendapatan dari kerjasama antara BPPP Tegal dengan Pemerintah Daerah BPPP Semarang dan DKP Bekasi;

2) Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo sebesar Rp236.082.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Paser terkait kegiatan pelatihan mekanisasi bagi pelaku perikanan Kabupaten Paser.

### Pendapatan BLU Lainnya

*Pendapatan BLU Lainnya Rp34.193.310.747,00*

Pendapatan BLU Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp34.193.310.747,00 dan sebesar Rp56.631.039.885,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan BLU Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.12**
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU Lainnya**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| **Setjen** | 7.822 | 8.857 | 113,23 | 11.739 | 28.433 | 242,21 | (19.576) | (68,85) |
| **Ditjen PB** | 33.842 | 39.152 | 115,69 | 36.294 | 24.938 | 68,71 | 14.214 | 57,00 |
| **BPPSDMKP** | 1.222 | 2.643 | 216,28 | 2.279 | 3.261 | 143,09 | (618) | (18,95) |
| **Total** | **42.886** | **50.652** | **118,11** | **50.312** | **56.632** | **112,56** | **(5.980)** | **(10,56)** |

Realisasi Pendapatan BLU Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.864.725.224,00 atau 9,40% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 202 yang secara umum disebabkan adanya kenaikan pada Pendapatan Lain-lain BLU diantaranya sewa tanah, gedung, dan hasil produksi pakan mandiri.

Penjelasan atas Pendapatan BLU Lainnya pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Realisasi bersih Pendapatan BLU Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.857.128.719,00 atau mencapai 113,23% dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp7.822.328.000,00. Terdapat pengembalian pada Pendapatan BLU Lainnya sebesar Rp31.876,00 dari pengembalian kelebihan jasa giro dimana nilai realisasi bersih tidak sama dengan nilai realisasi brutonya yaitu sebesar Rp8.857.160.595,00. Realisasi Pendapatan BLU Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 bersumber dari:

   a. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (424911) adalah pendapatan jasa giro dan layanan perbankan yang diterima oleh Badan Layanan Umum, terdapat dari dua (2) sumber Pendapatan yaitu Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Deposito. Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.836.211.059,00 terdapat pada Rekening Operasional Penerimaan BRI dan Rekening Operasional Penerimaan BNI. Berikut rinciannya:

1) Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang bersumber dari Jasa Giro sebesar Rp1.121.008.739,00 terdapat pada Rekening Operasional Penerimaan BRI sebesar Rp738.466.116,00 dan Rekening Operasional Penerimaan BNI sebesar Rp382.542.623,00.

2) Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang bersumber dari Deposito sebesar Rp7.715.202.320,00 terdapat pada Rekening Operasional Penerimaan BRI sebesar Rp7.453.626.978,00 dan Rekening Operasional Penerimaan BNI sebesar Rp261.575.342,00.

b. Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu (424915) Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.780.175,00 merupakan realisasi pengembalian belanja barang atas biaya perjalanan dinas tahun anggaran yang lalu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

c. Pendapatan Lain-lain BLU (424919) Realisasi Pendapatan Lain-lain BLU per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.137.485,00 merupakan realisasi pengesahan pendapatan atas transaksi kelebihan pelunasan pembayaran debitur tahun anggaran 2024 sebesar Rp657.615,00 dan transaksi dalam konfirmasi sebesar Rp479.870,00. Kelebihan pelunasan pembayaran debitur dan transaksi dalam konfirmasi tersebut sudah dilakukan pengembalian dana kepada debitur bersangkutan, namun rekening sudah tidak aktif. Sehingga atas kelebihan pelunasan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan lain-lain BLU berdasarkan surat keterangan KPA nomor B.001/KET/LPMUKP.4/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

2. Ditjen Perikanan Budi Daya

Sebesar Rp39.151.532.221,00 antara lain merupakan pendapatan dari BLU yaitu:

a. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara sebesar Rp4.596.237.817,00 berupa penjualan hasil perikanan sewa gedung atas kerjasama tambak mauk dan sewa lahan, sewa asrama baik non ac maupun ac untuk mahasiswa dan umum, ruang kelas ac, ruang pertemuan/aula, sewa peralatan dan mesin pakan dan mesin *excavator*;

b. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo sebesar Rp8.979.070.745,00 berupa Pendapatan Penjualan Hasil Perikanan dan Penjualan Hasil Produksi Pakan Mandiri, Pendapatan Sewa Asrama dan Guest House untuk kegiatan Magang/ PKL, dan Pendapatan Jasa Layanan dari Bank Syariah Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.

c. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPB) Karawang sebesar Rp25.576.223.659,00 berupa pendapatan Penjualan Hasil Perikanan dan Penjualan Hasil Produksi Pakan Mandiri, pendapatan jasa giro deposito, sewa gedung atas kerjasama tambak dan Pendapatan Sewa Asrama dan Guest House untuk kegiatan Magang/PKL, dan pembayaran kerjasama BINS.

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Realisasi bersih Pendapatan BLU Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.643.179.670,00 atau mencapai 216,28% dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp1.221.540.000,00.

Antara lain merupakan pendapatan dari:

a. Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo berupa pendapatan jasa layanan perbankan yang berasal dari bunga bank atas rekening BLU, Pendapatan yang berasal dari uji coba mesin EDC/QRIS, pendapatan yang berasal dari sewa dapur, sewa gedung Tefa Modern, sewa gedung pemasaran/pertokoan, sewa gedung kantin dan sewa ruang laboratorium Pendidikan serta pendapatan yang berasal dari sewa vacum sealer dan mikroskop.

b. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal berupa pendapatan dari sewa atm Bank Tabungan Negara, pendapatan dari sewa ruangan oleh Dharma Wanita BPPP Tegal, pendapatan jasa perbankan BLU berupa bunga bank dari rekening BLU, penerimaan Kembali belanja modal BLU Tahun Anggaran yang Lalu berupa pembayaran atas kekurangan volume dan denda penyelesaian pekerjaan pembangunan asrama bahasi resident, Pendapatan lain-lain BLU merupakan pendapatan dari pelayanan pembuatan buku pelaut, pelayanan perpanjangan buku pelaut, penjualan hasil pengolahan dan penjualan dari mall ikan (budidaya), Pendapatan BLU lainnya dari sewa gedung merupakan pendapatan sewa asrama Bahari Residence, Hotel Aquarium Indonesia, Pendapatan BLU

lainnya dari sewa ruangan merupakan pendapatan sewa ruang kelas, sewa auditorium dan *workshop firefighting*, Pendapatan BLU lainnya dari sewa peralatan dan mesin merupakan pendapatan sewa kursi auditorium, sewa tambahan *extra bed*, Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan merupakan hasil lelang gedung Asrama, pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan mesin BLU merupakan hasiil lelang peralatan dan mesin Ex-Departemen Pertanian.

Terdapat pendapatan barang kurang saji (*understated*) dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 senilai Rp667.749.341,00 pada BLU BBPBAP Jepara. Rincian pendapatan kurang saji pada BBPBAP Jepara terdiri dari:

1. Pendapatan kerja sama dari Bhumi Jati Power sebesar Rp307.281.480,00;
2. Kerja sama Tambak Mauk sebesar Rp283.461.105,00;
3. Pendapatan kerja sama dari YAKN sebesar Rp3.871.856,00;
4. Pendapatan kerja sama dari Petrokimia sebesar Rp62.390.000,00;
5. Pendapatan dari BPKAD sebesar Rp10.740.700,00; dan
6. Lebih transfer Dinas Koperasi Jepara sebesar Rp4.200,00.

### B.1.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya terdiri atas Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum, Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan, Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi, Pendapatan Jasa Lainnya, Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Denda, dan Pendapatan Lain-Lain.

Perbandingan rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.13**
**Perbandingan Rincian PNBP Lainnya**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| **Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN** | 49.931 | 63.944 | 128,06 | 48.945 | 64.754 | 132,30 | (810) | (1,25) |
| **Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum** | 1.036.035 | 863.936 | 83,39 | 744.092 | 868.466 | 116,71 | (4.530) | (0,52) |
| **Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan** | 0 | 0 | 0,00 | 2.167 | 39 | 1,80 | (39) | (100,00) |
| **Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi** | 4.253 | 1.082 | 25,44 | 4.992 | 4.964 | 99,44 | (3.882) | (78,20) |
| **Pendapatan Jasa Lainnya** | 69.615 | 93.275 | 133,99 | 72.132 | 99.644 | 138,14 | (6.369) | (6,39) |
| **Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan** | 0 | 54 | (100,00) | 0 | 175 | (100,00) | (121) | (69,14) |
| **Pendapatan Denda** | 5.607 | 70.749 | 1.261,80 | 6.999 | 25.096 | 358,57 | 45.653 | 181,91 |
| **Pendapatan Lain-Lain** | 0 | 8.065 | (100,00) | 0 | 10.712 | (100,00) | (2.647) | (24,71) |
| **Total** | **1.165.441** | **1.101.105** | **94,48** | **879.327** | **1.073.850** | **122,12** | **27.255** | **2,54** |

## Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN

*Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN Rp63.943.592.812,00*

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp63.943.592.812,00 dan sebesar Rp64.754.057.946,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.14**
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha and Penerimaan Klaim Asuransi BMN Per Akun**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya | 19.946 | 11.737 | 58,84 | 18.939 | 21.042 | 111,10 | (9.305) | (44,22) |
| Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya | 340 | 75 | 22,06 | 722 | 613 | 84,90 | (538) | (87,77) |
| Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan | 0 | 222 | (100,00) | 0 | 101 | (100,00) | 121 | 119,80 |
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | 85 | 7.433 | 8.744,71 | 100 | 6.862 | 6.862,00 | 571 | 8,32 |
| Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya | 0 | 128 | (100,00) | 0 | 163 | (100,00) | (35) | (21,47) |
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 7.805 | 25.365 | 324,98 | 4.745 | 7.789 | 164,15 | 17.576 | 225,65 |
| Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin | 361 | 760 | 210,53 | 711 | 1.783 | 250,77 | (1.023) | (57,38) |
| Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0 | 40 | (100,00) | 0 | 0 | 0,00 | 40 | 0,00 |
| Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan | 2.559 | 0 | 0,00 | 2.381 | 1.190 | 49,98 | (1.190) | (100,00) |
| Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya | 0 | 15 | (100,00) | 0 | 12 | (100,00) | 3 | 25,00 |
| Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi | 18.834 | 17.921 | 95,15 | 21.347 | 25.198 | 118,04 | (7.277) | (28,88) |
| Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN | 0 | 248 | (100,00) | 0 | 0 | 0,00 | 248 | 0,00 |
| **Total** | **49.930** | **63.944** | **128,07** | **48.945** | **64.753** | **132,30** | **(809)** | **(1,25)** |

**Tabel B.15**
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN Pada Masing-Masing Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| **Setjen** | 577 | 1.019 | 176,60 | 1.239 | 1.629 | 131,48 | (610) | (37,45) |
| **Itjen** | 0 | 66 | (100,00) | 0 | 0 | 0,00 | 66 | 0,00 |
| **Ditjen PT** | 16.119 | 30.479 | 189,09 | 12.586 | 19.203 | 152,57 | 11.276 | 58,72 |
| **Ditjen PB** | 13.144 | 13.483 | 102,58 | 12.853 | 16.943 | 131,82 | (3.460) | (20,42) |
| **Ditjen PSDKP** | 0 | 575 | (100,00) | 0 | 371 | (100,00) | 204 | 54,99 |
| **Ditjen PDSPKP** | 7.536 | 9.221 | 122,36 | 7.397 | 8.627 | 116,63 | 594 | 6,89 |
| **Ditjen PK** | 2.559 | 474 | 18,52 | 2.381 | 1.663 | 69,84 | (1.189) | (71,50) |
| **BPPSDMKP** | 9.996 | 7.636 | 76,39 | 9.361 | 14.380 | 153,62 | (6.744) | (46,90) |
| **BPPMHKP** | 0 | 991 | (100,00) | 3.128 | 1.937 | 61,92 | (946) | (48,84) |
| **Total** | **49.931** | **63.944** | **128,06** | **48.945** | **64.753** | **132,30** | **(809)** | **(1,25)** |

Realisasi Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp810.465.134,00 atau 1,25% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 yang secara umum disebabkan oleh penurunan pendapatan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi pada Ditjen Perikanan Tangkap dan penurunan pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Penjelasan atas pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha dan penerimaan klaim asuransi BMN pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Realisasi Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.018.600.586,00 dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp576.501.000,00. Pendapatan ini terdiri dari:

   a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) di Satker Biro Umum sebesar Rp110.202.000,00. Dan di Satker Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya KP sebesar Rp2.029.000,00 berupa penjualan lelang peralatan dan mesin.

b. Pendapatam dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (421129) di Biro Umum sebesar Rp14.140.000,00.

c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) di Satker Biro Umum sebesar Rp677.259.616,00 antara lain berupa sewa gedung bangunan di kantor pusat oleh IBS dan Telkom untuk beberapa tahun ke depan, sewa Ballroom di GMB III, pembayaran sewa lahan parkir oleh kelompok Wredatama KKP (PWKP) dan sewa kamar dan ruang rapat wisma glacilaria dan pada Satker Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp4.080.915,00 berupa pembayaran atas sewa sebagian bangunan kepada Koperasi Konsumen Prabu Jaya untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun secara periodesitas tahunan dengan nilai sewa sebesar Rp4.080.915,00 (empat juta delapan puluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah) per tahun. Berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-115/MK/KNL.1402/2025 perihal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa Tanah Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan sehubungan dengan Surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1222/SJ/PL.720/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 hal Permohonan Persetujuan Sewa Barang Milik Negara pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Sewa Barang Milik Negara pada Balai Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berupa sebagian Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen seluas 94$m^2$ yang terletak di Jalan Seacorm Km 2, Jembrana, Kab. Jembrana, Bali.

d. Pendapatan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151) pada Satker Biro Umum sebesar Rp471.584 dan pada Satker Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya KP sebesar Rp14.719.010,00 merupakan sewa rumah dinas pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibayar melalui potongan SPM Gaji Induk.

e. Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN di Satker Biro Umum sebesar Rp247.538.461,00 yang merupakan pendapatan *no claim bonus no renewal* atas Asuransi BMN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 s.d. 2023 yang tidak terdapat pembayaran klaim asuransi pada periode Asuransi tersebut. Nilai pendapatan atas *no claim bonus no renewal* sebesar 5% dari total premi Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

Realisasi Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp30.479.141.614,00 dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp16.118.856.000,00. Pendapatan ini terdiri dari:

a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.317.157.636,00 berupa lelang kendaraan roda dua dan roda empat, peralatan dan mesin yang rusak berat, pada satker:

- Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
- Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
- Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
- Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
- Balai Besar Penangkapan Ikan
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
- Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat

b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp39.364.064,00 merupakan lelang peralatan dan mesin yang rusak berat, inventaris dan mesin bekas perkantoran, bongkaran tempat

ibadah dan paket bingkaran yang terdiri dari ACP, Spandek Atap yang ada pada:

- Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman
- Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan
- Pelabuhan Perikanan Njsantara Pelabuhan Ratu

c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp18.145.445.105,00 merupakan pendapatan yang berasal dari sewa rumah dinas dan sewa aset yang berasal dari Properti Investasi atau aset lainnya sesuai dengan ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang ada pada:

- Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
- Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
- Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
- Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

- Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
- Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu

d. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp100.105.550,00 merupakan sewa atas *cold storage* dan genset yang ada pada:

- Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang merupakan pendataan pada sewa di SKPT Natuna.
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu

e. Pendapatan Sewa, Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp39.547.522,00 merupakan sewa atas jaringan stasiun pengisian bahan bakar solar pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

f. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI sebesar Rp9.837.521.737,00 berupa penggunaan tanah, pemakaian bangunan dan ruangan untuk aktivitas penjualan ikan, pengadaan es, freezer, cold storage, cold room, tangki BBM & tangki air, peralatan PPI, API, ABPI, penggunaan peralatan pelabuhan, penggunaan kapal dan penggunaan kendaraan dan rumah dinas, guest house dan sewa ruang pertemuan yang terdapat pada:

- Balai Besar Penangkapan Ikan
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang

- Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
- Pelabuhan Perikanan Nusantar Pengambengan
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
- Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
- Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
- Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
- Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
- Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

Realisasi Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp13.482.860.896,00 dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp13.143.729.000,00. Pendapatan ini terdiri dari:

a. Penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya sebesar Rp9.090.940.733,00 berupa penjualan hasil samping ikan budidaya dari benih, calon induk, induk dan ikan konsumsi yang terdapat pada seluruh satuan kerja Ditjen Perikanan Budi Daya kecuali BPKIL Serang,

b. Pendapatan atas penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp916.626.100,00 merupakan lelang atas penghapusan BMN yang terdapat pada:

- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
- Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
- Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya
- Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
- Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
- Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
- Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
- Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem
- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
- Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang

c. Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar Rp1.760.616.989,00 berupa Sewa *Hatcehry* dan masuk dalam Properti Investasi di UPT Serang LP2IL Serang.

d. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi sebesar Rp1.714.677.074,00 berupa sewa asrama/mess, ruang rapat dan pertemuan serta Rumah Dinas pada:

- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
- Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam
- Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
- Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
- Sekretariat Direktorat Perikanan Budidaya
- Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara

- Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
- Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
- Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
- Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karang asem
- Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
- Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Takalar
- Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
- Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang

4. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

   Realisasi Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp575.102.898,00 dimana tidak ada estimasi yang ditetapkan pendapatan ini terdiri dari:

   a. Pendapatan penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp521.343.889,00 yang merupakan Lelang Satu Paket BMN atas Kendaraan, Peralatan Perkantoran, Speed Boat, Inventaris Kantor, Bongkaran Kapal Paus 1 dan Bongkaran Replating Kapal Orcha 4 yang ada pada:

      1) Stasiun PSDKP Tahuna mencatat penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp2.429.567,00 yang berasal dari Risalah Lelang Nomor 04/16.01/2025-01 tanggal 9 Januari 2025 merupakan 1 (satu) paket inventaris kantor berupa Rol Meter, Mesin Ketik Elektronik, Rak Kayu, Papan Visual, Mesin Antrian, Terlaris dan lain-lain.

      2) Stasiun PSDKP Ambon mencatat penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp6.060.000,00 yang berasal dari Risalah Lelang Nomor

      3) Pangkalan PSDKP Benoa mencatat penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp36.351.247,00 merupakan:

         - Penjualan peralatan dan mesin senilai Rp18.333.000,00 yang berasal dari Risalah Lelang Nomor 24/14.01/2025-01 tanggal

16 Januari 2025 merupakan 1 (satu) unit mesin dalam kondisi rusak berat, telah disetor tanggal 21 Januari 2025.

- Penjualan peralatan dan mesin senilai Rp2.638.247,00 yang berasal dari risalah Lelang Nomor 196/14.01/2025-01 merupakan satu paket peralatan dan mesin rusak berat telah disetor tanggal 9 Mei 2025 dengan nomor NTPN BC5F655DFIM2DKH2.

- Penjualan peralatan dan mesin senilai Rp5.800.000,00 yang berasal dari risalah Lelang Nomor 415/14.01/2025-01 merupakan satu unit BMN dengan kondisi rusak berat berupa Inlatable Life Carft telah disetor tanggal 1 September 2025 dengan nomor NTPN 656AE55DFJ1O6LJ3.

- Berdasarkan risalah lelang nomor 253/14.01/2025.01 tanggal 11 Juni 2025 sebesar Rp5.104.000,00 berupa 1 unit motor roda dua dan 1 unit waterfilter rusak berat telah disetor pada tanggal 19 Juni 2025 dengan nomor NTPN 2CCAE55DFIPAUKCN.

4) Stasiun PSDKP Kupang mencatat penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp1.733.890,00 yang berasal dari Risalah Lelang Nomor 122/14.05/2025-01 tanggal 6 Agustus 2025 merupakan 1 (satu) paket inventaris kantor dalam kondisi rusak berat, telah disetor tanggal 7 Agustus 2025 dengan nomor NTPN B89CB55DFIUTT8U6.

5) Stasiun PSDKP Biak mencatat penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp4.048.000,00 yang berasal dari Risalah Lelang Nomor 45/17.04/2025-01 tanggal 26 Agustus 2025 merupakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua atau sepeda motor merk Yamaha 3C 1 (V-IXION/FZ150) Tahun 2012 Nopol DS 6530 CB, telah disetor tanggal 28 Agustus 2025 dengan nomor NTPN BBE26U8F84AU5VH.

6) Pangkalan PSDKP Batam mencatat penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp8.488.000,00 yang berasal dari Risalah Lelang Nomor 282/03.04/2025-01 tanggal 27 Agustus 2025 merupakan 1 (satu) paket scrap alat angkutan berupa speed baot / motor tempel dan rubber boat, telah disetor tanggal 3 September 2025 dengan nomor NTPN 3F4466U8F86IE8S0.

7) Stasiun PSDKP Tarakan mencatat penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp2.302.000,00 yang berasal dari Risalah Lelang Nomor

14/13.03/2025-01 tanggal 7 Maret 2025 merupakan 1 (satu) unit sepeda motor/type honda megapro, tahun 2008, nomor polisi B 6188 PKQ, nomor rangka MHJKC11128K184462, nomor mesin KC11E1186493, BPKP ada, STNK tidak ada dalam kondisi rusak berat, telah disetor tanggal 14 Maret 2025 dengan nomor NTPN 3707D48VVNTRUVO5.

8) Pangkalan PSDKP Jakarta mencatat penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp58.562.428,00 yang berasal dari:

- Risalah Lelang Nomor 809/07.02/2025-01 tanggal 15 Desember 2025 senilai Rp13.377.428,00 merupakan satu paket barang inventaris kantor milik negaran sejumlah 178 unit peralatan dan mesin kondisi rusak berat apa adanya, telah disetor tanggal 7 Desember 2025 dengan nomor NTPN 1485F8N3ETKLJ2K9.

- SK Penghapusan Nomor 1186/KEPMEN-KP/PL.750/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025 senilai Rp31.401.400,00 merupakan penghapusan dokumen perencanaan Pembangunan Gudang.

- Risalah Lelang Nomor 686/07.02/2025-01 tanggal 15 Desember 2025 senilai Rp45.185.000,00 merupakan satu paket Barang Milik Negara berupa Scrap Eks kendaraan Isuzu TBR 54F Turbo H Touring dan Cheverolet Spin 1.5 LTZ MT (tanpa dokumen kepemilikan), telah disetor tanggal 14 November 2025 dengan nomor NTPN 5FE5C3CIFU397SS5.

9) Pangkalan PSDKP Bitung mencatat penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp814.563,00 yang berasal dari Risalah Lelang Nomor 34/16.1/2025-01 tanggal 21 Februari 2025 merupakan 1 (satu) paket inventaris kantor, telah disetor tanggal 25 Februari 2025 dengan nomor NTPN B1AFE55DFIDJ0FH0.

10) Stasiun PSDKP Belawan mencatat penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp15.500.000,00 yang berasal dari Risalah Lelang Nomor 151/02.03/2025-01 tanggal 18 September 2025 berupa 1 (satu) paket scrap atau besi tua bekas speed boat dolphin kondisi apa adanya, telah disetor tanggal 24 September 2025 dengan nomor NTPN 706D648VVOG16QQ0.

11) Stasiun PSDKP Pontianak mencatat penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp9.559.688,00 yang berasal dari

- Risalah Lelang Nomor 9/11.01/2025-01 tanggal 20 Januari 2025 senilai Rp2.775.888,00 berupa 1 (satu) paket barang inventaris kantor terdiri dari peralatan computer, perabot kantor dan alat rumah tangga dalam keadaan rusak berat di Kabupaten Kubu Raya, telah disetor tanggal 22 Januari 2025 dengan nomor NTPN E83AC0NA0DEJ64SF.

- Risalah Lelang Nomor 312/11.01/2025-01 tanggal 21 November 2025 senilai Rp5.050.000,00 merupakan 1 (satu) unit speedboat/motor tempel merk/type Speed Hiu Macan 01/Yanmart E40 JMHL dalam kondisi rusak berat, telah disetor tanggal 24 November 2025 dengan nomor NTPN 572361JNG8UR75D7.

- Risalah Lelang Nomor 313/11.01/2025-01 tanggal 21 November 2025 senilai Rp1.733.800,00 merupakan 2 (dua) unit camera video techo seince dalam kondisi rusak berat, telah disetor tanggal 24 November 2025 dengan nomor NTPN E282248VV0M0E6KC.

12) Pangkalan PSDKP Tual mencatat penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp55.955.967,00 yang berasal dari Risalah Lelang:

- Risalah Lelang Nomor 81/17.01/2025-01 tanggal 22 Juli 2025 senilai Rp3.955.967,00 merupakan 1 (satu) paket inventaris kantor rusak berat berupa peralatan dan mesin, telah disetor tanggal 23 Juli 2025 dengan nomor NTPN DEB7248VVOA1VDMH.

- Risalah Lelang Nomor 352/09.01/2025-01 tanggal 11 Juli 2025 senilai Rp52.000.000,00 merupakan 1 (satu) paket besi/scrap hasil bongkaran repleting Kapal Pengawas Hiu Macan 06 dan Kapal Pengawas Hiu 14 dengan kondisi apa adanya, telah disetor tanggal 14 Juli 2025 dengan nomor NTPN 9A3D52G5034VVREV.

13) Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP mencatat penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp310.238.539,00 merupakan:

- Penjualan peralatan dan mesin senilai Rp25.333.046,00 yang berasal dari Risalah Lelang Nomor 7/07.02/2025-01 tanggal 7 Januari 2025 merupakan satu paket BMN berupa 537 unit peralatan dan mesin kondisi rusak berat, telah disetor tanggal

8 Januari 2025 dengan nomor NTPN 2759F7QLV21896EK.

- Risalah Lelang nomor 97/07.02/2025-01 tanggal 24 Februari senilai Rp5.377.587,00 merupakan satu paket BMN terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 160 D nomor Polisi B 6232 PKQ, tahun 2008 dan Honda GL 160 D nomor Polisi B 6233 PKQ tahun 2008 dengan kondisi rusak berat, telah disetor tanggal 25 Februari 2025 dengan nomor NTPN EC17A7QLV24O76AS.

- Risalah Lelang nomor 35/04.01/2025-01 tanggal 12 Februari 2025 senilai Rp575.762,00 merupakan 1 (satu) unit speedboat/motor tempel dalam kondisi rusak berat, telah disetor tanggal 17 Februari 2025 dengan nomor NTPN AC2A161QVCVNIOH1.

- Risalah Lelang Nomor 43/16.01/2025-01 tanggal 10 Maret 2025 senilai Rp114.825,00 merupakan 1 (satu) paket perlengkapan inventaris kantor di Kota Bitung telah disetor dengan nomor NTPN 4CA582G502VAEVDE.

- Risalah Lelang Nomor 88/11.01/2025-01 tanggal 15 Mei 2025 senilai Rp1.213.312,00 merupakan 1 (satu) paket alat perlengkapan inventaris kantor dalam keadaan rusak berat di kota Pontianak telah disetor tanggal 16 Mei 2025 dengan nomor NTPN 2EBEA0DQARSRS.

- Risalah Lelang Nomor 115/02.01/2025-01 tanggal 10 Maret 2025 senilai Rp686.950,00 merupakan satu paket inventaris dalam kondisi rusak berat telah disetor tanggal 13 Maret 2025 dengan nomor NTPN 130AE2G502OUNO2D.

- Risalah Lelang Nomor 131/07.02/2025-01 tanggal 13 Maret 2025 senilai Rp318.260,00 merupakan satu paket BMN peralatan dan mesin sejumlah 128unit berupa mobile file, tabung pemadam api, papan visual, white board, peta, meja kerja kayu, kursi besi, kursi kayu, sketsel, lambang garuda, palu siding dan scanner kondisi rusak berat, telah disetor tanggal 19 Maret 2025 dengan nomor NTPN 21B287QLV27HV6GC.

- Risalah Lelang Nomor 246/09.01/2025-01 tanggal 22 Mei 2025

senilai Rp34.750.000,00 merupakan satu paket bongkaran kondisi Kapal Paus 01 dan bongkaran Replating Kapal Orca 04 dengan kondisi rusak berat telah disetor tanggal 23 Mei 2025 dengan nomor NTPN 4CA582G502VAEVDE.

- Risalah Lelang Nomor 270/07.02/2025-01 tanggal 10 Juni 2025 senilai Rp62.441.000,00 merupakan dua kendaraan roda empat telah disetor dengan nomor NTPN AC2A161QVCVNIOH1.

- Risalah Lelang Nomor 333/07.02/2025-01 tanggal 8 Juli 2025 senilai Rp35.963.312,00 merupakan 2 (dua) unit kendaraan roda dua sepeda motor Honda GL 160 D nopol B 6209 PKQ Tahun 2008 dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Grand Vitara nopol B 2937 UQ Tahun 2007, telah disetor tanggal 9 Juli 2025 dengan nomor NTPN 222661JNG8IF18BQ.

- Risalah Lelang Nomor 97/17.01/2025-01 tanggal 20 Agustus 2025 senilai Rp165.781,00 merupakan 1 (satu) paket scrap/limbah besi padat (besi tua) terdiri dari 6 mobil dan 6 sepeda motor, telah disetor tanggal 22 Agustus 2025 dengan nomor NTPN 345623CIFTQJOMG0.

- Risalah Lelang Nomor 512/07.02/2025-01 tanggal 11 September 2025 senilai Rp20.472.816,00 merupakan 1 (satu) BMN berupa peralatan dan mesin kondisi rusak berat apa adanya yang terdiri dari PC. Unit, Laptop, Printer, Lemari Kayu, Lemari Besi/Metal, Filling Cabinet Besi, Kursi Besi/Metal, Kursi Fiber Glas/Plastik, Meubelair Lainnya, Kabel, Scanner, dan lain-lain, telah disetor tanggal 12 September 2025 dengan nomor NTPN EA7E755DFJ22DD6U.

- Risalah Lelang Nomor 215/11.01/2025-01 tanggal 10 September 2025 senilai Rp34.909.000,00 merupakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk/type Suzuki Escudo senilai Rp26.821.000,00, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk/type Honda NF Nopol B 60004 PEQ senilai Rp5.294.000,00 dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk/type Honda NF Nopol B 6006 PEQ senilai Rp2.794.000,00, telah disetor tanggal 10 September 2025 dengan nomor NTPN 0FC7B6U8F86P383O.

- Risalah Lelang Nomor 485/02.01/2025-01 tanggal 15 September 2025 senilai Rp25.959.000,00 merupakan 1 (satu)

unit kendaraan bermotor roda 4 merk Suzuki Type SE Nopol B 8745 WU senilai Rp22.749.000,00 dan 1 (paket) berupa 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda 2 kondisi scrap, telah disetor tanggal 19 September 2025 dengan nomor NTPN 5416F0NA0E6B50HO.

- Berdasarkan Surat Perjanjian Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Nomor B.3356/DJPSDKP.1/PL.750/IX/2025 tanggal 24 September 2025 senilai Rp30.578.200,00 merupakan kendaraan roda 4 (empat) sesuai dengan Surat Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II atas nama Menteri Keuangan Nomor S-917/MK/KNL.0702/2025 tanggal 23 September 2025 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Surat Penghapusan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1521/KEPMEN-KP/PL.750/IX/2025 tanggal 29 September 2025.

- Risalah Lelang Nomor 533/07.02/2025-01 tanggal 22 September 2025 senilai Rp2.511.000,00 merupakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk/type Suzuki FK 110 SD K6, Nopol B 6658 PBQ, telah disetor tanggal 25 September 2025 dengan nomor NTPN 5D6347QLV2PK20BI.

- Risalah Lelang Nomor 559/07.02/2025-01 tanggal 30 September 2025 senilai Rp9.320.000,00 merupakan 1 (satu) paket BMN peralatan dan mesin sejumlah 23 unit berupa floor crane, encoder/decoder, remote voip gateway E1 card interface, video camera surveillance, computer jaringan lainnya, server dan firewall kondisi apa adanya, telah disetor tanggal 1 Oktober 2025 dengan nomor NTPN 291008N3TE8M1JB.

- Risalah Lelang Nomor 287/16.01/2025-01 tanggal 19 November 2025 senilai Rp9.320.000,00 merupakan 2 (dua) unit kendaraan roda dua dalam keadaan rusak berat, telah disetor tanggal 19 November 2025 dengan nomor NTPN 8A49648VVOLR5RTC.

b. pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp1.140.945,00 merupakan hasil lelang KPKNL yang terdapat pada Pangkalan PSDKP Jakarta atas:

- Risalah Lelang Nomor 141/07.02/2025-01 tanggal 18 Maret 2025 senilai Rp635.945,00 merupakan satu paket BMN berupa bongkaran bangunan lainnya (Gudang) dalam keadaan lapuk dan rusak berat, telah disetor tanggal 19 Maret 2025 dengan nomor NTPN BB2B80NA0DKEPRDV.

- Risalah Lelang Nomor 149/07.02/2025-01 tanggal 20 Maret 2025 senilai Rp505.000,00 merupakan satu paket BMN berupa scrap jalan khusus Lori kondisi rusak berat apa adanya, telah disetor tanggal 24 Maret 2025 denan nomor NTPN B30147QLV27MBS5Q.

c. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai TUSI sebesar Rp52.618.064,00 merupakan sewa rumah pada:

a) Stasiun PSDKP Kupang mencatat pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan sebesar Rp6.255.592,00 merupakan sewa rumah yang dibayarkan perbulan melalui potongan SPM pembayaran Gaji pegawai yang bersangkutan Pengenaan sewa rumdin ini berdasarkan pada sesuai dengan SK Kepala Stasiun PSDKP Kupang nomor KEP.11/KPA-PSDKPSta.3/I/2025 tanggal 2 Januari 2025.

b) Pangkalan PSDKP Batam mencatat pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan sebesar Rp46.362.472,00 merupakan sewa rumah yang dibayarkan perbulan sesuai lampiran SK Kepala Pangkalan PSDKP Batam nomor KEP.14/Lan.2/TU.410/I/2025 tanggal 2 Januari 2025

5. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Realisasi Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.221.026.577,00 dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp7.536.243.000,00, terdiri dari:

a. Pendapatan atas penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp1.450.129.988,00 terdapat pada Satuan Kerja:

1) BBP3KP senilai Rp514.563.055,00 Pembayaran PNBP atas penjualan 5 unit Kendaraan berupa 1 nissan grand livina, 3 innova, 1 nissan extrail, 1 suzuki APV;

2) Sekretariat senilai Rp928.002.000,00 Pembayaran PNBP atas penjualan 8 unit kendaraan berupa 1 xenia, 1 dyna, 1 pick up, 2 innova, 1 toyota rush, 1 honda CRV, 1 honda civic;

3) DKI Jakarta senilai Rp7.564.933,00 Pembayaran PNBP atas penjualan peralatan dan mesin.

b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp23.968.408,00 merupakan peralatan dan mesin (partisi rolling door) terdapat pada Satuan Kerja Direktorat Pemasaran.

c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp3.572.346.448,00 berupa sewa lapak basah PIM Muara Baru, yang terdiri atas sewa dari banyak kios pada Satuan Kerja Setditjen PDSPKP.

d. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp170.076.926,00 merupakan Pembayaran PNBP atas sewa 2 unit Kendaraan Berpendingin oleh PERINDO Cab.Aceh Nopol B 9590 PQV dan B 9638 PQV periode 21-31 Desember 2024 atas reviu Inspektorat Jenderal pada Satuan Kerja BBP3KP.

e. Pendapatan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi sebesar Rp4.004.504.807,00 merupakan:

a) Setditjen PDSPKP senilai Rp320.947.500 berupa sewa akuarium dan peralatan pendukungnya Raiser Ikan Cibinong dan Kendaraan Berpendingin;

b) BBP3KP senilai Rp3.683.557.307 berupa Tarif PP 85 atas penggunaan *Coldstorage* 1.000 Ton dan Coldstorage 2.000 Ton Muara Baru.

6. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Realisasi Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp474.319.693,00 dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp2.559.257.000,00, terdiri dari:

a) Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp426.791.056,00 merupakan lelang kendaraan roda 4 dan roda 2, lelang inventaris kantor, minibus pada Sekretaris Ditjen PKRL, LPSPL Sorong, LKKPN Pekanbaru, BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang, BPSPL Pontianak dan BPSPL Makasar.

b) Pendapatan atas penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi sebesar Rp47.528.637,00 merupakan pendapatan penggunaan mess/rumah pegawai yang diterima pada tahun berjalan yang terdapat pada tujuh satker UPT yaitu BPSPL Padang, BPSPL Denpasar, BPSPL Makassar, BPSPL Pontianak, LKKPN Pekanbaru, LPSPL Serang, dan LPSPL Sorong berupa pendapatan penggunaan rumah negara dengan jumlah dan tipe rumah negara yang berbeda-beda tiap satkernya.

7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Realisasi Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.635.500.914,00 dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp9.995.952.000,00, terdiri dari:

a. Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya sebesar Rp2.646.256.080,00 merupakan pendapatan dari kegiatan hasil TEFA pendidikan kegiatan budidaya perikanan terutama berupa udang vaname yang terdapat pada hampir diseluruh UPT atau di 28 UPT.

b. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp74.594.000,00 merupakan pendapatan dari TEFA pendidikan berupa hasil olahan perikanan dan mekanisasi yang terdapat pada 19 UPT.

c. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp15.000.000,00 merupakan dari Hasil Lelang Penghancuran Gedung Gudang di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros.

d. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.168.829.690,00 merupakan hasil bersih lelang atau penghapusan BMN berupa kendaraan dan peralatan kantor pada 21 Satker,

e. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp49.627.330,00 merupakan Bongkaran Gedung Asrama pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

f. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp1.205.149.042,00 merupakan Sewa Koperasi, Tambak, Sewa Kantin, Kolam Renang pada:

- Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong
- Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman
- Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Poltek AUP) Jakarta
- Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi
- Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waeheru
- Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
- Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
- Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong
- Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak
- Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal
- Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
- Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
- Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan
- Loka Riset Budidaya Rumput Laut
- Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
- Balai Riset Budidaya Ikan Hias
- Loka Riset Perikanan Tuna
- Balai Riset Pemuliaan Ikan

- Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung
- Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
- Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang
- Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang
- Polteknik Kelautan dan Perikanan Bone
- Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana
- Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai
- Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran

g. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp489.916.944,00 merupakan pendapatan yang berasal dari sewa kapal Bawal Putih yang dimiliki BPPP Ambon untuk BPPP Tegal atas proyek swasta,

h. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya sebesar Rp15.000.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari sewa kapal latih kegiatan pelatihan di SUPM Tegal.

i. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp1.971.127.828,00 merupakan kegiatan sewa aula pendidikan dan pelatihan, asrama dan ruang kelas di UPT Balai Pelatihan serta cold storage untuk penyimpanan ikan nelayan di Politeknik KP Bitung dan Politeknik KP Karawang.

8. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

   Realisasi Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp991.394.494,00 dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp0, terdiri dari:

   a. Pendapatan atas penjualan tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp207.370.000,00 merupakan penjualan hasil bongkaran Gedung dan bangunan pada:

      - Balai Besar KIPM Makasar
      - Balai KIPM Denpasar

- Balai Uji Standar KIPM

b. Pendapatan atas penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp506.315.514,00 merupakan hasil lelang Peralatan dan Mesin atas penghapusan BMN karena status aset rusak berat pada:

- Balai KIPM Medan I
- Balai Besar KIPM Makasar
- Balai KPIM Denpasar
- Stasiun KIPM Pekanbaru
- Balai KIPM Balikpapan
- Stasium KIPM Kendari
- Balai KIPM Mataram
- Balai KIPM Jayapura
- Stasiun KIPM Kupang
- Stasiun KIPM Aceh
- Balai KPIM Banjarmasin
- Stasiun KIPM Bengkulu
- StasiunKIPM Jambi
- Stasiun KIPM Palangkaraya
- Stsiun KIPM Merak
- Stasiun KIPM Yogyakarta
- Balai KIPM Ambon
- Balai Uji Standar KIPM

c. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi sebesar Rp277.708.980,00 merupakan berupa sewa lahan *container* dan *reach* staker di satker Balai KIPM Surabaya I (Puspa Agro) selama proses pengecekan klinis dilakukan.

9. Inspektorat Jenderal

Realisasi Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp65.645.140,00 dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp0,00 yang merupakan setoran dengan NTPN 837171JNG8172O09 tanggal 30 Januari 2024, Risalah Lelang nomor 37/07.02/2025-01 tanggal 22 Januari 2025 yang terdiri dari Pendapatan dari lelang 1 Paket lelang peralatan dan mesin atas inventaris kantor sebanyak 305 unit.

## Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum

*Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum Rp863.935.630.797,00*

Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp863.935.630.797,00 dan sebesar Rp1.036.035.119.000,00.

Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.16**
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum Per Akun**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik / Turun | % |
| Pendapatan Perizinan Lainnya | 994.512 | 845.361 | 85,00 | 690.923 | 819.555 | 118,62 | 25.806 | 3,15 |
| Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya | 41.523 | 18.575 | 44,73 | 53.168 | 48.910 | 91,99 | (30.335) | (62,02) |
| **Total** | **1.036.035** | **863.936** | **83,39** | **744.091** | **868.465** | **116,71** | **(4.529)** | **(0,52)** |

**Tabel B.17**
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum**
**Pada Masing-Masing Unit Eselon I**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| **Setjen** | 34 | 50 | 147,06 | 31 | 34 | 109,68 | 16 | 47,06 |
| **Ditjen PT** | 17 | 16 | 94,12 | 13 | 6 | 46,15 | 10 | 166,67 |
| **Ditjen PB** | 2.286 | 2.974 | 130,10 | 2.280 | 3.706 | 162,54 | (732) | (19,75) |
| **Ditjen PDSPKP** | 261 | 266 | 101,92 | 228 | 263 | 115,35 | 3 | 1,14 |
| **Ditjen PK** | 994.512 | 845.361 | 85,00 | 690.923 | 819.555 | 118,62 | 25.806 | 3,15 |
| **BPPSDMKP** | 1 | 46 | 4.600,00 | 31 | 67 | 216,13 | (21) | (31,34) |
| **BPPMHKP** | 38.923 | 15.223 | 39,11 | 50.586 | 44.834 | 88,63 | (29.611) | (66,05) |
| **Total** | **1.036.034** | **863.936** | **83,39** | **744.092** | **868.465** | **116,71** | **(4.529)** | **(0,52)** |

Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.530.032.164,00 atau 0,52% dari realisasi untuk yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang secara umum disebabkan oleh penurunan atas pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisai lainnya pada Ditjen Perikanan Budidaya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Penjelasan atas pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal

   Realisasi Pendapatan dari pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp49.607.000,00 dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp34.475.000,00 yang merupakan pengujian kualitas air laboratorium kualitas perairan pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

2. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Realisasi Pendapatan dari pendapatan perizinan lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp845.361.101.497,00 dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp994.512.318.000,00, Terdapat Pengembalian sebesar Rp5.148.428.000,00 atas pendapatan perizinan lainnya yang disebabkan karena kesalahan input pada aplikasi sehingga dikembalikan ke pihak ketiga yang menyetorkan, yang ada pada:

- Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang sebesar Rp675.000,00.
- Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang sebesar Rp5.880.000,00.
- Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp5.141.873.000,00.

Pendapatan perizinan lainnya yang berupa:

a. Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut berupa:

1) Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya;

2) Surat Angkut Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Dibatasi Pemanfaatannya Dalam Negeri (SAJI-DN);

3) Surat Angkut Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Dibatasi Pemanfaatannya Luar Negeri (SAJILN);

4) Rekomendasi Pemanfaatan Jenis yang Mempunyai Kemiripan dengan Jenis Ikan Dilindungi, Dibatasi Pemanfaatannya, dan/atau Dilarang Ekspor dalam Negeri dan Luar Negeri;

5) Kegiatan Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam;

6) Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE);

7) Pelaksanaan Reklamasi;

8) Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan;

9) Rekomendasi Pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2;

10) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing.

b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) berupa:

1) Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut

2) Pemanfaatan Ruang untuk Kabel Bawah Laut

3) Pemanfaatan Ruang untuk Pipa Bawah Laut.

3. Ditjen Perikanan Tangkap

Realisasi Pendapatan dari pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.540.000,00 dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp17.000.000,00 yang merupakan pengujian atas kerjasama alih teknologi hasil riset pada Satuan Kerja Balai Besar Penangkapan Ikan.

4. Ditjen Perikanan Budi Daya

Realisasi Pendapatan dari pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.973.966.000,00 dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp2.286.133.000,00 yang merupakan pelayanan laboratorium pada:

- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
- Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam
- Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
- Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
- Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
- Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
- Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
- Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem
- Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi

- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
- Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
- Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
- Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee

5. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

   Realisasi Pendapatan dari pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp265.903.800,00 dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp260.810.000,00 yang merupakan pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan, residu antibiotik, bahan kimia, logam berat, obat, hormon dan kontaminan, kadar histamin berupa uji histamin, timbal dan cadmium, pada Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan.

6. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

   Realisasi Pendapatan dari pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp46.260.000,00 dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp1.100.000,00 yang merupakan kegiatan uji laboratorium Pelayanan Pemeriksaan Analisis kualitas air tambak, pada:

   - Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
   - Balai Riset Pemuliaan Ikan
   - Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
   - Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros
   - Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pasisir

7. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan.Perikanan

   Realisasi Pendapatan dari pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.223.252.500,00 dari estimasi yang ditetapkan sebesar

Rp38.923.283.000,00 yang merupakan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi Lainnya khusus untuk mutu pada BPPMHKP.

### Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan

*Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan Rp0,00*

Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp38.700.000,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel B.18**
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Unit Eselon I | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik (Turun) | % |
| BPPMHKP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167 | 39 | 1,80 | (100,00) | (100,00) |
| **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.167** | **39** | **1,80** | **(100,00)** | **(100,00)** |

Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 tidak terdapat estimasi dan realisasi mengalami penurunan sebesar Rp38.700.000,00 atau 100,00% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Penurunan ini disebabkan oleh perpindahan fungsi karantina ke Badan Karantina Indonesia yang juga mengakibatkan pendapatan di akun ini menjadi wewenang Badan Karantina Indonesia. Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan hanya terdapat pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada akun Pendapatan Jasa Karantina Perikanan yang antara lain merupakan pendapatan atas uji klinis, pengamatan dan pengasingan, pendapatan pengujian sertifikasi, serta kalibrasi.

### Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi

*Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Rp1.082.188.371,00*

Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.082.188.371,00 dan sebesar Rp4.964.310.500,00. Rincian estimasi dan

realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.19**
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik / Turun | % |
| Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan | 511 | 8 | 1,57 | 557 | 4 | 0,72 | 4 | 100,00 |
| Pendapatan Biaya Pendidikan | 775 | 854 | 110,19 | 1.171 | 1.078 | 92,06 | (224) | (20,78) |
| Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan | 2.965 | 220 | 7,42 | 3.232 | 3.865 | 119,59 | (3.645) | (94,31) |
| Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | (100,00) | (1) | (100,00) |
| Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya | 2 | 1 | 50,00 | 29 | 17 | 58,62 | (16) | (94,12) |
| **Total** | **4.253** | **1.083** | **25,46** | **4.989** | **4.965** | **99,52** | **(3.882)** | **(78,19)** |

**Tabel B.20**
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik / Turun | % |
| Setjen | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ditjen PT | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BPPSDMKP | 4.252 | 1.082 | 25,45 | 4.971 | 4.964 | 99,86 | (3.882) | (78,20) |
| **Total** | **4.254** | **1.082** | **25,43** | **4.992** | **4.964** | **99,44** | **(3.882)** | **(78,20)** |

Realisasi Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.882.122.129,00 atau 78,20% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Realisasi Tahun 2025 hanya ada pada Badan

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan pada Tahun 2025 mengalami penurunan disebabkan adanya penurunan pada pendapatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pendapatan atas Layanan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2025 sebesar Rp220.075.000,00. Selain pendapatan atas Layanan Pendidikan dan Pelatihan, terdapat pendapatan ujian/seleksi masuk Pendidikan sebesar Rp8.000.000,00, pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp853.600.000,00, dan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek lainnya sebesar Rp513.371,00.

Realisasi Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi terdiri dari:

a. Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan sebesar Rp8000.000,00 berupa pendapatan dari ujian/seleksi masuk taruna Politeknik AUP;

b. Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp853.600.000,00;

c. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan senilai Rp220.075.000,00 berupa pelatihan BST di Politeknik AUP Jakarta;

d. Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya senilai Rp513.371,00 berupa pendapatan dari Royalti Vaksin Ikan Satker BRPBATPP Sempur.

### Pendapatan Jasa Lainnya

*Pendapatan Jasa Lainnya Rp93.274.920.656,00*

Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp93.274.920.656,00 dan sebesar Rp99.644.150.219,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Jasa Lainnya pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.21**
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya Per Akun**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik / Turun | % |
| **Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan** | 56.772 | 73.157 | 128,86 | 57.027 | 78.317 | 137,33 | (5.160) | (6,59) |

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik / Turun | % |
| Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya | 12.833 | 20.101 | 156,64 | 15.089 | 21.271 | 140,97 | (1.170) | (5,50) |
| Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi | 11 | 17 | 154,55 | 16 | 54 | 337,50 | (37) | (68,52) |
| **Total** | **69.616** | **93.275** | **133,99** | **72.132** | **99.642** | **138,14** | **(6.367)** | **(6,39)** |

**Tabel B.22**
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya Pada Masing-Masing Unit Eselon I**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik / Turun | % |
| Setjen | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 3 | 300,00 | (3) | (100,00) |
| Ditjen PT | 56.880 | 73.234 | 128,75 | 57.113 | 78.472 | 137,40 | (5.238) | (6,67) |
| Ditjen PB | 10 | 17 | 170,00 | 8 | 35 | 437,50 | (18) | (51,43) |
| Ditjen PK | 12.723 | 20.024 | 157,38 | 15.010 | 21.135 | 140,81 | (1.111) | (5,26) |
| BPPSDMKP | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Total** | **69.616** | **93.275** | **133,99** | **72.132** | **99.645** | **138,14** | **(6.370)** | **(6,39)** |

Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.369.229.563,00 atau 6,39% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang secara umum disebabkan oleh:

1. Adanya penurunan pendapatan Jasa Pelabuhan sebesar Rp5.160.130.691,00 atau 6,59% jika dibandingkan dengan tahun 2024 hal ini disebabkan menurunnya pendapatan atas pengunaan Listrik, pada PPS Nizam Zachman dan PPN Kejawanan terdapat penurunan yang signifikan karena pada TA 2024 terdapat pembayaran piutang atas PT HOI, Perindo dan beberapa debitur lainnya.

2. Adanya penurunan pada akun Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya sebesar Rp1.169.795.584,00 atau 5,50% jika dibandingkan dengan tahun 2024 hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran atas pengujian meisn kapal dan alat tangkap pada Satuan Kerja BBPI Semarang.

3. Adanya penurunan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi pada Ditjen Perikanan Tangkap, Sekretariat Jenderal dan Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp36.810.000,00 atau 68,45% jika dibandngkan dengan tahun 2024 hal ini disebabkan:

   - Tidak ada permintaan bimbingan teknis dalam bidang pengembangan penangkapan kan baik dari Universitas dan Instansi terkait sebagai dampak dari efisiensi anggaran di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada BBPI Semarang dan Sekretariat Jenderal pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

   - Dan berkurangnya permintaan bimbingan teknis bidang pembudidayaan ikan pada Balai Besar Budidaya Perikanan Air Tawar Sukabumi.

4. Tidak adanya realisasi pendapatan Jasa Lainnya berupa listrik pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Ditjen Perikanan Tangkap jika dibandingkat tahun 2024 hal ini disebabkan pada tahun 2025 penggunaan akun ini berpindah ke pendapatan jasa Pelabuhan perikanan (425621).

Penjelasan atas Pendapatan Jasa Lainnya pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Merupakan pendapatan atas Jasa tenaga, pekerjaan, dan informasi dimana pada tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp3.000.000,00 pada Satker BPISDKP berupa bimtek pembuatan Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI) dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

   Antara lain merupakan pendapatan atas:

   a. Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan pada tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp73.157.106.604,00 dan Rp78.317.237.295 dimana terdapat pada 22 pelabuhan Unit Pelayanan Teknis berupa jasa pelayanan di pelabuhan perikanan pendapatan jasa di pelabuhan perikanan berupa tambat labuh, *docking*, pengadaan air, bengkel, pembuatan film/video, pas masuk, kebersihan, Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL), listrik dan Wisata bahari.

b. Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya pada tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp77.080.000,00 dan Rp136.080.000,00 berupa pendapatan yang berasal dari pelayanan pengujian sarana penangkapan ikan berupa pengujian mesin kapal dan alat tangkap yang terdapat pada Satuan Kerja BBPI Semarang.

c. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi pada tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp16.275.000,00 yang terdapat pada satker BBPI berupa konsultasi dan bimbingan teknis dalam bidang pengembangan penangkapan ikan dimana tahun 2025 tidak ada permintaan pada bimbingan teknis ini.

d. Pendapatan Jasa Lainnya pada tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp2.493.288,00 merupakan pendapatan dari listrik pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

Merupakan pendapatan atas Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi pada tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp16.965.000,00 dan Rp 34.500.000,00 yang pada satker BBPBAT Sukabumi berupa jasa bimbingan teknis pembudidayaan ikan, pada tahun 2025 mengalami penurunan karena menurunnya permintaan atas bimbingan teknis ini.

4. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Antara lain merupakan pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya pada tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp20.023.769.052,00 dan Rp21.134.564.636,00 yang berasal dari berasal dari satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT, baik yang mengelola kawasan konservasi maupun jenis ikan. Pendapatan pada satker Setditjen PKRL dan UPT pengelola jenis ikan (PSPL) yang merupakan mandat baru dari PP 85 Tahun 2021 yang bersumber dari Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya berupa Pungutan Penangkapan/ Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas di Luar Ketentuan Perlindungannya dan Dibatasi Pemanfaatannya dari Habitat Alam untuk Kegiatan Perdagangan dan Pungutan Perdagangan Jenis Ikan Dilindungi Hasil Pengembangbiakan dan/atau Dibatasi sedangkan pada satker UPT pengelola kawasan konservasi perairan (UPT KKPN) yaitu LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang bersumber dari karcis masuk dan tanda masuk kawasan konservasi perairan yang dikelolanya berupa Karcis Masuk Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan, Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Penelitian Komersial dan Pendidikan.

## Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan

*Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan Rp54.391.248,00*

Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp54.391.248,00 dan sebesar Rp175.159.746,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.23**
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan Per Akun**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. | 0 | 15 | (100,00) | 0 | 174 | (100,00) | (159) | (91,38) |
| Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara | 0 | 40 | (100,00) | 0 | 1 | (100,00) | 39 | 3.900,00 |
| **Total** | **0** | **55** | **(100,00)** | **0** | **175** | **(100,00)** | **(120)** | **(68,57)** |

**Tabel B.24**
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| Setjen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 73 | (100,00) | (73) | (100,00) |
| Itjen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ditjen PT | 0 | 45 | (100,00) | 0 | 1 | (100,00) | 44 | 4.400,00 |
| Ditjen PB | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | (100,00) | (5) | (100,00) |
| Ditjen PSDKP | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | (100,00) | (4) | (100,00) |
| Ditjen PDSPKP | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik / Turun | % |
| Ditjen PK | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ditjen PRL | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BPPSDMKP | 0 | 5 | (100,00) | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| BPPMHKP | 0 | 4 | (100,00) | 0 | 93 | (100,00) | (89) | (95,70) |
| **Total** | **0** | **54** | **(100,00)** | **0** | **176** | **(100,00)** | **(122)** | **(69,32)** |

Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp124.032.945,00 atau sebesar 41,53% yang secara umum disebabkan adanya penurunan dari setoran penyelesaian ganti kerugian negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pada tahun 2025 tidak terdapat Kembali dari pendapatan jasa Lembaga keuangan.

Penjelasan atas Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Merupakan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain berupa Pengunduran diri Pegawai Biro Hukum atas ikatan dinas Pegawai Negeri Sipil, dimana pada tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp72.960.000,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

   Antara lain merupakan:

   a. Pendapatan penyelesaian ganti keruian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain pada tahun 2025 berupa pendapatan atas ganti rugi kehilangan motor pada PPN Pelabuhanratu sebesar Rp5.500.000,00.

   b. Pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara pada tahun berupa pembayaran cicilan piutang bendahara pada Satker PPS Bitung sebesar Rp39.760.092,00 yang merupakan pengembalian atas kelalaian bendahara.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

Merupakan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain pada BPBAT Sungai Gelam, dimana pada tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp4.800.000,00.

4. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

   Antara lain merupakan:

   a. Pendapatan jasa atas Jasa Giro sebesar Rp320,00 yang berasal dari setorang bunga bank yang berasal dari rekening pemerintah lainnya kapal pengawas

   b. Pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara berupa TGR pegawai Stasiun PSDKP Biak dimana pada tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp3.500.000,00.

5. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

   Merupakan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain berupa TGR Inspektorat V atas Pegawai di SUPM Pontianak, dimana pada tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp5000.000,00 dan Rp0,00.

6. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

   Merupakan Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain pada tahun 2025 terdapat di Sekretariat BPPMHKP berupa:

   - Senilai Rp3.000.000,00 merupakan TGR kehilangan sepeda Motor pada Balai KIPM Medan I

   - Senilai Rp1.131.156,00 merupakan cicilan terkait temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal KKP Nomor R.820/ITJ.5/HP.230/VII/2021 tanggal 31 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Audit Investigasi dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat pada Sekretariat BPPMHKP (dicicil selama 2 tahun mulai Juni 2024 - Juni 2026) dimana pada tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp4.131.156,00 dan Rp92.899.426,00.

## Pendapatan Denda

*Pendapatan Denda Rp70.748.977,00*

Realisasi Pendapatan Denda untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp70.748.977.441,00 dan sebesar Rp25.095.541.265,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Denda pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini

**Tabel B.25**
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Denda Per Akun**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah | 0 | 1.906 | (100,00) | 0 | 3.541 | (100,00) | (1.635) | (46,17) |
| Pendapatan Denda Lainnya | 5.607 | 68.843 | 1.227,80 | 6.999 | 21.554 | 307,96 | 47.289 | 219,40 |
| **Total** | **5.607** | **70.749** | **1.261,80** | **6.999** | **25.095** | **358,55** | **45.654** | **181,92** |

**Tabel B.26**
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Denda Pada Masing-Masing**
**Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| Setjen | 0 | 350 | (100,00) | 0 | 52 | (100,00) | 298 | 573,08 |
| Ditjen PT | 0 | 38 | (100,00) | 0 | 1.758 | (100,00) | (1.720) | (97,84) |
| Ditjen PB | 0 | 405 | (100,00) | 0 | 1.249 | (100,00) | (844) | (67,57) |
| Ditjen PSDKP | 5.607 | 68.860 | 1.228,11 | 6.999 | 21.701 | 310,06 | 47.159 | 217,31 |
| Ditjen PDSPKP | 0 | 2 | (100,00) | 0 | 54 | (100,00) | (52) | (96,30) |
| Ditjen PK | 0 | 77 | (100,00) | 0 | 173 | (100,00) | (96) | (55,49) |
| BPPSDMKP | 0 | 1.016 | (100,00) | 0 | 105 | (100,00) | 911 | 867,62 |
| BPPMHKP | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | (100,00) | (4) | (100,00) |
| **Total** | **5.607** | **70.748** | **1.261,78** | **6.999** | **25.096** | **358,57** | **45.652** | **181,91** |

Realisasi Pendapatan Denda untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp45.653.436.176,00 atau

181,91% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang secara umum disebabkan kenaikan atas Pendapatan Denda Lainnya.

Penjelasan atas Pendapatan Denda dirinci sebagai berikut.

1. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

    a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp350.000.000,00 berupa yang berasal dari pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Platform Integrasi Perizinan KKP sesuai BAST/BAPP Nomor BAST.365.4/PPK-7/XII/2024 Tanggal 30-12-2024 sesuai SPM Nomor 00027A tanggal 6 Januari 2025.

    b. Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp38.231.457,00 berupa pendapatan atas pekerjaan pemerintah berupa keterlamabatan pekerjaan. Pada periode 30 Juni 2025 pada:

        - PPS Nizam Zachman pendapatan denda berasal dari denda keterlambatan pekerjaan command center;

        - Sekretariat pendapatan denda berasal dari denda Perbaikan Kapal Perikanan dan temuan BPK No. 5/LHP/XVII/01/2018 Denda Keterlambatan Pengadaan Kapal Tahun TA. 2016 a.n. PT. Yasa Ayu Abadi.

    c. Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp404.344.485,00 berupa temuan atas temuan BPK atas Keramba Jaring Apung *offshore*.

    d. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp27.796.201,00 berupa denda administratif atas pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

    e. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.333.467,00 berupa Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan tahun 2025 dan denda keterlambatan pengiriman barang sesuai tanggal berakhirnya kontrak.

    f. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp76.858.023,00 terdapat pada satker Setditjen PKRL dan 3 UPT yaitu Satker BPSPL Denpasar, BPSPL Pontianak dan BPSPL Makassar.

        Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah pada Setditjen PKRL yang merupakan setoran denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp41.448.069,00 terdiri dari Rp40.370.000,00

berasal dari Denda Keterlambatan pekerjaan penataan ruang rapat dan ruang kerja pimpinan Ditjen PKRL, Rp785.254,00 berasal dari Direktorat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Rp292.815,00 berasal dari Direktorat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.

BPSPL Denpasar ada pendapatan berupa pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp14.099.594,00 dengan rincian sebagai berikut, Rp112.450,00 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Sarpras Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut (*Drone* dan GPS), Rp90.000,00 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Sarpras Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut (Proyektor dan lain-lain, Rp363.500,00 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Sarpras Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut (PC dan *Drone*), Rp4.000,00 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Sarpras Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Alor (Alat *Scan Barcode*), Rp16.520,00 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Sarpras Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Alor (*Action Camera*), Rp2.645.700 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Sarpras Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Alor (GPS, *Drone, Ecosounder*), Rp1.016.000,00 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut (*Smart Tab* dan *Smartphone*), Rp528.000,00 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Peralatan Pendukung Penyelenggaraan Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (Peralatan selam *scuba*), Rp9.323.424,00 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Sarpras Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Alor (Alat Pengukur Kualitas Air).

BPSPL Pontianak ada Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan senilai Rp1.032.080,00 berupa denda keterlambatan pengadaan seragam pegawai. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp20.278.280,00 pada Satker BPSPL Makassar merupakan Denda keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan kontraktual Pengadaan Peralatan dan Mesin serta Jasa Konsultan Kegiatan Lautran1 diantaranya Reviu Rencana Pengelolaan KKD Teluk Moramo dan KK Teluk Gorontalo, Reviu-*Update* Rencana Zonasi KKD Banggai Dalaka dan Kajian Daya Dukung dan Daya tampung KKD Teluk Maramo dan KK Teluk Gorontalo.

g. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp404.344.485,00 yang berasal dari:

- SUPM Tegal atas Keterlambatan atas Penyelesaian Pembangunan Gedung Sayap Direktorat di SUPM Tegal,

- Poltek Karawang atas Keterlambatan pembangunan gedung simulator dan keterlambatan pembangunan lainnya di 7 satuan kerja

h. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp4.124.054,00, pada tahun 2024 berupa pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pada Balai Besar KIPM Makasar dan Balai KIPM Jakarta II.

2. Pendapatan Denda Lainnya

a. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp21.547.019.784,00 merupakan PNBP fungsional pada Direktorat Jenderal PSDKP berupa denda administratif atas pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, serta ganti kerugian atas penyelesaian sengketa;

b. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp1.429.058,00 berupa denda keterlambatan pembayaran *plugging container* dan CS 2000 ton;

c. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp9.679.695,00 berupa denda atas Keterlambatan Pembayaran Sewa Kapal Bawal Putih dan Keterlambatan Sewa Asrama di BPPP Ambon.

### Pendapatan Lain-Lain

*Pendapatan Lain-Lain Rp8.064.903.196,00*

Realisasi Pendapatan Lain-Lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp8.064.903.196,00 dan sebesar Rp10.711.582.944,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Lain-Lain pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.27**
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain Per Akun**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 578 | (100,00) | 0 | 1.534 | (100,00) | (956) | (62,32) |
| Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 5.914 | (100,00) | 0 | 7.201 | (100,00) | (1.287) | (17,87) |
| Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 1.478 | (100,00) | 0 | 1.807 | (100,00) | (329) | (18,21) |
| Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS | 0 | 65 | (100,00) | 0 | 112 | (100,00) | (47) | (41,96) |
| Pendapatan Anggaran Lain-lain | 0 | 30 | (100,00) | 0 | 57 | (100,00) | (27) | (47,37) |
| **Total** | **0** | **8.065** | **(100,00)** | **0** | **10.711** | **(100,00)** | **(2.646)** | **(24,70)** |

**Tabel B.28**
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| Setjen | 0 | 2.208 | (100,00) | 0 | 434 | (100,00) | 1.774 | 408,76 |
| Itjen | 0 | 5 | (100,00) | 0 | 24 | (100,00) | (19) | (79,17) |
| Ditjen PT | 0 | 234 | (100,00) | 0 | 1.751 | (100,00) | (1.517) | (86,64) |
| Ditjen PB | 0 | 3.360 | (100,00) | 0 | 2.705 | (100,00) | 655 | 24,21 |
| Ditjen PSDKP | 0 | 144 | (100,00) | 0 | 1.385 | (100,00) | (1.241) | (89,60) |
| Ditjen PDSPKP | 0 | 160 | (100,00) | 0 | 410 | (100,00) | (250) | (60,98) |
| Ditjen PK | 0 | 491 | (100,00) | 0 | 783 | (100,00) | (292) | (37,29) |

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| BPPSDMKP | 0 | 1.417 | (100,00) | 0 | 2.799 | (100,00) | (1.382) | (49,37) |
| BPPMHKP | 0 | 46 | (100,00) | 0 | 421 | (100,00) | (375) | (89,07) |
| **Total** | **0** | **8.065** | **(100,00)** | **0** | **10.712** | **(100,00)** | **(2.647)** | **(24,71)** |

Realisasi Pendapatan Lain-lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.646.679.748,00 atau sebesar 24,71% dari Realisasi Pendapatan Lain-lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang secara umum disebabkan karena berkurangnya Penerimaan Kembali Belanja dibandingkan dengan tahun 2024.

Penjelasan atas Pendapatan Lain-lain pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Antara lain merupakan:

   a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, yang ada pada:

      - Satker Biro Umum atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp56.809.113,00 berasal dari potongan SPM nomor 00861T tanggal 11 Maret 2025 01056T tanggal 11 April 2025, 01725T tanggal 19 Juni 2025 serta pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian gaji, tunjangan fungsional dan tunjangan kinerja, tunjangan suami dan anak tahun anggaran yang lalu Bulan November dan Desember 2024.

      - Satker Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya KP sebesar Rp1.110.300,00 dari kekurangan gaji PNS mulai bulan November 2024 sampai dengan bulan Januari 2025 yang telah dibayarkan pada bulan Februari 2025 dengan nomor SPM 00049T/632004/2025 dan nomor SP2D 251321303000043 tanggal 19 Februari 2025.

   b. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu yang ada pada Satker Biro Umum sebesar Rp1.241.607.452,00 atas Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu untuk periode 13 yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*).

c. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu terdapat pada:

- Satker Biro Umum sebesar Rp54.779.662,00. Pengembalian ini berasal dari Pengembalian Belanja Pekerjaan Renovasi Biro SDMAO sesuai dengan NTPN No. 56FA67QLV2APKV8B tanggal 29 April 2025.

- Satker Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya KP sebesar Rp788.914.173,00 berasal dari penihilan belanja modal tahun 2024 yang dibayarkan melalui mekanisme RPATA.

d. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp64.812.239,00. yang merupakan transaksi akun oleh PT TASPEN (Persero) yang ada pada Satker Biro Umum.

2. Inspektorat Jenderal

Merupakan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp5.029.794,00 atas Setoran SSBP senilai Rp5.029.794,00 NTPN 0816848VVNU1F225 tanggal 20 Maret 2025, merupakan penerimaan kembali belanjapegawai TAYL.

3. Ditjen Perikanan Tangkap

Antara lain merupakan pendapatan atas:

a. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp20.037.807,00 berupa kelebihan belanja pegawai seperti kelebihan pembayaran tukin dan uang makan;

b. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp150.681.521,00 berupa pendapatan atas belanja barang seperti listrik dan air Desember TA 2024 yang dibayar pada TA 2025 dan temuan BPK atas belanja barang berupa perjalanan dinas luar negeri;

c. Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp35.794.407,00 berupa pendapatan yang diterima atas temuan pengembalian belanja modal berupa kekurangan volume pada PPS Nizam Zachman;

d. Pendapatan anggaran lain-lain sebesar Rp27.000.000,00 yang terdapat pada Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang merupakan pendapatan atas setoran temuan Inspektorat V.

4. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Antara lain merupakan:

   a. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp3.006.986.908,00;

   b. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp327.288.718,00;

   c. Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp29.102.029,00;

   d. Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji sebesar pada tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp1.451.560,00.

5. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

   Antara lain:

   a. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp46.154.830,00 terdapat pada:

| Kode | Nama Satker | Nilai |
|---|---|---|
| **215141** | Stasiun PSDKP Ambon | 809.647 |
| **325156** | Pangkalan PSDKP Batam | 9.019.300 |
| **440822** | Pangkalan PSDKP Bitung | 2.194.357 |
| **440847** | Stasiun PSDKP Pontianak | 736 |
| **449520** | Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP | 34.130.790 |
| **Total** | | **46.154.830** |

   Berupa:

   1.) Kelebihan pembayaran Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja, Kelebihan pembayaran Uang Makan, Kelebihan Pembayaran Uang Lembur, Kelebihan Pembayaran Uang Makan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Istri dan Tunjangan Beras Tahun 2025;
   2.) Temuan BPK Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja kepada Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,

telah disetor tanggal 24 April 2025 dengan nomor NTPN 6E6227QLV2AL6GKJ, dan;

3.) Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL senilai Rp736,00 yang dibayarkan melalui potongan nomor SPM 00020A tanggal 13 Januari 2025 dan nomor SPM 00021A tanggal 14 Januari 2025.

b. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp52.851.054,00

1) Stasiun PSDKP Cilacap mencatat penerimaan kembali belanja barang tahun TAYL sebesar Rp24.632.852,00 merupakan Temuan BPK Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan kantor Stasiun PSDKP Cilacap (*Kitchen Set*), telah disetor tanggal 14 April 2025 dengan nomor NTPN 023CF6U8F7NTLBTM.

2) Stasiun PSDKP Ambon mencatat penerimaan belanja barang TAYL senilai Rp251.472,00 merupakan kelebihan pembayaran (terbayar dua kali) listrik Kantor Wilker Tulehu bulan Oktober 2025 dengan Nomor NTPN 557A61JNG80OU5M5 tanggal 21 Januari 2025.

3) Stasiun PSDKP Biak mencatat penerimaan belanja barang TAYL senilai Rp65.157,00 merupakan pengembalian double bayar tagihan telekomunikasi bulan November dan Desember 2024 dengan nomor NTPN 58E043CUFU00ILRR.

4) Pangkalan PSDKP Bitung mencatat penerimaan Kembali belanja barang TAYL senilai Rp6.791.000,00 merupakan SPM Penihilan RPATA No 9 tanggal 8 Januari 2025 merupakan pembayaran BBM yang dilaksanakan oleh oleh Penyedia PT. Pertamina Patra Niaga.

5) Sekretariat Ditjen PSDKP mencatat penerimaan Kembali belanja barang TAYL senilai Rp21.110.573,00 merupakan:

- Pengembalian atas penihilan RPATA pekerjaan Komunikasi Satelit di Kapal Pengawas sebesar Rp10.806.642,00 sesuai kontrak Nomor 182/KPA.1-PSDKP/I/2024 melalui SPM Penihilan Nomor 00016A Tanggal 8 Januari 2025, dan telah disetujui KPPN melalui SP2D Nomor 251750301000027 tanggal 10 Januari 2025.

- Pengembalian atas penihilan RPATA pekerjaan Dukungan Terintegrasi Kapal Pengawas Paket II sebesar Rp1.760.000,00 sesuai kontrak Nomor 45/KPA.1-PSDKP/I/2024 melalui SPM Penihilan Nomor 00015A Tanggal 8 Januari 2025, dan telah disetujui KPPN melalui SP2D Nomor 251750301000026 tanggal 10 Januari 2025.

- Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri ABK Tahun 2024 berdasarkan temuan PDTT BPK sebesar Rp8.543.931 sebanyak 13 pegawai yang seluruhnya telah disetorkan ke kas negara pada bulan April 2025.

c. Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp45.373.731,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Kode | Nama Satker | Nilai |
|---|---|---|
| **065135** | Pangkalan PSDKP Lampulo | 1.500.000 |
| **245160** | Stasiun PSDKP Kupang | 4.800.000 |
| **440816** | Pangkalan PSDKP Jakarta | 20.973.731 |
| **449520** | Sekretariat Ditjen PSDKP | 18.100.000 |
| **Jumlah** | | **45.373.731** |

1) Pangkalan PSDKP Lampulo mencatat penerimaan kembali modal TAYL sebesar Rp1.500.000,00 merupakan kelebihan pembayaran atas item biaya listrik pada kontrak pembangunan kantor Satwas SDKP Padang. Pengembalian sudah dibayarkan ke kas negara dengan NTB: 903131084807 dan NTPN: AE69948VVNO4TK78 tanggal 23 Januari 2025.

2) Stasiun PSDKP Kupang mencatat penerimaan Kembali modal TAYL senilai Rp4.800.000,00 merupakan temuan BPK Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Pendopo senilai Rp4.775.085,08, telah disetor tanggal 19 Februari 2025 dengan Nomor NTPN 5C2821JNG83RPO98.

3) Pangkalan PSDKP Jakarta mencatat penerimaan Kembali modal TAYL sebesar Rp20.973.731,00 terdiri dari:

- Temuan BPK Pekerjaan Pematangan Lahan Pangkalan PSDKP Jakarta Kekurangan Volume Pekerjaan senilai Rp8.105.535,51 telah disetor tanggal 11 Maret 2025 dengan nomor NTPN 16CC155DFIG4VMCB senilai Rp8.105.536,00.

- Temuan BPK Pekerjaan Renovasi Pagar Kantor Pangkalan PSDKP Jakarta Kekurangan Volume Pekerjaan senilai Rp12.868.195,00 telah disetor tanggal 11 Maret 2025 dengan nomor NTPN 7F4700NA0DK6UN7D.

4) Sekretariat Ditjen PSDKP mencatat penerimaan kembali modal TAYL senilai Rp18.100.000,00 merupakan pengembalian belanja atas tindak lanjut temuan BPK terhadap pengadaan Kapal Pengawas SDK pada tahun 2009, Pengembalian disetorkan pada tanggal 3 Oktober 2025 dengan NTPN nomor 6BFBB6U8F89I7CA3.

6. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

Antara lain merupakan pendapatan atas:

- Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp6.074.402,00 terdapat pada Satker Sekretariat Dijten PDSPKP dan Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan berupa pengembalian sisa Perhitungan Tunjangan Kinerja PNS dan uang makan Tahun 2024 serta potongan SPM.

- Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp154.155.627,00, terdapat pada Satker Sekretariat Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp153.755.127 dan BBP3KP sebesar Rp400.500 berupa pembayaran PNBP atas temuan perjalanan dinas TA 2024, kekurangan volume pekerjaan, Pengembalian Perjalanan Dinas Luar Negeri TA 2023, Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas dan Penyimpanan TA 2024, Pengembalian Belanja Pembayaran Honorarium yang melebihi SBM pada Kegiatan Gemarikan TA 2024, Temuan Kelebihan Pembayaran CV Bintang Rejeki LHP BPK atas LK 2016 dan Pengembalian kelebihan pembayaran.

7. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Antara lain merupakan pendapatan atas:

a. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp70.878.210,00 terdapat pada tujuh satker yaitu LPSPL Sorong, LKKPN Pekanbaru, BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang, BPSPL Pontianak, Sekretariat Ditjen PKRL dan BPSPL Makassar atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), pengembalian kelebihan bayar belanja pegawai berupa gaji,

tunjangan kinerja pegawai, kelebihan uang makan, Penerimaan kembali belanja barang dan pegawai TAYL atas Pembayaran Kekurangan Gaji bulan November tahun 2024 s.d. bulan Februari tahun 2025 atas Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional

b. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp420.047.376,00 terdapat pada 6 satker yaitu Sekretariat Ditjen PKRL, LPSPL Sorong, BPSPL Pontianak, BKKPN Kupang, BPSPL Makassar dan BPSPL Denpasar atas pengembalian kelebihan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu seperti kelebihan pembayaran perjalanan dinas, biaya cetak, , pengembalian atas temuan Itjen terkait pengembalian Belanja Perjalanan Dinas yang sebagaimana tertuang dalam surat Inspektur Jenderal I Nomor : T.84/ITJ.1/HP.130/II/2025, - 25 - tanggal 28 Februari 2025, perihal Hasil Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025, Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri atas TGR Hasil Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran kegiatan Lautra TA 2024-2025 dengan NTPN 41C0D0NA0DK6V8MU dan NTB 087301591274, konsep temuan pemeriksaan BPK RI terkait Laporan Keuangan 2024, konsep temuan pemeriksaan Laporan Keuangan Lautra 2024, LHP Itjen No. T.84/ITJ.1/HP.130/II/2025, Pengembalian ke kas negara sesuai LHA Nomor 3608/ITJ.0/RC.330/III/2018 dengan akun 425912 dan Kekurangan PPh pada Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi oleh LSM Prima pada DKP Kab Buton Selatan Tahun 2016 sesuai LHP BPK Nomor 22C/LHP/XVII/06/2017

8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Antara lain merupakan pendapatan atas:

a. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL senilai Rp325.034.799,00 berupa pendapatan yang berasal dari Pengembalian uang makan, tunjangan kinerja PNS, tunjangan fungsional TA 2024 dari 22 Satker lingkup BPPSDMKP;

b. Penerimaan kembali belanja barang TAYL senilai Rp862.721.609,00 berupa pengembalian belanja perjalanan dinas, belanja bahan, belanja persediaan, belanja barang dan jasa, dan belanja pemeliharaan pada 9 satker BPPSDMKP;

c. Penerimaan kembali belanja modal TAYL senilai Rp225.455.415,00 pada Politeknik AUP dan SUPM Tegal yang merupakan setoran atas temuan BPK Pembangunan Gedung Direktorat dan Pengurugan tanah pada SUPM Tegal senilai Rp205.394.065 dan pengembalian atas renovasi gedung direktorat lantai 1 di Politeknik AUP senilai Rp20.061.350;

d. Pendapatan anggaran lain-lain senilai Rp3.358.000,00 yang berasal dari LRMPHP Bantul.

e. Pada satker BPPP Banyuwangi yang merupakan kelebihan pengembalian TUP.

9. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Antara lain merupakan pendapatan atas:

a. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL merupakan pengembalian gaji, tunjangan kinerja, uang makan sebesar Rp25.063.078,00 setoran dilakukan melalui (dua) cara, dengan disetorkan menggunakan SSBP dan dengan memotong SPM.

b. Penerimaan kembali belanja barang TAYL merupakan jurnal balik akrual tahun anggaran yang lalu, pengembalian perjalanan dinas, kelebihan pembayaran tagihan listrik dan telepon tahun angaran yang lalu sebesar Rp25.063.078.

c. Penerimaan kembali belaja modal TAYL pada tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp79.370.600,00 dimana realisasi tahun 2024 merupakan pengembalian kekurangan volume pengadaaan pekerjaan, kelebihan pembayaran pekerjaan berdasarkan hasil audit APIP yang terdapat pada satker Balai KIPM Denpasar dan Stasiun KIPM Cirebon.

d. Pendapatan anggaran lain-lain pada tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp9.775.000,00. Dimana realisasi tahun 2024 merupakan pendapatan dari kelebihan Pengembalian UP akhir tahun pada Balai KIPM Tanjung Pinang.

## B.2 Belanja

*Realisasi Belanja Rp7.969.246.147.229,00*

Realisasi Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.969.246.147.229,00 atau 79,51% dari pagu anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp10.023.336.496.000,00. Rincian pagu dan realisasi belanja per jenis belanja untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.29**
**Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

| Jenis Belanja | Pagu Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| **Belanja Pegawai** | 2.014.373.667.000 | 1.981.998.452.037 | 98,39 |
| **Belanja Barang** | 4.727.315.788.000 | 3.767.428.525.803 | 79,69 |
| **Belanja Modal** | 3.281.647.041.000 | 2.219.819.169.389 | 67,64 |
| **Total** | **10.023.336.496.000** | **7.969.246.147.229** | **79,51** |

Sedangkan rincian pagu dan realisasi belanja pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.30**
**Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Pada Masing-masing**
**Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

| Unit Eselon I | Pagu Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| **Setjen** | 628.315.099.000 | 546.862.338.079 | 87,04 |
| **Itjen** | 50.150.274.000 | 49.585.196.401 | 98,87 |
| **Ditjen PT** | 2.664.335.557.000 | 1.727.261.946.882 | 64,83 |
| **Ditjen PB** | 1.435.421.390.000 | 1.083.907.177.037 | 75,51 |
| **Ditjen PSDKP** | 1.683.504.931.000 | 1.631.917.981.196 | 96,94 |
| **Ditjen PDSPKP** | 218.791.500.000 | 152.383.791.590 | 69,65 |
| **Ditjen PK** | 1.568.147.056.000 | 1.301.851.920.032 | 83,02 |
| **BPPSDMKP** | 1.418.309.833.000 | 1.176.708.266.046 | 82,97 |
| **BPPMHKP** | 356.360.856.000 | 298.767.529.966 | 83,84 |
| **Total** | **10.023.336.496.000** | **7.969.246.147.229** | **79,51** |

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.305.019.226.513,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja 31 Desember 2024, realisasi belanja untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.005.021.640.032,00 atau sebesar 15,95%. Rincian perbandingan realisasi belanja per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.31**
**Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Belanja Pegawai** | 1.981.998.452.037 | 1.891.758.893.702 | 90.239.558.335 | 4,77 |
| **Belanja Barang** | 3.767.428.525.803 | 3.885.910.376.345 | (118.481.850.542) | (3,05) |
| **Belanja Modal** | 2.219.819.169.389 | 522.328.316.434 | 1.697.490.852.955 | 324,99 |
| **Total** | **7.969.246.147.229** | **6.299.997.586.481** | **1.669.248.560.748** | **26,50** |

## B.2.1 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai Rp1.981.998.452.037,00*

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.981.998.452.037,00 atau 98,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.014.373.667.000,00.

Rincian pagu anggaran dan realisasi belanja pegawai menurut akun 3 *digit* untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.32**
**Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

| Jenis Akun | Pagu Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| **Belanja Gaji dan Tunjangan** | 1.004.707.774.000 | 991.461.223.411 | 98,68 |
| **Belanja Honorarium/ Lembur/ Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito** | 1.009.665.893.000 | 990.537.228.626 | 98,11 |
| **Total** | **2.014.373.667.000** | **1.981.998.452.037** | **98,39** |

Sedangkan rincian pagu anggaran dan realisasi belanja pegawai per Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.33**
**Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**
**Menurut Unit Eselon I**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

| Unit Eselon I | Pagu Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| **Setjen** | 98.249.172.000 | 97.824.283.540 | 99,57 |
| **Itjen** | 39.229.470.000 | 38.952.922.377 | 99,30 |
| **Ditjen PT** | 247.371.621.000 | 242.049.672.937 | 97,85 |
| **Ditjen PB** | 195.824.149.000 | 193.972.845.565 | 99,05 |
| **Ditjen PSDKP** | 216.316.162.000 | 216.113.497.416 | 99,91 |
| **Ditjen PDSPKP** | 70.633.574.000 | 68.766.107.822 | 97,36 |
| **Ditjen PKRL** | 122.762.427.000 | 119.052.031.110 | 96,98 |
| **BPPSDMKP** | 862.243.475.000 | 849.400.910.651 | 98,51 |
| **BPPMHKP** | 161.942.617.000 | 156.064.257.598 | 96,37 |
| **Total** | **2.014.572.667.000** | **1.982.196.529.016** | **98,39** |

Pagu anggaran belanja pegawai terbesar berada pada Unit Eselon I BPPSDMKP sehubungan dengan jumlah pegawai terbanyak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rincian perbandingan realisasi belanja pegawai per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.34**
**Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Akun**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

| Jenis Akun | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Naik (Turun) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Belanja Gaji dan Tunjangan** | 991.461.223.411 | 950.188.749.527 | 41.272.473.884 | 4,34 |
| **Belanja Honorarium/Lembur/ Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito** | 990.537.228.626 | 941.570.144.175 | 48.967.084.451 | 5,20 |
| **Total** | **1.981.998.452.037** | **1.891.758.893.702** | **90.239.558.335** | **4,77** |

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp90.239.558.335,00 atau 4,77% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Kenaikan realisasi ini disebabkan peningkatan belanja yang bersumber dari komponen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), seiring dengan adanya pengangkatan PPPK baru pada bulan Oktober 2025 sebanyak 3.222 orang.

## Belanja Gaji dan Tunjangan

*Belanja Gaji dan Tunjangan Rp991.461.223.411,00*

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp991.461.223.411,00 dan Rp950.188.749.527,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.35**
**Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Menurut Unit Eselon I**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| **Setjen** | 45.644 | 45.572 | 99,84 | 40.985 | 40.725 | 99,37 | 4.847 | 11,90 |
| **Itjen** | 17.393 | 17.264 | 99,26 | 16.173 | 16.164 | 99,94 | 1.100 | 6,81 |
| **Ditjen PT** | 128.759 | 125.029 | 97,10 | 118.368 | 118.106 | 99,78 | 6.923 | 5,86 |
| **Ditjen PB** | 96.633 | 95.729 | 99,06 | 94.722 | 94.139 | 99,38 | 1.590 | 1,69 |
| **Ditjen PSDKP** | 105.919 | 105.829 | 99,92 | 99.448 | 99.308 | 99,86 | 6.521 | 6,57 |
| **Ditjen PDSPKP** | 33.845 | 32.784 | 96,87 | 31.348 | 31.204 | 99,54 | 1.580 | 5,06 |
| **Ditjen PK** | 58.064 | 56.549 | 97,39 | 52.935 | 52.630 | 99,42 | 3.919 | 7,45 |
| **Ditjen PRL** | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **BPPSDMKP** | 440.515 | 437.840 | 99,39 | 421.509 | 419.873 | 99,61 | 17.967 | 4,28 |
| **BPPMHKP** | 77.937 | 74.865 | 96,06 | 79.015 | 78.040 | 98,77 | (3.175) | (4,07) |
| **Total** | **1.004.709** | **991.461** | **98,68** | **954.503** | **950.189** | **99,55** | **41.272** | **4,34** |

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp41.272.473.884,00 atau 4,34% dari realisasi periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan jumlah pegawai dibandingkan dengan tahun 2024 paling besar terjadi pada BPPSDMKP sebanyak 1.519 pegawai dan diikuti DJPT sebanyak 413 pegawai.

## Belanja Honorarium/ Lembur/ Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito

*Belanja Honorarium/Lembur/ Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito Rp.990.537.228.626,00*

Realisasi Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp990.537.228.626,00 dan sebesar Rp941.570.144.175,00.

Rincian pagu dan realisasi Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito pada menurut Unit Eselon I untuk periode yang

berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.36**
**Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito Menurut Unit Eselon I**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik/Turun | % |
| **Setjen** | 52.606 | 52.252 | 99,33 | 47.630 | 47.279 | 99,26 | 4.973 | 10,52 |
| **Itjen** | 21.837 | 21.688 | 99,32 | 20.410 | 20.410 | 100,00 | 1.278 | 6,26 |
| **Ditjen PT** | 118.612 | 117.021 | 98,66 | 111.791 | 111.689 | 99,91 | 5.332 | 4,77 |
| **Ditjen PB** | 98.992 | 98.046 | 99,04 | 92.062 | 91.753 | 99,66 | 6.293 | 6,86 |
| **Ditjen PSDKP** | 110.397 | 110.284 | 99,90 | 101.926 | 101.872 | 99,95 | 8.412 | 8,26 |
| **Ditjen PDSPKP** | 36.788 | 35.982 | 97,81 | 34.118 | 34.115 | 99,99 | 1.867 | 5,47 |
| **Ditjen PKRL** | 64.699 | 62.503 | 96,61 | 59.565 | 59.445 | 99,80 | 3.058 | 5,14 |
| **BPPSDMKP** | 421.729 | 411.561 | 97,59 | 398.221 | 396.870 | 99,66 | 14.691 | 3,70 |
| **BPPMHKP** | 84.006 | 81.199 | 96,66 | 79.718 | 78.138 | 98,02 | 3.061 | 3,92 |
| **Total** | **1.009.666** | **990.536** | **98,11** | **945.441** | **941.571** | **99,59** | **48.965** | **5,20** |

Realisasi Belanja Honorarium/ Lembur/ Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp48.967.084.451,00 atau 5,20% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Kenaikan tertinggi pada BPPSDMKP sebesar Rp14.691.029.531,00 sejalan dengan kenaikan jumlah pegawai sebanyak 1.519 dibandingkan dengan tahun 2024.

### B.2.2 Belanja Barang

*Belanja Barang Rp3.767.428.525.803,00*

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.767.428.525.803,00 atau 79,69% dari pagu anggaran Belanja Barang sebesar Rp4.727.315.788.000,00.

**Tabel B.37**
**Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Per Akun**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

| Jenis Akun | Pagu Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| **Belanja Barang** | 1.018.468.531.000 | 858.165.312.405 | 84,26 |
| **Belanja Jasa** | 1.037.673.381.000 | 788.469.855.581 | 75,98 |
| **Belanja Pemeliharaan** | 249.212.999.000 | 236.062.230.498 | 94,72 |
| **Belanja Perjalanan Dinas** | 456.586.544.000 | 256.404.144.140 | 56,16 |
| **Belanja BLU** | 119.877.435.000 | 74.327.901.202 | 62,00 |

| Jenis Akun | Pagu Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| **Belanja Barang Untuk Dserahkan Kepada Masyarakat** | 1.828.839.441.000 | 1.526.211.637.408 | 83,45 |
| **Total** | **4.727.315.788.000** | **3.767.428.525.803** | **79,69** |

Rincian realisasi Belanja Barang menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.38**
**Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

| Nama Eselon I | Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Setjen | 390.833.121.000 | 332.641.132.432 | 85,11 |
| Itjen | 10.920.802.000 | 10.632.274.024 | 97,36 |
| Ditjen PT | 1.871.462.328.000 | 1.456.594.809.717 | 77,83 |
| Ditjen PB | 546.046.993.000 | 456.121.518.392 | 83,53 |
| Ditjen PSDKP | 509.026.434.000 | 458.623.854.414 | 90,10 |
| Ditjen PDSPKP | 142.109.350.000 | 77.598.985.213 | 54,61 |
| Ditjen PK | 766.765.946.000 | 567.331.359.684 | 73,99 |
| Ditjen PRL | 0 | 0 | 0,00 |
| BPPSDMKP | 323.793.936.000 | 292.345.179.686 | 90,29 |
| BPPMHKP | 166.356.878.000 | 115.539.412.241 | 69,45 |
| **Total** | **4.727.315.788.000** | **3.767.428.525.803** | **79,69** |

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.39**
**Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Akun**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Naik (Turun) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Belanja Barang** | 858.165.312.405 | 1.325.453.972.546 | (467.288.660.141) | (35,25) |
| **Belanja Jasa** | 799.798.845.207 | 689.698.165.896 | 110.100.679.311 | 15,96 |
| **Belanja Pemeliharaan** | 236.062.230.498 | 355.011.705.003 | (118.949.474.505) | (33,51) |
| **Belanja Perjalanan Dinas** | 256.404.144.140 | 831.013.130.715 | (574.608.986.575) | (69,15) |

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Naik (Turun) | % |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Badan Layanan Umum (BLU) | 90.786.356.145 | 80.546.714.025 | 10.239.642.120 | 12,71 |
| Belanja Barang Untuk Dserahkan Kepada Masyarakat | 1.526.211.637.408 | 604.186.688.160 | 922.024.949.248 | 152,61 |
| **Total** | **3.767.428.525.803** | **3.885.910.376.345** | **(118.481.850.542)** | **(3,05)** |

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp118.481.850.542,00 atau 3,05% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang secara umum disebabkan karena penurunan pada realisasi belanja perjalanan dinas dan belanja barang, khususnya Belanja Barang Non Operasional.

## Belanja Barang

*Belanja Barang Rp858.165.312.405,00*

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp858.165.312.405,00 dan sebesar Rp1.325.453.972.546,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Barang menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.40**
**Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Menurut Unit Eselon I**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| **Setjen** | 145.395 | 115.549 | 79,47 | 150.220 | 138.086 | 91,92 | (22.537) | (16,32) |
| **Itjen** | 2.562 | 2.509 | 97,93 | 6.077 | 6.074 | 99,95 | (3.565) | (58,69) |
| **Ditjen PT** | 72.195 | 57.313 | 79,39 | 133.047 | 119.915 | 90,13 | (62.602) | (52,21) |
| **Ditjen PB** | 126.937 | 115.770 | 91,20 | 167.939 | 166.311 | 99,03 | (50.541) | (30,39) |
| **Ditjen PSDKP** | 329.846 | 293.593 | 89,01 | 495.555 | 419.462 | 84,64 | (125.869) | (30,01) |
| **Ditjen PDSPKP** | 39.622 | 29.122 | 73,50 | 80.488 | 65.671 | 81,59 | (36.549) | (55,65) |
| **Ditjen PKRL** | 59.021 | 42.778 | 72,48 | 57.130 | 55.002 | 96,28 | (12.224) | (22,22) |
| **BPPSDMKP** | 172.387 | 156.712 | 90,91 | 321.722 | 292.223 | 90,83 | (135.511) | (46,37) |
| **BPPMHKP** | 70.502 | 44.819 | 63,57 | 64.817 | 62.709 | 96,75 | (17.890) | (28,53) |
| **Total** | **1.018.467** | **858.165** | **84,26** | **1.476.995** | **1.325.453** | **89,74** | **(467.288)** | **(35,25)** |

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp858.165.312.405,00 atau 89,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.018.468.531.000,00. Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 jika dibandingkan dengan realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp467.288.660.141,00 atau 35,25% yang disebabkan menurunnya realisasi belanja pada pos belanja keperluan perkantoran, ekstrakomptabel, dan persediaan barang konsumsi. Di antara penurunan yang terjadi, pos belanja barang non operasional di Ditjen PSDKP menurun karena terbatasnya belanja BBM Kapal Pengawas untuk kegiatan operasi pengawasan dan terdapat belanja dari anggaran PNBP yang tidak terealisasi pada termin 10 pengadaan BBM kapal pengawas karena penyampaian SPM diluar batas waktu LLAT 2025 sebagaimana telah diatur pada Perdirjen Nomor PER(17/PB/2025. Belanja tersebut menjadi utang tahun 2025 yang akan dibayarkan di tahun 2026.

Terdapat blokir anggaran pada belanja barang sebesar Rp103.228.536.000,00 atau 10,14% dari pagu anggaran belanja barang KKP tahun 2025.

Realisasi belanja barang yang cukup signifikan diantaranya:

1. Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak pada Satker Setditjen PSDKP sebesar Rp114.320.853.000,00;

2. pengadaan pakan buatan (pembesaran) tahap I Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) di Karawang pada Satker Setditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp22.213.800.000,00;

3. Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan dan Dukungan Layanan Perkantoran Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Satker Biro Umum sebesar Rp18.602.225.985,00;

4. Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dan Persediaan Barang Kebersihan (Jasa Tenaga Kerja Kebersihan Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan) pada Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp17.346.181.457,00;

5. Paket Pekerjaan Pengadan Jasa Tenaga Teknisi (Jasa Tenaga Teknisi Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan) pada Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp14.935.016.275,00.

## Belanja Jasa

*Belanja Jasa Rp799.798.845.207,00*

Realisasi belanja jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp799.798.845.207,00 dan sebesar Rp689.698.165.896,00. Rincian pagu dan realisasi belanja jasa menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.41**
**Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Jasa Menurut Unit Eselon I**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| Setjen | 70.466 | 68.136 | 96,69 | 96.484 | 96.184 | 99,69 | (28.048) | (29,16) |
| Itjen | 1.093 | 1.076 | 98,44 | 1.446 | 1.446 | 100,00 | (370) | (25,59) |
| Ditjen PT | 314.029 | 196.194 | 62,48 | 181.017 | 146.223 | 80,78 | 49.971 | 34,17 |
| Ditjen PB | 137.335 | 124.910 | 90,95 | 104.587 | 100.392 | 95,99 | 24.518 | 24,42 |
| Ditjen PSDKP | 101.847 | 99.006 | 97,21 | 115.541 | 110.635 | 95,75 | (11.629) | (10,51) |
| Ditjen PDSPKP | 31.543 | 27.808 | 88,16 | 50.921 | 42.504 | 83,47 | (14.696) | (34,58) |
| Ditjen PK | 259.532 | 174.007 | 67,05 | 164.468 | 55.608 | 33,81 | 118.399 | 212,92 |
| BPPSDMKP | 83.491 | 73.638 | 88,20 | 104.590 | 101.056 | 96,62 | (27.418) | (27,13) |
| BPPMHKP | 38.536 | 35.024 | 90,89 | 43.868 | 35.650 | 81,27 | (626) | (1,76) |
| **Total** | **1.037.872** | **799.799** | **77,06** | **862.922** | **689.698** | **79,93** | **110.101** | **15,96** |

Realisasi belanja jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp799.798.845.207,00 atau 77,06% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.037.872.381.000,00. Terdapat blokir anggaran pada pos belanja jasa sebesar Rp95.690.286.000,00 atau 9,40% dari total pagu belanja jasa KKP tahun 2025.

Realisasi belanja jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp98.771.689.685,00 atau sebesar 14,32% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang disebabkan kenaikan realisasi pada pos belanja Jasa Lainnya dan belanja Jasa Konsultan.

Realisasi Belanja Jasa yang cukup signifikan diantaranya:

1. Pekerjaan Survei Hidro-Oseanografi di Teluk Jakarta dan Perairan Semarang pada Satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp35.535.207.000,00;

2. Penyiapan Pelaksanaan Pembangunan 1000 kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp20.132.904.300,00;

3. *Broodstock and Multiplication Centers Advisory Services Infrastucture Improvement for Shirmp Aquaculture Project (IISAP) ADB LOAN No.4283(INO* pada Satker Setditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp19.040.000.000,00;

4. Pekerjaan *Project Management and Technical Consultant (PMTC) Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP), ADB Loan No. 4283 - INO* pada Satker Setditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp12.226.471.539,00; dan

5. Jasa Konsultansi untuk *Technical Assistance to the Owner (TAO) Proyek Outer Ring Fishing Port Development (Eco Fishing Port) Lender AFD* pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp11.130.912.647,00.

Pengungkapan atas temuan hasil pemeriksaan BPK tahun 2025 atas Belanja Jasa diinformasikan sebagai berikut.

1. Kelebihan pembayaran Belanja Barang yang tidak sesuai kontrak senilai Rp17.000.000,00 atas Pekerjaan Pengadaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Tahun 2025 pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Telah terdapat setoran ke kas negara dengan NTPN 2DD9255DFS01OM7G sebesar Rp17.000.000,00.

2. Terdapat kelebihan pembayaran Belanja Barang sebesar Rp516.885.683,00 atas Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao pada Sekretariat DJPK yang tidak sesuai ketentuan. Atas kelebihan pembayaran ini, telah disetor ke kas negara sebesar sebesar Rp472.315.352,00 melalui NTPN Nomor F27786U8FH547IQ3 tanggal 21 Mei 2026 dan sebesar Rp44.570.331,00 melalui NTPN Nomor D2C5761QVMINQIJG tanggal 19 Mei 2026.

### Belanja Pemeliharaan

*Belanja Pemeliharaan Rp236.062.230.498,00*

Realisasi belanja pemeliharaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp236.062.230.498,00 dan Rp355.011.705.003,00. Rincian pagu dan realisasi belanja pemeliharaan menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.42**
**Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan Menurut Unit Eselon I**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| **Setjen** | 67.466 | 66.719 | 98,89 | 74.947 | 73.504 | 98,07 | (6.785) | (9,23) |
| **Itjen** | 640 | 640 | 100,00 | 1.170 | 1.168 | 99,83 | (528) | (45,21) |
| **Ditjen PT** | 45.045 | 36.235 | 80,44 | 45.863 | 43.660 | 95,20 | (7.425) | (17,01) |
| **Ditjen PB** | 25.827 | 25.397 | 98,34 | 38.001 | 37.875 | 99,67 | (12.478) | (32,95) |
| **Ditjen PSDKP** | 44.535 | 44.453 | 99,82 | 92.279 | 87.173 | 94,47 | (42.720) | (49,01) |
| **Ditjen PDSPKP** | 3.950 | 3.921 | 99,27 | 6.614 | 6.557 | 99,14 | (2.636) | (40,20) |
| **Ditjen PKRL** | 7.201 | 5.178 | 71,91 | 8.342 | 8.096 | 97,05 | (2.918) | (36,04) |
| **BPPSDMKP** | 28.578 | 28.288 | 98,99 | 74.897 | 72.878 | 97,30 | (44.590) | (61,18) |
| **BPPMHKP** | 25.972 | 25.231 | 97,15 | 25.232 | 24.101 | 95,52 | 1.130 | 4,69 |
| **Total** | **249.214** | **236.062** | **94,72** | **367.345** | **355.012** | **96,64** | **(118.950)** | **(33,51)** |

Realisasi belanja pemeliharaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp236.062.230.498,00 atau 94,72% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp249.212.999.000,00. Terdapat blokir anggaran pada pos belanja pemeliharaan sebesar R11.494.343.000,00 atau 4,61% dari total pagu belanja pemeliharaan.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, realisasi belanja pemeliharaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp118.949.474.505,00 atau 33,51%.

Realisasi Belanja Pemeliharaan yang cukup signifikan antara lain:

1. *ATS Collaboration Office* pada Biro Umum sebesar Rp7.892.383.339,00;
2. *ATS Command Center* pada Biro Umum sebesar Rp5.830.544.164,00;
3. Pengadaan Data Citra Satelit Radar dan Pemeliharaan Operasional Stasiun Bumi pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.915.533.550,00;
4. *Docking* kapal pengawas ORCA 01, 02, dan 03 sebesar Rp7.961.835.600,00; dan

5. Layanan Jasa Pengasuransian Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2025 Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Biro Umum sebesar Rp1.999.737.930,00.

Pengungkapan atas temuan hasil pemeriksaan BPK tahun 2025 atas Belanja Pemeliharaan diinformasikan sebagai berikut.

1. Kelebihan pembayaran Belanja Barang yang tidak sesuai kontrak senilai Rp20.798.919,00 atas Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Perkantoran dan *Guesthouse* pada BLUPPB Karawang. Telah terdapat setoran ke kas negara sebanyak tiga kali, antara lain:

    a. sebesar Rp10.163.086,00 melalui NTPN 52B566U8FGS1C9CL tanggal 19 Februari 2026;

    b. sebesar Rp8.547.523,00 melalui NTPN 368450NA0MRAH6AC tanggal 19 Februari 2026; dan

    c. sebesar Rp2.088.310,00 melalui NTPN F45D461QVM9KV9AT tanggal 19 Februari 2026.

2. Terdapat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp135.720.984,00 pada tiga unit eselon I dengan rincian temuan sebagai berikut.

    a. Kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan berupa penataan ruangan pada Ditjen PSDKP tidak sesuai ketentuan serta terjadi kekurangan volume sebesar Rp96.951.627,00. Telah terdapat setoran ke kas negara sebanyak lima kali melalui:

        i. NTPN nomor AA7506U8FH4V4JD7 tanggal 13 Mei 2026 sebesar Rp383.788,00;

        ii. NTPN nomor 540623CIG6RDGJ7S tanggal 13 Mei 2026 sebesar Rp28.127.845,00;

        iii. NTPN nomor 116C849001DPTIVD tanggal 13 Mei 2026 sebesar Rp13.409.882,00;

        iv. NTPN nomor 8D2A03CIG6RDGJ1P tanggal 13 Mei 2026 sebesar Rp11.866.674,00; dan

        v. NTPN nomor D88C03CIG6RDGIH4 tanggal 13 Mei 2026 sebesar Rp43.163.438,00.

b. Kekurangan Volume Pekerjaan dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan pada Pekerjaan Interior Melekat dan Backdrop Dinding Ruang *Basement* GMB III pada Biro Umum sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp16.921.300,00. Telah terdapat setoran ke kas negara sebanyak dua kali melalui NTPN nomor 1. NTPN nomor ECB867QLVBNABB0B tanggal 13 Mei 2026 sebesar Rp12.121.300,00 dan NTPN nomor 95D7D0NA0N473B1V tanggal 13 Mei 2026 sebesar Rp4.800.000,00.

c. Kekurangan volume pekerjaan atas renovasi gedung sebesar Rp21.848.057,00 pada DJPK. Telah terdapat setoran ke kas negara melalui NTPN nomor 73B818N3F69MIJMF sebesar Rp21.848.057,00.

## Belanja Perjalanan Dinas

*Belanja Perjalanan Dinas Rp256.404.144.140,00*

Realisasi belanja Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp256.404.144.140,00 dan sebesar Rp831.013.130.715,00. Rincian pagu dan realisasi belanja Perjalanan Dinas pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.43**
**Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Menurut Unit Eselon I**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| **Setjen** | 18.465 | 12.786 | 69,24 | 132.545 | 93.085 | 70,23 | (80.299) | (86,26) |
| **Itjen** | 6.627 | 6.407 | 96,68 | 38.806 | 36.458 | 93,95 | (30.051) | (82,43) |
| **Ditjen PT** | 85.102 | 60.391 | 70,96 | 217.267 | 162.362 | 74,73 | (101.971) | (62,80) |
| **Ditjen PB** | 70.936 | 33.742 | 47,57 | 103.352 | 91.851 | 88,87 | (58.109) | (63,26) |
| **Ditjen PSDKP** | 32.798 | 21.571 | 65,77 | 147.113 | 117.464 | 79,85 | (95.893) | (81,64) |
| **Ditjen PDSPKP** | 25.950 | 4.749 | 18,30 | 84.914 | 65.403 | 77,02 | (60.654) | (92,74) |
| **Ditjen PK** | 177.833 | 99.355 | 55,87 | 168.361 | 150.666 | 89,49 | (51.311) | (34,06) |
| **Ditjen PRL** | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **BPPSDMKP** | 7.528 | 6.937 | 92,15 | 92.356 | 73.929 | 80,05 | (66.992) | (90,62) |
| **BPPMHKP** | 31.347 | 10.465 | 33,38 | 44.454 | 39.795 | 89,52 | (29.330) | (73,70) |
| **Total** | **456.586** | **256.403** | **56,16** | **1.029.168** | **831.013** | **80,75** | **(574.610)** | **(69,15)** |

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp256.404.144.140,00 atau 56,16% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp456.586.544.000,00. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp574.608.986.575,00 atau 69,15% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini disebabkan adanya blokir anggaran terkait penghematan perjalanan dinas dengan nilai blokir pada akhir tahun sebesar Rp180.180.454.000,00.

Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk melaksanakan penugasan yang dilakukan baik di dalam negeri dan di luar negeri. Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp241.464.013.716,00 dan realisasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp14.940.130.424,00.

Pengungkapan atas temuan hasil pemeriksaan BPK tahun 2025 atas Belanja Perjalanan Dinas diinformasikan sebagai berikut.

1. Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Hibah Langsung kegiatan GEF-6 atas perjalanan dinas dalam negeri senilai Rp158.203.580,00 dan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas luar negeri senilai Rp70.914.620,00. Telah terdapat setoran ke kas negara sebesar Rp158.203.580,00 melalui NTPN 567AE0NA0N48ACOV pada tanggal 13 Mei 2026 dan sebesar Rp70.914.620,00 dengan NTPN D28ED3CIG6RDHFPJ tanggal 13 Mei 2026.

2. Terdapat kelebihan pembayaran Belanja Barang yang tidak sesuai kontrak senilai Rp617.741.032,00 atas pengadaan Survei Sosial Ekonomi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana di Lokasi KNMP TA 2025 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Kelebihan pembayaran terdapat pada Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp671.777.581,00 yang disertai dengan Belanja Jasa sebesar Rp187.526.000,00 dan Belanja Barang sebesar Rp25.000,00 serta dikurangi PPh 23 dan PPN dengan total sebesar Rp241.587.549,00. Pengembalian telah disetor ke kas negara sebesar Rp617.741.032,00 melalui NTPN 896212G50C8VODGQ tanggal 11 Mei 2026.

### Belanja Badan Layanan Umum (BLU)

*Belanja Badan Layanan Umum Rp90.786.356.145,00*

Realisasi Belanja Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp90.786.356.145,00 dan

Rp80.546.714.025,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja BLU menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.44**
**Rincian Perbandingan Realisasi Belanja BLU Menurut Unit Eselon I**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| Setjen | 38.409 | 18.819 | 49,00 | 39.558 | 30.687 | 77,57 | (11.868) | (38,67) |
| Ditjen PB | 66.118 | 45.198 | 68,36 | 34.339 | 31.984 | 93,14 | 13.214 | 41,31 |
| BPPSDMKP | 31.809 | 26.769 | 84,16 | 19.256 | 17.876 | 92,83 | 8.893 | 49,75 |
| **Total** | **136.336** | **90.786** | **66,59** | **93.153** | **80.547** | **86,47** | **10.239** | **12,71** |

Realisasi Belanja Barang Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp90.786.356.145,00 atau 66,59% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp136.335.892.000,00. Realisasi Belanja Barang Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.239.642.120,00 atau sebesar 12,71% jika dibandingkan dengan realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Kenaikan realisasi Belanja Barang Badan Layanan Umum (BLU) terbesar terjadi pada Direktorat Jenderal Budi Daya, pada satuan kerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo. Pada Tahun 2025, realisasi Belanja BLU tercatat sebesar Rp15.212.516.456,00, sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp7.787.808.415,00. Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat kenaikan sebesar Rp7.424.708.041,00 atau 95,34% dibandingkan dengan total realisasi Tahun 2024 Realisasi terbesar terdapat pada Benih Ikan Laut yang Diproduksi sebesar Rp3.652.434.326,00 pada Jasa Lainnya dan Rp3.560.318.929,00 pada Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( BLU.

Kenaikan realisasi belanja yang signifikan juga terdapat pada BLUPPB Karawang. Pada Tahun 2025, realisasi Belanja BLU tercatat sebesar Rp25.838.306.231,00, sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp19.025.254.242,00. Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat kenaikan sebesar Rp6.813.051.989,00 atau 35,81% dibandingkan dengan total realisasi Tahun 2024, hal ini disebabkan adanya kenaikan belanja untuk proyek BUBK Kebumen dan BINS 2.

Untuk penurunan terbesar terdapat pada BLU LPMUKP dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp11.867.472.947,00 atau 38,67%. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Realisasi Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi – BLU (525121) merupakan realisasi dari belanja pembelian ATK dan computer supplies untuk keperluan perkantoran. Realisasi Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi – BLU per 31 Desember 2025 sebesar Rp157.903.200,00 atau mencapai 93,99% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp168.000.000,00. Penurunan realisasi Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi – BLU per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 disebabkan karena menurunnya pengadaan alat tulis perkantoran yang dipengaruhi oleh perubahan cara kerja (digitalisasi) seperti penggunaan aplikasi manajemen dokumen dan *approval online* dan berkurangnya kebutuhan cetak.

2. Realisasi Belanja Pemeliharaan (525114) merupakan realisasi dari belanja penggunaan bahan bakar dan biaya perbaikan kendaraan dinas operasional roda 2 dan kendaraan dinas operasional roda 4 serta biaya pemeliharaan laptop dan printer pegawai. Realisasi Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp42.843.200,00 atau mencapai 35,33% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp121.281.000,00. Menurunnya realisasi Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 disebabkan karenakan berkurangnya kegiatan dinas luar kantor serta biaya bahan bakar kendaraan dinas operasional yang dibatasi penggunaannya berdasarkan perhitungan jarak tempuh.

3. Realisasi Belanja Pegawai ( Gaji dan Tunjangan (525111) meliputi belanja remunerasi pegawai tetap PNS dan non PNS, remunerasi pegawai kontrak pusat, remunerasi Dewan Pengawas, dan honorarium pegawai kontrak daerah. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.922.113.370,00 atau mencapai 84,33% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp15.323.360.000.00. Menurunnya realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 disebabkan karena menurunnya jumlah pegawai aktif selama kurun waktu tahun 2025. Jumlah pegawai aktif pada akhir tahun 2024 sebanyak 221 pegawai sedangkan jumlah pegawai aktif pada akhir tahun 2025 sebanyak 98 pegawai.

4. Realisasi Belanja Barang (525112) per 31 Desember 2025 merupakan realisasi belanja konsumsi dan snack rapat, biaya keperluan perkantoran sehari(hari, biaya jamuan tamu, biaya cetak dokumen atau spanduk

kegiatan selama Tahun 2025. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 sebesar Rp585.998.188,00 atau mencapai 34,13% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.716.834.000,00. Menurunnya realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 disebabkan karena berkurangnya frekuensi rapat tatap muka yang dialihkan secara daring.

5. Realisasi Belanja Jasa (525113) per 31 Desember 2025 merupakan realisasi dari biaya honor narasumber, jasa konsultan, dan jasa pelatihan pegawai. Realisasi belanja jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.746.494.282,00 atau mencapai 65,73% dari pagu anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp2.657.252.000,00. Menurunnya realisasi Belanja Jasa per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 disebabkan karena penyesuaian skala kegiatan pelatihan yang dikhususkan untuk pelatihan prioritas guna mendukung kegiatan organisasi.

6. Realisasi Belanja Perjalanan (525115) per 31 Desember 2025 merupakan realisasi dari biaya perjalanan dinas pegawai BLU LPMUKP. Realisasi Belanja Perjalanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.129.411.351,00 atau mencapai 12,77% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp16.681.188.000,00. Menurunnya realisasi Belanja Jasa per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 disebabkan dalam rangka komitmen LPMUKP untuk mengupayakan efisiensi anggaran tanpa mengurangi pelayanan khususnya dalam program penyaluran dana bergulir.

7. Realisasi Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (525119) per 31 Desember 2025 merupakan realisasi dari biaya penggunaan bahan bakar kendaraan sewa roda 4 jabatan dan BPJS pegawai BLU LPMUKP. Realisasi Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.234.381.326,00. Terdapat koreksi pengesahan belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU atas lebih catat biaya administrasi perbankan sebesar (Rp2.500,00) sehingga realisasi netto Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.234.378.826,00 atau mencapai 70,91% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp1.740.892.000,00. Menurunnya realisasi Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 disebabkan karena dipengaruhi oleh pengurangan biaya bahan bakar kendaraan sewa roda 4 yang disebabkan karena penurunan intensitas perjalanan dinas serta penyesuaian penggunaan bahan bakar sesuai jarak tempuh.

Pengungkapan atas temuan hasil pemeriksaan BPK tahun 2025 atas Belanja BLU diinformasikan sebagai berikut.

1. Terdapat belanja barang kurang saji (*understated*) dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 senilai Rp667.749.341,00 pada BLU BBPBAP Jepara senilai Rp667.749.341,00. Belanja tersebut didetilkan sebagai berikut.

**Tabel B.45**
**Rincian Belanja Barang BLU BBPBAP Jepara Belum Disahkan**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

| Tgl | No Bukti | Uraian | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | 01/DK/239192/II/2025 | Pengambilan Pendapatan Jasa Program Budidaya Bandeng dari Bhumi Jati Power | 171.000.000 | Belanja Barang Operasional Diserahkan Ke Masyarakat |
| 25/04/2025 | 03/DK/239192/IV/2025 | Biaya Operasional Kerjasama Tambak Mauk (TF Kamsudi) | 283.461.105 | Belanja Barang Operasional Hasil Kerja Sama |
| 26/09/2025 | 02/DK/239192/IX/2025 | Pembayaran Uang Makan dan Transport Nara Sumber (Donorojo) | 1.140.000 | Belanja Perjalanan Dinas |
| 04/11/2025 | 05/DK/239192/XI/2025 | Pengambilan Cash dari YaKN Rp3.170.000,00 Pembayaran Perjadin Donorojo Rp500.000,00 dan Rp1.100.000,00 | 4.770.000 | Belanja Barang Operasional dan Perjalanan Dinas |
| 13/11/2025 | 08/DK/239192/XI/2025 | Pengambilan Cash Petrokimia | 6.124.000 | Belanja Barang Operasional Diserahkan Ke Masyarakat |
| 24/11/2025 | 17/DK/239192/XI/2025 | Pengambilan Cash Kerjasama CSR Rp131.566.900,00 dan Petrokimia Rp18.885.000,00 | 150.451.900 | Belanja Barang Operasional Diserahkan Ke Masyarakat |
| 05/12/2025 | 13/DK/239192/XII/2025 | Pengambilan Cash Petrokimia Rp9.593.000,00 dan BPKAD Rp10.740.000,00 | 20.333.000 | Belanja Barang Operasional Diserahkan Ke Masyarakat |
| 22/12/2025 | 23/DK/239192/XII/2025 | Pengambilan Cash Petrokimia Rp6.325.000,00 dan CSR Rp1.853.840,00 | 8.178.840 | Belanja Barang Operasional Diserahkan Ke Masyarakat |
| 30/12/2025 | 37/DK/239192/XII/2025 | Pengambilan Cash YKAN Rp701.856,00 PETROKIMIA Rp21.463.000,00 CSR Rp120.740,00 DINAS KOPERASI JEPARA Rp4.200,00 BPKAD Rp700,00 | 22.290.496 | Belanja Barang Operasional |
| **Jumlah** | | | **667.749.341** | |

## Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

*Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Rp1.526.211.637.408,00*

Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.526.211.637.408,00 dan Rp604.186.688.160,00.

Rincian pagu dan realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel B.46**
**Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang**
**Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Menurut Unit Eselon I**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| **Setjen** | 50.632 | 50.632 | 100,00 | 83.461 | 73.942 | 88,59 | (23.310) | (31,52) |
| **Ditjen PT** | 1.355.091 | 1.106.462 | 81,65 | 109.798 | 102.585 | 93,43 | 1.003.877 | 978,58 |
| **Ditjen PB** | 118.894 | 111.105 | 93,45 | 284.324 | 283.526 | 99,72 | (172.421) | (60,81) |
| **Ditjen PDSPKP** | 41.044 | 12.000 | 29,24 | 89.789 | 73.028 | 81,33 | (61.028) | (83,57) |
| **Ditjen PK** | 263.179 | 246.013 | 93,48 | 72.270 | 71.106 | 98,39 | 174.907 | 245,98 |
| **Total** | **1.828.840** | **1.526.212** | **83,45** | **639.642** | **604.187** | **94,46** | **922.025** | **152,61** |

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.526.211.637.408,00 atau 83,45% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.828.839.441.000,00. Terdapat blokir pada pos belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp36.285.731.000,00 atau 1,98% dari total pagu anggaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda.

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp922.024.949.248,00 atau sebesar 152,61% jika dibandingkan dengan realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dengan realisasi yang signifikan antara lain:

1. Kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih sebanyak 56 kontrak pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan total sebesar Rp1.064.960.814.222,00;

2. Kegiatan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K(SIGN) sebanyak 33 kontrak pada Satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan total sebesar Rp192.796.090.749,00; dan

3. Pengadaan Bioflok melalui 168 kontrak sebesar Rp109.365.714.800,00 yang tersebar pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar

Tatelu, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee, Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, dan Setditjen Perikanan Budidaya.

Pengungkapan atas temuan hasil pemeriksaan BPK tahun 2025 atas Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda diinformasikan sebagai berikut.

1. Terdapat kelebihan pembayaran Belanja Barang yang tidak sesuai kontrak senilai Rp302.116.403,00 atas 2 Pekerjaan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada Ditjen PKRL. Terdapat setoran ke kas negara dengan NTPN Nomor C92644900156SG5M tanggal 24 Februari 2026 senilai Rp15.343.563,00 dan NTPN Nomor C9666D2G50C2O6MHK tanggal 09 Maret 2026 senilai Rp286.773.978,00

### B.2.3 Belanja Modal

*Belanja Modal Rp2.219.819.169.389,00*

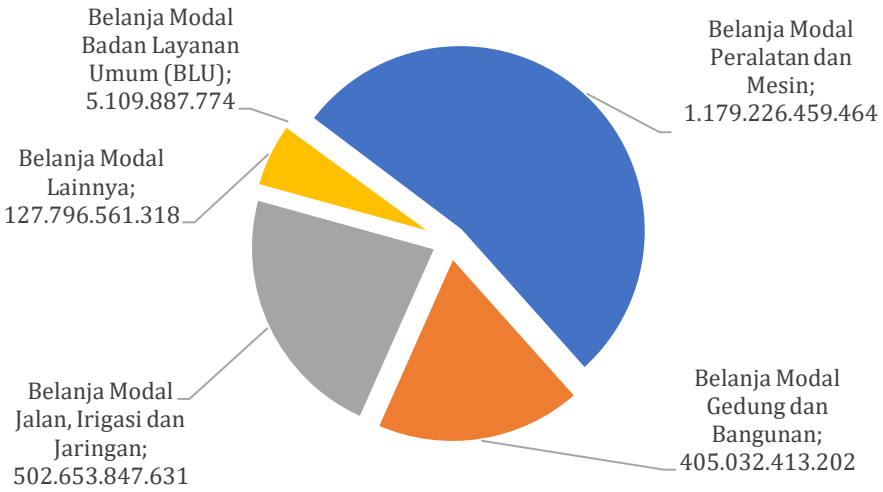
Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.219.819.169.389,00 atau 67,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.281.647.041.000,00.

Rincian pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.47**
**Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

| Nama Akun | Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.371.183.518.000 | 1.179.226.459.464 | 86,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.156.339.529.000 | 405.032.413.202 | 35,03 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 510.657.494.000 | 502.653.847.631 | 98,43 |
| Belanja Modal Lainnya | 228.783.893.000 | 127.796.561.318 | 55,86 |
| Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU) | 14.682.607.000 | 5.109.887.774 | 34,80 |
| **Total** | **3.281.647.041.000** | **2.219.819.169.389** | **67,64** |

Komposisi realisasi belanja modal KKP tahun 2025 dalam bentuk diagram disajikan di bawah ini:




**Gambar 7**
**Komposisi Realisasi Belanja Modal KKP Tahun 2025**

Sedangkan rincian pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.48**
**Rincian Realisasi Belanja Modal Menurut Unit Eselon I**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

| Nama Eselon I | Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Setjen | 139.232.806.000 | 116.396.922.107 | 83,60 |
| Itjen | 2.000 | 0 | 0,00 |
| Ditjen PT | 545.501.608.000 | 28.617.464.228 | 5,25 |
| Ditjen PB | 693.749.248.000 | 434.010.890.059 | 62,56 |
| Ditjen PSDKP | 958.162.335.000 | 957.180.629.366 | 99,90 |
| Ditjen PDSPKP | 6.048.576.000 | 6.018.698.555 | 99,51 |
| Ditjen PK | 678.618.683.000 | 615.468.529.238 | 90,69 |
| BPPSDMKP | 232.272.422.000 | 34.962.175.709 | 15,05 |
| BPPMHKP | 28.061.361.000 | 27.163.860.127 | 96,80 |
| **Total** | **3.281.647.041.000** | **2.219.819.169.389** | **67,64** |

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terdapat belanja modal yang signifikan antara lain:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

   Berupa pembangunan pelabuhan perikanan Ukurlaran SKPT Morotai sebesar Rp70.497.840.646,00.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berupa pembayaran MFISS dari *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.* (BBVA) sebesar Rp323.346.917.329,00 dan *Instituto De Credito Oficial* (ICO) sebesar Rp586.637.553.126,00 serta paket pengadaan *water cannon* pada Satker Ditjen PSDKP sebesar Rp13.996.000.000,00.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.49**
**Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per Akun**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Belanja Modal Tanah** | 0 | 2.599.446.303 | (2.599.446.303) | (100,00) |
| **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | 1.179.226.459.464 | 167.334.008.148 | 1.011.892.451.316 | 604,71 |
| **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | 405.032.413.202 | 266.701.902.287 | 138.330.510.915 | 51,87 |
| **Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan** | 502.653.847.631 | 32.204.565.667 | 470.449.281.964 | 1.460,82 |
| **Belanja Modal Lainnya** | 127.796.561.318 | 44.108.098.940 | 83.688.462.378 | 189,73 |
| **Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)** | 5.109.887.774 | 9.380.295.089 | (4.270.407.315) | (45,53) |
| **Total** | **2.219.819.169.389** | **522.328.316.434** | **1.697.490.852.955** | **324,99** |

Terdapat kenaikan realisasi belanja modal tahun 2025 sebesar Rp1.011.892.451.316,00 atau 604,71% dari realisasi belanja modal tahun 2024 dalam rangka penyelesaian program prioritas antara lain Kampung Nelayan Merah Putih, Budidaya Ikan Nila Salin, Esktensifikasi dan Intensifikasi Garam, dan *Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System* (*MFISS*).

Penjelasan atas realisasi Belanja Modal menurut jenis akun kami sajikan di bawah ini:

### Belanja Modal Tanah

*Belanja Modal Tanah Rp0,00*

Rincian Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp2.599.446.303,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal Tanah menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel B.50**
**Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| **Ditjen PT** | 0 | 0 | 0,00 | 70 | 50 | 71,43 | (50) | (100,00) |
| **Ditjen PB** | 0 | 0 | 0,00 | 252 | 252 | 100,00 | (252) | (100,00) |
| **Ditjen PSDKP** | 0 | 0 | 0,00 | 1.826 | 1.826 | 100,00 | (1.826) | (100,00) |
| **BPPSDMKP** | 0 | 0 | 0,00 | 644 | 471 | 73,14 | (471) | (100,00) |
| **Total** | **0** | **0** | **0,00** | **2.792** | **2.599** | **93,09** | **(2.599)** | **(100,00)** |

Realisasi belanja modal tanah tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari pagu belanja modal tanah sebesar Rp0,00.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi belanja modal tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.599.446.303,00.

### Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp592.588.906.338,00*

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.179.226.459.464,00 dan Rp167.334.008.148,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.51**
**Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| **Setjen** | 8.453 | 4.841 | 57,27 | 32.683 | 26.234 | 80,27 | (21.393) | (81,55) |
| **Itjen** | 0 | 0 | 0,00 | 2.708 | 2.708 | 100,00 | (2.708) | (100,00) |
| **Ditjen PT** | 48.713 | 24.833 | 50,98 | 40.338 | 36.005 | 89,26 | (11.172) | (31,03) |
| **Ditjen PB** | 82.408 | 55.088 | 66,85 | 27.325 | 27.292 | 99,88 | 27.796 | 101,85 |
| **Ditjen PSDKP** | 957.822 | 956.841 | 99,90 | 66.552 | 36.021 | 54,12 | 920.820 | 2.556,34 |
| **Ditjen PDSPKP** | 5.230 | 5.200 | 99,43 | 5.012 | 3.172 | 63,29 | 2.028 | 63,93 |
| **Ditjen PK** | 125.113 | 93.817 | 74,99 | 95.643 | 13.294 | 13,90 | 80.523 | 605,71 |

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| BPPSDMKP | 116.182 | 11.812 | 10,17 | 19.829 | 17.765 | 89,59 | (5.953) | (33,51) |
| BPPMHKP | 27.261 | 26.795 | 98,29 | 5.116 | 4.843 | 94,66 | 21.952 | 453,27 |
| **Total** | **1.371.182** | **1.179.227** | **86,00** | **295.206** | **167.334** | **56,68** | **1.011.893** | **604,71** |

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 adalah sebesar Rp1.179.226.459.464,00 atau 86,00% dari pagu belanja sebesar Rp1.371.183.518.000,00. Terdapat kenaikan realisasi belanja modal peralatan dan mesin dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.011.892.451.316,00 atau 604,71% dalam rangka pelaksanaan prioritas nasional. Terdapat blokir anggaran pada pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp44.594.811.000,00 atau 3,25% dari total pagu anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Belanja modal peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2025 yang signifikan diantaranya:

1. MFISS pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp323.346.917.329,00 dari BBVA dan Rp586.637.553.126,00 dari ICO;

2. Pengadaan Drone bawah laut/ROV (Mikom Ulang) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp10.518.861.000,00;

3. Pengadaan Kincir ( Segara Paddle Wheel Aerator SPWA(22B Setditjen Perikanan Budidaya pada sebesar Rp21.625.000.575,00;

4. Terintegrasi Rancang Dan Bangun Pembangunan K(SIGN di Kabupaten Rote Ndao pada Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp19.900.000.000,00;

5. Pengadaan 20 Unit Genset 250 KvA Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) di Karawang sebesar Rp11.360.499.995,00 pada Setditjen Perikanan Budi Daya.

### Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp355.032.413.202,00*

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp405.032.413.202,00 dan Rp266.701.902.287,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal

Gedung dan Bangunan menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.52**
**Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| **Setjen** | 6.359 | 1.665 | 26,18 | 160.790 | 160.718 | 99,96 | (159.053) | (98,96) |
| **Ditjen PT** | 494.629 | 2.277 | 0,46 | 19.500 | 14.112 | 72,37 | (11.835) | (83,86) |
| **Ditjen PB** | 592.432 | 363.213 | 61,31 | 255.750 | 42.345 | 16,56 | 320.868 | 757,75 |
| **Ditjen PSDKP** | 68 | 68 | 100,00 | 19.661 | 19.620 | 99,79 | (19.552) | (99,65) |
| **Ditjen PDSPKP** | 819 | 819 | 100,00 | 1.476 | 1.179 | 79,88 | (360) | (30,53) |
| **Ditjen PK** | 47.048 | 22.517 | 47,86 | 5.339 | 5.307 | 99,40 | 17.210 | 324,29 |
| **BPPSDMKP** | 14.185 | 14.104 | 99,43 | 27.864 | 21.822 | 78,32 | (7.718) | (35,37) |
| **BPPMHKP** | 800 | 368 | 46,00 | 1.659 | 1.598 | 96,32 | (1.230) | (76,97) |
| **Total** | **1.156.340** | **405.031** | **35,03** | **492.039** | **266.701** | **54,20** | **138.330** | **51,87** |

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp405.032.413.202,00 atau 35,03% dari pagu belanja sebesar Rp1.156.339.529.000,00. Terdapat blokir anggaran pada pos belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp219.043.103.000,00 atau 18,94% dari total pagu anggaran belanja modal gedung dan bangunan. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami kenaikan dalam rangka melaksanakan prioritas nasional.

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang signifikan diantaranya:

1. Rancang dan Bangun Penyelesaian Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Eks TIR Karawang pada Setditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp238.858.542.360,00;

2. Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Budidaya Udang Terintegrasi (*Integrated Shrimp Farming*) pada Setditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp50.000.000.000,00;

3. Pekerjaan Pembangunan Tambak UPT di Pinrang (BPBAP Takalar) pada Setditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp56.556.467.720,00;

4. Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan K(SIGN di Kabupaten Rote Ndao pada Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp21.245.598.000,00;

5. Pembayaran termin 4 pekerjaan konstruksi pembangunan pelabuhan perikanan Ukurlaran SKPT Saumlaki sebesar Rp28.174.832.558,00; dan

6. Pembangunan Gedung Administrasi II/Gedung Simulator pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sebesar Rp13.335.162.000,00.

Pengungkapan atas temuan hasil pemeriksaan BPK tahun 2025 atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan diinformasikan sebagai berikut.

1. Terdapat kelebihan pembayaran Belanja Modal sebesar Rp558.162.614,00 atas Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao yang tidak sesuai ketentuan. Atas kelebihan pembayaran ini, telah disetor ke kas negara sebesar Rp463.489.994,00 melalui NTPN DBB6049001DV0IVA tanggal 19 Mei 2026 dan Rp124.672.620,00 melalui NTPN DBB6049001DV0IVA pada tanggal 19 Mei 2026.

2. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp15.118.255,00 atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Administrasi IV Gedung Simulator pada Poltek KP Karawang yang tidak sesuai kontrak. Atas kelebihan pembayaran ini, telah terdapat penyetoran ke kas negara sebesar Rp15.434.241,00 melalui NTPN C5D067QLVBK70QL2 tanggal 9 April 2026.

3. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp452.146.203,00 atas Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Penyelesaian Modeling BINS di Eks Tambak Inti Rakyat (TIR) Karawang yang tidak sesuai kontrak. Atas kelebihan pembayaran ini, telah disetor ke kas negara sebesar Rp452.146.203,00 melalui NTPN 38A22G50C695CD4 tanggal 22 April 2026.

### Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp502.653.847.631,00*

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp502.653.847.631,00 dan Rp32.204.565.667,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.53**
**Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik / Turun | % |
| Ditjen PT | 2.159 | 1.508 | 69,85 | 6.677 | 5.098 | 76,35 | (3.590) | (70,42) |
| Ditjen PB | 2.133 | 2.104 | 98,64 | 23.609 | 23.411 | 99,16 | (21.307) | (91,01) |
| Ditjen PSDKP | 272 | 272 | 100,00 | 2.551 | 2.115 | 82,91 | (1.843) | (87,14) |
| Ditjen PK | 506.093 | 498.770 | 98,55 | 0 | 0 | 0,00 | 498.770 | 0,00 |
| BPPSDMKP | 0 | 0 | 0,00 | 1.584 | 1.581 | 99,81 | (1.581) | (100,00) |
| **Total** | **510.657** | **502.654** | **98,43** | **34.421** | **32.205** | **93,56** | **470.449** | **1.460,79** |

Terdapat kenaikan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan yang disebabkan kenaikan signifikan pada Ditjen PKRL pada Satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dalam rangka pelaksanaan prioritas nasional. Beberapa belanja jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai signifikan diantaranya:

1. Terintegrasi Rancang Dan Bangun Pembangunan K(SIGN di Kabupaten Rote Ndao pada Satker BLUPPB Karawang Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp498.254.402.000,00;

2. Pengadaan Plastik HDPE Tahap IV Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) di Karawang pada Setditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp1.242.990.832,00;

3. Pekerjaan Perkerasan Jalan Pelabuhan Perikanan Nusantara Di SKPT Merauke pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp991.000.000,00;

4. Perbaikan Jalan Kompleks Kantor LPSPL Sorong sebesar Rp477.372.000,00; dan

5. Rehab Jalan Pendukung Produksi Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) di Karawang sebesar Rp390.569.700,00.

### Belanja Modal Lainnya

*Belanja Modal Lainnya Rp127.796.561.318,00*

Rincian Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp127.796.561.318,00 dan Rp44.108.098.940,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal Lainnya

menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.54**
**Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| **Setjen** | 124.122 | 109.810 | 88,47 | 41.084 | 40.533 | 98,66 | 69.277 | 170,92 |
| **Ditjen PT** | 0 | 0 | 0,00 | 825 | 822 | 99,64 | (822) | (100,00) |
| **Ditjen PB** | 11.616 | 11.381 | 97,98 | 95 | 95 | 100,00 | 11.286 | 11.880,00 |
| **Ditjen PDSPKP** | 0 | 0 | 0,00 | 2.220 | 2.065 | 93,02 | (2.065) | (100,00) |
| **Ditjen PK** | 364 | 364 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 364 | 0,00 |
| **BPPSDMKP** | 92.682 | 6.242 | 6,73 | 612 | 594 | 97,06 | 5.648 | 950,84 |
| **Total** | **228.784** | **127.797** | **55,86** | **44.836** | **44.109** | **98,38** | **83.688** | **189,73** |

Terdapat kenaikan realisasi belanja modal lainnya dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp83.688.462.378,00 dalam rangka melaksanakan prioritas nasional. Beberapa belanja modal lainnya yang signifikan diantaranya:

1. Pembangunan *Reconnaissance* Kampung Nelayan Merah Putih pada Satker Biro Umum sebesar Rp99.998.855.000,00;

2. Pembangunan *Campaign Media Management* pada Satker Setditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp11.266.500.000,00;

3. Pekerjaan Pengadaan Paket Perencanaan Modernisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan pada Satker Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp6.242.146.988,00; dan

4. Pengadaan Data Citra Satelit Radar dan Pemeliharaan Operasional Stasiun Bumi pada Satker Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.323.700.522,00.

### Belanja Modal BLU

*Belanja Modal BLU Rp5.109.887.774,00*

Realisasi Belanja Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp5.109.887.774,00 dan Rp9.380.295.089,00.

Rincian pagu dan realisasi Belanja BLU menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel B.55**
**Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU**
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

| Nama Akun | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | | Komparasi Realisasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi | Realisasi | % | Estimasi | Realisasi | % | Naik Turun | % |
| **Setjen** | 299 | 81 | 27,09 | 2.181 | 1.888 | 86,57 | (1.807) | (95,71) |
| **Ditjen PB** | 5.161 | 2.225 | 43,11 | 786 | 783 | 99,62 | 1.442 | 184,16 |
| **BPPSDMKP** | 9.223 | 2.804 | 30,40 | 6.881 | 6.709 | 97,50 | (3.905) | (58,21) |
| **Total** | **14.683** | **5.110** | **34,80** | **9.848** | **9.380** | **95,25** | **(4.270)** | **(45,52)** |

Realisasi Belanja Modal Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.109.887.774,00 atau 34,80% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.682.607.000,00. Realisasi Belanja Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.270.407.315,00 atau sebesar 45,53% jika dibandingkan dengan realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Penurunan realisasi Belanja Badan Layanan Umum (BLU) terbesar secara persentase terjadi pada Sekretariat Jenderal, pada satuan kerja BLU LPMUKP. Pada Tahun 2025, realisasi Belanja BLU tercatat sebesar Rp80.978.990,00, sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp1.888.104.920,00. Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat penurunan sebesar Rp1.807.125.930,00 atau 95,71% dibandingkan dengan total realisasi Tahun 2024. Belanja modal pada BLU LPMU KP merupakan pengadaan *handphone* sebanyak tujuh (7) unit, scanner satu (1) unit, alat ukur kualitas air satu (1) unit, speaker satu (1) unit, dan *iPad air* dua (2) unit.

Sedangkan, penurunan realisasi Belanja Badan Layanan Umum (BLU) terbesar secara nilai uang terjadi pada BPPSDMKP dan yang paling signifikan ada pada satuan kerja Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Tegal. Pada Tahun 2025, realisasi Belanja Modal BPPP Tegal tercatat sebesar Rp2.754.259.276,00 yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU pada BPPP Tegal berupa pembelian sarana Kelengkapan Asrama Bahari Residence III sebesar Rp567.252.846,00, mesin *Cold Storage* sebesar Rp59.719.998,00, sarana perlengkapan navigasi dan mesin sebesar Rp75.100.000,00, kursi sebesar Rp65.859.002,00, sarana layanan pelatihan sebesar Rp160.812.219,00, kendaraan operasional layanan pelatihan sebesar Rp705.000.001,00, desktop PC sebesar Rp29.700.000,00, TV Led sebesar Rp101.850.000,00, Laptop sebesar Rp18.930.000,00, Mold kapal fiber sebesar Rp29.380.000,00 Mebelair sebesar Rp19.399.000,00, dan Gazebo sebesar Rp31.400.000,00.

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU

   Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU pada BPPP Tegal berupa:

   a. Pembangunan Pemasangan Penangkal Petir Elektrostatis, sejumlah Rp139.335.025,00;

   b. Pembangunan Pekerjaan Paving Halaman Asrama Bahari Residence III sejumlah Rp167.875.400,00;

   c. Pemasangan Kanopi, Railing, List dan Plint Asrama Bahari Residen III Rp251.341.185,00;

   d. Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Mess sejumlah Rp39.615.900,00;

   e. Pekerjaan Instalasi Rumah Pompa, Kolam Penampungan Air Selokan, Pompa, Sistem Drainase Lingkungan Asrama Pelatihan Eks SUPM Tegal sejumlah Rp197.047.500,00; dan

   f. Rehab Bangunan Aula sejumlah Rp94.641.200,00.

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



# PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Catatan atas Laporan Keuangan



# C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

## C.1 Aset Lancar

*Aset Lancar Rp2.569.572.365.883,00*

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian saldo aset lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.1**
**Rincian Saldo Aset Lancar Per Akun**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 67.600.000 | 215.583.279 | (147.983.279) | (68,64) |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | 196.422.234.131 | 247.271.846.142 | (50.849.612.011) | (20,56) |
| Kas pada Badan Layanan Umum | 260.370.997.622 | 210.657.196.390 | 49.713.801.232 | 23,60 |
| Investasi Jangka Pendek ( Badan Layanan Umum | 139.850.000.000 | 23.450.000.000 | 116.400.000.000 | 496,38 |
| Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) | 14.076.352.496 | 853.731.100 | 13.222.621.396 | 1.548,80 |
| Uang Muka Belanja (prepayment) | 909.984.470.455 | 0 | 909.984.470.455 | 0,00 |
| Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 21.943.695.912 | 21.667.904.525 | 275.791.387 | 1,27 |
| Piutang Bukan Pajak | 158.364.411.690 | 58.098.228.477 | 100.266.183.213 | 172,58 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ( Piutang Bukan Pajak | (101.236.262.482) | (37.330.326.609) | (63.905.935.873) | 171,19 |
| **Piutang Bukan Pajak (Netto)** | **57.128.149.208** | **20.767.901.868** | **36.360.247.340** | **175,08** |
| Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi | 316.018.435 | 105.339.479 | 210.678.956 | 200,00 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan | (1.580.092) | (526.698) | (1.053.394) | 200,00 |
| **Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Netto)** | **314.438.343** | **104.812.781** | 209.625.562 | 0,00 |
| Piutang dari KUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum | 45.941.839.872 | 40.334.387.105 | 5.607.452.767 | 13,90 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ( Piutang dari Kegiatan Operasional BLU | (31.537.795.721) | (28.682.135.319) | (2.855.660.402) | 9,96 |
| **Piutang dari Kegiatan Operasional (Netto)** | **14.404.044.151** | **11.652.251.786** | **2.751.792.365** | **23,62** |
| Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU | 0 | 19.780.175 | (19.780.175) | (100,00) |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ( Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional BLU | 0 | (98.901) | 98.901 | (100,00) |
| **Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)** | **0** | **19.681.274** | **(19.681.274)** | **(100,00)** |
| Persediaan | **955.010.383.565** | **159.570.028.616** | 795.440.354.949 | 498,49 |
| Persediaan Belum Diregister | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Total** | **2.569.572.365.883** | **696.230.937.761** | **1.873.341.428.122** | **269,07** |

### C.1.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran

*Kas Di Bendahara Pengeluaran Rp67.600.000,00*

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp67.600.000,00 dan Rp215.583.279,00.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berupa sisa kas uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP) adalah sebagai berikut:

**Tabel C.2**
**Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran**
**Per Akun Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Sisa Kas UP** | 0 | 2.000.000 | (2.000.000) | (100,00) |
| **Sisa Kas TUP** | 67.600.000 | 213.583.279 | (145.983.279) | (68,35) |
| **Total** | **67.600.000** | **215.583.279** | **(147.983.279)** | **(68,64)** |

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 terdapat pada unit Eselon I sebagai berikut:

**Tabel C.3**
**Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pada Masing-masing Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| No. | Unit Eselon I | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo UP | Saldo TUP | Jumlah | Saldo UP | Saldo TUP | Jumlah |
| **1** | Ditjen PT | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| **2** | BPPSDM KP | 0 | 67.600.000 | 67.600.000 | 0 | 213.583.279 | 213.583.279 |
| **Total** | | **0** | **67.600.000** | **67.600.000** | **2.000.000** | **213.583.279** | **215.583.279** |

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP merupakan sisa pertanggungjawaban TUP sebesar Rp67.600.000,00 pada satker Poltek KP Sorong. Atas sisa TUP tersebut telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 8 Januari 2026 sebesar Rp67.300.000,00 dengan NTPN 60B536QTF68E0H7L dan sebesar Rp300.000,00 degan NTPN 0B3ED45KVMHIAUDE.

### C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan Setara Kas Rp196.422.234.131,00*

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp196.422.234.131,00 dan Rp247.271.846.142,00.

Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per akun adalah sebagai berikut:

**Tabel C.4**
**Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per Akun**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran** | 27.949.772 | 21.814.415 | 6.135.357 | 28,13 |
| **Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah** | 195.942.723.165 | 237.152.919.019 | (41.210.195.854) | (17,38) |
| **Kas Lainnya di BLU** | 451.561.194 | 10.097.112.708 | (9.645.551.514) | (95,53) |
| **Total** | **196.422.234.131** | **247.271.846.142** | **(50.849.612.011)** | **(20,56)** |

Penjelasan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

#### C.1.2.1 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas berupa Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari Uang Persediaan, dapat berupa bunga jasa giro yang belum disetor ke kas negara, uang pihak ketiga yang belum diserahkan atau pajak yang belum disetor. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp27.949.772,00 dan Rp21.814.415,00.

Rincian saldo Kas di Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.5**
**Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Pada Masing-masing Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Ditjen PRL** | 0 | 113.000 | (113.000) | (100,00) |
| **BPPSDM KP** | 23.524.881 | 21.701.415 | 1.823.466 | 8,40 |
| **BPPMH KP** | 4.424.891 | 0 | 4.424.891 | 0,00 |
| **Total** | **27.949.772** | **21.814.415** | **6.135.357** | **28,13** |

Penjelasan ringkas atas saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengembangan dan SDM KP

   Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada unit Eselon I Badan Pengembangan dan SDM KP merupakan pajak yang belum disetor pada satker Balai Riset Pemuliaan Ikan sebesar Rp23.524.881,00. Rincian setoran atas pajak tersebut ke Kas Negara dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2025 ini.

2. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP

   Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP merupakan pajak yang belum disetor pada satker Balai KIPM Tarakan sebesar Rp515.900,00 serta satker Stasiun KIPM Pangkal Pinang sebesar Rp3.908.991,00. Rincian setoran atas pajak tersebut ke Kas Negara dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2025 ini.

### C.1.2.2 Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah

Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp195.942.723.165,00 dan Rp481.490.774.994,00.

Rincian saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.6**
**Rincian Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah**
**Pada Masing-masing Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 194.117.701.715 | 235.465.034.456 | (41.347.332.741) | (17,56) |
| Ditjen PT | 444.068.949 | 306.932.062 | 137.136.887 | 44,68 |
| Ditjen PK | 1.380.952.501 | 1.380.952.501 | 0 | 0,00 |
| **Total** | **195.942.723.165** | **237.152.919.019** | **(41.210.195.854)** | **(17,38)** |

Terdapat penurunan saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah per 31 Desember 2025 sebesar 17,38% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan adanya pembayaran pembangunan SKPT Sabang pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

Penjelasan ringkas atas saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Merupakan saldo kas terkait proyek *Development of Fisheries Sector in Outer Islands* dari hibah ODA-Japan *International Cooperation Agency* (JICA) yang dicatat pada Biro Umum dan PBJ. Hibah tersebut diatas diberikan pada 2 (dua) fase yaitu sebagai berikut:

   a. Fase I dengan sebesar ¥2.500.000,00 dengan nomor register hibah 2FMFRX6A, sesuai *Grant Agreement* yang ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2018;

   b. Fase II dengan sebesar ¥3.000.000,00 dengan nomor register hibah 2CK4LTSA, sesuai *Grant Aggrement* yang ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2021.

   Dana setiap fase ditempatkan rekening penyalur (dalam mata uang Yen Jepang) dan rekening penampung (dalam mata uang Rupiah Indonesia) yang berbeda. Rekening penampung adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang digunakan untuk menampung dana hibah dalam mata uang Yen Jepang, sedangkan rekening penyalur adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang digunakan untuk menyalurkan dana Hibah yang berasal dari Rekening penampung. Rincian saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah per rekening per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.7**
**Rincian Saldo Kas di K/L dari Hibah Per *Phase***
**Pada Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa**
**Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2024**

| Phase | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Phase I | 87.753.290.824 | 87.396.131.122 | 357.159.702 | 0,41 |
| Phase II | 106.364.410.891 | 148.068.903.334 | (41.704.492.443) | (28,17) |
| **Total** | **194.117.701.715** | **235.465.034.456** | **(41.347.332.741)** | **(17,56)** |

Rincian saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah per rekening per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.8**
**Rincian Saldo Kas di K/L dari Hibah Per Rekening**
**Pada Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa**
**Per 31 Desember 2025**

| No. | Jenis Rekening/Mata Uang/Nomor Rekening/Nama Rekening | Saldo Rekening Per 31 Des 2025 | Kurs Penutup BI | Saldo Neraca Per 31 Des 2025 (dalam Rp) |
|---|---|---|---|---|
| **FASE I** | | | | |
| **1** | Rekening penampungan - JPY<br>1960690254<br>Biro Umun dan Pengadaan Barang dan Jasa | 250.077.169 | 107,59 | 26.905.802.613 |
| **2** | Rekening penyalur - IDR<br>1960690243<br>Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa | 60.847.488.211 | | 60.847.488.211 |
| **Subtotal** | | | | **87.753.290.824** |
| **FASE II** | | | | |
| **1** | Rekening penampungan - JPY<br>1960690232<br>Biro Umun dan Pengadaan Barang dan Jasa | 600.099.417 | 107,59 | 64.564.696.275 |
| **2** | Rekening penyalur - IDR<br>1960690221<br>Biro Umun dan Pengadaan Barang dan Jasa | | | 41.799.714.616 |
| **Subtoal** | | | | **106.364.410.891** |
| **TOTAL** | | | | **194.117.701.715** |

Ringkasan mutasi Nilai Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada proyek SKPT JICA per 31 Desember 2025 dalam mata uang rupiah adalah sebagai berikut dalam:

**Tabel C.9**
**Ringkasan Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah Pada Proyek SKPT JICA**
**Per 31 Desember 2025**

| No | Uraian | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **Fase I (No. Register 2FMFRX6A)** | | | | |
| | **Saldo Awal per 31 Desember 2024** | | | | **87.396.131.122** |
| | A | Mutasi Tambah | | | 5.502.737.287 |
| | | 1 | Pengesahan pendapatan jasa giro Tahun 2025 | 352.850 | |
| | | 2 | Pengesahan pendapatan jasa giro Tahun 2025 | 1.093.255.117 | |
| | | 3 | Selisih Kurs Terealisasi (¥375.000.000 X [102,36 - 110,63]) | 3.101.250.000 | |
| | | 4 | Selisih Kurs Belum Terealisasi | 1.307.879.320 | |
| | B | Mutasi Kurang | | | 5.145.577.585 |
| | | 1 | Pengesahan Belanja dari Rekening Rupiah | 5.145.577.585 | |
| | **Saldo Akhir per 31 Desember 2025** | | | | **87.753.290.824** |
| **II** | **Fase II (No. Register 2CK4LTSA)** | | | | |
| | **Saldo Awal per 31 Desember 2024** | | | | **148.068.903.334** |
| | A | Mutasi Tambah | | | 10.216.200.895 |
| | | 1 | Pengesahan pendapatan jasa giro Tahun 2025 | 816.172 | |
| | | 2 | Pengesahan pendapatan jasa giro Tahun 2025 | 874.421.433 | |

| No | Uraian | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | Selisih Kurs Terealisasi (¥750.000.000 X [102,36 - 110,63]) | 6.202.500.000 | |
| | | 4 | Selisih Kurs Belum Terealisasi | 3.138.463.290 | |
| | B | Mutasi Kurang | | | 51.920.693.338 |
| | | 1 | Pengesahan Belanja dari Rekening Rupiah | 50.863.684.338 | |
| | | 2 | Pengesahan sisa beban kurs yang belum disetujui Kanwil Ditjen Perbendahaan Prov. DKI Jakarta Tahun 2024 | 1.057.009.000 | |
| | **Saldo Akhir per 31 Desember 2025** | | | | **106.364.410.891** |
| **Total Saldo Rekening Fase I dan Fase II** | | | | | **194.117.701.715** |

Rincian pengesahan hibah dari rekening Fase I dan Fase adalah sebagai berikut:

**Tabel C.10**
**Rincian Pembayaran ke Pihak Ketiga dari Rekening Rupiah yang Belum Disahkan Per Fase Per 31 Desember 2025 (rekening koran)**

| No. | No. SP2HL | SKPT / PPI | Uraian Pembayaran | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **Rekening 1960690243 (IDR) Fase 1 No. Register 2FMFRX6A** | | | **5.145.577.585** |
| 1 | 02152A | SKPT Moa | Pembayaran Termin ke 5 Jasa Pengawasan | 40.270.600 |
| 2 | 02152A | SKPT Saumlaki | Pembayaran Termin ke 7 Jasa Konsultasi Perencana | 225.683.400 |
| 3 | 02152A | SKPT Natuna | Pembayaran Termin ke 6 Jasa Konsultasi Perencana | 200.979.000 |
| 4 | 03960A | SKPT Saumlaki | Pembayaran Konstruksi | 4.350.794.585 |
| 5 | 03960A | SKPT Saumlaki | Pembayaran Konsultasi Pengawasan | 228.850.000 |
| 6 | 03960A | | Pembayaran PMC Perorangan Hibah | 99.000.000 |
| **B** | **Rekening 1960690221 (IDR) Fase 2 No. Register 2CK4LTSA** | | | **50.863.684.338** |
| 1 | 02249A | SKPT Sabang | Pembayaran Termin ke 2 Pengawasan | 510.906.250 |
| 2 | 02249A | SKPT Sabang | Pembayaran Termin ke 2 Konstruksi | 16.346.000.000 |
| 3 | 02249A | SKPT Sabang | Pembayaran Termin ke 3 Pengawasan | 510.906.250 |
| 4 | 02249A | SKPT Sabang | Pembayaran Termin ke 3 Konstruksi | 16.346.000.000 |
| 5 | 02249A | SKPT Moa | Pembayaran 80% Jasa Konsultasi Seawall | 79.623.200 |
| 6 | 03961A | SKPT Moa | Pembayaran Uang Muka Konstruksi Penguatan Seawall | 596.119.565 |
| 7 | 03961A | SKPT Moa | Pembayaran Termin 1 Konstruksi Penguatan Seawall | 278.189.130 |
| 8 | 03961A | SKPT Sabang | Pembayaran Termin 4 Konstruksi | 14.873.600.000 |
| 9 | 03961A | SKPT Moa | Pembayaan Termin 2 Konstruksi Penguatan Seawall | 369.161.109 |
| 10 | 03961A | SKPT Moa | Pembayaran Konsultasi Pengawasan | 222.101.175 |
| 11 | 03961A | SKPT Moa | Pembayaran Termin3 Konstruksi Penguatan Seawall | 369.161.109 |
| 12 | 03961A | SKPT Moa | Pembayaran Konsultasi Pengawasan Penguatan Seawall Tahap 1 | 44.769.150 |
| 13 | 03961A | SKPT Moa | Pembayaran Konsultasi Pengawasan Penguatan Seawall Tahap 2 | 44.769.150 |
| 14 | 03962A | SKPT Morotai | Pemabayaran Konsultasi Pengawasan Konstruksi | 272.378.250 |
| **TOTAL** | | | | **56.009.261.923** |

2. Ditjen Perikanan Tangkap

Merupakan saldo kas terkait proyek *The Eco-System Approach to Fisheries Management* (EAFM) *in Eastern Indonesia dari hibah Global Environmental Facility* (GEF-6) pada satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap.

Ringkasan mutasi Nilai Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada proyek GEF-6 per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.11**
**Rincian Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah Pada Proyek GEF(6**
**Per 31 Desember 2025**

| Uraian | | | Nilai |
|---|---|---|---|
| **Saldo Awal 1 Januari 2024** | | | **306.932.062** |
| **Mutasi Tambah:** | | | **25.580.241.887** |
| 1 | Penambahan kas hibah | 7.435.193.884 | |
| 2 | Penambahan kas hibah | 10.089.465.988 | |
| 3 | Pengembalian selisih perjalanan dinas | 6.092.748 | |
| 4 | Penambahan kas hibah | 5.034.449.427 | |
| 5 | Penambahan kas hibah | 3.015.039.840 | |
| **Mutasi Kurang:** | | | **(25.443.105.000)** |
| 1 | Belanja Bahan | 3.463.142.000 | |
| 2 | Belanja Honor Output Kegiatan | 62.530.000 | |
| 3 | Belanja Sewa | 1.110.779.000 | |
| 4 | Belanja Jasa Profesi | 602.660.000 | |
| 5 | Belanja Jasa Lainnya | 9.213.189.000 | |
| 6 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 6.457.648.000 | |
| 7 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 409.413.000 | |
| 8 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 1.300.543.000 | |
| 9 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 1.315.544.000 | |
| 10 | Belanja Perjalanan Biasa ( Luar Negeri | 1.507.657.000 | |
| **Saldo Per 31 Desember 2025** | | | **444.068.949** |

Penjelasan pengesahan belanja pada hibah GEF-6 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Bahan antara lain berupa Bimtek Kesiapan Kelompok Perempuan Pengelolaan Produk Olahan Perikanan Menuju Standar Program MBG Maluku Tenggara - Langgur Maluku Tenggara;

b. Belanja Honor Output Kegiatan antara lain berupa Honorarium Panitia Kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan Skala Kecil dalam

Penanganan, Pendistribusian dan Pemasaran Produk Perikanan melalui Adopsi Prinsip EAFM dan Blue Economy di Provinsi Maluku;

c. Belanja Sewa antara lain berupa Sewa Kendaraan Roda 4 dan Ruang Pertemuan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan *Destructive Fishing* di Kab. Maluku Tenggara;

d. Belaja Jasa Profesi antara lain berupa Pembayaran Honorarium Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelola Perikanan (RPP) kepiting Bakau dan Strategi Pemanfataan Perikanan Layang di WPNRI 715;

e. Belanja Perjalanan Dinas Biasa antara lain berupa Kegiatan Peresmian Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko - SKPT Morotai;

f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota antara lain berupa Transportasi Lokal Kegiatan Sosialisasi kebijakan pencegahan destructive fishing di Maluku Tenggara - DKP Maluku;

g. Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota antara lain berupa Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelola Perikanan (RPP) kepiting Bakau dan Strategi Pemanfataan Perikanan Layang di WPNRI 715;

h. Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota antara lain berupa Kegiatan Reviu Pelaksanaan Regulasi terkait Perlindungan Nelayan/ Awak Kapal Perikanan dan Bagi Hasil Perikanan DJPT

i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri antara lain berupa Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Jepang, China dan India.

3. Ditjen Pengelolaan Kelautan

Merupakan hibah luar negeri berasal dari *Korea Maritime and Ocean University Concortium* (KMOUC) dengan kegiatan *The Establishment of Marine and Fisheries Scientific and Technical Cooperation* yang merupakan pemindahan saldo kas hibah dari Unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP pada satker Pusat Riset Perikanan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.380.952.501,00. Tidak terdapat mutasi pada Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada proyek KMOUC sehingga saldo per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.380.952.501,00.

### C.1.2.3 Kas Lainnya di Badan Layanan Umum (BLU)

Saldo Kas Lainnya di Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp451.561.194,00 dan Rp10.097.112.708,00.

Rincian saldo Kas Lainnya di Badan Layanan Umum (BLU) pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.12**
**Rincian Saldo Kas Lainnya di Badan Layanan Umum**
**Pada Masing-Masing Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 362.881.194 | 202.075.608 | 160.805.586 | 79,58 |
| Ditjen PB | 0 | 9.684.074.100 | (9.684.074.100) | (100,00) |
| BPPSDM KP | 88.680.000 | 210.963.000 | (122.283.000) | (57,96) |
| **Total** | **451.561.194** | **10.097.112.708** | **(9.645.551.514)** | **(95,53)** |

Penjelasan ringkas atas saldo Kas Lainnya di BLU pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Kas Lainnya di BLU pada Sekretariat Jenderal hanya terdapat pada satker LPMUKP yang merupakan transaksi dalam proses konfirmasi sebesar Rp102.879.530,00, kelebihan pembayaran angsuran debitur lunas sebesar Rp42.453.954,00, kelebihan provisi yang dibayarkan oleh Debitur pada skema pencairan bertahap sebesar Rp102.353.460,00, dan titipan pembayaran jasa notaris dari debitur BLU LPMUKP sebesar Rp115.194.250,00.

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

   Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP hanya terdapat pada satker BPPP Tegal yang merupakan pembayaran uang muka dari peserta untuk pelatihan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 sebesar Rp88.680.000,00.

### C.1.3 Kas Pada Badan Layanan Umum

*Kas Pada Badan Layanan Umum Rp260.370.997.622,00*

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo yang berasal dari akumulasi bersih pengesahan pendapatan PNBP BLU dan belanja BLU yang bersumber dari PNBP. Saldo Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) per 31

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp260.370.997.622,00 dan Rp210.657.196.390,00.

Rincian saldo Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) per akun adalah sebagai berikut:

**Tabel C.13**
**Rincian Saldo Kas Pada Badan Layanan Umum (BLU) Per Akun**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Kas dan Bank - BLU | 276.014.575.855 | 210.657.196.390 | 64.357.379.465 | 31,03 |
| Kas dan Bank BLU Belum Disahkan | (15.643.578.233) | 0 | (15.643.578.233) | 0,00 |
| **Total** | **260.370.997.622** | **210.657.196.390** | **49.713.801.232** | **23,60** |

Penjelasan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

### C.1.3.1 Kas dan Bank - BLU

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp276.014.575.855,00 dan Rp210.657.196.390,00.

Rincian saldo Kas dan Bank BLU pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.14**
**Rincian Saldo Kas dan Bank BLU Per Satker**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Satker | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Setjen** | **140.353.644.254** | **137.803.500.539** | **2.550.143.715** | **1,85** |
| -LPMUKP | 140.353.644.254 | 137.803.500.539 | 2.550.143.715 | 1,85 |
| **Ditjen PB** | **125.066.911.108** | **68.221.487.743** | **56.845.423.365** | **83,32** |
| -BBPBAP Jepaara | 3.345.496.296 | 2.060.041.640 | 1.285.454.656 | 62,40 |
| -BLUPPB Karawang | 6.117.503.186 | 6.357.920.758 | (240.417.572) | (3,78) |
| -BPBAP Situbondo | 115.603.911.626 | 59.803.525.345 | 55.800.386.281 | 93,31 |
| **BPPSDMKP** | **10.594.020.493** | **4.632.208.108** | **5.961.812.385** | **128,70** |
| BPPP Tegal | 3.204.407.790 | 1.116.089.695 | 2.088.318.095 | 187,11 |
| ( Poltek KP Sidoarjo | 7.389.612.703 | 3.516.118.413 | 3.873.494.290 | 110,16 |
| **Total** | **276.014.575.855** | **210.657.196.390** | **65.357.379.465** | **31,03** |

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum tersimpan dalam beberapa rekening bank yang dimiliki satker BLU (Rekening RPL) yang secara umum fungsinya sebagai penampung penerimaan dan untuk pengeluaran.

Rincian saldo rekening bank pada masing-masing satker BLU per rekening Bank per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah berikut ini:

**Tabel C.15**
**Rincian Saldo Rekening Operasional BLU**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| No. | Nama Bank | Peruntukan | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 |
| **Sekretariat Jenderal** | | | **115.453.616.447,18** | **37.579.724.648,79** |
| **Lembaga Pengelolaan Modal Usaha KP** | | | **115.453.616.447,18** | **37.579.724.648,79** |
| 1 | Bank Negara Indonesia | Rekening Operasional Penerimaan | 30.625.681.930 | 19.082.425.250,00 |
| 2 | Bank Rakyat Indonesia | Rekening Operasional Penerimaan | 84.712.366.295,18 | 16.981.965.029,79 |
| 3 | Bank Rakyat Indonesia | Rekening Operasional Pengeluaran | 0 | 1.515.334.369,00 |
| 4 | Bank Rakyat Indonesia | Rekening Dana Kelolaan - Titipan | 115.568.222,00 | 0 |
| **Ditjen Perikanan Budi Daya** | | | **125.066.911.114,27** | **77.905.561.852,73** |
| **Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang** | | | **6.117.503.186** | **6.357.920.758** |
| 1 | Bank Jawa Barat | Rekening Operasional Penerimaan 1 | 6.117.503.186 | 6.357.920.758 |
| 2 | Bank Jawa Barat | Rekening Operasional Penerimaan 2 | 0 | 0 |
| 3 | Bank Jawa Barat | Rekening Dana Kelola | 0 | 0 |
| 4 | Bank Jawa Barat | Rekening PKE | 0 | 0 |
| **Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara** | | | **3.345.496.301,68** | **2.060.041.647,73** |
| 1 | Bank Tabungan Negara | Rekening Operasional 1 | 7.386,91 | 40.582,25 |
| 2 | Bank Tabungan Negara | Rekening Operasional 2 | 323,96 | 0 |
| 3 | Bank Tabungan Negara | Rekening PKE | 3.345.017.146,14 | 2.059.967.778,68 |
| 4 | Bank Tabungan Negara | Rekaning Dana Kelolaan | 347.088,57 | 33.286,8 |
| 5 | Bank Tabungan Negara | Rekening PKD | 124.356,10 | ( |
| **Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo** | | | **115.603.911.626,59** | **69.487.599.447** |
| 1 | Bank Mandiri | Rekening Operasional Penerimaan | 70.503.748.581 | 59.749.027.036 |
| 2 | Bank Mandiri | Rekening Operasional Pengeluaran | 73.520,73 | 16.779 |
| 3 | Bank Mandiri | Rekening Dana Kelolaan | 14.604,83 | 9.738.555.632 |
| 4 | Bank BRI | Rekening Investasi Giro | 45.100.017.500,00 | 0 |
| 5 | Bank BSI | Rekening Investasi Giro | 57.420,03 | 0 |
| **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP** | | | **10.682.699.493,66** | **4.843.169.710** |
| **Badan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal** | | | **3.293.087.790** | **1.327.051.288** |
| 1 | Bank Tabungan Negara | Rekening Operasional Penerimaan | 3.204.205.401 | 1.115.869.564 |
| 2 | Bank Tabungan Negara | Rekening Operasional Pengeluaran | 0 | 140.902 |
| 3 | Bank Tabungan Negara | Rekening Dana Kelolaan | 88.880.212 | 211.039.318 |
| 4 | Bank Tabungan Negara | Rekening Pengelolaan Kas | 0 | 984 |

| No. | Nama Bank | Peruntukan | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 |
| 5 | Bank Tabungan Negara | Rekening Operasional Penerimaan (Bahari Residence) | 2.177 | 520 |
| **Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo** | | | **7.389.612.703,66** | **3.516.118.422** |
| 1 | Bank Mandiri | Rekening Operasional Penerimaan | 0 | 2.422.462.561 |
| 2 | Bank Mandiri | Rekening Operasional Pengeluaran | 0 | 55.812 |
| 3 | Bank Mandiri | Rekening Dana Kelolaan | 45.157,37 | 5.180 |
| 4 | Bank Negara Indonesia | Rekening Operasional Penerimaan | 1.000.000 | 0 |
| 5 | Bank Tabungan Negara | Rekening Operasional Penerimaan | 7.388.516.972,94 | 0 |
| 6 | Bank Tabungan Negara | Rekening Operasional Pengeluaran | 49.058,11 | 0 |
| 7 | Bank Tabungan Negara | Rekening Dana Kelolaan | 1.515,24 | 0 |
| 8 | Bank Mandiri | Rekening Pengelolaan Operasional Mahasiswa Baru | 0 | 1.093.594.869 |
| **Total** | | | **258.592.840.758,77** | **120.328.456.211,52** |

Kas pada Badan Layanan Umum pada Neraca per 31 Desember 2025 dan akumulasi saldo rekening bank per 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp276.014.575.855,00 dan Rp251.203.228.055,11. Terdapat selisih sebesar Rp24.811.347.799,89 lebih besar saldo pada neraca dibandingkan dengan saldo pada rekening bank dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel C.16**
**Perbandingan Saldo Kas dan Bank BLU pada Neraca dengan Saldo Rekening BLU**
**Per 31 Desember 2025**

| No | Nama Satker | Saldo per 31 Desember 2025 | | | | Saldo Rekening Bank Per 31 Des 2025 | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kas Pada BLU | Kas Lainnya | Kas dan Bank Belum Disahkan | Total | | |
| 1 | LPMUKP | 140.353.644.254 | 362.881.194,00 | (15.643.578.233) | 125.072.947.215 | 115.453.616.447,18 | 9.619.330.767,82 |
| 2 | BBPBAP Jepara | 3.345.496.296 | 0 | 0 | 3.345.496.296 | 3.345.496.301,68 | (5,68) |
| 3 | BLUPPB Karawang | 6.117.503.186 | 0 | 0 | 6.117.503.186 | 6.117.503.186,00 | 0 |
| 4 | BPBAP Situbondo | 115.603.911.626 | 0 | 0 | 115.603.911.626,59 | 115.603.911.626,59 | (0,59) |
| 5 | BP3 Tegal | 3.204.407.790 | 88.680.000 | 0 | 3.293.087.790 | 3.293.087.790,00 | 0 |
| 6 | Poltek KP Sidoarjo | 7.389.612.703 | 0 | 0 | 7.389.612.703 | 7.389.612.703,66 | (0,66) |
| **Total** | | **276.014.575.855** | **451.561.194** | **(15.643.578.233)** | **260.822.558.816** | **251.203.228.055,11** | **9.619.330.760,89** |

Penjelasan selisih antara Saldo Kas pada Badan Layanan Umum pada Neraca per 31 Desember 2025 dengan akumulasi saldo rekening bank per 31 Desember 2025 pada masing-masing satker BLU adalah sebagai berikut:

1. Pada BLU LPMUKP, saldo rekening koran lebih kecil Rp9.619.330.767,82 dibandingkan saldo neraca, selisih tersebut terjadi karena:

| No. | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Penyesuaian rekening atas pengembalian pemindahan saldo operasional pada dana kelolaan | (9.519.941.328,00) |
| 2 | Jasa layanan yang masih terdapat di rekening dana kelolaan Bulan Desember 2025:<br>(BRI RPL 019 Rp102.150.347,00)<br>(BNI RPL 019 Rp37.868.506,00)<br>(BRI RPL 175 sebesar Rp19.083.750,00) | (159.102.603,00) |
| 3 | Angsuran pokok yang masih terdapat di rekening operasional Bulan Desember 2025:<br>(BRI RPL 175 Rp8.657.806,00)<br>(BNI RPL 175 Rp52.705.357,00) | 61.363.163 |
| 4 | Kas lainnya yang terdapat pada rek DK Desember 2025 (Rekening DK BRI) | (1.650.000,00) |
| 5 | Pembulatan | 0,18 |
| **Total** | | **(9.619.330.767,82)** |

2. Pada BLU BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, dan Poltek KP Sidoarjo terdapat selisih masing-masing sebesar Rp5,68, Rp0,59, dan Rp0,66, merupakan akumulasi dari pencatatan dibelakang koma yang tidak terakomodasi dalam aplikasi SAKTI.

### C.1.3.2 Kas dan Bank-BLU Yang Belum Disahkan

Kas dan bank BLU belum disahkan adalah saldo kas/bank yang bersumber dari pendapatan BLU atau hibah langsung yang telah diterima dan dicatat oleh Satker BLU, namun belum disahkan oleh KPPN melalui mekanisme SP3B(BLU (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU) hingga akhir periode pelaporan, sering kali menjadi temuan dalam monitoring kualitas data. Saldo Kas dan Bank BLU Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.643.578.233,00 dan Rp0,00.

Rincian saldo Kas dan Bank BLU belum disahkan adalah sebagai berikut:

**Tabel C.17**
**Rincian Saldo Kas dan Bank-BLU yang Belum Disahkan Per Satker**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Satker | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| LPMU KP | (15.643.578.233) | 0 | (15.643.578.233) | 0,00 |
| **Total** | **(15.643.578.233)** | **0** | **(15.643.578.233)** | **0,00** |

Saldo Kas dan Bank BLU belum disahkan tersebut merupakan penggunaan dana saldo kas BLU yang digunakan untuk penyaluran dana bergulir kepada debitur. Sehubungan dengan penggunaan saldo kas tersebut dilakukan penyesuaian sesuai dengan surat dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S(12/PB.6/2026 agar LPMUKP menambahkan jurnal untuk memulihkan saldo Kas dan Bank(BLU dengan akun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan di Kredit, dan melakukan reklasifikasi atas Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga ke Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya senilai Rp15.643.578.233. Uraian lebih lanjut disajikan pada Catatan Pengungkapan Lainnya.

### C.1.4 Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum

*Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum Rp139.850.000.000,00*

Invetasi Jangka Pendek ( Badan Layanan Umum adalah investasi pada deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya dari kas dari bank BLU yang dibatasi penggunaannya. Saldo Invetasi Jangka Pendek ( Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp139.850.000.000,00 dan Rp22 850.000.000,00.

Rincian saldo Investasi Jangka Pendek(Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut:

**Tabel C.18**
**Rincian Saldo Investasi Jangka Pendek(Badan Layanan Umum**
**Pada Masing-masing Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 30.000.000.000 | 12.000.000.000 | 18.000.000.000 | 150,00 |
| DJPB | 100.000.000.000 | 5.000.000.000 | 95.000.000.000 | 1.900,00 |
| BPPSDM KP | 9.850.000.000 | 6.450.000.000 | 3.400.000.000 | 52,71 |
| **Total** | **139.850.000.000** | **23.450.000.000** | **116.400.000.000** | **496,38** |

Daftar rincian deposito pada masing-masing satker adalah sebagai berikut:

**Tabel C.19**
**Rincian Saldo Deposito BLU pada Masing-masing Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| No. | Nama Bank | Jangka Waktu | Nominal |
|---|---|---|---|
| **Sekretariat Jenderal** | | | **30.000.000.000** |
| **Lembaga Pengelolaan Modal Usaha KP** | | | **30.000.000.000** |
| 1 | Bank BRI | 3 Bulan | 15.000.000.000 |
| 2 | Bank BRI | 3 Bulan | 15.000.000.000 |
| **Ditjen Perikanan Budi Daya** | | | **100.000.000.000** |

| No. | Nama Bank | Jangka Waktu | Nominal |
|---|---|---|---|
| **BPBAP Situbondo** | | | **100.000.000.000** |
| 1 | Bank BTN | 6 Bulan | 100.000.000.000 |
| **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP** | | | **9.850.000.000** |
| **Badan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal** | | | **9.850.000.000** |
| 1 | Bank Tabungan Negara | 3 bulan | 1.350.000.000 |
| 2 | Bank Tabungan Negara | 3 bulan | 1.000.000.000 |
| 3 | Bank Tabungan Negara | 3 bulan | 1.000.000.000 |
| 4 | Bank Tabungan Negara | 3 bulan | 1.000.000.000 |
| 5 | Bank Tabungan Negara | 3 bulan | 1.500.000.000 |
| 6 | Bank Tabungan Negara | 3 bulan | 1.500.000.000 |
| 7 | Bank Tabungan Negara | 3 bulan | 2.500.000.000 |
| **Total** | | | **139.850.000.000** |

### C.1.5 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

*Belanja dibayar Dimuka (Prepaid) Rp14.076.352.496,00*

Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per 31 Desember 2025 hanya berupa Belanja Dibayar Dimuka. Saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.076.352.496,00 dan Rp853.731.100,00.

Saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.20**
**Rincian Saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka**
**Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Ditjen PSDKP | 64.879.167 | 108.964.167 | (44.085.000) | (40,46) |
| Ditjen PK | 12.916.853.718 | 0 | 12.916.853.718 | 0,00 |
| BPPSDM KP | 435.970.833 | 676.058.333 | (240.087.500) | (35,51) |
| BPPMH KP | 658.648.778 | 68.708.600 | 589.940.178 | 858,61 |
| **Total** | **14.076.352.496** | **853.731.100** | **13.222.621.396** | **1.548,80** |

Terdapat kenaikan saldo Belanja Dibayar Dimuka sebesar 1.548,80% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan oleh

adanya pembukaan gerai layanan pada wilayah kerja Ditjen Pemanfaatan Ruang Laut.

Penjelasan ringkas atas saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka (*Prepaid*) pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP

   Saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka (*Prepaid*) pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP terdapat pada 4 (empat) satker yaitu sebagai berikut:

   a. Pangkalan PSDKP Lampulo

      Merupakan sewa gedung kantor satuan pengawas Aceh Selatan sebesar Rp1.250.000,00 dan sewa gedung kantor satuan pengawas Aceh Barat sebesar Rp1.250.000,00.

   b. Stasiun PSDKP Ambon

      Merupakan sewa gedung kantor wilayah kerja Masohi sebesar Rp10.500.000,00.

   c. Pangkalan PSDKP Benoa

      Merupakan sewa Gedung kantor di Gili Air, Lombok Utara sebesar Rp16.666.667,00.

   d. Stasiun PSDKP Belawan

      Merupakan sewa gedung kantor Panipahan sebesar Rp8.325.000,00 dan sewa Gudang BMN sebesar Rp26.887.500,00.

2. Ditjen Pengelolaan Kelautan

   Saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka (*Prepaid*) pada Ditjen Pengelolaan Kelautan terdapat terdapat pada 6 (empat) satker yaitu sebagai berikut:

   a. BPSPL Denpasar

      Merupakan sewa kantor pelayanan pada 8 (delapan) wilayah kerja sebesar Rp5.280.100.000,00.

   b. Loka KKPN Pekanbaru

      Merupakan sewa kantor pelayanan pada 11 (sebelas) wilayah kerja sebesar Rp2.619.190.000,00

c. BKKPN Kupang

Merupakan sewa kantor pelayanan pada 7 (tujuh) wilayah kerja sebesar Rp1.277.429.720,00.

d. Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan

Merupakan sewa kantor sekretariat Lautra sebesar Rp1.600.000.000,00.

e. Satker Lainnya

Merupakan sewa kantor pelayanan dan sewa kendaraan pada 4 (empat) satker sebesar Rp2.140.133.998,00.

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka (*Prepaid*) pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada satker Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP yang merupakan biaya pendidikan ASN sebanyak 16 (enam belas orang) orang yang tugas belajar sebesar Rp435.970.833,00.

4. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP

Saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka (*Prepaid*) pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP terdapat 10 (sepuluh) pada satker yaitu sebagai berikut:

a. Balai KIPM Surabaya I

Merupakan sewa gudang arsip sebesar Rp40.000.000,00, langganan internet sebesar Rp127.440.867,00 dan langganan aplikasi sebesar Rp11.438.397,00.

b. Balai KIPM Medan I

Merupakan sewa gudang arsip sebesar Rp3.750.000,00, sewa mesin fotokopi sebesar Rp13.320.000,00 dan langganan internet sebesar Rp76.109.000,00.

c. Balai KIPM Merak

Merupakan sewa gudang arsip sebesar Rp30.000.000,00 dan sewa mesin fotokopi sebesar Rp60.500.000,00.

d. Balai Uji Standar KIPM

Merupakan sewa gudang BMN sebesar Rp104.660.111,00.

e. Satker Lainnya

Merupakan sewa arsip dan lain-lain pada 6 (enam) satker sebesar Rp191.430.403,00.

### C.1.6 Uang Muka Belanja (*Prepayment)*

*Uang Muka (Prepayment) Rp909.984.470.455,00*

Uang muka kerja merupakan porsi pembayaran yang dilakukan di muka/awal sebelum pihak ketiga menyerahkan barang/jasa. Pemberian uang muka kerja dapat dilakukan setelah penyedia barang/jasa menyampaikan surat jaminan. Saldo Uang Muka (*prepayment*) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp909.984.470.455,00 dan Rp0,00.

**Tabel C.21**
**Rincian Saldo Uang Muka**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Uang muka belanja modal (prepayment) | 909.984.470.455 | 0 | 909.984.470.455 | 0,00 |
| **Total** | **909.984.470.455** | **0** | **909.984.470.455** | **0,00** |

Terdapat Uang Muka Belanja Modal (*prepayment*) pada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp909.984.470.455,00 yang merupakan pembayaran uang muka pekerjaan MFISS yang berasal dari pemberi pinjaman Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) dan *Instituto De Credito Oficial (ICO)*.

### C.1.7 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp21.943.695.912,00*

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Berdasarkan perhitungan secara akuntansi, yang sudah menjadi hak pemerintah tersebut dicatat sebagai pendapatan yang masih harus diterima dan diakui sebagai pendapatan di periode berjalan. Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.943.695.912,00 dan Rp21.667.904.525,00.

Rincian saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.22**
**Rincian Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima**
**Pada Masing-masing Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 558.296.506 | 661.683.530 | (103.387.024) | (15,62) |
| Ditjen PT | 21.172.817.728 | 20.895.800.631 | 277.017.097 | 1,33 |
| BPPSDM KP | 212.581.678 | 110.420.364 | 102.161.314 | 92,52 |
| **Total** | **21.943.695.912** | **21.667.904.525** | **275.791.387** | **1,27** |

Terdapat kenaikan saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar 1,27% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan oleh adanya penurunan jumlah kapal dan nilai pembayaran PNBP pascaproduksi dari lembar penilaian sendiri (LPS) yang belum terkonfirmasi.

Penjelasan ringkas atas saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada Sekretariat Jenderal hanya terdapat satker BLU LPMUKP yang merupakan:

   a. Bunga penempatan deposito pada BLU LPMUKP yang sudah menjadi hak BLU LPMU KP sampai dengan 31 Desember 2025 namun belum jatuh tempo sebesar Rp72.328.767,00. Penempatan deposito tersebut berasal dari dana mengganggur (*idle cash*) dari Kas BLU dan Dana Kelolaan BLU.

   b. Pendapatan jasa layanan yang sudah menjadi hak BLU LPMUKP sampai dengan 31 Desember 2024 namun belum jatuh tempo. Pendapatan tersebut dihitung secara proporsional selama 6 (enam) hari dari tanggal 26 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp485.967.739,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

   Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada 20 (dua puluh) satker yaitu sebagai berikut:

   a. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Merupakan PNBP pascaproduksi dari lembar penilaian sendiri (LPS) dari 66 (enam puluh enam) kapal yang belum terkonfirmasi sebesar Rp493.167.744,00.

b. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan

Merupakan jasa tambat labuh dan kebersihan kolam dari 31 (tiga puluh satu) kapal sebesar Rp473.860.560,00.

c. Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap

Merupakan jasa tambat labuh dan kebersihan kolam dari 218 (dua ratus delapan belas) kapal sebesar Rp265.660.358,00 serta jasa penggunaan air dan listrik yang jatuh tempo pada bulan Januari 2026 masing-masing sebesar Rp519.910,00 dan Rp 16.135.508,00.

d. Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman (PPSNZ)

1) Merupakan jasa tambat labuh dan kebersihan kolam atas kapal perikanan dan nonperikanan (SPOB) dengan jumlah penerimaan senilai Rp18.551.346.308,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel C.23**
**Rincian Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima PPSNZ**
**Per 31 Desember 2025**

| No | Jumlah Kapal | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2.560.896.967 | PYMHD kapal yang masih berada di Kolam Pelabuhan |
| 2 | 5 | 264.071.076 | PYMHD terhadap kapal sudah tidak berada di Kolam Pelabuhan |
| 3 | 16 | 38.185.097 | Kapal SPB yang terdapat dalam absensi kolam akhir tahun 2021 dan telah dilakukan konfirmasi dengan pemilik kapal kecuali 1 Kapal (Sungai Rokan 12) yang belum memberikan konfirmasi/klarifikasi |
| 4 | 594 | 15.497.712.888 | PYMHD Kapal Perikanan yang dihitung per 31 Desember 2025 berdasarkan dokumen kedatangan kapal dan belum ada dokumen SPB yang didukung dengan dokumentasi kapal |
| 5 | 8 | 190.480.280 | PYMHD Kapal Non Perikanan (SPOB) yang berasal dari tagihan bulan Desember 2025 (Tambat SPOB berdasarkan penjualan SPOB dan Kebersihan Kolam SPOB) |
| **Total** | **627** | **18.551.346.308** | |

2) Terdapat kapal yang tidak beroperasi sebanyak 54 kapal yang ditambatkan di kolam PPSNZ. Sebanyak 22 kapal di antaranya tidak diketahui dokumennya berupa Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dan dalam kondisi rusak/tidak layak

melaut dan sudah mangkrak di kolam pelabuhan selama minimal lebih dari 5 tahun. Potensi penerimaan atas 22 kapal ini senilai Rp8.839.203.660,00. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan pada pengungkapan lainnya.

e. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

Merupakan jasa tambat labuh dan kebersihan kolam dari 14 (empat belas) kapal sebesar Rp 239.043.870,00 serta jasa penggunaan air dan listrik yang jatuh tempo pada bulan Januari 2026 sebesar Rp14.072.446,00.

f. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Merupakan jasa tambat labuh dan kebersihan kolam dari 169 (seratus enam puluh sembilan) kapal sebesar Rp889.364.525,00.

g. Satuan Kerja Lainnya

Merupakan jasa tambat dan labuh, biaya kebersihan kolam, penggunaan sarana dan prasarana sesuai tusi (listrik, air dan lain-lain) sampai dengan 31 Desember 2025 pada 14 (lima belas) satuan kerja sebesar Rp230.730.500,00.

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 2 (dua) satker yaitu sebagai berikut:

a. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Tegal

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada BP3 Tegal berupa:

1) Bunga penempatan deposito pada BLU BP3 Tegal yang sudah menjadi hak BLU BP3 Tegal sampai dengan 31 Desember 2025 namun belum jatuh tempo sebesar Rp16.561.644,00;

2) Pengakuan pendapatan dari kerjasama dengan perusahaan aplikasi atas sewa Hotel Aquarium Indonesia di Pangadaran sebesar Rp29.981.650,00;

3) Pengakuan pendapatan kompensasi tetap KSO pemanfaatan aquarium Indonesia di Pangandaran periode 1 November sampai

dengan 31 Desember 2025 belum jatuh tempo sebesar Rp16.038.384,00.

b. Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo

Merupakan pembayaran termin IV yang berasal dari pendapatan kerjasama dengan UNIDO terkait kegiatan pengembangan kurikulum satuan pendidikan KKP sebesar Rp150.000.000,00.

### C.1.8 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak Rp158.364.411.690,00*

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp158.364.411.690,00 dan Rp58.098.228.477,00. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.24**
**Rincian Saldo Piutang Bukan Pajak**
**Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun / Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak** | **143.107.781.119** | **30.053.705.189** | **113.054.075.930** | **376,17** |
| Ditjen PT | 22.278.134.649 | 22.669.504.139 | (391.369.490) | (1,73) |
| Ditjen PB | 8.930.041.658 | 84.000.000 | 8.846.041.658 | 10.531,00 |
| Ditjen PSDKP | 57.512.264.422 | 2.502.785.101 | 55.009.479.321 | 2.197,93 |
| Ditjen PDSPKP | 2.223.047.627 | 1.839.391.122 | 383.656.505 | 20,86 |
| Ditjen PK | 51.749.455.013 | 2.559.256.077 | 49.190.198.936 | 1.922,05 |
| BPPSDM KP | 414.837.750 | 398.768.750 | 16.069.000 | 4,03 |
| **Piutang Lainnya** | **15.256.630.571** | **28.044.523.288** | **(12.787.892.717)** | **(45,60)** |
| Setjen | 363.143.738 | 1.367.029.603 | (1.003.885.865) | (73,44) |
| Ditjen PT | 7.406.240.303 | 7.158.223.258 | 248.017.045 | 3,46 |
| Ditjen PB | 2.514.176.953 | 5.521.882.227 | (3.007.705.274) | (54,47) |
| Ditjen PSDKP | 7.101.350 | 94.024.497 | (86.923.147) | (92,45) |
| Ditjen PDSPKP | 24.877.736 | 132.996.271 | (108.118.535) | (81,29) |
| Ditjen PK | 571.058.531 | 8.680.635.245 | (8.109.576.714) | (93,42) |
| BPPSDM KP | 4.354.812.347 | 5.076.651.871 | (721.839.524) | (14,22) |
| BPPMH KP | 15.194.613 | 13.080.316 | 2.114.297 | 16,16 |
| **Total** | **158.364.411.690** | **58.098.228.477** | **100.266.183.213** | **172,58** |

Terdapat kenaikan saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 172,58% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan oleh adanya pembukuan piutang atas pelanggaran administratif atas pagar laut pada unit eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan unit eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan pembukuan piutang atas izin pelaksanaan reklamasi.

Disisi lain terdapat terdapat penurunan saldo Piutang Lainnya sebesar 45,60% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan oleh adanya pelunasan piutang atas izin pelaksanaan reklamasi a.n EMPG Ltd dan a.n PT VI.

### C.1.8.1 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penjelasan rinci atas saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Perikanan Tangkap

   Saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada 9 (sembilan) satker yaitu sebagai berikut:

   a. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

      Merupakan piutang sebagai berikut:

      Piutang atas tunggakan pungutan hasil perikanan (PHP) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI sesuai LHP Nomor 39/LHP/XVII/11/2013 tanggal 19 November 2013 yang disebabkan penyesuaian harga patokan ikan pada peraturan Menteri Perdagangan nomor 13/M(DAG/PER/5/2011 sebesar Rp28.876.531.364,00 yang berasal dari 1.078 (seribu tujuh puluh delapan) kapal di atas 30 GT milik 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) perusahaan. Sampai dengan 31 Desember 2025 piutang yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp14.228.126.264,00 (termasuk *crash program* PT H sebesar Rp1.110.390.866,00) sehingga saldo piutang PHP per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.648.405.100,00. Piutang ini diklasifikasikan sebagai piutang macet karena setelah dilakukan penagihan lebih dari 3 (tiga) kali terhadap 468 (empat ratus enam puluh delapan) kapal penunggak pungutan hasil perikanan sampai 31 Desember 2025 belum melunasi kewajibannya dan sudah disisihkan 100% sebagai piutang tidak tertagih.

   b. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Merupakan piutang atas sewa dan lahan bangunan dari 19 (sembilan belas) debitur sebesar Rp1.498.836,00,00.

c. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang

Merupakan piutang atas jasa pelayanan pelabuhan, air, dan cold storage dari 12 (dua belas) debitur sebesar Rp26.351.910,00,00.

d. Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman

Merupakan piutang atas jasa tambat labuh dan kebersihan kolam, serta piutang atas tagihan jasa listrik, jasa gedung bangunan dan jasa kebersihan yang berasal dari LHA Itjen, LHP BPK dan Piutang PNBP dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel C.25**
**Rincian saldo Piutang PNBP pada PPS Nizam Zachman**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Uraian | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 |
|---|---|---|
| LHA Itjen 2022 (Periode Aktivitas 2019(2020) | 13.096.577 | 68.210.375 |
| Piutang non tambat 2021 | 31.080.000 | 31.080.000 |
| LHP BPK RI 2021 (22M) (Periode Aktivitas 2019(2020) | 53.748.712 | 59.054.131 |
| **Jumlah** | **97.925.289** | **158.344.506** |

e. Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari

Merupakan piutang atas piutang atas penggunaan sarana dan prasarana atas nama CV. BC (sudah diserahkan ke PUPN pada tahun 2021) sebesar Rp11.509.294,00 dan piutang penggunaan sarana dan prasarana sebanyak 7 (tujuh) debitur sebesar Rp129.932.381,00 serta piutang atas penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi di PP Untia atas nama Koperasi P sebesar Rp 4.307.016,00 dan atas nama CV. MI (sudah diserahkan ke PUPN pada tanggal 26 September 2024) sebesar Rp37.474.918,00.

f. Pelabuhan Perikanan Palabuhan Ratu

Merupakan piutang atas jasa pelabuhan perikanan berupa tagihan penggunaan listrik dari 100 (seratus) debitur sebesar Rp22.031.672,00,00.

g. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

1) Piutang atas jasa tambat labuh dan kebersihan kolam PT HOI sebesar Rp14.070.311.650,00. Penyelesaian piutang ini telah

diserahkan kepada panitia urusan piutang negara (PUPN). Adapun penyerahannya melalui 2 (dua) tahap, penyerahan pertama sebesar Rp11.914.580.846,00 pada tanggal 18 Februari 2018 dan penyerahan kedua sebesar Rp2.155.730.804,00 pada tanggal 4 Februari 2019. Selama tahun 2025 terdapat pembayaran sebesar Rp3.671.852.875, Sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.253.004.235,00.

2) Piutang tagihan penggunaan listrik a.n PT HLA sebesar Rp1.193.335,00

h. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

Merupakan piutang atas jasa pelabuhan perikanan berupa tambat labuh, kebersihan kolam dan lain-lain dari 13 (tiga belas) debitur sebesar Rp42.699.263,00.

i. Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Merupakan piutang jasa kebersihan penggunaan kawasan pelabuhan oleh Pemerintah Kota Bitung yang sudah jatuh tempo sebesar Rp2.801.400,00.

2. Ditjen Perikanan Budi Daya

Saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Perikanan Budidaya terdapat pada 2 (dua) satker yaitu sebagai berikut:

1) Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya

Merupakan Jaminan Pelaksanaan yang belum dicairkan pada Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya sesuai Hasil Audit BPK RI Nomor 13c/LHP/XVII/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp124.127.000,00, Piutang KJA Direktorat Pakan dan Obat Ikan yang telah diserahkan ke PUPN sesuai Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Negara atas nama PT Perikanan Indonesia d/h PT Perikanan Nusantara Nomor B.4453/DJPB.3/KU.420/XI/2024 tanggal 5 November 2024 sebesar Rp3.692.393.100,00 dan Piutang KJA Direktorat Rumput Laut d/h Direktorat Perbenihan yang telah diserahkan ke PUPN sesuai Surat Penyerahan Nomor B.1942/DJPB.4/B.150/XI/2024 sebesar Rp5.029.521.558,00.

2) Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang

Saldo piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Perikanan Budi Daya hanya terdapat pada satker Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang yang merupakan piutang atas penggunaan lahan tambak intensif oleh Perum Perindo pada satker BLU Produksi Perikanan Budidaya Karawang sebesar Rp350.000.000,00. Penyelesaian piutang ini telah diserahkan kepada PUPN. Adapun penyerahannya melalui 2 (dua) tahap, penyerahan pertama pada tanggal 31 Mei 2023 dan penyerahan kedua pada tanggal 6 Juli 2023. Sampai dengan 31 Desember 2025 piutang yang disetor ke kas negara sebesar Rp266.000.000,00, sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp84.000.000,00.

3. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP

Piutang PNBP pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP hanya terdapat pada satker Sekretariat 3. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP yaitu sebagai berikut:

a. Piutang PNBP Sdr. RM sebesar Rp1.143.538.189. Piutang ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2024. Piutang dilimpahkan ke KPKNL Batam pada tanggal 14 Agustus 2025 sebesar Rp1.143.538.189, dan telah terbit SP3N pada tanggal 25 Agustus 2025. Belum ada pembayaran sehingga nilai piutang masih sesuai dengan nilai yang dilimpahkan ke KPKNL Batam.

b. Piutang PNBP Sdr. RAM (KM. SS) sebesar Rp1.083.424.173. Piutang ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2024. Piutang dilimpahkan ke KPKNL Padang Sidempuan pada tanggal 11 Maret 2025 sebesar Rp1.087.414.272, dan telah terbit SP3N pada tanggal 19 Maret 2025. Berdasarkan hasil penagihan, wajib bayar telah membayar sebesar Rp3.990.099, sehingga nilai sisa piutang menjadi sebesar Rp1.083.424.173.

c. Piutang PNBP Sdr. TJK (KM. SI) sebesar Rp37.035.180. Piutang ditetapkan padda tanggal 11 November 2025. Piutang telah dilakukan pembayaran pada tanggal 11 Januari 2026 dengan NTPN Nomor 8800E1JNGHAFPPKM.

d. Piutang PNBP Sdr. A dan Sdr. T (Pagar Laut) sebesar Rp55.248.266.880. Piutang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2025. Piutang masih dalam proses penagihan oleh Ditjen PSDKP dan belum dapat dilimpahkan ke KPKNL Tangerang I karena

berdasarkan hasil koordinasi, Ditjen PSDKP belum mengoptimalkan seluruh kewenangan penagihan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif.

**Tabel C.26**
***Timeline* Penagihan Pagar Laut**

| No | Tanggal | Keterangan | B.172 (Sdr. A dan Sdr. T) | B.184 (Sdr. A) | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Februari 2025 | Diterbitkan penetapan denda administratif pagar laut | 7.357.342.160 | 41.106.049.840 | 48.463.392.000 |
| 2 | 26 Maret 2025 | Billing denda administratif pagar laut | 7.357.342.160 | 41.106.049.840 | 48.463.392.000 |
| 3 | 22 Mei 2025 | Billing denda administratif pagar laut & denda keterlambatan 2% | 7.504.489.003 | 41.928.170.837 | 49.432.659.840 |
| 4 | 23 Juni 2025 | Billing denda administratif pagar laut & denda keterlambatan 4% | 7.651.635.846 | 42.750.291.834 | 50.401.927.680 |
| 5 | 23 Juli 2025 | Billing denda administratif pagar laut & denda keterlambatan 6% | 7.798.782.690 | 43.572.412.830 | 51.371.195.520 |
| 6 | 25 Agustus 2025 | Billing denda administratif pagar laut & denda keterlambatan 8% | 7.945.929.533 | 44.394.533.827 | 52.340.463.360 |
| 7 | 29 September 2025 | Billing denda administratif pagar laut & denda keterlambatan 10% | 8.093.076.376 | 45.216.654.824 | 53.309.731.200 |
| 8 | 6 November 2025 | Billing denda administratif pagar laut & denda keterlambatan 12% | 8.240.223.219 | 46.038.775.821 | 54.278.999.040 |
| 9 | 18 Desember 2025 | Billing denda administratif pagar laut & denda keterlambatan 14% | 8.387.370.062 | 46.860.896.818 | 55.248.266.880 |

4. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

Saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP terdapat pada satker Sekretariat Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP yang merupakan piutang sebagai berikut:

a. Sewa Pasar Ikan Modern Muara Baru dan denda keterlambatan pembayaran sewa periode 7 September s.d. 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp553.384.148,00 dan Rp44.270.732,00;

b. Sewa Pasar Ikan Modern Muara Baru dan denda keterlambatan pembayaran sewa periode 1 Januari s.d. 16 Februari 2024 masing-masing sebesar Rp224.216.137,00 dan Rp4.484.247,00;

c. Piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa:

   a) Kekurangan denda keterlambatan pembayaran sewa periode 1 Januari s.d. 16 Februari 2024 sebesar Rp4.484.247,00;

b) Sewa Pasar Ikan Modern Muara Baru periode Februari s.d. Agustus 2024 sebesar Rp863.470.170,00.

d. Sewa Pasar Ikan Modern Muara Baru selama tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel C. 27**
**Rincian Sewa Pasar Ikan Modern Muara Baru Tahun 2025**

| No | Uraian | Tahun 2025 (Jan ( Des) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nilai Tagihan | Terbayar | Belum dibayar |
| 1 | Lapak Basah | 2.719.448.400 | 2.467.831.600 | 251.616.800 |
| 2 | Foodcourt | 385.089.516 | 241.593.517 | 143.495.999 |
| 3 | Office Area (Lt. 3) | 37.603.883 | 33.670.101 | 3.933.782 |
| 4 | Kios Maritim | 209.120.000 | 148.797.000 | 60.323.000 |
| 5 | Resto Modern (Lt.2) | 183.411.814 | 114.043.448 | 69.368.365 |
| **TOTAL** | | **3.534.673.612** | **3.005.935.666** | **528.737.946** |

5. Ditjen Pengelolaan Kelautan

Merupakan piutang atas izin pelaksanaan reklamasi atas nama PT. Pembangunan Jaya Ancol TBK sesuai Perjanjian Nomor B.337/DJPK/KS.320/V/2025 Tanggal 11 Juni 2025 sebesar Rp50.774.806.651,00 dan izin pelaksanaan reklamasi atas nama PPN Pengambengan sesuai Perjanjian Nomor B.4045/DJPK.5/KS.320/XII/2025 Tanggal 23 Desember 2025 sebesar Rp974.648.362,00.

Terhadap piutang kontribusi tetap dari perikatan kerja sama pemanfaatan (KSP) BMN yang berlokasi di Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan PT SMA pada satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp1.279.628.039,00, sudah dilakukan jurnal balik karena telah dilakukan pengakhiran perjanjian kerja sama pemanfaatan sebagian BMN berupa tanah sesuai Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PT SMA (KSO) nomor B.2/DJPK/PRL.240/III/2025 dan Nomor 005A/SMAK/III/2025.

6. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Saldo piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 3 (tiga) Satker yaitu sebagai berikut :

a. Balai Riset Pemuliaan Ikan

Merupakan piutang atas pemanfaatan lahan dengan cara sewa oleh Koperasi Produsen LMS & S dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 pada satker Balai Riset Pemuliaan Ikan sebesar Rp7.600.000,00, piutang sewa lahan PT BNP serta PT WCI selama 2 tahun sebesar Rp143.122.500,00, piutang sewa lahan PT BTP Rp82.958.750,00; piutang atas sewa tanah dan bangunan oleh PT PIB selama 4 tahun dengan akumulasi sebesar Rp164.400.000,00.

b. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Dan Penyuluhan Perikanan

merupakan piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2025 berupa kekurangan setoran penjualan Ikan Bandeng Konsumsi dan Nila Tahun 2025 sebesar Rp7.756.500,00.

c. Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong

merupakan piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2025 berupa kekurangan setoran Sewa Aula Rp6.000.000,00 dan Sewa Kendaraan Rp3.000.000,00 oleh GEF.

### C.1.8.2 Piutang Lainnya

Penjelasan ringkas atas saldo Piutang Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

Piutang Lainnya pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal hanya terdapat pada satker Biro Umum dan PBJ yang merupakan:

a. Piutang Kelebihan Uang Makan PNS Periode Desember 2025 sebesar Rp17.560.050,00.

b. Piutang Kelebihan Uang Makan PPPK Periode Desember 2025 sebesar Rp986.450,00.

c. Piutang Kelebihan Tunjangan Kinerja PNS Periode Desember 2025 sebesar Rp6.611.619,00.

d. Piutang Kelebihan Tunjangan Kinerja PPPK Periode Desember 2025 sebesar Rp1.402.012,00.

e. Pengembalian Pekerjaan Jasa Teknisi Gedung Kantor Pusat sebesar Rp202.050.000,00.

f. Pengembalian Belanja Barang Pekerjaan Jasa Satuan Pengamanan sebesar Rp38.250.000,00.

g. Pengembalian Belanja Barang Pekerjaan Tenaga Kebersihan sebesar Rp9.900.000,00.

h. Pengembalian Perjalanan Dinas Biasa Dalam Negeri sebesar Rp126.000,00.

i. Pengembalian belanja pegawai tunjangan fungsional tugas belajar bulan Agustus sampai November 2025 an. DA sebesar Rp3.824.000,00.

j. Pengembalian belanja barang lainnya sebesar Rp5.000,00.

k. Piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024 atas Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar negeri dan perjalanan dinas luar negeri sebesar RpRp82.453.607,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

Saldo Piutang Lainnya pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada 15 (lima belas) satker antara lain:

a. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Saldo Piutang Lainnya pada satker Setditjen Perikanan Tangkap merupakan:

- Terkait pemeriksaan atas Laporan Keungan KKP TA 2017, terdapat temuan atas Pembangunan Kapal dan Direktorat KAPI yang sudah diserahkan ke KPKNL berupa:

  a) PDTT Kapal dan Pelabuhan TA.2015(2016 berupa denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan atas 45 (empat puluh lima) unit kapal perikanan a.n. CV. SP sebesar Rp1.407.826.752,00,00. Piutang tersebut telah diserahkan ke PUPN untuk pengurusan penagihan dan sudah dikategorikan Piutang Macet.

  b) Pembayaran pembangunan kapal untuk diserahkan kepada masyarakat pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan TA 2017 yang tidak diyakini kewajarannya a.n. PT. IFT sebesar Rp435.420.000,00. Piutang tersebut telah

diserahkan ke PUPN untuk pengurusan penagihan dan sudah dikategorikan Piutang Macet.

c) Pembayaran pembangunan kapal untuk diserahkan kepada masyarakat pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan TA 2017 yang tidak diyakini kewajarannya a.n PT. AC sebesar Rp588.574.400,00. Piutang tersebut telah diterima PSBDT dan telah diajukan penghapusan piutangnya ke DJKN Kementerian Keuangan.

d) Denda atas kekurangan penyelesaian pekerjaan pengadaan kapal perikanan KM Mina Maritim 122 oleh CV. MKU sebesar Rp238.285.891,00. Pada tanggal 2 November 2024 piutang tersebut telah diserahkan ke PUPN untuk pengurusan penagihan dan sudah dikategorikan Piutang Macet.

- Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengadaan kapal dan pembuatan sabuk pantai untuk mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim tahun 2016(2017 berupa:

  i. Kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan pekerjaan kapal 5 GT sebanyak 13 (tiga belas) unit oleh CV. KB sebesar Rp103.624.449,00.

  ii. Kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan pekerjaan Kapal 10 GT sebanyak 15 (lima belas) kapal oleh PT YA, sebesar Rp548.001.686,00. Sepanjang tahun 2025 piutang yang disetor ke Kas Negara sebesar Rp11.071.108,00,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp536.930.578,00,00

- Kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan pembangunan dan pengerukan PPI Cikidang oleh PT BIP masing-masing sebesar Rp2.363.812.906,55 dan sebesar Rp593.948.800,00. Pada tahun 2016 PT BIP telah mengangsur denda sebesar Rp200.000.000,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.753.331.310,00.

- Merupakan temuan TGR a.n. Sdr. AWS dengan nilai temuan sebesar Rp125.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah menyetor 23 (dua puluh tiga) kali angsuran ke Kas Negara sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp35.000.000,00.

- Piutang atas temuan pemeriksaan BPK RI eks satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw sebesar Rp3.015.000,00;

- Piutang atas temuan pemeriksaan BPK RI tahun 2017 atas pengadaan kapal perikanan dan pembangunan pelabuhan perikanan tahun anggaran 2015 dan 2016 a.n PT PU sebesar Rp154.193.010,00. piutang tersebut telah diserahkan ke PUPN untuk pengurusan penagihan dan sudah dikategorikan Piutang Macet.

- Piutang atas temuan pemeriksaan BPK RI tahun 2025 atas kelebihan pembayaran yang bersumber dari dana Hibah GEF berupa belanja perjalanan dinas dalam negeri senilai Rp158.203.580,00 dan Luar Negeri sebesar Rp70.914.620

b. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Merupakan piutang atas pencairan jaminan asuransi atas pekerjaan kapal yang tidak selesai. Saat ini sedang proses pengalihan penagihan piutang ke PUPN sebesar Rp537.727.080,00.

c. Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Merupakan Piutang atas temuan pemeriksaan BPK RI tahun 2025 atas jasa keamanan sebesar Rp12.000.000,00 dan jasa kebersihan sebesar Rp5.000.000,00

d. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat

Merupakan pengembalian belanja perjalan dinas sebesar Rp820.000,00

e. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

Merupakan pengembalian belanja perjalan dinas sebesar Rp52.500,00

f. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Saldo Piutang Lainnya pada satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan:

1) piutang atas jasa kapal keruk sebesar Rp325.600.000,00;

2) kelebihan Tunjangan Kinerja PPPK bulan Desember 2025 sebesar Rp81.300,00;

3) kelebihan Uang Makan PPPK bulan Desember 2025 sebesar Rp613.000,00;

4) kelebihan Tunjangan Kinerja PNS bulan Desember 2025 sebesar Rp445.000,00;

5) kelebihan Uang Makan PNS bulan Desember 2025 sebesar Rp1.363.000,00.

g. Satker Lainnya

Terdapat pada 12 (dua belas) satker yang merupakan piutang atas kelebihan pembayaran uang makan dan tunjangan kinerja periode Desember 2025 sebesar Rp37.218.833,00.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

Saldo Piutang Lainnya pada Ditjen Perikanan Budidaya terdapat pada 3 (tiga) satker antara lain:

a. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung

Merupakan piutang atas pengembalian kelebihan pembayaran uang makan sebesar Rp699.200,00,00.

b. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee

Merupakan piutang atas pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan kinerja sebesar Rp256.678,00.

c. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang

Merupakan Piutang atas temuan pemeriksaan BPK RI tahun 2025 atas kelebihan pembayaran belanja barang sebesar Rp20.798.919,00.

d. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Merupakan Piutan pengembalian belanja perjalanan dinas sebesar Rp672.000,00.

e. Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya

Piutang lainnya pada satker Sekretariat Ditjen Budidaya merupakan:

1) Piutang atas kurang volume pengadaan paket bantuan sarana budidaya ikan lele sistem bioflok Tahun 2018 atas nama CV. CA sebesar Rp314.626.646,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 piutang yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp267.710.337,00, sehingga saldo per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp46.916.309,00.

2) Piutang atas kelebihan pembayaran pekerjaan antara lain kelebihan pembayaran pengadaan sarana budidaya rumput laut. Selama Tahun 2024 terdapat penyetoran angsuran pembayaran piutang sebesar Rp25.000.000,00, sehingga saldo per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp275.823.040,00.

3) Piutang atas ketidak sesuaian kontrak atas pekerjaan pagar SKPT Sumba Timur atas nama CV SRH. Selama Tahun 2024 terdapat penyetoran angsuran pembayaran piutang sebesar Rp10.000.000,00, sehingga saldo per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp60.830.000,00.

4) Piutang atas ketidak sesuaian kontrak atas pekerjaan pagar SKPT Sumba Timur atas nama CV CP sebesar Rp101.438.788,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 piutang yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp72.719.394,00, sehingga saldo per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp28.719.394,00.

5) Piutang atas temuan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah atas bantuan kekerangan tahun 2017 sebesar Rp197.690.000,00. Sampai dengan tahun 2017 yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp60.000.000,00, sehingga saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp137.690.000,00. Piutang ini diklasifikasikan sebagai piutang macet karena setelah tahun 2017 belum ada pembayaran angsuran atas piutang ini.

6) Piutang atas kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan gudang beku terintegrasi 100 ton di kota Sabang atas nama PT TKM sebesar Rp250.735.763,00 (Rp350.245.763,35–Rp99.510.000,00). Pada tanggal 26 Oktober 2020 piutang tersebut telah diserahkan ke PUPN untuk pengurusan penagihan dan sudah dikategorikan Piutang Macet.

7) Piutang atas temuan Inspektorat Jenderal terkait honor fasilitator kegiatan yang didanai oleh IISAP (pinjaman luar negeri) sebesar Rp1.688.181.251,00.

8) Piutang atas kelebihan pembayaran uang makan dan tunjangan kinerja periode Desember 2025 sebesar Rp93.196.598,00.

9) Piutang atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp2.854.400,00.

4. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP

Saldo Piutang Lainnya pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP hanya terdapat pada Sekretariat Ditjen PSDKP yang merupakan piutang atas:

a. Kelebihan pembayaran uang lembur PNS sebesar Rp2.961.550,00;

b. Kelebihan pembayaran uang makan PNS sebesar Rp1.695.750,00;

c. Kelebihan pembayaran uang lembur PPPK sebesar Rp81.000,00;

d. Kelebihan pembayaran uang makan PPPK sebesar Rp2.363.050,00.

Piutang kelebihan pembayaran belanja pegawai tersebut telah dilakukan pengembalian pada tanggal 19 Januari 2026 dengan NTPN DD8158N3F5U0F7PP.

5. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

Saldo Piutang Lainnya pada Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP terdapat pada 3 (tiga) satker yaitu:

a. Setditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

Merupakan Piutang kelebihan pembayaran uang makan dan tunjangan kinerja periode Desember 2025 sebesar Rp1.111.411,00.

b. Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan Dan Perikanan (BBP3KP)

Merupakan piutang kelebihan pembayaran uang makan dan tunjangan kinerja periode Desember 2025 sebesar Rp1.443.325,00,00.

c. DKP Prov. Sulawesi Tenggara

Merupakan piutang atas temuan aparat pengawas intern pemerintah atas program strategis pada tahun anggaran 2015 berupa pengadaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp26.300.000,00 dan pengelolaan keuangan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp55.263.000,00. Sampai dengan Tahun 2024 piutang yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp59.240.000,00. Saldo piutang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp22.323.000,00.

6. Ditjen Pengelolaan Kelautan

Saldo Piutang Lainnya pada Ditjen Pengelolaan Kelautan terdapat pada 2 (dua) satker antara lain:

a. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar

Merupakan Piutang kelebihan pembayaran uang makan PNS dan PPK periode Desember 2025 sebesar Rp 5.829.050,00.

b. Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Piutang lainnya pada satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut merupakan:

1) Temuan pemeriksaan oleh BPKP pada proyek *Coremap*-CTI pada tahun anggaran 2014 pada satker Dinas KP Kabupaten Buton (inaktif) sebesar Rp123.046.000,00. Pada Triwulan III Tahun 2024 terdapat pembayaran angsuran piutang sebesar Rp2.000.000,00 sehingga sampai dengan 31 Desember 2025 piutang yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp106.300.000,00. Sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp14.746.000,00.

2) Temuan pemeriksaan pada satker DKP Kab. Buton yang sudah dilimpahkan ke PUPN yang terdiri dari:

a) Pengadaan perlengkapan perahu oleh CV. YJ (Sdr. R) sebesar Rp88.500.000,00.

b) Pengadaan *publication material of coremap* oleh CV. LB (Sdr. WOA) sebesar Rp12.019.802,00.

c) Pekerjaan pembuatan perahu pokmaswas multifungsi pada CV. L (Sdr. S) sebesar Rp28.000.250,00.

3) Piutang atas kelebihan pembayaran uang makan PNS dan PPK Bulan Desember 2025 sebesar Rp81.614.000,00.

4) Piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja PNS dan PPPK bulan Desember 2025 sebesar Rp10.687.808,00.

7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Saldo Piutang Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 25 (dua puluh lima) satker sebagai berikut:

a. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Pencatatan piutang atas temuan BPK tahun 2019 berupa denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan pengadaan KM Bawal Putih III yang telah diserahkan pengurusannya ke PUPN atas nama PT CBI sebesar Rp1.428.485.977,00.

b. Pusat Riset Kelautan dan Perikanan

Saldo Piutang Lainnya pada satker Pusat Riset Kelautan dan Perikanan merupakan:

- Merupakan temuan pemeriksaan BPK(RI pada LK KKP TA 2019 atas kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan kelembagaan *Morotai Integrated Aquarium dan Marine Research Institute* (MIAMARI) Pangandaran yang dilaksanakan oleh PT TGP pada satker Pusat Riset Kelautan sebesar Rp1.003.754.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 piutang yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp203.754.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp800.000.000,00.

- Merupakan temuan pemeriksaan atas LK KKP Tahun 2019 yaitu kelebihan pembayaran rancang dan bangun (*design and build*) pekerjaan pembangunan *Pangandaran Integrated Aquarium dan Marine Research Institute* (PIAMARI) yang dilaksanakan oleh KSO PT PM – PT DCD sebesar Rp1.896.388.393,00. Atas kelebihan pembayaran tersebut KKP telah menerbitkan 4 (empat) kali surat teguran kepada KSO PT PM – PT DCD. Karena tidak ada itikad baik dari KSO PT PM – PT DCD untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada negara, melalui surat nomor B.4567/BPPSDM.1/KU.420/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021, penagihan kelebihan pembayaran tersebut telah diserahkan kepada Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN). Pada tahun

2023 dilakukan mediasi antara PUPN dengan KSO PT PM – PT DCD namun tidak membuahkan hasil. Sampai saat ini penagihan piutang KSO PT PM – PT DCD masih dalam proses oleh PUPN.

c. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong

Merupakan piutang atas pengembalian sewa rumah negara yang dikuasai oleh mantan pegawai berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung sebesar Rp105.000.000,00.

d. Satker Lainnya

Terdapat pada 22 (dua puluh dua) satker yang merupakan kelebihan pembayaran uang makan, tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional periode Desember 2025 sebesar Rp101.419.722,00.

8. Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil KP

Saldo Piutang Lainnya pada Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil KP terdapat pada 15 (lima belas) satker sebagai berikut:

a. Stasiun KIPM Sorong

Merupakan Piutang atas Pengembalian kelebihan Pembayaran Belanja sewa internet starlink sebesar Rp5.039.320,00.

b. Satker Lainya

Terdapat pada 13 (tiga belas) satker yang merupakan kelebihan pembayaran uang makan dan tunjangan kinerja periode Desember 2025 sebesar Rp15.194.613,00.

### C.1.9 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Rp101.236.262.482,00*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp101.236.262.482,00 dan Rp37.330.326.609,00.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Bukan Pajak pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.28**
**Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak**
**Per Akun Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Penyisihan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak** | **(89.066.880.691)** | **(25.186.969.274)** | **(63.879.911.417)** | **253,62** |
| Ditjen PT | (22.093.648.747) | (22.411.674.048) | 318.025.301 | (1,42) |
| Ditjen PB | (8.930.041.658) | (84.000.000) | (8.846.041.658) | 10.531,00 |
| Ditjen PSDKP | (57.475.414.418) | (2.371.468.981) | (55.103.945.437) | 2.323,62 |
| Ditjen PDSPKP | (306.954.404) | (305.036.121) | (1.918.283) | 0,63 |
| Ditjen PKRL | (258.747.275) | (12.796.279) | (245.950.996) | 1.922,05 |
| BPPSDM | (2.074.189) | (1.993.845) | (80.344) | 4,03 |
| **Penyisihan Piutang Lainnya** | **(12.169.381.791)** | **(12.143.357.335)** | **(26.024.456)** | **0,21** |
| Setjen | (1.815.843) | (6.835.150) | 5.019.307 | (73,43) |
| Ditjen PT | (7.086.137.026) | (6.995.495.133) | (90.641.893) | 1,30 |
| Ditjen PB | (809.281.819) | (824.320.347) | 15.038.528 | (1,82) |
| Ditjen PSDKP | (35.507) | (470.123) | 434.616 | (92,45) |
| Ditjen PDSPKP | (124.389) | (657.391) | 533.002 | (81,08) |
| Ditjen PKRL | (145.405.012) | (185.952.898) | 40.547.886 | (21,81) |
| BPPSDM | (4.126.506.223) | (4.129.560.892) | 3.054.669 | (0,07) |
| BPPMHKP | (75.972) | (65.401) | (10.571) | 16,16 |
| **Total** | **(101.236.262.482)** | **(37.330.326.609)** | **(63.905.935.873)** | **171,19** |

Sedangkan rincian penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Bukan Pajak berdasarkan penggolongan kualitas piutang sebagai berikut :

**Tabel C.29**
**Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak**
**Berdasarkan Kualitas Piutang**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Kualitas Piutang | Nilai Piutang | Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|---|---|---|---|
| **Piutang PNBP** | **92.235.683.375,00** | | **88.812.472.188,89** |
| Lancar | 3.101.461.718,00 | 0,50% | 15.507.308,59 |
| Kurang Lancar | 42.699.263,00 | 10% | 4.269.926,30 |
| Diragukan | 97.654.880,00 | 50% | 298.827.440,00 |
| Macet | 88.493.867.514,00 | 100% | 88.493.867.514,00 |
| **Piutang Lainnya** | **14.643.116.593,00** | | **12.166.314.225,06** |
| Lancar | 2.489.248.611,00 | 0,50% | 1.244.624.305,50 |
| Kurang Lancar | 0 | 10% | 0 |
| Diragukan | 0 | 50% | 0 |
| Macet | 12.153.867.982,00 | 100% | 12.153.867.982,00 |

Terdapat selisih saldo penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Bukan Pajak antara neraca saldo akrual dengan sub ledger (modul piutang) atas piutang PNBP dan pembulatan pembukuan atas piutang lainnya.

Selisih tersebut terdapat pada Unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap atas Piutang PNBP senilai Rp48.013,39 dan seluruh unit Eselon I atas piutan lainnya senilai Rp4,94.

**Tabel C.30**
**Rincian Selisih Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak**
**Antara neraca saldo akrual dengan *subledger* (modul piutang)**
**Per 31 Desember 2025**

| Kualitas Piutang | Nilai Penyisihan Modul Piutang (piutang PNBP) | Nilai Penyisihan Neraca Saldo Akrual | Selisih |
|---|---|---|---|
| **Piutang PNBP** | **89.066.832.677,61** | **89.066.880.690,45** | **48.013,39** |
| Lancar | 269.867.797,31 | 269.867.797,31 | 0,55 |
| Kurang Lancar | 4.269.926,30 | 4.317.939,14 | 48.012,84 |
| Diragukan | 298.827.440,00 | 298.827.440,00 | 0 |
| Macet | 88.493.867.514,00 | 88.493.867.514,00 | 0 |
| **Piutang Lainnya** | **12.169.381.795,94** | **12.169.381.800,88** | **4,94** |
| Lancar | 15.513.812,94 | 15.513.817,88 | 4,94 |
| Kurang Lancar | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Diragukan | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Macet | 12.153.867.983,00 | 12.153.867.983,00 | 0 |

### C.1.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

*Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbedaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp316.018.435,00*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah bagian TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) buan setelah tanggal pelaporan. Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp316.018.435,00 dan Rp105.339.479,00.

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil KP yang merupakan kerugian negara akibat kekurangan uang yang diketahui dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal KKP Nomor R.280/ITJ.5/HP.230/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 atas nama Sdr. RS dan atas nama Sdr. THP sebesar Rp316.018.435,00.

### C.1.11 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendahaan/Tuntutan Ganti Rugi

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp1.580.092,00*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.580.092,00 dan Rp526.698,00.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil KP yang merupakan pencadangan atas piutang kerugian negara akibat kekurangan uang yang diketahui dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal KKP Nomor R.280/ITJ.5/HP.230/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 atas nama Sdr. RS dan atas nama Sdr. THP sebesar Rp316.018.435,00. Piutang tersebut diklasifikasikan sebagai piutang lancar sehingga disisihkan sebesar 0,5% senilai Rp1.580.092,00 (Rp316.018.435,00 X 0,5%).

### C.1.12 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

*Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Rp45.941.839.872,00*

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU merupakan hak atau pengakuan atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan yang merupakan kegiatan utama dari BLU dan belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp45.941.839.872,00 dan Rp40.334.387.105,00.

Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah sebagai berikut:

**Tabel C.31**
**Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU**
**Per Akun Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Piutang BLU Pelayanan Pendidikan | 0 | 11.800.000 | (11.800.000) | (100,00) |
| Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya | 0 | 166.243.450 | (166.243.450) | (100,00) |
| Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir | 45.542.575.072 | 40.143.368.655 | 5.399.206.417 | 13,45 |
| Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional | 399.264.800 | 12.975.000 | 386.289.800 | 2.977,19 |
| **Total** | **45.941.839.872** | **40.334.387.105** | **5.607.452.767** | **13,90** |

Penjelasan ringkas atas saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada masing-masing akun adalah sebagai berikut:

#### C.1.12.1 Piutang BLU Pelayanan Pendidikan

Tidak terdapat Piutang BLU Pelayanan Pendidikan pada per 31 Desember 2025. Piutang BLU Pelayanan Pendidikan per 31 Desember 2024 hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP di satker Poltek KP Sidoarjo yang merupakan biaya pendidikan atas 13 (tiga belas) taruna yang belum dibayar.

#### C.1.12.2 Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya

Tidak terdapat Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya pada per 31 Desember 2025. Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya per 31 Desember 2024 hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya di satker BLU BPBAP Jepara yang merupakan Penjualan Pakan yang belum dibayar.

#### C.1.12.3 Piutang BLU Pengelolaan Dana Bergulir

Piutang BLU Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Eselon I Sekretariat Jenderal terdapat di satker BLU LPMUKP yang merupakan akumulasi tunggakan jasa layanan debitur yang telah jatuh tempo namun hingga per 31 Desember 2025 belum dilakukan pembayaran atau pelunasan sebesar Rp45.542.575.072,00.

#### C.1.12.4 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional

Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional terdapat di unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP yang merupakan piutang atas pelaksanaan kegiatan yang bekerjasama dengan JICA sebesar Rp399.264.800,00.

### C.1.13 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Rp31.571.742.722,00*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari kegiatan Operasional BLU merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang dari Kegiatan Operasional BLU berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp31.571.742.722,00 dan Rp28.682.135.319,00.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU adalah sebagai berikut:

**Tabel C.32**
**Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional BLU Per Akun**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ( Piutang BLU Pelayanan Pendidikan | 0 | (59.000) | 59.000 | (100,00) |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ( Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya | 0 | (831.217) | 831.217 | (100,00) |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ( Piutang BLU Pengelola dana Bergulir | (31.569.746.398) | (28.681.180.227) | (2.888.566.171) | 10,07 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU | (1.996.324) | (64.875) | (1.931.449) | 2.977,19 |
| **Total** | **(31.571.742.722)** | **(28.682.135.319)** | **(2.889.607.403)** | **10,07** |

### C.1.13.1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pelayanan Pendidikan

Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pelayanan Pendidikan pada per 31 Desember 2025. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan per 31 Desember 2024 hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP di satker Poltek KP Sidoarjo yang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang biaya pendidikan atas 13 (tiga belas) taruna yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2025. Piutang tersebut dikategorikan kualitas lancar dengan perhitungan persentase penyisihan sebesar 0,5%, sehingga saldo penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp59.000,00.

### C.1.13.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya

Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya per 31 Desember 2025. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya per 31 Desember 2024 hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya di satker BLU BPBAP Jepara yang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang terhadap Penjualan Pakan. Piutang tersebut dikategorikan kualitas lancar dengan perhitungan persentase penyisihan sebesar 0,5%, sehingga saldo penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp831.217,00.

### C.1.13.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pelayanan Pendidikan Pengelolaan Dana Bergulir

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pengelolaan Dana Bergulir hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal di satker LPMU KP yang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang BLU Pengelola Dana Bergulir berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Dalam menghitung pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, LPMU KP memperhitungkan jumlah tunggakan atau besaran piutang, kualitas piutang dan nilai barang agunan atau jaminan. Nilai agunan atau barang yang dijaminkan oleh debitur sebagai komponen pengurang terhadap piutang, lalu dikalikan dengan persentase sesuai dengan kualitas piutangnya. Perhitungan ini sesuai dengan Peraturan Direktur LPMUKP Nomor 6/PER(LPMUKP/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang. Rincian perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut berdasarkan kualitas piutang adalah sebagai berikut:

**Tabel C.33**
**Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-**
**Piutang BLU Pengelolaan Dana Bergulir berdasarkan kualitas**
**Per 31 Desember 2025**

| Kualitas Piutang PNBP | Nilai Piutang | Nilai Piutang ( Jaminan (LPMUKP) | % | Penyisihan Piutang |
|---|---|---|---|---|
| Lancar | 288.754.474 | 226.753.133 | 0,50 | 1.133.766 |
| Kurang Lancar | 260.524.915 | 94.323.984 | 10 | 9.432.398 |
| Diragukan | 113.120.000 | 90.000.000 | 50 | 45.000.000 |
| Macet | 44.880.175.683 | 31.480.233.233 | 100 | 31.480.233.233 |
| **Jumlah** | **45.542.575.072** | | | **31.535.799.397** |

### C.1.13.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP yang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang pelaksanaan kegiatan yang bekerjasama dengan JICA. Piutang tersebut dikategorikan kualitas lancar dengan perhitungan persentase penyisihan sebesar 0,5%, sehingga saldo penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp1.996.324,00.

### C.1.14 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

*Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Rp0,00*

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU merupakan hak atau pengakuan atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan yang bukan

merupakan kegiatan utama dari BLU dan belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp19.681.274,00.

Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2024 hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal di satker LPMU KP yang merupakan piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024 berupa kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp3.253.536,00 dan kelebihan pembayaran BBM atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp16.526.639,00.

### C.1.15 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum Rp0,00*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp98.901,00.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2024 hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal di satker LPMU KP yang merupakan pencadangan atas piutang kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri di LPMUKP.

### C.1.16 Persediaan

*Persediaan Rp955.010.383.565,00*

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.34**
**Rincian Saldo Persediaan Per Akun**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Persediaan Operasional** | **99.767.172.498** | **71.815.406.769** | **27.951.765.729** | **38,92** |
| Barang Konsumsi | 49.816.916.440 | 19.483.236.542 | 30.333.679.898 | 155,69 |
| Amunisi | 1.699.372.538 | 1.783.377.246 | (84.004.708) | (4,71) |
| Bahan untuk Pemeliharaan | 617.513.160 | 841.004.388 | (223.491.228) | (26,57) |

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Suku Cadang | 27.534.159.646 | 32.887.259.703 | (5.353.100.057) | (16,28) |
| Bahan Baku | 6.918.233.700 | 8.369.341.132 | (1.451.107.432) | (17,34) |
| Persediaan Lainnya | 13.180.977.014 | 8.451.187.758 | 4.729.789.256 | 55,97 |
| **Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat** | **855.243.211.067** | **87.754.621.847** | **767.488.589.220** | **874,58** |
| Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada | 3.174.178.260 | 44.711.306.208 | (41.537.127.948) | (92,90) |
| Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada | 11.089.686.917 | 12.297.178.010 | (1.207.491.093) | (9,82) |
| Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada | 15.785.867.000 | 426.892.990 | 15.358.974.010 | 3.597,85 |
| Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat | 0 | 884.672.250 | (884.672.250) | (100,00) |
| Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke | 59.780.328.508 | 1.025.355.500 | 58.754.973.008 | 5.730,21 |
| Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat ( | 765.413.150.382 | 28.409.216.889 | 737.003.933.493 | 2.594,24 |
| **Total** | **955.010.383.565** | **159.570.028.616** | **795.440.354.949** | **498,49** |

Selain saldo Persediaan pada tabel diatas terdapat Persediaan dalam kondisi rusak atau usang yang masih dalam proses penghapusan. Rincian saldo Persediaan dalam kondisi rusak atau usang masing-masing unit Eselon I per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.35**
**Rincian Saldo Persediaan Dalam Kondisi Usang dan Rusak**
**Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025**

| Unit Eselon I | Usang | Rusak | Total |
|---|---|---|---|
| Ditjen PT | 19.881.000 | 0 | 19.881.000 |
| Ditjen PB | 21.671.698 | 17.459.600 | 39.131.298 |
| Ditjen PSDKP | 14.526.500 | 0 | 14.526.500 |
| BPPSDMKP | 9.204.591 | 25.512.800 | 34.717.391 |
| BPPMHKP | 267.615.410 | 0 | 267.615.410 |
| **Total** | **332.899.199** | **42.972.400** | **375.871.599** |

Penjelasan Persediaan per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

### C.1.16.1 Persediaan Untuk Operasional

Saldo Persediaan untuk Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp99.760.172.498,00 dan Rp71.815.406.769,00.

Rincian saldo Persediaan untuk Operasional pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.36**
**Rincian Saldo Persediaan Untuk Operasional**
**Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 2.149.516.828 | 2.431.118.400 | (281.601.572) | (11,58) |
| Itjen | 34.390.710 | 91.253.504 | (56.862.794) | (62,31) |
| Ditjen PT | 2.266.776.990 | 813.307.086 | 1.453.469.904 | 178,71 |
| Ditjen PB | 55.407.531.836 | 21.484.548.873 | 33.922.982.963 | 157,89 |
| Ditjen PSDKP | 29.403.822.007 | 34.819.568.708 | (5.415.746.701) | (15,55) |
| Ditjen PDSPKP | 265.822.204 | 219.079.526 | 46.742.678 | 21,34 |
| Ditjen PK | 25.129.425 | 27.522.162 | (2.392.737) | (8,69) |
| BPPSDM KP | 3.686.491.817 | 5.258.394.846 | (1.571.903.029) | (29,89) |
| BPPMH KP | 6.527.690.681 | 6.670.613.664 | (142.922.983) | (2,14) |
| **Total** | **99.767.172.498** | **71.815.406.769** | **27.951.765.729** | **38,92** |

Terdapat kenaikan saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 38,92% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan oleh pengadaan Barang Konsumsi senilai Rp37.042.943.640,00 pada DItjen Perikanan Budi Daya.

Daftar ringkas barang Persediaan untuk Operasional pada masing-masing unit Eselon I per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.37**
**Daftar Barang Persediaan untuk Operasional**
**Per 31 Desember 2025**

| Nama Es1 | Kode/Nama Barang | Nilai |
|---|---|---|
| **Setjen** | | **2.149.516.828** |
| | 10101-Bahan | 41.794.101 |
| | 10102-Suku Cadang | 366.310.980 |
| | 10103-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor | 1.696.606.821 |
| | 10104-Obat-Obatan | 12.634.182 |
| | 10201-Komponen | 22.058.972 |
| | 10202-P I P A | 10.111.772 |
| **Itjen** | | **34.390.710** |

| Nama Es1 | Kode/Nama Barang | Nilai |
|---|---|---|
| | 10103-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor | 34.390.710 |
| **Ditjen PT** | | **2.266.776.990** |
| | 10103-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor | 2.266.776.990 |
| **Ditjen PB** | | **55.407.531.836** |
| | 10101-Bahan | 2.777.304.513 |
| | 10102-Suku Cadang | 662.644.831 |
| | 10103-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor | 1.619.142.824 |
| | 10104-Obat-Obatan | 62.409.052 |
| | 10107-Natura Dan Pakan | 39.032.546.671 |
| | 10108-Persediaan Penelitian | 11.210.638.619 |
| | 10201-Komponen | 40.181.326 |
| | 10202-P I P A | 2.664.000 |
| **Dtjen PSDKP** | | **29.403.822.007** |
| | 10101-Bahan | 1.699.372.538 |
| | 10102-Suku Cadang | 26.500.924.560 |
| | 10103-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor | 1.203.524.909 |
| **Ditjen PDSPKP** | | **265.822.204** |
| | 10101-Bahan | 234.644.140 |
| | 10103-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor | 2.258.564 |
| | 10108-Persediaan Penelitian | 28.919.500 |
| **Ditjen PK** | | **25.129.425** |
| | 10103-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor | 25.129.425 |
| **BP2SDM KP** | | **3.686.491.817** |
| | 10101-Bahan | 194.610.741 |
| | 10102-Suku Cadang | 4.279.275 |
| | 10103-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor | 1.385.047.595 |
| | 10104-Obat-Obatan | 50.253.896 |
| | 10107-Natura Dan Pakan | 311.194.615 |
| | 10108-Persediaan Penelitian | 1.741.077.945 |
| | 10201-Komponen | 27.750 |
| **BP2MH KP** | | **6.527.690.681** |
| | 10101-Bahan | 3.669.880.205 |
| | 10103-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor | 2.852.862.476 |
| | 10107-Natura Dan Pakan | 4.948.000 |
| **Total** | | **99.767.172.498** |

Ringkasan mutasi akun Persediaan untuk Operasional per jenis transaksi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.38**
**Ringkasan Mutasi Persediaan untuk Operasional Per Jenis Transaksi**
**Per 31 Desember 2025**

| Kode Transaksi | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| **Saldo Awal Per 1 Januari 2025** | | **71.815.406.769** |
| **Mutasi Tambah:** | | **210.807.893.784** |
| M01 | Saldo Awal | 501.000 |
| M02 | Pembelian | 143.667.946.545 |
| M03 | Transfer Masuk | 59.430.900.598 |
| M06 | Perolehan Lainnya | 5.846.420.849 |
| M10 | Reklasifikasi Masuk | 593.514.720 |
| M11 | Reklasifikasi Dari Aset | 72.235.648 |
| M95 | Koreksi Transfer Keluar Online | 17.594.944 |
| M98 | Koreksi Nilai Tambah | 25.000 |
| M99 | Koreksi Kuantitas Tambah | 727.620.275 |
| P01 | Hasil Opname Fisik | 451.134.205 |
| **Mutasi Kurang:** | | **(182.856.128.055)** |
| K01 | Habis Pakai | (105.364.863.379) |
| K02 | Transfer Keluar | (59.468.097.852) |
| K03 | Hibah Keluar | (120.000) |
| K04 | Usang | (1.464.269.551) |
| K05 | Rusak | (157.592.800) |
| K06 | Keluar Lainnya | (9.394.425.112) |
| K10 | Reklasifikasi Keluar | (1.014.245.395) |
| K11 | Reklasifikasi ke Aset | (213.297.748) |
| K98 | Koreksi Nilai Kurang | (717.862.175) |
| K99 | Koreksi Kuantitas Kurang | (9.694.500) |
| P01 | Hasil Opname Fisik | (5.051.659.543) |
| **Saldo Akhir Per 31 Desember 2025** | | **99.767.172.498** |

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Persediaan untuk Operasional adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Transaksi Penambahan Saldo Awal terdapat pada pada 2 (dua) unit Eselon yaitu pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp60.000,00 dan unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp441.000,00.

2. Transaksi Pembelian terdapat pada 9 (sembilan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.971.090.150,00; unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp36.595.953,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3.591.420.352,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp108.125.237.876,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp10.123.868.475,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar

Rp402.107.689,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp652.359.228,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp7.611.579.518,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp9.153.687.304,00.

3. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp51.399.768.557,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp4.569.307.208,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp3.461.824.833,00

4. Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp59.648.148,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp4.810.188.631,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp316.715.800,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp658.950.270,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp918.000,00.

5. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3.048.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp425.915.250,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp1.666.400,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp900.000,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp161.985.070,00.

6. Transaksi Reklasifikasi Dari Aset terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp4.620.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp40.677.648,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp26.938.000,00.

7. Transaksi Koreksi Transfer Keluar Online terdapat pada unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp17.594.944,00.

8. Transaksi Koreksi Nilai Tambah terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp25.000,00.

9. Transaksi Koreksi Kuantitas Tambah terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar

Rp727.440.275,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp180.000,00.

10. Transaksi Hasil Opname Fisik terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp4.467.201,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.403.950,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp304.095.528,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp49.241.315,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp91.562.711,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp363.500,00.

11. Transaksi Habis Pakai terdapat pada 9 (sembilan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.135.916.870,00; unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp97.925.948,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.116.436.825,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp66.922.703.520,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp14.948.938.682,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp353.805.511,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp654.811.965,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp8.012.325.317,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp8.121.998.741,00.

12. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp51.399.768.557,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp4.569.307.208,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp3.499.022.087,00.

13. Transaksi Hibah Keluar terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp120.000,00.

14. Transaksi Barang Usang terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp177.009.830,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp22.773.500,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp81.257.485,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp1.183.228.736,00.

15. Transaksi Barang Rusak terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp11.340.000,00; unit

Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp34.554.500,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp57.180.000,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp1.559.500,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp52.958.800,00.

16. Transaksi Keluar Lainnya terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.801.500,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp8.925.390.548,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp319.318.090,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp146.914.974,00.

17. Transaksi Reklasifikasi Keluar terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3.048.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp846.645.925,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp1.666.400,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp900.000,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp161.985.070,00.

18. Transaksi Reklasifikasi ke Aset terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp176.423.000,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp36.874.748,00.

19. Transaksi Koreksi Nilai Kurang terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp717.595.775,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp266.400,00.

20. Transaksi Koreksi Kuantitas Kurang terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp9.694.500,00.

21. Transaksi Hasil Opname Fisik terdapat pada 4 (emapt) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp8.776.073,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp2.840.824.999,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp557.362.019,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp1.644.696.452,00.

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Persediaan untuk Operasional dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2025 yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2025 (*Audited*) ini.

### C.1.16.2 Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp855.243.211.067,00 dan Rp87.754.621.847,00.

Rincian saldo Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.39**
**Rincian Saldo Persediaan untuk Dijual Atau Diserahkan kepada Masyarakat**
**Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 64.176.081.088 | 24.313.321.651 | 39.862.759.437 | 163,95 |
| Ditjen PT | 683.908.254.754 | 44.100.520.208 | 639.807.734.546 | 1.450,79 |
| Ditjen PB | 70.775.681.039 | 17.502.595.938 | 53.273.085.101 | 304,37 |
| Ditjen PDSPKP | 3.174.178.260 | 223.911.800 | 2.950.266.460 | 1.317,60 |
| Ditjen PK | 33.114.681.540 | 1.614.272.250 | 31.500.409.290 | 1.951,37 |
| BPPSDM KP | 94.334.386 | 0 | 94.334.386 | 0,00 |
| **Total** | **855.243.211.067** | **87.754.621.847** | **767.488.589.220** | **874,58** |

Terdapat kenaikan signifikan saldo Persediaan untuk Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp683.908.254.754,00 yang secara umum disebabkan oleh adanya pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih (KMNP).

Penjelasan ringkas atas saldo Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Sekretariat Jenderal antara lain berupa pekerjaan pembangunan infrasktruktur di SKPT Natuna sebesar Rp99.250.000,00 SKPT Sabang di Prov. Aceh sebesar Rp62.072.937.500,00 dan SKPT Moa di Prov. Maluku sebesar Rp2.003.893.588,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

   Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp683.908.254.754 antara lain berupa pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih (KMNP).

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen Perikanan Budi Daya antara lain berupa persediaan ikan hidup sebesar Rp3.774.177.050,00 pada satker BBPBAT Sukabumi dan pengadaan Bioflok Tematik sebesar Rp58.129.242.001,00 pada satker Setditjen Perikanan Budidaya.

4. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

   Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP hanya terdapat pada satker Setditjen Penguatan Daya Saing Produk KP yang merupakan Pasar Ikan di Kab. Banjarnegara sebesar Rp3.174.178.260,00.

5. Ditjen Pengelolaan Kelautan

   Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen Pengelolaan Kelautan hanya terdapat pada satker SetDitjen Pengelolaan Kelautan yang merupakan pembangunan GGR Kab. Pati sebesar Rp159.347.160,00 dan Rancang Bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K(SIGN) sebesar Rp32.955.334.380,00.

Ringkasan mutasi akun Persediaan per jenis transaksi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.40**
**Ringkasan Mutasi Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Per Jenis Transaksi**
**Per 31 Desember 2025**

| Kode Transaksi | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| **Saldo Awal Per 1 Januari 2025** | | **87.754.621.847** |
| **Mutasi Tambah:** | | **1.379.239.707.634** |
| M02 | Pembelian | 1.075.084.594.800 |
| M03 | Transfer Masuk | 11.702.107.501 |
| M06 | Perolehan Lainnya | 94.854.429.644 |
| M10 | Reklasifikasi Masuk | 57.140.171.153 |
| M11 | Reklasifikasi Dari Aset | 1.223.895.033 |
| M15 | Persediaan Dalam Proses Masuk | 138.967.479.426 |

| Kode Transaksi | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| M98 | Koreksi Nilai Tambah | 61.224.000 |
| M99 | Koreksi Kuantitas Tambah | 4.173.000 |
| P01 | Hasil Opname Fisik | 101.696.177 |
| | Jurnal Terpusat | 99.936.900 |
| **Mutasi Kurang:** | | **(611.751.118.414)** |
| K01 | Habis Pakai | (351.394.026.226) |
| K02 | Transfer Keluar | (11.702.107.501) |
| K03 | Hibah Keluar | (1.800.000) |
| K04 | Usang | (223.911.800) |
| K05 | Rusak | (122.427.000) |
| K06 | Keluar Lainnya | (46.996.190.585) |
| K10 | Reklasifikasi Keluar | (56.716.586.266) |
| K11 | Reklasifikasi ke Aset | (1.237.755.033) |
| K15 | Persediaan Dalam Proses Keluar | (141.948.995.743) |
| K98 | Koreksi Nilai Kurang | (423.489.400) |
| K99 | Koreksi Kuantitas Kurang | (613.649.180) |
| M98 | Koreksi Nilai Tambah | (44.569.600) |
| P01 | Hasil Opname Fisik | (325.610.080) |
| **Saldo Akhir Per 31 Desember 2025** | | **855.243.211.067** |

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Pembelian terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp50.631.576.688,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp747.598.125.550,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp109.071.850.594,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp12.000.135.571,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp155.696.420.039,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp86.486.358,00.

2. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.025.700.600,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp102.780.000,00 dan unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp9.573.626.901,00.

3. Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp94.532.238.023,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp322.191.621,00.

4. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp45.098.173.241,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp9.662.484.795,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp2.375.993.905,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp2.854.212,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp665.000,00.

5. Transaksi Reklasifikasi Dari Aset terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp86.040.000,00 dan unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.137.855.033,00.

6. Transaksi Persediaan Dalam Proses Masuk terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp9.573.626.901,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp44.404.520.559,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp4.719.017.055,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp3.174.178.260,00 dan unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp77.096.136.651,00.

7. Transaksi Koreksi Nilai Tambah terdapat pada 1 (satu) unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp61.224.000,00.

8. Transaksi Koreksi Kuantitas Tambah terdapat pada 1 (satu) unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp4.173.000,00.

9. Transaksi Habis Pakai terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp109.816.091.605,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp102.914.343.646,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp18.399.584.212,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp119.861.162.781,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp402.843.982,00.

10. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp10.854.857.251,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp102.780.000,00 dan unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp744.470.250,00.

11. Transaksi Hibah Keluar terdapat pada 1 (satu) unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.800.000,00.

12. Transaksi Usang terdapat pada 1 (satu) unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp223.911.800,00.

13. Transaksi Rusak terdapat pada 1 (satu) unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp122.427.000,00.

14. Transaksi Keluar Lainnya terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp46.993.340.585,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp2.850.000,00.

15. Transaksi Rekasifikasi Keluar terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp45.098.173.241,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp9 241 754 120,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp2.375.993.905,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp665.000,00.

16. Transaksi Reklasifikasi ke Aset terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.137.855.033,00 dan unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp99.900.000,00.

17. Transaksi Persediaan Dalam Proses Keluar terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp9.573.626.901,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp44.404.520.558,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp4.719.017.055,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp3.174.178.260,00 dan unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp80.077.652.969,00.

18. Transaksi Koreksi Nilai Kurang terdapat pada 1 (satu) unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp423.489.400,00.

19. Transaksi Koreksi Kuantitas Kurang terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp4.787.780,00 dan unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp608.861.400,00.

20. Transaksi Nilai Tambah terdapat pada 1 (satu) unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp44.569.600,00.

21. Transaksi Hasil Opname Fisik terdapat pada 1 (satu) unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp325.610.080,00.

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2025 (*Audited*) ini.

## C.2 Investasi Jangka Panjang

### C.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

*Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Rp15.643.578.233,00*

Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya adalah Investasi Jangka Panjang Nonpermanen yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai Dana Bergulir. Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.643.578.233,00 dan Rp0,00.

Rincian saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya adalah sebagai berikut:

**Tabel C.41**
**Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Satker | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| LPMU KP | (15.643.578.233) | 0 | (15.643.578.233) | 0,00 |
| **Total** | **(15.643.578.233)** | **0** | **(15.643.578.233)** | **0,00** |

Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya tersebut merupakan penggunaan dana saldo kas BLU yang digunakan untuk penyaluran dana bergulir kepada debitur. Uraian lebih lanjut disajikan pada Catatan Pengungkapan Lainnya.

### C.2.2 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya

*Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Rp70.437.547,00*

Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya Diragukan Realisasinya adalah Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya. Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya Diragukan Realisasinya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp70.437.547,00 dan Rp 0,00.

Uraian lebih lanjut disajikan pada Catatan Pengungkapan Lainnya.

## C.3 Aset Tetap

*Aset Tetap Rp24.383.010.269.492,00*

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan

umum. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp24.383.010.269.492,00 dan Rp23.377.116.399.469,00.

Rincian saldo Aset Tetap per akun adalah sebagai berikut:

**Tabel C.42**
**Rincian Saldo Aset Tetap Per Akun**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Tanah | 16.360.961.084.032 | 15.853.798.190.884 | 507.162.893.148 | 3,20 |
| Peralatan dan Mesin | 6.483.872.129.707 | 6.284.712.692.903 | 199.159.436.804 | 3,17 |
| Gedung dan Bangunan | 5.413.469.993.250 | 5.261.675.168.922 | 151.794.824.328 | 2,88 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 4.139.015.306.911 | 4.053.129.578.585 | 85.885.728.326 | 2,12 |
| Aset Tetap Lainnya | 211.745.434.245 | 211.154.575.775 | 590.858.470 | 0,28 |
| Konstruksi Dalam pengerjaan | 846.375.146.080 | 183.735.627.793 | 662.639.518.287 | 360,65 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (9.072.428.824.733) | (8.471.089.435.393) | (601.339.389.340) | 7,10 |
| **Total** | **24.383.010.269.492** | **23.377.116.399.469** | **1.005.893.870.023** | **4,30** |

Pada Tahun 2025 terdapat transfer masuk dan/atau transfer keluar dari KKP ke Kementerian/Lembaga lain. Penjelasan transfer masuk dan/atau transfer keluar tersebut dapat dilihat pada catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan Aset Tetap per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

### C.3.1 Tanah

*Tanah Rp16.360.961.084.032,00*

Aset tetap berupa Tanah ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai kegiatan operasional pemerintah dan kondisi siap pakai. Saldo Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp16.360.961.084.032,00 dan Rp15.853.798.190.884,00.

Rincian saldo Tanah pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.43**
**Rincian Saldo Tanah Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 1.057.716.350.000 | 1.048.754.118.000 | 8.962.232.000 | 0,85 |
| Ditjen PT | 3.619.813.948.424 | 3.635.961.793.591 | (16.147.845.167) | (0,44) |
| Ditjen PB | 3.792.279.477.365 | 3.756.767.517.642 | 35.511.959.723 | 0,95 |

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Ditjen PSDKP | 366.223.713.166 | 362.408.433.351 | 3.815.279.815 | 1,05 |
| Ditjen PDSPKP | 610.358.044.792 | 610.358.044.792 | 0 | 0,00 |
| Ditjen PK | 2.525.900.406.399 | 328.758.991.227 | 2.197.141.415.172 | 668,31 |
| BPPSDM KP | 4.118.431.855.114 | 5.838.589.166.509 | (1.720.157.311.395) | (29,46) |
| BPPMH KP | 270.237.288.772 | 272.200.125.772 | (1.962.837.000) | (0,72) |
| **Total** | **16.360.961.084.032** | **15.853.798.190.884** | **507.162.893.148** | **3,20** |

Terdapat kenaikan saldo Tanah sebesar 3,20% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan adanya transfer masuk BMN berupa Tanah dari Kementerian Keuangan pada Unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan.

Rincian nilai tercatat (*carrying ammount*) Aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Tanah Persil sebesar Rp13.328.070.044.296,00;

2. Tanah Non Persil sebesar Rp2.799.354.793.231,00;

3. Lapangan sebesar Rp233.536.246.505,00.

Ringkasan mutasi akun Tanah per jenis transaksi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.44**
**Ringkasan Mutasi Tanah Per Jenis Transaksi**
**Per 31 Desember 2025**

| Kode Transaksi | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| **Saldo Awal Per 1 Januari 2025** | | **15.853.798.190.884** |
| **Mutasi Tambah** | | **2.751.402.218.210** |
| 100 | Saldo Awal | 5.674.758.000 |
| 102 | Transfer Masuk | 2.548.419.693.348 |
| 103 | Hibah Masuk | 4.941.964.315 |
| 107 | Reklasifikasi Masuk | 14.638.249.000 |
| 112 | Perolehan Lainnya | 62.902.018.073 |
| 204 | Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah | 471.223.002 |
| 206 | Penerimaan Aset Tetap Renovasi | 4.008.025.300 |
| 432 | Perubahan PI ke BMN | 110.346.287.172 |
| **Mutasi Kurang** | | **(2.244.239.325.062)** |
| 302 | Transfer Keluar | (2.179.818.167.348) |
| 303 | Hibah Keluar | (4.753.570.000) |
| 304 | Reklasifikasi Keluar | (15.985.267.500) |
| 305 | Koreksi Pencatatan | (27.534.475.047) |

| Kode Transaksi | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 431 | Perubahan BMN Ke PI | (16.147.845.167) |
| **Saldo Akhir Per 31 Desember 2025** | | **16.360.961.084.032** |

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Tanah adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Penambahan Saldo Awal hanya terdapat pada unit Eselon yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp5.674.758.000,00.

2. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp8.962.232.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.305.598.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp3.522.837.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan Rp2.083.529.091.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp424.247.396.000,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp26.852.539.348,00.

3. Transaksi Hibah Masuk terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.305.598.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.639.461.315,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp436.905.000,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp1.560.000.000,00.

4. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.775.871.000,00 dan unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp12.862.378.000,00.

5. Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp56.364.886.073,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp2.829.132.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp2.829.132.000,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp3.708.000.000,00.

6. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp471.223.002,00.

7. Transaksi Penerimaan Aset Tetap Renovasi hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp4.008.025.300,00.

8. Transaksi Perubahan PI ke BMN hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp110.346.287.172,00.

9. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.305.598.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp2.148.137.193.000,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp30.375.376.348,00.

10. Transaksi Hibah Keluar hanya terdapat unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp4.753.570.000,00.

11. Transaksi Reklasifikasi Keluar terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.775.871.000,00 dan unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp14.209.396.500,00.

12. Transaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp27.087.737.650,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp446.737.397,00.

Transaksi Perubahan BMN ke PI hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp16.147.845.167,00.

Terdapat permasalahan pada BMN berupa Tanah yang dikuasai/ ditatausahakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah dikuasai dan/atau bersengketa dengan pihak lain

   Terdapat tanah dikuasai dan/atau bersengketa dengan pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel C.45**
**Rincian Tanah Dikuasai dan/atau Bersengketa dengan Pihak Lain**
**Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025**

| Unit Eselon I | Nama Satker | Luas (m2) | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **Ditjen Perikanan Tangkap** | | **1.103** | **3.965.775.000** | |
| | Pelabunan Perikanan Nusantara Brondong | 1.103 | 3.965.775.000 | Sengketa dengan PT DOK dan PS (Persero) |

| Unit Eselon I | Nama Satker | Luas (m2) | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **Ditjen Perikanan Budi Daya** | | **3.243.419** | **393.900.484.000** | |
| | Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya | 472.440 | 180.483.744.000 | Sengketa dengan PT SC |
| | BLU Produksi Perikanan Budi Daya Karawang | 2.736.585 | 153.248.760.000 | Dikuasai oleh masyarakat |
| | Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar | 15.664 | 55.020.000.000 | Dikuasai oleh masyarakat |
| **Jumlah** | | **3.225.792** | **392.718.279.000** | |

Penjelasan ringkas atas permasalahan tanah pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

a. Ditjen Perikanan Tangkap(Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Berupa tanah seluas 1.103 m2 di Lamongan, Jawa Timur pada satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang dikuasai oleh PT DOK dan PS (Persero). Atas permasalahan tersebut pada tanggal 3 Desember 2024 Pemkab. Lamongan telah menyelenggarakan rapat dengan hasil akan dilakukan peninjauan lapangan oleh BPN Kab Lamongan ke lokasi tanah sengketa.

b. Ditjen Perikanan Budi Daya ( Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya

Berupa sebidang tanah seluas 472.440 m2 sebagai obyek perjanjian tukar menukar (*ruislag*) di Sidoarjo, Jawa Timur antara Kementerian Pertanian c.q. Ditjen Perikanan dengan PT SC pada Tahun 1997. Dalam perjalanannya terjadi sengketa dalam pelaksanaan *ruislag* sehingga tanah tersebut saat ini dikuasai oleh PT SC.

Atas permasalahan tersebut pada tahun 2023 KKP melakukan langkah(langkah sebagai berikut:

1) Mengirimkan surat permohonan penilaian BMN berupa Tanah dalam rangka tindak lanjut penyelesaian perjanjian *ruislag* kepada Kementerian Keuangan. Surat tersebut dikembalikan dengan alasan obyek penilaian beserta permasalahan hukum tidak jelas.

2) Melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan dengan kesapakatan sebagai berikut:

   i. Kementerian Keuangan belum dapat melakukan penilaian ulang atas aset dimaksud dan disarankan untuk sementara

menggunakan hasil revaluasi pada tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp180.246.056.750,00.

ii. Penilaian aset pengganti yang telah diberikan oleh PT. Semeru Cemerlang dapat dilakukan oleh Tim Penilai/Akuntan Publik.

iii. KKP dapat melakukan negosiasi ulang dengan PT. Semeru Cemerlang dan diharapkan mendapatkan alternatif solusi terbaik bagi para pihak.

3) Sebagai tindak lanjut poin 2 huruf iii telah dilaksanakan rapat antara 2 pihak pada tanggal 19 Juni 2024. Dalam rapat tersebut KKP memberikan opsi kepada PT SC untuk melanjutkan *ruislag* dengan memperhitungkan prestasi perjajian yang telah dilaksanakan PT SC. Prestasi tersebut berupa 2 (dua) unit mobil Izusu Panther senilai Rp168.000.000,00; Tanah dan Bangunan di Buduran, Jawa Timur senilai Rp77.750.000,00 dan Perbaikan sarana dan prasarana rumah dinas seniai Rp43.941.000,00. Sehingga tanah yang dapat ditukar adalah sebagai berikut:

$$\frac{289.691.000}{3.372.972.000} \text{ X } 472.440 \text{ m}^2 = 40.575 \text{ m}^2$$

Atas usulan tersebut PT SC akan membahasnya secara internal terlebih dahulu untuk didiskusikan kembali dengan KKP.

c. Ditjen Perikanan Budi Daya(BLU Produksi Perikanan Budidaya Karawang

Terdapat tanah seluas 273,66 Ha eks Plasma Proyek Tambak Inti Rakyat yang dikuasai oleh masyarakat. Atas masalah ini KKP masih mengkaji kewajiban yang mungkin timbul berkenaan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1984 tentang Proyek Tambak Inti Rakyat berserta peraturan turunannya, termasuk tapi tidak terbatas pada konversi lahan kepada masyarakat.

d. Ditjen Perikanan Budi Daya(Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar

Terdapat 2 (dua) bidang tanah yang tercatat sebagai BMN di satker BPBAP Takalar dan juga tercatat sebagai BMD pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kondisi sebagai berikut:

- Tanah di Desa Bira, Kota Makassar dengan luas tanah 15.000 $m^2$ dengan nilai Rp55.020.000.000,00 bersertifikat Hak Pakai Nomor

20004/Parang Loe atas nama Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan terbit tahun 2019.

Pada tanah ini terdapat bangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

- Tanah di Desa Mandalle, Kab. Pangkep dengan luas tanah 19.394 $m^2$ dengan nilai Rp5.147.980.000,00 bersertifikat Hak Pakai a.n. Departemen Pertanian RI Jakarta Kantor dan Unit *Hatchery* Ditjen Perikanan dan Kepulauan, dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Mandelle tanggal 2 Februari 1989.

  Pada tanah ini terdapat bangunan UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Sertifkat tanah tersebut berupa salinan dan dipegang oleh satker BBPBAP Takalar.

Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan Pengamanan Aset Tetap Tanah pada BPBAP Takalar dengan hasil sesuai surat nomor T.153/ITJ.5/HP.550/IV/2023 tanggal 11 April 2023 merekomendasikan untuk mengusulkan hibah terhadap 2 (dua) bidang tanah yang dikuasai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, BPBAP Takalar bersurat kepada KPKNL Makasar melalui surat nomor B.5960/BPBAPT/HP.550/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 menyampaikan permohonan informasi terkait Tanah Hibah sebagaimana dimaksud untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Tanah dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2025 (*Audited*) ini.

### C.3.2 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin Rp6.483.872.129.707,00*

Aset tetap berupa Peralatan dan Mesin merupakan mesin(mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Saldo per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.483.872.129.707,00 dan Rp6.284.712.692.903,00.

Rincian saldo Peralatan dan Mesin pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.46**
**Rincian Saldo Peralatan dan Mesin Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 427.633.729.969 | 372.813.315.084 | 54.820.414.885 | 14,70 |
| Itjen | 21.504.991.754 | 21.614.225.277 | (109.233.523) | (0,51) |
| Ditjen PT | 790.297.101.650 | 747.538.103.773 | 42.758.997.877 | 5,72 |
| Ditjen PB | 952.688.528.934 | 922.411.425.057 | 30.277.103.877 | 3,28 |
| Ditjen PSDKP | 2.141.568.570.332 | 2.110.458.043.015 | 31.110.527.317 | 1,47 |
| Ditjen PDSPKP | 143.271.811.095 | 155.596.231.192 | (12.324.420.097) | (7,92) |
| Ditjen PK | 195.334.072.133 | 125.006.191.641 | 70.327.880.492 | 56,26 |
| BPPSDM KP | 1.415.557.688.634 | 1.449.384.664.147 | (33.826.975.513) | (2,33) |
| BPPMH KP | 396.015.635.206 | 379.890.493.717 | 16.125.141.489 | 4,24 |
| **Total** | **6.483.872.129.707** | **6.284.712.692.903** | **199.159.436.804** | **3,17** |

Terdapat kenaikan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar 3,17% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan pengadaan Alat Laboratorium dan Peralatan Proses/Produksi serta adanya penambahan Peralatan dan Mesin dari perolehan lainnya.

Nilai akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.230.193.198.960,00. Rincian nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per bidang barang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.47**
**Daftar Rinci Nilai Tercatat Peralatan dan Mesin Per Bidang Barang**
**Per 31 Desember 2025**

| Kode dan Nama Bidang | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | | Nilai Tercatat/Nilai Buku |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Awal | Saldo Akhir | |
| 301(Alat Besar | 477.102.963.904 | 389.561.896.333 | 401.358.987.850 | 75.743.976.054 |
| 302(Alat Angkutan | 2.751.245.529.489 | 2.011.884.302.168 | 2.143.475.276.053 | 607.770.253.436 |
| 303(Alat Bengkel Dan Alat Ukur | 81.840.870.769 | 66.067.727.621 | 67.372.194.617 | 14.468.676.152 |
| 304(Alat Pertanian | 207.379.689.898 | 187.491.812.409 | 191.639.484.354 | 15.740.205.544 |
| 305(Alat Kantor & Rumah Tangga | 713.818.481.778 | 619.477.311.321 | 633.016.316.513 | 80.802.165.265 |
| 306(Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar | 372.131.342.913 | 246.549.479.241 | 267.270.505.480 | 104.860.837.433 |
| 307(Alat Kedokteran Dan Kesehatan | 45.626.185.653 | 46.236.240.475 | 42.781.328.110 | 2.844.857.543 |
| 308(Alat Laboratorium | 1.048.351.869.024 | 886.572.769.528 | 907.286.314.078 | 141.065.554.946 |
| 309(Alat Persenjataan | 27.987.441.374 | 35.016.875.128 | 16.309.295.142 | 11.678.146.232 |
| 310(Komputer | 495.977.802.708 | 365.211.017.544 | 379.680.686.693 | 116.297.116.015 |
| 311(Alat Eksplorasi | 7.385.112.496 | 7.068.756.507 | 7.109.910.326 | 275.202.170 |

| Kode dan Nama Bidang | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | | Nilai Tercatat/Nilai Buku |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Awal | Saldo Akhir | |
| 312(Alat Pengeboran | 4.129.183.300 | 4.111.658.935 | 4.128.061.025 | 1.122.275 |
| 313(Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian | 18.942.149.186 | 13.735.918.847 | 14.815.158.715 | 4.126.990.471 |
| 314(Alat Bantu Eksplorasi | 15.089.070.150 | 14.833.636.463 | 14.634.515.625 | 454.554.525 |
| 315(Alat Keselamatan Kerja | 51.029.656.012 | 39.683.170.854 | 42.463.296.532 | 8.566.359.480 |
| 316(Alat Peraga | 12.681.845.146 | 8.327.693.116 | 9.119.796.796 | 3.562.048.350 |
| 317(Peralatan Proses/Produksi | 135.830.160.920 | 65.869.721.771 | 73.326.976.614 | 62.503.184.306 |
| 318(Rambu ( Rambu | 9.359.491.117 | 6.949.494.531 | 7.341.170.711 | 2.018.320.406 |
| 319(Peralatan Olah Raga | 7.963.283.870 | 6.894.438.035 | 7.063.923.726 | 899.360.144 |
| **Total** | **6.483.872.129.707** | **5.021.543.920.827** | **5.230.193.198.960** | **1.253.678.930.747** |

Ringkasan mutasi akun Peralatan dan Mesin per jenis transaksi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.48**
**Ringkasan Mutasi Peralatan dan Mesin Per Jenis Transaksi**
**Per 31 Desember 2025**

| Kode Transaksi | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| **Saldo Awal Per 1 Januari 2025** | | **6.284.712.692.903** |
| **Mutasi Tambah** | | **1.489.827.782.369** |
| 100 | Saldo Awal | 1.797.898.040 |
| 101 | Pembelian | 1.078.328.445.671 |
| 102 | Transfer Masuk | 210.062.999.187 |
| 103 | Hibah Masuk | 847.239.532 |
| 105 | Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | 34.606.038.343 |
| 106 | Pembatalan Penghapusan | 255.989.130 |
| 107 | Reklasifikasi Masuk | 34.152.280.974 |
| 112 | Perolehan Lainnya | 113.823.150.356 |
| 115 | Reklasifikasi Masuk dari Persediaan | 267.221.000 |
| 131 | Likuidasi Masuk | 1.796.371.500 |
| 202 | Pengembangan Nilai Aset (Langsung) | 1.470.997.790 |
| 204 | Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah | 1.564.302.225 |
| 214 | Koreksi Susulan | 3.780.800.000 |
| 402 | Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif | 7.074.048.621 |
| **Mutasi Kurang** | | **(1.290.668.345.565)** |
| 264 | Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang | (9.988.330.209) |
| 302 | Transfer Keluar | (210.244.693.401) |
| 303 | Hibah Keluar | (13.738.661.625) |
| 304 | Reklasifikasi Keluar | (35.512.059.708) |

| Kode Transaksi | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 305 | Koreksi Pencatatan | (874.107.077.170) |
| 311 | Likuidasi Keluar | (1.796.371.500) |
| 315 | Reklasifikasi Keluar ke Persediaan | (97.304.000) |
| 401 | Penghentiaan Aset Dari Penggunaan | (145.183.847.952) |
| **Saldo Akhir Per 31 Desember 2025** | | **6.483.872.129.707** |

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Penambahan Saldo Awal terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.003.355.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp168.050.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp605.993.040,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp13.000.000,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp7.500.000,00.

2. Transaksi Pembelian terdapat pada 8 (delapan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.921.941.113,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp20.388.183.580,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp44.755.979.604,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp905.378.261.133,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp5.199.843.495,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp67.172.442.925,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp3.716.378.886,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp26.795.414.935,00;

3. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 8 (delapan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp28.300.000,00;unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp6.694.854.813,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp6.594.840.029,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp123.863.554.114,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp3.378.958.487,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp1.062.289.200,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp8.403.309.080,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp60.036.893.464,00.

4. Transaksi Hibah Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp847.239.532,00.

5. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp9.729.947.027,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp4.142.342.342,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp9.163.840.333,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp9.991.090.041,00.

6. Transaksi Pembatalan Penghapusan terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp150.389.130,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp105.600.000,00.

7. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat terdapat pada 8 (delapan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp167.143.800,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp178.995.130,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.808.261.649,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp375.785.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp331.163.500,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp6.770.416.802,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp9.034.588.657,00.

8. Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp56.955.142.786,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp38.789.669.019,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp4.386.813.136,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.532.202.000,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp171.930.082,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp320.627.000,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp11.666.766.333,00.

9. Transaksi Reklasifikasi Masuk dari Persediaan terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp176.423.000,00 dan unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp90.798.000,00.

10. Transaksi Likuidasi Masuk hanya terdapat unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.796.371.500,00.

11. Transaksi Pengembangan Nilai Aset (Langsung) terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp302.107.790,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.168.890.000,00.

12. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp11.791.927,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp92.561.645,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.305.406.000,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp850.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp135.542.653,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp18.150.000,00.

13. Transaksi Koreksi Susulan terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.047.100.000,00 dan unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp733.700.000,00.

14. Transaksi Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan prnggunaan aktif terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.366.881.095,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp347.390.900,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp2.004.300.805,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp276.661.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp1.428.418.500,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp650.396.321,00.

15. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp9.700.711.637,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp23.700.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp18 100.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Lau.t sebesar Rp240.374.072,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp5.444.500,00.

16. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada 9 (sembilan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.352.374.500,00; unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp18.840.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp6.457.947.813,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp6.594.840.029,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp124.046.515.517,00;

unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp3.360.118.487,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp45.399.200,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp8.325.034.891,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp60.043.622.964,00.

17. Transaksi Hibah Keluar terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp377.639.200,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp11.436.889.940,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.436.466.000,00 dan unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp487.666.485,00.

18. Transaksi Reklasifikasi Keluar terdapat pada 8 (delapan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp167.143.800,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp144.295.130,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp15.485.926.436,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp3.080.809.383,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp375.785.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp331.163.500,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp6.923.547.802,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp9.003.388.657,00.

19. Transaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp11.791.926,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp74.400.270,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp401.788.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp861.744.675.486,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp121.448.581,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp11.094.896.041,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp658.076.866,00.

20. Transaksi Likuidasi Keluar hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.796.371.500,00.

21. Transaksi Reklasifikasi Keluar ke Persediaan terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp11.264.000,00 dan unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp86.040.000,00.

22. Transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan ke Persediaan terdapat pada 9 (sembilan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp12.269.549.000,00; unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp90.393.523,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp20.943.484.029,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp8.047.492.863,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp18.099.689.728,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp17.228.217.189,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp7.396.300.766,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp50.412.715.953,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp10.696.004.901,00.

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2025 (*Audited*) ini.

### C.3.3 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan Bangunan Rp5.413.469.993.250,00*

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.413.469.993.250,00 dan Rp5.261.675.168.922,00.

Rincian saldo Gedung dan Bangunan pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.49**
**Rincian Saldo Gedung dan Bangunan Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 770.070.625.915 | 766.903.467.648 | 3.167.158.267 | 0,41 |
| Ditjen PT | 822.890.971.980 | 787.698.310.066 | 35.192.661.914 | 4,47 |
| Ditjen PB | 1.416.541.076.707 | 1.313.698.875.867 | 102.842.200.840 | 7,83 |
| Ditjen PSDKP | 232.095.303.906 | 231.184.717.974 | 910.585.932 | 0,39 |
| Ditjen PDSPKP | 113.530.059.225 | 112.680.374.165 | 849.685.060 | 0,75 |
| Ditjen PK | 92.752.545.755 | 90.736.630.532 | 2.015.915.223 | 2,22 |
| BPPSDM KP | 1.704.197.354.673 | 1.692.502.360.675 | 11.694.993.998 | 0,69 |
| BPPMH KP | 261.392.055.089 | 266.270.431.995 | (4.878.376.906) | (1,83) |
| **Total** | **5.413.469.993.250** | **5.261.675.168.922** | **151.794.824.328** | **2,88** |

Terdapat kenaikan saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar 2,88% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan adanya reklasifikasi masuk dari akun Properti Investasi dan perolehan lainnya eks penggunaan lahan di Pelabuhan Perikanan.

Nilai akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.177.439.868.622,00. Rincian nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per bidang barang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.50**
**Daftar Rinci Nilai Tercatat Gedung dan Bangunan Per Bidang Barang**
**Per 31 Desember 2025**

| Kode dan Nama Bidang | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | | Nilai Tercatat/Nilai Buku |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Awal | Saldo Akhir | |
| 401(Bangunan Gedung | 5.205.828.831.750 | 976.517.283.421 | 1.138.365.925.860 | 4.067.462.905.890 |
| 402(Monumen | 1.268.914.269 | 195.207.039 | 221.530.375 | 1.047.383.894 |
| 403(Bangunan Menara | 17.875.118.153 | 4.462.980.300 | 5.091.666.036 | 12.783.452.117 |
| 404(Tugu Titik Kontrol/Pasti | 188.497.129.078 | 29.304.381.003 | 33.717.669.857 | 154.779.459.221 |
| **Total** | **5.413.469.993.250** | **1.010.479.851.763** | **1.177.396.792.128** | **4.236.073.201.122** |

Ringkasan mutasi akun Gedung dan Bangunan per jenis transaksi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.51**
**Ringkasan Mutasi Gedung dan Bangunan Per Jenis Transaksi**
**Per 31 Desember 2025**

| Kode Transaksi | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| **Saldo Awal Per 1 Januari 2025** | | **5.261.675.168.922** |
| **Mutasi Tambah** | | **372.764.385.768** |
| 100 | Saldo Awal | 4.495.634.300 |
| 101 | Pembelian | 8.158.678.248 |
| 102 | Transfer Masuk | 86.914.388.728 |
| 103 | Hibah Masuk | 175.000.000 |
| 105 | Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | 15.276.342.461 |
| 106 | Pembatalan Penghapusan | 226.777.000 |
| 107 | Reklasifikasi Masuk | 62.296.155.681 |
| 112 | Perolehan Lainnya | 57.249.443.114 |
| 202 | Pengembangan Nilai Aset (Langsung) | 1.587.691.370 |
| 204 | Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah | 15.550.275.642 |
| 208 | Pengembangan Melalui KDP | 4.084.992.490 |
| 214 | Koreksi Susulan | 74.285.000 |
| 402 | Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif | 1.787.579.380 |

| Kode Transaksi | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 432 | Perubahan PI ke BMN | 114.887.142.354 |
| **Mutasi Kurang** | | **(220.969.561.440)** |
| 264 | Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang | (2.197.064.801) |
| 302 | Transfer Keluar | (87.536.551.110) |
| 303 | Hibah Keluar | (3.020.555.200) |
| 304 | Reklasifikasi Keluar | (60.835.526.881) |
| 305 | Koreksi Pencatatan | (16.290.424.908) |
| 401 | Penghentiaan Aset Dari Penggunaan | (37.162.067.186) |
| 431 | Perubahan BMN Ke PI | (13.927.371.354) |
| **Saldo Akhir Per 31 Desember 2025** | | **5.413.469.993.250** |

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Transaksi Penambahan Saldo Awal terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp 2.243.502.400,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp92.101.000,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp2.160.030.900,00.

2. Transaksi Pembelian terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.144.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp30.830.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp1.912.103.820,00 dan unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp5.071.744.428,00.

3. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.823.215.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp6.077.525.220,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.291.649.197,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp346.657.109,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp843.028.000,00; unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp35.356.470.904,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp41.175.843.298,00.

4. Transaksi Hibah Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp175.000.000,00.

5. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp668.854.377,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp363.562.300,00 dan unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp14.243.925.784,00.

6. Transaksi Pembatalan Penghapusan terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp29.436.000,00 dan unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp197.341.000,00.

7. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp26.494.700.323,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp703.931.180,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp6.496.477.804,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp24.894.569.234,00; unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp3.507.107.140,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp199.370.000,00.

8. Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp56.786.386.114,00 dan unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp463.057.000,00.

9. Transaksi Pengembangan Nilai Aset (Langsung) terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp39.027.600,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp37.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp818.855.060,00 dan unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp692.808.710,00.

10. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp155.690.999,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3.720.768.769,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp548.503.952,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp184.824.482,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp99.830.000,00; unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp7.367.277.024,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp3.473.380.416,00.

11. Transaksi Pengembangan Melalui KDP terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.343.943.267,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.458.162.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp110.000.000,00 dan unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp1.172.887.223,00.

12. Transaksi Koreksi Susulan terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp24.985.000,00 dan unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp49.300.000,00.

13. Transaksi Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp538.412.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp443.222.380,00; unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp617.057.000,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp188.888.000,00.

14. Transaksi Perubahan PI ke BMN terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.169.070.354,00 dan unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp112.718.072.000,00.

15. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp6.641.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp13.774.644,00;unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.500.000,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp2.160.030.901,00.

16. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp5.827.952.840,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp2.208.308.847,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp346.657.109,00; unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp36.803.701.819,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp42.349.930.495,00.

17. Transaksi Hibah Keluar terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp193.140.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp2.215.623.200,00 dan unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp611.792.000,00.

18. Transaksi Reklasifikasi Keluar terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp26.375.300.323,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp703.931.180,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp5.155.249.004,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp24.894.569.234,00; unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp3.507.107.140,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp199.370.000,00.

19. Transaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp155.690.998,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp5.957.749.438,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp69.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp1.912.103.820,00; unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp5.071.744.428,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp3.124.136.224,00.

20. Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp13.958.370.288,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp8.723.677.268,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp249.572.380,00; unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp9.988.025.350,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp4.242.421.900,00.

21. Transaksi Perubahan BMN Ke PI terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp13.883.014.354,00 dan unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp44.357.000.

Penjelasan lebih lanjut pengelolaan Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2025 (*Audited*) ini.

### C.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp4.139.015.306.911,00*

Aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.139.015.306.911,00 dan Rp4.053.129.578.585,00.

Rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.52**
**Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 79.096.958.111 | 78.998.488.111 | 98.470.000 | 0,12 |
| Ditjen PT | 2.850.074.983.943 | 2.867.865.609.468 | (17.790.625.525) | (0,62) |
| Ditjen PB | 552.929.175.841 | 550.975.996.989 | 1.953.178.852 | 0,35 |
| Ditjen PSDKP | 142.410.791.707 | 141.640.668.493 | 770.123.214 | 0,54 |
| Ditjen PDSPKP | 30.205.936.446 | 30.205.936.446 | 0 | 0,00 |
| Ditjen PK | 118.156.870.570 | 12.616.970.810 | 105.539.899.760 | 836,49 |
| BPPSDM KP | 348.477.437.305 | 352.882.410.805 | (4.404.973.500) | (1,25) |
| BPPMH KP | 17.663.152.988 | 17.943.497.463 | (280.344.475) | (1,56) |
| **Total** | **4.139.015.306.911** | **4.053.129.578.585** | **85.885.728.326** | **2,12** |

Terdapat kenaikan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 2,12% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan adanya reklasifikasi masuk Jalan, Irigasi dan Jaringan di Pulau Nipa, Batam, Prov. Kep. Riau dari akun Aset Kemitraan.

Nilai akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.658.795.377.020,00. Rincian nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan per bidang barang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.53**
**Daftar Rinci Nilai Tercatat Jalan, Irigasi dan Jaringan**
**Per Bidang Barang**
**Per 31 Desember 2025**

| Kode dan Nama Bidang | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | | Nilai Tercatat/Nilai Buku |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Awal | Saldo Akhir | |
| 501(Jalan Dan Jembatan | 1.936.662.346.727 | 1.083.380.676.875 | 1.215.352.481.081 | 721.309.865.646 |
| 502(Bangunan Air | 1.772.057.688.342 | 1.171.308.998.786 | 1.255.812.463.934 | 516.245.224.408 |
| 503(Instalasi | 286.378.381.177 | 140.166.666.536 | 146.062.229.928 | 140.316.151.249 |

| Kode dan Nama Bidang | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | | Nilai Tercatat/Nilai Buku |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Awal | Saldo Akhir | |
| 504(Jaringan | 143.916.890.665 | 37.608.387.134 | 41.568.202.077 | 102.348.688.588 |
| **Total** | **4.139.015.306.911** | **2.432.464.729.331** | **2.658.795.377.020** | **1.480.219.929.891** |

Ringkasan mutasi akun Jalan, Irigasi dan Jaringan per jenis transaksi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.54**
**Ringkasan Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Jenis Transaksi**
**Per 31 Desember 2025**

| Kode Transaksi | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| **Saldo Awal Per 1 Januari 2024** | | **4.053.129.578.585** |
| **Mutasi Tambah** | | **141.794.070.340** |
| 100 | Saldo Awal | 1.826.720.600 |
| 101 | Pembelian | 2.727.786.332 |
| 102 | Transfer Masuk | 9.469.787.453 |
| 103 | Hibah Masuk | 61.000.000 |
| 105 | Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | 965.746.400 |
| 107 | Reklasifikasi Masuk | 546.183.214 |
| 112 | Perolehan Lainnya | 19.368.495.600 |
| 113 | Penyelesaian Pembangunan Langsung | 779.144.700 |
| 204 | Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah | 1.006.648.042 |
| 208 | Pengembangan Melalui KDP | 1.142.061.999 |
| 402 | Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif | 24.492.000 |
| 412 | Perubahan Aset Kemitraan ke BMN | 103.876.004.000 |
| **Mutasi Kurang** | | **(55.908.342.014)** |
| 264 | Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang | (123.254.162) |
| 302 | Transfer Keluar | (7.732.496.496) |
| 304 | Reklasifikasi Keluar | (30.974.000) |
| 305 | Koreksi Pencatatan | (181.679.325) |
| 401 | Penghentiaan Aset Dari Penggunaan | (47.839.938.031) |
| **Saldo Akhir Per 31 Desember 2025** | | **4.139.015.306.911** |

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Transaksi Penambahan Saldo Awal hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.826.720.600,00.

2. Transaksi Pembelian terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp991.000.000,00; unit

Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp1.242.990.832,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp296.748.000,00 dan unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp197.047.500,00.

3. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp98.470.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.851.091.035,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp122.445.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp1.148.334.000,00; unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp220.141.000,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp5.029.306.418,00.

4. Transaksi Hibah Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp61.000.000,00.

5. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp965.746.400,00.

6. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp205.156.000,00 dan unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp341.027.214,00.

7. Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp19.290.367.800,00;unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp78.127.800,00.

8. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp779.144.700,00.

9. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp313.162.360,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp569.656.682,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp39.999.000,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp83.830.000,00.

10. Transaksi Pengembangan Melalui KDP terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp626.500.239,00 dan unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp515.561.760,00.

11. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp102.663.000,00 dan unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp20.591.162,00.

12. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada 3 (unit) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.258.589.078,00; unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp1.322.156.000,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp5.151.751.418,00.

13. Transaksi Reklasifikasi Keluar terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp474.000,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp30.500.000,00.

14. Transaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 3 (unit) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp30.666.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp24.496.000,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp126.517.325,00.

15. Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp43.487.710.881,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp696.150.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp5.600.000,00; unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp3.560.532.000,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp89.945.150,00.

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2025 (*Audited*) ini.

### C.3.5 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya Rp211.745.434.245,00*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp211.745.434.245,00 dan Rp211.154.575.775,00.

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.55**
**Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 22.680.175.172 | 15.288.041.864 | 7.392.133.308 | 48,35 |
| Ditjen PT | 19.680.845.884 | 23.821.507.884 | (4.140.662.000) | (17,38) |
| Ditjen PB | 4.584.886.569 | 4.649.857.349 | (64.970.780) | (1,40) |
| Ditjen PSDKP | 8.960.411.340 | 8.100.376.320 | 860.035.020 | 10,62 |
| Ditjen PDSPKP | 118.180.610 | 272.840.270 | (154.659.660) | (56,69) |
| Ditjen PK | 129.392.148.011 | 129.357.185.571 | 34.962.440 | 0,03 |
| BPPSDM KP | 24.938.762.702 | 28.153.165.516 | (3.214.402.814) | (11,42) |
| BPPMH KP | 1.390.023.957 | 1.511.601.001 | (121.577.044) | (8,04) |
| **Total** | **211.745.434.245** | **211.154.575.775** | **590.858.470** | **0,28** |

Terdapat kenaikan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar 0,28% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan pengadaan Videotron, Biaya Renovasi Gedung dan Banguna serta reklasfikasi masuk dari akun Konstruksi dalam Pengerjaan.

Nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.043.456.625,00. Rincian nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap berupa Aset Tetap Lainnya per bidang barang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.56**
**Daftar Rinci Nilai Tercatat Aset Tetap Lainnya Per Akun Per Bidang Barang**
**Per 31 Desember 2025**

| Nama Akun serta Kode dan Nama Bidang | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | | Nilai Buku |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Awal | Saldo Akhir | |
| **Aset Tetap Renovasi** | **11.741.816.553** | **200.310.639** | **271.216.145** | **11.470.600.408** |
| 607(Aset Tetap Dalam Renovasi | 11.741.816.553 | 200.310.639 | 271.216.145 | 11.470.600.408 |
| **Aset Tetap Lainnya** | **200.003.617.692** | **6.400.622.833** | **5.772.240.480** | **194.231.377.212** |
| 601(Bahan Perpustakaan | 61.629.712.461 | 0 | 0 | 61.629.712.461 |
| 602(Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga | 138.142.405.231 | 6.400.622.833 | 5.772.240.480 | 132.370.164.751 |
| 606(Barang Koleksi Non Budaya | 231.500.000 | 0 | 0 | 231.500.000 |
| **Total** | **211.745.434.245** | **6.600.933.472** | **6.043.456.625** | **205.701.977.620** |

Penjelasan ringkas atas saldo Aset Tetap dalam Renovasi pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.499.967.753,00

   Saldo Aset Tetap Renovasi pada Sekretariat Jenderal hanya terdapat pada satker Biro Umum yang merupakan pekerjaan pembuatan ruangan kerja Ditjen Pengelolaan Ruang Laut di Gd. Mina Bahari II.

2. Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp5.851.234.674,00

   Saldo Aset Tetap Renovasi pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada 3 (tiga) satker yaitu pada DKP Prov. Kalimantan Timur sebesar Rp5.415.973.000,00; DKP Prov. Sulawesi Utara sebesar Rp208.851.674,00 yang merupakan renovasi kantor; dan satker Setditjen Perikanan Tangkap yang merupakan pekerjaan pada PP Cikidang sebesar Rp226.410.000,00.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp2.818.527.559,00

   Saldo Aset Tetap Renovasi pada Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat pada satker sebagai berikut:

   a. DKP Prov. Sulawesi Utara

      Merupakan pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi sebesar Rp77.000.000,00 yang saat ini dalam proses penyelesaian melalui proses penghibahan atau penghapusan.

   b. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

      Merupakan pekerjaan rehabiliatasi gedung kantor sebesar Rp758.629.593,00.

   c. Setditjen Perikanan Budi Daya

      Merupakan pekerjaan pembuatan partisi dan tata ruang di lantai 7 dan 8 Gd. Mina Bahari IV yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebesar Rp1.837.608.966,00 dan pekerjaan penaatan ruang *podcast* lantai 7 Gd Mina Bahari IV yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebesar Rp63.310.000,00.

4. Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp363.969.000,00

   Saldo Aset Tetap Renovasi pada Ditjen Pengelolaan Kelautan hanya terdapat pada satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan yang merupakan

5. Badan Riset dan Sumber Daya KP sebesar Rp839.672.375,00

   Saldo Aset Tetap Renovasi pada Badan Riset dan Sumber Daya KP terdapat pada satker sebagai berikut:

   a. Sekrtariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

      Merupakan pekerjaan renovasi ruang Kepala Badan di lantai 7 Gd. Mina Bahari III yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebesar Rp95.000.000.

   b. Pusat Riset Perikanan

      Merupakan pembangunan gedung baru di SUPM Tegal sebesar Rp744.672.375,00

6. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP

   Saldo Aset Tetap Renovasi pada Badan Pengedalian dan Pengawasan Hasil Mutu KP terdapat pada satker Sekretariat Badan Pengedalian dan Pengawasan Hasil Mutu KP yang merupakan rehabilitasi gedung kantor UPT sebesar Rp368.445.192,00,00.

Ringkasan mutasi akun Aset Tetap Lainnya per jenis transaksi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.57**
**Ringkasan Mutasi Aset Tetap Lainnya Per Jenis Transaksi**
**Per 31 Desember 2025**

| Kode Transaksi | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| **Saldo Awal Per 1 Januari 2024** | | **211.154.575.775** |
| **Mutasi Tambah** | | **23.737.548.570** |
| 100 | Saldo Awal | 4.008.025.300 |
| 101 | Pembelian | 6.545.848.763 |
| 102 | Transfer Masuk | 565.736.540 |
| 103 | Hibah Masuk | 120.618.500 |
| 105 | Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | 77.560.000 |
| 107 | Reklasifikasi Masuk | 1.732.423.600 |
| 112 | Perolehan Lainnya | 624.053.875 |

| Kode Transaksi | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 115 | Reklasifikasi Masuk dari Persediaan | 1.137.855.033 |
| 202 | Pengembangan Nilai Aset (Langsung) | 1.309.729.737 |
| 952 | Pembelian Aset Tetap Renovasi | 363.969.000 |
| 954 | Penyelesaian Dengan KDP Aset Tetap Renovasi | 7.251.728.222 |
| **Mutasi Kurang** | | **(23.146.690.100)** |
| 302 | Transfer Keluar | (4.573.761.840) |
| 303 | Hibah Keluar | (2.537.843.450) |
| 304 | Reklasifikasi Keluar | (647.998.080) |
| 305 | Koreksi Pencatatan | (11.437.271.222) |
| 315 | Reklasifikasi Keluar ke Persediaan | (1.137.855.033) |
| 401 | Penghentiaan Aset Dari Penggunaan | (2.811.960.475) |
| **Saldo Akhir Per 31 Desember 2025** | | **211.745.434.245** |

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Penambahan Saldo Awal hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp4.008.025.300,00.

2. Transaksi Pembelian terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp6.177.403.571,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp368.445.192,00.

3. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp323.649.040,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp242.087.500,00.

4. Transaksi Hibah Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp120.618.500,00.

5. Transaksi Penyelesaian Pembangunan KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp77.560.000,00.

6. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.578.818.600,00 dan unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp153.605.000,00.

7. Transaksi Perolehan Lainnya hanya terdapat pada unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp624.053.875,00.

8. Transaksi Reklasifikasi Masuk dari Persediaan hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.137.855.033,00.

9. Transaksi Pengembangan Nilai Aset Langsung hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.309.729.737,00.

10. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp4.008.025.300,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp323.649.040,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp242.087.500,00.

11. Transaksi Hibah Keluar hanya terdapat pada unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp2.537.843.450,00.

12. Transaksi Reklasifikasi Keluar terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp647.298.080,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp700.000,00.

13. Transaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp4.218.222.000,00 dan unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp7.219.049.222,00.

14. Transaksi Reklasifikasi Keluar ke Persediaan hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.137.855.033,00.

15. Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp95.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp146.949.780,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp71.485.500,00;.unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp154.659.660,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp329.006.560,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp1.525.536.739,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp489.322.236,00.

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2025 (*Audited*) ini.

### C.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp1.721.871.963.822,00*

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.721.871.963.822,00 dan Rp183.735.627.793,00.

Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.58**
**Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 321.348.897 | 7.699.342.783 | (7.377.993.886) | (95,83) |
| Ditjen PT | 29.329.639.808 | 143.588.893.165 | (114.259.253.357) | (79,57) |
| Ditjen PB | 333.300.821.067 | 23.005.851.182 | 310.294.969.885 | 1.348,77 |
| Ditjen PSDKP | 0 | 2.122.367.218 | 878.446.194.952 | (100,00) |
| Ditjen PDSPKP | 1.178.609.200 | 1.357.471.200 | (178.862.000) | (13,18) |
| Ditjen PK | 476.731.865.620 | 0 | 476.731.865.620 | 0,00 |
| BPPSDM KP | 5.512.861.488 | 5.961.702.245 | (448.840.757) | (7,53) |
| **Total** | **846.375.146.080** | **183.735.627.793** | **662.639.518.287** | **360,65** |

Terdapat kenaikan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar 360,65% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan adanya pelaksananan program Budidaya Ikan Nila Salin sebesar Rp195.038.440.724,00 dan Pekerjaan program prioritas pembangunan tambak Way Ngapu sebesar Rp57.500.000.000,00 unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya, dan pelaksananan program intensifikasi dan ekstensifikasi tambak garam pada Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp476.731.865.620,00.

Penjelasan ringkas atas saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal antara lain merupakan jasa konsultan pengawasan konstruksi pembangunan Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko SKPT Morotai sebesar Rp272.378.250,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

   Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap antara lain merupakan pembangunan Pelabuhan Perikanan pada SKPT Saumlaki sebesar Rp28.632.532.558,00.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Ditjen Perikanan budi Daya antara lain merupakan pembangunan tambak di Way Ngapu sebesar Rp57.500.000.000,00; pembangunan budidaya ikan nila salin sebesar Rp195.038.440.724,00 dan pengadaan BMN dari pinjaman luar negeri proyek IISAP berupa pembangunan tambak di Kab. Pinrang sebesar Rp73.759.378.143,00.

4. Ditjen Penguatan Daya Saing KP

   Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP merupakan 6 (enam) buah perencanaan pembangunan gudang beku sebesar Rp1.178.609.200,00.

5. Ditjen Pengelolaan Kelautan

   Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan antara lain berupa Pekerjaan Ekstensifikasi K(SIGN (Rote Ndao) sebesar Rp476.633.065.620,00 dan Pekerjaan Intensifikasi Garam Rakyat (Indramayu, Cirebon, Pati, Sabu Raijua) sebesar Rp98.800.000,00.

Sedangkan rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan status keberlanjutannya adalah sebagai berikut:

**Tabel C.59**
**Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan Status Keberlanjutannya**
**Per 31 Desember 2025**

| Unit Eselon I | Dilanjutkan | Dihentikan Sementara | Dihentikan Permanen | Total |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 321.348.897 | | 79.209.600 | 400.558.497 |
| Ditjen PT | 29.329.639.808 | | | 29.329.639.808 |
| Ditjen PB | 332.072.541.817 | 44.677.200 | 1.228.279.250 | 333.345.498.267 |
| Ditjen PSDKP | | 208.060.075 | | 208.060.075 |
| Ditjen PDSPKP | 1.178.609.200 | | | 1.178.609.200 |
| Ditjen PK | 476.731.865.620 | | | 476.731.865.620 |
| BPPSDM KP | | 250.115.860 | 191.001.200 | 441.117.060 |
| **Total** | **839.634.005.342** | **502.853.135** | **1.498.490.050** | **841.635.348.527** |

Penjelasan ringkas atas Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan sementara dan dihentikan permanen pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan permanen pada unit Eselon I Sekretariat jenderal antara lain berupa Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Galeri Foto Menteri Kelauran dan Perikanan Lantai GF GMB I sebesar Rp79.209.600,00.

2. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan permanen pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya antara lain berupa biaya pendukung pengadaan KJA Offshore sebesar Rp242.164.650,00 dan penyusunan dok lingkungan instalasi budidaya ikan lepas pantai sebesar Rp527.345.500,00 pada satker Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya.

3. Ditjen Pengelolaan Kelautan

   Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan sementara pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan pembangunan kantor Saba dan pembayaran jasa konsultan perencanaan pembangunan kantor Kota Baru sebesar Rp198.060.075,00

4. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

   Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan sementara pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP antara lain berupa perencanaan renovasi asrama kampus Serang sebesar Rp78.720.400,00, Perencanaan Aula Madidihang pada satker Poltek AUP sebesar Rp11.200.000,00.

   Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan permanen pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP konsultan perencanaan renovasi dermaga Poltek KP Sorong sebesar Rp181.912.400,00.

Ringkasan mutasi akun Konstruksi Dalam Pengerjaan per jenis transaksi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.60**
**Ringkasan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Jenis Transaksi**
**Per 31 Desember 2025**

| Kode Transaksi | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| **Saldo Awal Per 1 Januari 2024** | | **183.735.627.793** |
| **Mutasi Tambah** | | **1.743.397.606.451** |
| 502 | Perolehan/Penambahan KDP | 330.631.151.197 |
| 503 | Pengembangan KDP | 503.558.480.274 |
| 504 | Koreksi Nilai KDP Bertambah | 25.429.536.172 |
| 506 | Transfer Masuk KDP | 2.165.990.300 |
| 510 | Perolehan Lainnya KDP | 880.383.639.258 |
| 514 | Reklasifikasi Masuk KDP | 530.000 |
| 552 | Penggunaan Kembali KDP | 1.228.279.250 |
| **Mutasi Kurang** | | **(1.080.758.088.164)** |
| 105 | Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | (50.935.144.404) |
| 208 | Pengembangan Melalui KDP | (5.227.054.489) |
| 505 | Penghapusan/Penghentian Permanen KDP | (699.768.613) |
| 507 | Transfer Keluar KDP | (2.165.990.300) |
| 513 | Reklasifikasi Keluar KDP | (530.000) |
| 517 | Koreksi Pencatatan KDP | (1.012.880.972.511) |
| 551 | Penghentian Sementara KDP | (1.560.226.125) |
| 564 | Koreksi Nilai KDP Berkurang | (36.673.500) |
| **Saldo Akhir Per 31 Desember 2025** | | **846.375.146.080** |

Ringkasan mutasi akun Konstruksi Dalam Pengerjaan per jenis transaksi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Transaksi Perolehan / Penambahan KDP terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.045.651.314,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp4.667.029.459,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp54.510.254.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp265.499.359.071,00; dan unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp4.908.857.353,00.

2. Transaksi Pengembangan KDP terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp 2.729.454.694,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.086.115.799,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp258.108.031.612,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp Rp299.378.870,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp220.172.692.045,00 dan unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp21.162.807.254,00.

3. Transaksi Koreksi Nilai KDP Bertambah terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp1.364.956.255,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp21.151.259.731,00 dan unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp2.913.320.186,00.

4. Transaksi Transfer Masuk KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.165.990.300,00.

5. Transaksi Perolehan Lainnya KDP terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp110.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp873.289.791.010,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp1.912.103.820,00 dan unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp5.071.744.428,00.

6. Transaksi Reklasifikasi Masuk KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp530.000,00.

7. Transaksi Penggunaan Kembali KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp1.228.279.250,00.

8. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp9.729.947.027,00;unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp5.863.960.319,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.942.380.900,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp9.163.840.333,00 dan unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp24.235.015.825,00.

9. Transaksi Pengembangan Melalui KDP terdapat pada pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.343.943.267,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.084.662.239,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp110.000.000,00 dan unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp1.688.448.983,00.

10. Transaksi Penghapusan / Penghentian Permanen KDP terdapat pada pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp84.617.500,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp271.305.113,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp178.862.000,00 dan unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp164.984.000,00.

11. Transaksi Transfer Keluar KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.165.990.300,00.

12. Transaksi Reklasifikasi Keluar KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp530.000,00.

13. Transaksi Koreksi Pencatatan KDP terdapat pada pada 4 (empat) unit yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp112.063.776.057,00 dan unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp3.443.548.282,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp894.441.050.741,00 dan unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp2.932.597.431,00.

14. Transaksi Penghentian Sementara KDP terdapat pada pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp79.209.600,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp1.272.956.450,00 dan unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp208.060.075,00.

15. Transaksi Koreksi Nilai KDP Berkurang terdapat pada pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp33.450.000,00 dan unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp3.223.500,00.

16. Transaksi Penyelesaian Dengan KDP Aset Tetap Renovasi terdapat pada pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp81.979.000,00 dan unit Eselon I Badan dan Penyuluhan Pengembangan SDM KP sebesar Rp7.169.749.222,00.

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2025 (*Audited*) ini.

### C.3.7 Akumulasi Penyusutan

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp9.072.428.824.733,00*

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.072.428.824.733,00 dan Rp8.471.089.435.393,00.

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per akun adalah sebagai berikut:

**Tabel C.61**
**Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Akun**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | (Kenaikan) Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (5.230.193.198.960) | (5.021.543.920.827) | (208.649.278.133) | 4,16 |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (1.177.396.792.128) | (1.010.479.851.763) | (166.916.940.365) | 16,52 |
| Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan | (1.215.352.481.081) | (1.083.380.676.875) | (131.971.804.206) | 12,18 |
| Akumulasi Penyusutan Irigasi | (1.255.812.463.934) | (1.171.308.998.786) | (84.503.465.148) | 7,21 |
| Akumulasi Penyusutan Jaringan | (187.630.432.005) | (177.775.053.670) | (9.855.378.335) | 5,54 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | (6.043.456.625) | (6.600.933.472) | 557.476.847 | (8,45) |
| **Total** | **(9.072.428.824.733)** | **(8.471.089.435.393)** | **(601.339.389.340)** | **7,10** |

Ringkasan nilai penyusutan Aset Tetap per akun per bidang barang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.62**
**Ringkasan Nilai Penyusutan Aset Tetap Per Akun Per Bidang Barang**
**Per 31 Desember 2025**

| Nama Akun serta Kode dan Nama Bidang | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | | Nilai Buku |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Awal | Saldo Akhir | |
| **Peralatan dan Mesin** | **6.483.872.129.707** | **5.021.543.920.827** | **5.230.193.198.960** | **1.253.678.930.747** |
| 301-Alat Besar | 477.102.963.904 | 389.561.896.333 | 401.358.987.850 | 75.743.976.054 |
| 302-Alat Angkutan | 2.751.245.529.489 | 2.011.884.302.168 | 2.143.475.276.053 | 607.770.253.436 |
| 303-Alat Bengkel Dan Alat Ukur | 81.840.870.769 | 66.067.727.621 | 67.372.194.617 | 14.468.676.152 |
| 304-Alat Pertanian | 207.379.689.898 | 187.491.812.409 | 191.639.484.354 | 15.740.205.544 |
| 305-Alat Kantor & Rumah Tangga | 713.818.481.778 | 619.477.311.321 | 633.016.316.513 | 80.802.165.265 |
| 306-Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar | 372.131.342.913 | 246.549.479.241 | 267.270.505.480 | 104.860.837.433 |
| 307-Alat Kedokteran Dan Kesehatan | 45.626.185.653 | 46.236.240.475 | 42.781.328.110 | 2.844.857.543 |
| 308-Alat Laboratorium | 1.048.351.869.024 | 886.572.769.528 | 907.286.314.078 | 141.065.554.946 |
| 309-Alat Persenjataan | 27.987.441.374 | 35.016.875.128 | 16.309.295.142 | 11.678.146.232 |
| 310-Komputer | 495.977.802.708 | 365.211.017.544 | 379.680.686.693 | 116.297.116.015 |
| 311-Alat Eksplorasi | 7.385.112.496 | 7.068.756.507 | 7.109.910.326 | 275.202.170 |

| Nama Akun serta Kode dan Nama Bidang | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | | Nilai Buku |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Awal | Saldo Akhir | |
| 312-Alat Pengeboran | 4.129.183.300 | 4.111.658.935 | 4.128.061.025 | 1.122.275 |
| 313-Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian | 18.942.149.186 | 13.735.918.847 | 14.815.158.715 | 4.126.990.471 |
| 314-Alat Bantu Eksplorasi | 15.089.070.150 | 14.833.636.463 | 14.634.515.625 | 454.554.525 |
| 315-Alat Keselamatan Kerja | 51.029.656.012 | 39.683.170.854 | 42.463.296.532 | 8.566.359.480 |
| 316-Alat Peraga | 12.681.845.146 | 8.327.693.116 | 9.119.796.796 | 3.562.048.350 |
| 317-Peralatan Proses/Produksi | 135.830.160.920 | 65.869.721.771 | 73.326.976.614 | 62.503.184.306 |
| 318-Rambu - Rambu | 9.359.491.117 | 6.949.494.531 | 7.341.170.711 | 2.018.320.406 |
| 319-Peralatan Olah Raga | 7.963.283.870 | 6.894.438.035 | 7.063.923.726 | 899.360.144 |
| **Gedung dan Bangunan** | **5.413.469.993.250** | **1.010.479.851.763** | **1.177.396.792.128** | **4.236.073.201.122** |
| 401-Bangunan Gedung | 5.205.828.831.750 | 976.517.283.421 | 1.138.365.925.860 | 4.067.462.905.890 |
| 402-Monumen | 1.268.914.269 | 195.207.039 | 221.530.375 | 1.047.383.894 |
| 403-Bangunan Menara | 17.875.118.153 | 4.462.980.300 | 5.091.666.036 | 12.783.452.117 |
| 404-Tugu Titik Kontrol/Pasti | 188.497.129.078 | 29.304.381.003 | 33.717.669.857 | 154.779.459.221 |
| **Jalan dan Jembatan** | **1.936.662.346.727** | **1.083.380.676.875** | **1.215.352.481.081** | **721.309.865.646** |
| 501-Jalan Dan Jembatan | 1.936.662.346.727 | 1.083.380.676.875 | 1.215.352.481.081 | 721.309.865.646 |
| **Irigasi** | **1.772.057.688.342** | **1.171.308.998.786** | **1.255.812.463.934** | **516.245.224.408** |
| 502-Bangunan Air | 1.772.057.688.342 | 1.171.308.998.786 | 1.255.812.463.934 | 516.245.224.408 |
| **Jaringan** | **430.295.271.842** | **177.775.053.670** | **187.630.432.005** | **242.664.839.837** |
| 503-Instalasi | 286.378.381.177 | 140.166.666.536 | 146.062.229.928 | 140.316.151.249 |
| 504-Jaringan | 143.916.890.665 | 37.608.387.134 | 41.568.202.077 | 102.348.688.588 |
| **Aset Tetap Renovasi** | **11.741.816.553** | **200.310.639** | **271.216.145** | **11.470.600.408** |
| 607-Aset Tetap Dalam Renovasi | 11.741.816.553 | 200.310.639 | 271.216.145 | 11.470.600.408 |
| **Aset Tetap Lainnya** | **200.003.617.692** | **6.400.622.833** | **5.772.240.480** | **194.231.377.212** |
| 601-Bahan Perpustakaan | 61.629.712.461 | 0 | 0 | 61.629.712.461 |
| 602-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 138.142.405.231 | 6.400.622.833 | 5.772.240.480 | 132.370.164.751 |
| 606-Barang Koleksi Non Budaya | 231.500.000 | 0 | 0 | 231.500.000 |
| **Total** | **16.248.102.864.113** | **8.471.089.435.393** | **9.072.428.824.733** | **7.175.674.039.380** |

## C.4 Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

2. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

### C.4.1 Properti Investasi

*Properti Investasi Rp703.370.864.038,00*

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp703.370.864.038,00 dan Rp898.573.434.043,00.

Rincian saldo Properti Investasi pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.63**
**Rincian Saldo Properti Investasi Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Ditjen PT | 215.291.136.399 | 187.429.347.232 | 27.861.789.167 | 14,87 |
| Ditjen PB | 38.527.858.000 | 151.245.930.000 | (112.718.072.000) | (74,53) |
| Ditjen PDSPKP | 80.683.375.526 | 80.683.375.526 | 0 | 0,00 |
| Ditjen PK | 0 | 110.346.287.172 | (110.346.287.172) | (100,00) |
| BPPSDM KP | 368.868.494.113 | 368.868.494.113 | 0 | 0,00 |
| **Total** | **703.370.864.038** | **898.573.434.043** | **(195.202.570.005)** | **(21,72)** |

Terdapat kenaikan saldo Properti Investasi sebesar 21,72% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan adanya reklasifikasi keluar BMN tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Properti Investasi.

Penjelasan ringkas atas saldo Properti Investasi pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Perikanan Tangkap

   Saldo Properti Investasi pada Ditjen Perikanan Tangkap antara lain berupa kantin, *foodcourt* anak buah kapal (ABK), gedung pertokoan MBC, lahan penanganan hasil tangkapan, lahan penyaluran BBM, gedung pemasaran produk perikanan, gedung pasar, area wisata bahari, lahan parkir wisata bahari, *cold storage*, bangunan pengepakan, gudang dan rumah susun.

2. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Properti Investasi pada Ditjen Perikanan Budi Daya antara lain berupa wisma, kolam ikan dan lahan *hatchery* udang.

3. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

   Properti Investasi pada Ditjen Perikanan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP antara lain berupa Pasar Ikan Modern dan tempat penglolaan *styrofoam* di Muara Baru.

4. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

   Properti Investasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP berupa Pulau Cemara Besar di Karimun Jawa, akuarium PIAMARI di Pangandaran, tanah dan kolam tambak.

Rincian aset tetap berupa Properti Investasi per bidang barang per satker per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.64**
**Daftar Rinci Properti Investasi Per Bidang Barang**
**Per 31 Desember 2025**

| Kode dan Nama Bidang | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | | Nilai Tercatat/Nilai Buku |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Awal | Saldo Akhir | |
| 201-Tanah | 409.073.015.351 | 0 | 0 | 409.073.015.351 |
| 401-Bangunan Gedung | 294.297.848.687 | 81.513.026.434 | 51.532.926.708 | 242.764.921.979 |
| **Total** | **703.370.864.038** | **81.513.026.434** | **51.532.926.708** | **651.837.937.330** |

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Properti Investasi dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2025 (*Audited*) ini.

### C.4.2 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

*Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Rp51.532.926.708,00*

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp51.532.926.708,00 dan Rp81.366.905.591,00.

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi ada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.65**
**Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi**
**Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Ditjen PT | (21.621.384.923) | (17.127.800.683) | (4.493.584.240) | 26,24 |
| Ditjen PB | (7.154.978.387) | (44.841.144.544) | 37.686.166.157 | (84,04) |

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Ditjen PDSPKP | (11.295.672.570) | (9.682.005.060) | (1.613.667.510) | 16,67 |
| BPPSDM KP | (11.473.892.020) | (9.862.076.147) | (1.611.815.873) | 16,34 |
| **Total** | **(51.545.927.900)** | **(81.513.026.434)** | **29.967.098.534** | **(36,76)** |

Ringkasan nilai penyusutan Properti Investasi per akun per bidang barang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel diatas.

## C.5 Piutang Jangka Panjang

*Piutang Jangka Panjang Rp141,854,330,00*

Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per akun Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.66**
**Rincian Saldo Piutang Jangka Panjang Per Akun**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi | 299.391.711 | 516.201.823 | (216.810.112) | (42,00) |
| Piutang Jangka Panjang lainnya | 2.855.976.110 | 101.011.615.666 | (98.155.639.556) | (97,17) |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ( Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi | (157.537.381) | (158.621.431) | 1.084.050 | (0,68) |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ( Piutang Jangka Panjang Lainnya | (2.855.976.110) | (505.058.070) | (2.350.918.040) | 465,47 |
| **Total** | **141.854.330** | **100.864.137.988** | **(100.722.283.658)** | **(99,86)** |

Penjelasan Piutang Jangka Panjang per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

### C.5.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

*Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp299.391.711,00*

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp299.391.711,00 dan dan Rp516.201.823,00.

Rincian saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.67**
**Rincian Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**
**Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| BPPSDM KP | 196.014.544 | 201.014.544 | (5.000.000) | (2,49) |
| BPPMH KP | 103.377.167 | 315.187.279 | (211.810.112) | (67,20) |
| **Total** | **299.391.711** | **516.201.823** | **(216.810.112)** | **(42,00)** |

Terdapat penurunan saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan sebesar 42,00% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan adanya reklasifikasi keluar Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi ke Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Penjelasan ringkas atas saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

   Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada satker sebagai berikut:

   a. Pusat Pendidikan

      Merupakan piutang atas untuan ganti rugi biaya atas pelanggaran dalam pelaksanaan tugas belajar atas nama Sdr. HR Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.117/MEN/KU.440/2017 tanggal 13 Oktober 2017. Penyelesaian piutang ini telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pada tanggal 16 Juli 2019. Saldo Piutang TP/TGR per 31 Desember 2025 sebesar Rp156.824.545,00.

   b. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak

      Berdasarkan laporan hasil audit investigasi (LHAI) nomor R.112/ITJ.5/HP.230/III/2023 terdapat Tuntutan Ganti Rugi atas nama Sdr. FF terkait kegiatan Pelatihan Satpam yang dilaksanakan di SUPM

senilai Rp66.240.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah dilakukan setoran ke kas negara sebesar Rp27.050.000,00, namun terdapat beberapa setoran yang menggunakan akun tidak sesuai, yaitu akun penerimaan atas pemanfaatan BMN dan penerimaan kembali belanja lain-lain, sehingga saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp39.190.000,00.

2. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KP

   Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP terdapat pada Satker Sekretariat BKIPM atas kerugian negara akibat kekurangan uang yang diketahui dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal KKP Nomor R.280/IT J.5/HP.230/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Audit Investigasi dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat pada Sekretariat BKIPM dengan temuan adanya pengelolaan keuangan Negara TA 2022 dan 2023 yang tidak benar sebesar Rp420.526.758,00. Dari nilai tersebut sebesar Rp421.357.914,00,00. Dari nilai tersebut sebesar Rp316.018.437,00 merupakan piutang yang jatuh tempo pada Tahun 2025 yang telah dibukukan pada akun Bagian Lancar TP/TGR, sehingga saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp103.377.167,00.

Adapun kualitas dari saldo piutang TP/TGR pada masing-masing unit eselon I per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.68**
**Kualitas Piutang TP/TGR pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | Saldo | Lancar | Kurang Lancar | Diragukan | Macet |
|---|---|---|---|---|---|
| BPPSDMKP | 196.014.544 | 39.190.000 | 0 | 0 | 156.824.544 |
| BPPMHKP | 103.377.167 | 103.377.167 | | | |
| **Total** | **299.391.711** | **142.567.167** | **0** | **0** | **156.824.544** |

### C.5.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Rp157.537.381,00*

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp157.537.381,00 dan Rp158.621.431,00.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.69**
**Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**
**Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**
**Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| BPPSDM KP | (157.020.495) | (157.045.495) | 25.000 | (0,02) |
| BPPMH KP | (516.886) | (1.575.936) | 1.059.050 | (67,20) |
| **Total** | **(157.537.381)** | **(158.621.431)** | **1.084.050** | **(0,68)** |

### C.5.3 Piutang Jangka Panjang Lainnya

*Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp2.855.976.110,00*

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa(peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.855.976.110,00 dan Rp103.580.242.333,00.

Rincian saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.70**
**Rincian Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya**
**Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Ditjen PT | 2.855.976.110 | 2.855.976.110 | 0 | 0 |
| Ditjen PKRL | 0 | 98.155.639.556 | (98.155.639.556) | (100,00) |
| **Total** | **2.855.976.110** | **101.011.615.666** | **(98.155.639.556)** | **(97,17)** |

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya mengalami penurunan sebesar 97,17% hal ini disebabkan karena piutang kontribusi tetap dari perikatan kerja sama pemanfaatan (KSP) BMN yang berlokasi di Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan PT SMA pada satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp98.155.639.556,00, sudah

dilakukan jurnal balik karena telah dilakukan pengakhiran perjanjian kerja sama pemanfaatan sebagian BMN berupa tanah sesuai Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PT SMA (KSO) nomor B.2/DJPK/PRL.240/III/2025 dan Nomor 005A/SMAK/III/2025. Sedangkan Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.855.976.110,00 merupakan pembebanan ganti kerugian negara atas pelanggaran kewajiban pegawai tugas belajar atas nama Sdr. GP di satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap.

Adapun kualitas dari saldo piutang Jangka Panjang Lainnya pada masing-masing unit eselon I per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.71**
**Kualitas Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025**

| Unit Eselon I | Saldo | Lancar | Kurang Lancar | Diragukan | Macet |
|---|---|---|---|---|---|
| Ditjen PT | 2.855.976.110 | 0 | 0 | 0 | 2.855.976.110 |
| **Total** | **2.855.976.110** | **0** | **0** | **0** | **2.855.976.110** |

### C.5.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya

*Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp2.855.976.110,00*

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.855.976.110,00 dan Rp505.058.070,00.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.72**
**Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih(Piutang Jangka Panjang Lainnya**
**Pada Masing-masing Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Ditjen PT | (2.855.976.110) | (14.279.881) | (2.841.696.229) | 19.900,00 |
| Ditjen PKRL | 0( | (490.778.189) | 490.778.189 | (100,00) |
| **Total** | **(2.855.976.110)** | **(505.058.070)** | **(2.350.918.040)** | **465,47** |

Saldo penyisihan piutang tidak tertagih mengalami kenaikan sebesar 465,47% disebabkan karena kualitas piutang unit eselon I DJPT mengalami penurunan menjadi macet.

## C.6 Aset Lainnya

*Aset Lainnya Rp1.807.278.142.987,00*

Rincian saldo Aset Lainnya per akun Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.73**
**Rincian Saldo Aset Lainnya Per Akun**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 0 | 103.876.004.000 | (103.876.004.000) | (100,00) |
| Aset Tak Berwujud | 265.007.176.461 | 256.859.024.246 | 8.148.152.215 | 3,17 |
| Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan | 0 | 235.822.950 | (235.822.950) | (100,00) |
| Dana di Rekening Penampungan(Kementerian/Lembaga | 1.609.133.804.062 | 78.880.988.327 | 1.530.252.815.735 | 1.939,95 |
| Aset Lainnya | 416.816.583.236 | 390.301.200.894 | 26.515.382.342 | 6,79 |
| Akm Peny dan Amortisasi Aset Lainnya | (483.679.420.772) | (496.394.725.995) | 12.715.305.223 | (2,56) |
| **Total** | **1.807.278.142.987** | **333.758.314.422** | **1.473.519.828.565** | **441,49** |

Penjelasan Aset Lainnya per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

### C.6.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

*Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0,00*

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan pemanfataan aset melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP) antara KKP dengan PT SMA atas aset yang terdapat di Pulau Nipa, Kota Batam, Prov. Kep. Riau. Kerja sama pemanfaatan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Keuangan melalui surat nomor S(502/MK.6/2013 dengan jangka waktu pemanfataan selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang kembali.

Pada tanggal 16 April 2014 telah ditandatangani akta perjanjian kerjasama dihadapan notaris PH, S.H sehingga perjanjian KSP tersebut dimulai pada tanggal 16 April 2014 dan berakhir pada tanggal 15 April 2043. Ringkasan akta perjanjian kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Objek yang dikerjasamakan terdiri dari:

    a. Tanah sebesar Rp110.346.287.172,00;

    b. Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.107.000,00;

    c. Jalan Khusus Inspeksi senilai Rp13.121.507.000,00;

d. Tanggul Keliling senilai Rp90.754.497.000,00.

2. Penerimaan Langsung untuk Negara

a. Kontribusi tetap sebesar 0,50% dari nilai investasi;

b. Pembagian keuntungan hasil pendapatan KSP Pulau Nipa (paling cepat dimulai pada tahun ke(8);

c. Hibah aset berupa *speed boat* dan kantor terintegrasi beserta *furniture*/peralatan kantor sebesar Rp5.200.000.000,00;

d. Sisa Aset berupa bangunan tangki minyak beserta fasilitas pendukungnya yang akan diterima pada akhir jangka waktu KSP sebesar Rp1.704.073.842.605,00.

Pada tanggal 20 Maret 2025 telah dilakukan pengakhiran perjanjian kerja sama pemanfaatan (KSP) tersebut diatas sesuai Berita Acara nomor B.2/DJPK/PRL.240/III/2025 dan Nomor 005A/SMAK/III/2025

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp103.876.004.000,00. Rincian saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.74**
**Rincian Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Ditjen PK | 0 | 103.876.004.000 | (103.876.004.000) | (100,00) |
| **Total** | **0** | **103.876.004.000** | **(103.876.004.000)** | **(100,00)** |

Ringkasan mutasi akun Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per jenis transaksi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.75**
**Ringkasan Mutasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Per Jenis Transaksi**
**Per 31 Desember 2025**

| Kode Transaksi | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| **Saldo Awal Per 1 Januari 2024** | | **103.876.004.000** |
| **Mutasi Kurang** | | **103.876.004.000** |
| 412 | Perubahan Aset Kemitraan ke BMN | 103.876.004.000 |
| **Saldo Akhir Per 31 Desember 2025** | | **0** |

Mutasi kurang pada akun Kemitraan Dengan Pihak Ketiga hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp103.876.004.000,00 yang merupakan tindak lanjut pengakhiran kerja sama pemanfaatan (KSP).

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2025 (Audited) ini

### C.6.2 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud Rp265.007.176.461,00*

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp265.007.176.461,00 dan Rp256.859.024.246,00. Rincian saldo Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

**Tabel C.76**
**Rincian Saldo Aset Tak Berwujud Per Akun**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Paten | 6.081.970.795 | 6.182.273.163 | (100.302.368) | (1,62) |
| Software | 167.729.915.908 | 156.980.722.508 | 10.749.193.400 | 6,85 |
| Lisensi | 55.350.607.141 | 2.399.752.141 | 52.950.855.000 | 2.206,51 |
| Hasil Kajian/Penelitian | 789.767.000 | 789.767.000 | 0 | 0,00 |
| Aset Tak Berwujud Lainnya | 35.054.915.617 | 90.506.509.434 | (55.451.593.817) | (61,27) |
| **Total** | **265.007.176.461** | **256.859.024.246** | **8.148.152.215** | **3,17** |

Terdapat kenaikan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar 3,17% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan *Sotwfare* dari Perolehan Lainnya.

Pada Tahun 2024 Aset Tak Berwujud yang mengalami kenaikan nilai signifikan adalah Aplikasi STELINA sebesar Rp1.117.536.900,00 pada satker Sekretariat Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP. Sedangkan Aset Tak Berwujud yang mengalami penurunan nilai signifikan adalah *Reconnaissance Kampung Nelayan Merah Putih Reconnaissance Kampung Nelayan Merah Putih* sebesar Rp94.155.709.985,00 pada satker Pusat Data dan Informasi.

Rincian aset tetap berupa Aset Tak Berwujud per akun per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.77**
**Daftar Rinci Aset Tak Berwujud Per Akun**
**Per 31 Desember 2025**

| Nama Akun | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | | Nilai Buku |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Awal | Saldo Akhir | |
| Paten | 6.081.970.795 | 4.458.151.314 | 4.625.264.837 | 1.456.705.958 |
| Software | 167.729.915.908 | 91.693.222.822 | 120.116.200.770 | 47.613.715.138 |
| Lisensi | 55.350.607.141 | 2.141.087.141 | 4.877.894.888 | 50.472.712.253 |
| Hasil Kajian/Penelitian | 789.767.000 | 0 | 0 | 789.767.000 |
| Aset Tak Berwujud Lainnya | 35.054.915.617 | 2.930.639.986 | 4.241.400.563 | 30.813.515.054 |
| **Total** | **265.007.176.461** | **101.223.101.263** | **133.860.761.058** | **131.146.415.403** |

Penjelasan ringkas atas saldo Aset Tetap Tak Berwujud pada masing-masing akun adalah sebagai berikut:

1. Paten

   Aset Tak Berwujud berupa Paten antara lain berupa paten proses pemurnian garam sebesar Rp573.399.400,00, paten berupa buoy untuk pemantauan kualitas air sebesar Rp383.410.800,00, dan paten rumpon eletronik dengan pengamatan langsung sebesar Rp475.398.500,00.

2. *Software*

   Aset Tak Berwujud berupa Software antara lain berupa *software coofis ultimate digital touch point* sebesar Rp14.718.513.147,00; dan *software ultimate* otomasisasi proses bisnis sebesar Rp14.468.513.147,00 dan *portal dan big engine data* sebesar Rp12.900.000.000,00.

3. Lisensi

   Aset Tak Berwujud berupa lisensi antara lain berupa Mudah *Analytic Engine* v2.4 sebesar Rp16.044.587.930,00; Mudah *Storage Engine* v1.4 sebesar Rp8.022.293.966,00 dan Mudah GIS *Engine* v2.1 sebesar Rp12.032.477.309,00.

4. Hasil Kajian/Penelitian

   Aset Tak Berwujud berupa Hasil Kajian/Penelitian antara lain berupa rancang bangun rinci (*Detail Engineering Design*) masing-masing sebesar Rp342.045.000,00 dan Rp447.722.000,00.

5. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset Tak Berwujud berupa Aset Tak Berwujud Lainnya antara lain berupa Data Citra *COSMO-SkyMED 150 Scenes* sebesar Rp7.390.301.414,00; 300 *Scene* Data Radar sebesar Rp3.998.325.000,00 dan Data Radar 350 *Scene* sebesar Rp4.891.984.796,00.

Ringkasan mutasi akun Aset Tak Berwujud per jenis transaksi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.78**
**Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud Per Jenis Transaksi**
**Per 31 Desember 2025**

| Kode Transaksi | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| **Saldo Awal Per 1 Januari 2024** | | **256.859.024.246** |
| **Mutasi Tambah** | | **247.188.146.748** |
| 100 | Saldo Awal | 30.506.400 |
| 101 | Pembelian | 130.758.560.141 |
| 102 | Transfer Masuk | 196.394.000 |
| 105 | Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | 2.559.523.472 |
| 107 | Reklasifikasi Masuk | 52.950.855.000 |
| 112 | Perolehan Lainnya | 47.107.709.985 |
| 113 | Penyelesaian Pembangunan Langsung | 11.266.500.000 |
| 204 | Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah | 495.035.000 |
| 208 | Pengembangan Melalui KDP | 705.525.850 |
| 214 | Koreksi Susulan | 1.117.536.900 |
| **Mutasi Kurang** | | **(239.039.994.533)** |
| 264 | Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang | (94.650.256.735) |
| 302 | Transfer Keluar | (196.394.000) |
| 304 | Reklasifikasi Keluar | (52.950.855.000) |
| 305 | Koreksi Pencatatan | (31.944.127.041) |
| 401 | Penghentian Aset Dari Penggunaan | (59.298.361.757) |
| **Saldo Akhir Per 31 Desember 2025** | | **265.007.176.461** |

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Transaksi Penambahan Saldo Awal hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp30.506.400,00.

2. Transaksi Pembelian terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp99.998.855.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp1.912.259.998,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp28.797.945.143,00 dan

unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp49.500.000,00.

3. Transaksi Transfer Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp196.394.000,00.

4. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.360.833.472,00 dan unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp198.690.000,00.

5. Transaksi Reklasifikasi Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp52.950.855.000,00.

6. Transaksi Perolehan Lainnya hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp47.107.709.985,00.

7. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp11.266.500.000,00.

8. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp98.235.000,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp396.800.000,00.

9. Transaksi Pengembangan Melalui KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp705.525.850,00.

10. Transaksi Koreksi Susulan terdapat hanya pada unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp1.117.536.900,00.

11. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp94.155.709.985,00 dan unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp494.546.750,00.

12. Transaksi Transfer Keluar hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp196.394.000,00.

13. Transaksi Reklasifikasi Keluar hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp52.950.855.000,00.

14. Transaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp1.912.259.998,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp28.797.945.143,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp1.215.771.900,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp18.150.000,00.

15. Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp58.508.686.389,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp100.302.368,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp79.618.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp584.755.000,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp25.000.000,00.

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2025 (*Audited*) ini.

### C.6.3 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

*Aset Tek Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0,00*

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan adalah aset tak berwujud yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp235.822.950,00.

Rincian saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.79**
**Rincian Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan**
**Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 0 | 37.132.950 | (37.132.950) | (100,00) |
| Ditjen PB | 0 | 198.690.000 | (198.690.000) | (100,00) |
| **Total** | **0** | **235.822.950** | **(235.822.950)** | **(100,00)** |

Terdapat penurunan saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu,

yang secara umum disebabkan telah selesainya pembangunan Aset Tak Berwujud.

Ringkasan mutasi akun Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per jenis transaksi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.80**
**Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Per Jenis Transaksi**
**Per 31 Desember 2025**

| Kode Transaksi | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| **Saldo Awal Per 1 Januari 2025** | | **235.822.950** |
| **Mutasi Tambah** | | **18.572.646.086** |
| 502 | Perolehan/Penambahan KDP | 1.601.863.650 |
| 503 | Pengembangan KDP | 1.427.362.722 |
| 504 | Koreksi Nilai KDP Bertambah | 367.562.409 |
| 510 | Perolehan Lainnya KDP | 15.175.857.305 |
| **Mutasi Kurang** | | **(18.808.469.036)** |
| 105 | Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | (2.559.523.472) |
| 208 | Pengembangan Melalui KDP | (705.525.850) |
| 517 | Koreksi Pencatatan KDP | (15.543.419.714) |
| **Saldo Akhir Per 31 Desember 2025** | | **0** |

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Transaksi Perolehan/Penambahan KDP hanya terdapat pada 1 (satu) unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.601.863.650,00.

2. Transaksi Pengembangan KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.427.362.722,00.

3. Transaksi Koreksi Nilai KDP Bertambah hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp367.562.409,00.

4. Trasaksi Perolehan Lainnya KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp15.175.857.305,00.

5. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.360.833.472,00 dan unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp198.690.000,00.

6. Transaksi Pengembangan Melalui KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp705.525.850,00.

7. Trasaksi Perolehan Lainnya KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp15.543.419.714,00.

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2025 (*Audited*) ini.

### C.6.4 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

*Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp1.609.133.804.062,00*

Pemerintah menerapkan pembayaran dengan mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran yang selanjutnya disebut rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) dengan tujuan untuk:

1. Menjaga prinsip “pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN baru dapat dilaksanakan setelah barang/jasa diterima”;

2. Mendukung optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Rekening Penampungan sebagaimana diubah menjadi PMK 116 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran melalui Rekening Penampungan, RPATA digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diserahterimakan pada akhir tahun anggaran. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran hingga batas waktu tertentu (31 Maret).

Sedangkan pekerjaan yang diberikan perpanjangan penyelesaian sampai dengan tanggal 7 Mei 2026 terdapat pada dua eselon I antara lain:

1. Berdasarkan Surat a.n. Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-20/MK/PB/2026 tanggal 2 April 2026 hal Tanggapan Usulan Perpanjangan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk Program Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) senilai Rp33.066.064.199,00 yang dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sambas, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Sumenep.

2. Berdasarkan Surat a.n. Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-18/MK/PB/2026 tanggal 25 Maret 2025 hal Tanggapan Usulan Perpanjangan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk Program Strategis Nasional Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), pekerjaan yang diberikan perpanjangan penyelesaian sampai dengan 7 Mei 2026 yaitu Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao dengan Nomor Kontrak SPK.48/PPK-SDK/PL.450/VIII/2025 senilai Rp657.300.000.000.

Sedangkan ruang lingkup pembayaran atas penyelesaian pekerjaan dengan mekanisme RPATA merupakan pekerjaan yang:

1. Pekerjaan terselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran;

2. Pekerjaan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya; dan

3. Pekerjaan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan tidak diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya berdasarkan keputusan KPA.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.609.133.804.062,00 dan Rp78.880.988.327,00. Rincian saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per akun Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.81**
**Rincian Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Per Akun**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga** | 1.609.133.804.062 | 77.897.445.316 | 1.531.236.358.746 | 1.965,71 |
| **Dana di Rekening Penampungan - BLU** | 0 | 983.543.011 | (983.543.011) | (100,00) |
| **Total** | **1.609.133.804.062** | **78.880.988.327** | **1.530.252.815.735** | **1.939,95** |

Penjelasan Dana Rekening Penampungan – K/L per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

### C.6.4.1 Dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga

Rincian saldo Dana di Rekening Penampungan – Kementerian/Lembaga pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.82**
**Rincian Saldo Dana Rekening Penampungan-K/L**
**Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Setjen** | 109.751.828.196 | 38.456.138.715 | 71.295.689.481 | 185,39 |
| **Ditjen PT** | 719.527.816.579 | 5.472.213.465 | 714.055.603.114 | 13.048,75 |
| **Ditjen PB** | 257.258.170.168 | 8.217.751.805 | 249.040.418.363 | 3.030,52 |
| **Ditjen PSDKP** | 4.416.520.777 | 4.939.898.353 | (523.377.576) | (10,59) |
| **Ditjen PDSPKP** | 2.093.340.182 | 10.939.976.273 | (8.846.636.091) | (80,87) |
| **Ditjen PK** | 508.231.530.903 | 0 | 508.231.530.903 | 0,00 |
| **BPPSDM KP** | 7.458.611.780 | 9.840.539.226 | (2.381.927.446) | (24,21) |
| **BPPMH KP** | 395.985.477 | 30.927.479 | 365.057.998 | 1.180,37 |
| **Total** | **1.609.133.804.062** | **77.897.445.316** | **1.531.236.358.746** | **1.965,71** |

Terdapat kenaikan Dana di Rekening Penampungan – Kementerian/Lembaga sebesar 1.965,71% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan adanya pelaksananan program Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap, program Budidaya Ikan Nila Salin unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya dan pelaksananan program intensifikasi dan ekstensifikasi produksi garam pada Ditjen Pengelolaan Kelautan.

Ringkasan dan mutasi Dana Rekening Penampungan(K/L per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.83**
**Ringkasan dan Mutasi Dana di Rekening Penampungan**
**Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025**

| Unit Eselon I | Nilai RPATA | | Mutasi | | | Saldo RPATA 31 Desember 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | Nilai | Jumlah | Pembayaran s.d. 31 Desember 2025 | Penihilan | Jumlah | Nilai |
| **Setjen** | 8 | 109.751.828.196 | | | | 8 | 109.751.828.196 |
| **Ditjen PT** | 184 | 722.733.912.208 | 24 | 3.206.095.629 | | 160 | 719.527.816.579 |
| **Ditjen PB** | 135 | 269.502.258.567 | 30 | 12.244.088.399 | | 105 | 257.258.170.168 |
| **Ditjen PSDKP** | 17 | 50.282.861.402 | 9 | 45.866.340.625 | | 8 | 4.416.520.777 |

| Unit Eselon I | Nilai RPATA | | Mutasi | | | Saldo RPATA 31 Desember 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | Nilai | Jumlah | Pembayaran s.d. 31 Desember 2025 | Penihilan | Jumlah | Nilai |
| Ditjen PDSPKP | 6 | 3.120.796.413 | 2 | 1.027.456.231 | | 4 | 2.093.340.182 |
| Ditjen PK | 136 | 520.728.189.537 | 23 | 11.990.002.634 | 506.656.000 | 113 | 508.231.530.903 |
| BPPSDM KP | 33 | 12.626.028.676 | 13 | 5.088.191.985 | 79.224.911 | 20 | 7.458.611.780 |
| BPPMH KP | 16 | 5.343.073.860 | 6 | 4.947.088.383 | | 10 | 395.985.477 |
| **Total** | **535** | **1.694.088.948.859** | **107** | **84.369.263.886** | **585.880.911** | **428** | **1.609.133.804.062** |

Dari saldo akhir tersebut diatas, terdapat pekerjaan yang telah selesai pada tanggal 31 Desember 2025 namun pembayarannya dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel C. 84**
**Ringkasan Penyelesaian RPATA Tanpa Pemberian Perpanjangan Penyelesaian Pekerjaan Pada Masing-masing Unit Eselon I Per 8 Mei 2026**

| Unit Eselon I | Saldo RPATA 31 Desember 2025 | | Mutasi | | | Saldo RPATA Akhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | Nilai | Jumlah | Pembayaran | Penihilan | Jumlah | Nilai |
| Setjen | 8 | 109.751.828.196 | 8 | 109.750.986.394 | 841.802 | 0 | 0 |
| Ditjen PT | 160 | 719.527.816.579 | 59 | 37.334.766.942 | 3.756.371.528 | 101 | 678.436.678.109 |
| Ditjen PB | 105 | 257.258.170.168 | 96 | 97.304.811.640 | 507.443.718 | 9 | 159.445.914.810 |
| Ditjen PSDKP | 8 | 4.416.520.777 | 8 | 4.396.303.777 | 20.217.000 | 0 | 0 |
| Ditjen PDSPKP | 4 | 2.093.340.182 | 4 | 2.093.340.182 | | 0 | 0 |
| Ditjen PK | 113 | 508.231.530.903 | 103 | 71.579.967.960 | 3.918.264.636 | 10 | 432.733.298.307 |
| BPPSDM KP | 20 | 7.458.611.780 | 20 | 6.288.209.220 | 1.170.402.560 | 0 | 0 |
| BPPMH KP | 10 | 395.985.477 | 10 | 395.985.477 | | 0 | 0 |
| **Total** | **428** | **1.609.133.804.062** | **308** | **329.144.371.592** | **9.373.541.244** | **120** | **1.270.615.891.226** |

Sedangkan penyelesaian pekerjaan di atas 31 Desember 2025 yang dibayarkan melalui RPATA pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

**Tabel C.85**
**Ringkasan Penyelesaian RPATA yang Diselesaikan pada Tahun 2026 Pada Masing-masing Unit Eselon I Per 8 Mei 2026**

| Unit Eselon I | Saldo RPATA Akhir | | Mutasi | | | Saldo RPATA per 8 Mei 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | Nilai | Jumlah | Pembayaran | Penihilan | Jumlah | Nilai |
| Ditjen PT | 101 | 678.436.678.109 | 101 | 676.625.711.596 | 1.810.966.513 | 0 | 0 |
| Ditjen PB | 9 | 159.445.914.810 | 9 | 159.445.914.810 | | 0 | 0 |
| Ditjen PK | 10 | 432.733.298.307 | 10 | 432.733.298.307 | | 0 | 0 |
| **Total** | **120** | **1.270.615.891.226** | **120** | **1.268.804.924.713** | **1.810.966.513** | **0** | **0** |

Sedangkan pekerjaan yang diberikan perpanjangan penyelesaian sampai dengan tanggal 7 Mei 2026 terdapat pada dua eselon I antara lain:

1. Berdasarkan Surat a.n. Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-20/MK/PB/2026 tanggal 2 April 2026 hal Tanggapan Usulan Perpanjangan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk Program Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) senilai Rp33.066.064.199,00 yang dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sambas, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Sumenep.

2. Berdasarkan Surat a.n. Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-18/MK/PB/2026 tanggal 25 Maret 2025 hal Tanggapan Usulan Perpanjangan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk Program Strategis Nasional Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), pekerjaan yang diberikan perpanjangan penyelesaian sampai dengan 7 Mei 2026 yaitu Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao dengan Nomor Kontrak SPK.48/PPK-SDK/PL.450/VIII/2025 senilai Rp657.300.000.000.

Selain itu terdapat denda keterlambatan pekerjaan Rancang Bangun K-SIGN karena pihak penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir kontrak. Progres Fisik Pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 77,8645% sehingga sisa persentase pekerjaan fisik sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 22,1355%. Denda keterlambatan terhitung:

1. Sebanyak 60 hari dari nilai sisa pekerjaan dikalikan dengan 0,1% atau sebesar Rp7.864.676.768,54. Adapun Perhitungan denda keterlambatan ini berdasarkan surat penyampaian perhitungan denda keterlambatan dari Manajemen Konstruksi PT. Agrinas Pangan Nusantara Nomor 27.01/MK.APN/K-SIGN.II/IV/2026 tanggal 27 April 2026. Perhitungan denda tersebut juga mengacu pada Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.152/MEN-KP/III/2026 tanggal 10 Maret 2026 hal Usulan Perpanjangan RPATA untuk PSN K-Sign dilakukan dengan pertimbangan bahwa keterlambatan penyelesaian lahan K-Sign tidak sepenuhnya merupakan kesalahan penyedia, mengingat terdapat faktor keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kendala cuaca yang termasuk kategori force majeure sehingga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberikan kesempatan perpanjangan waktu.

2. Penambahan denda keterlambatan Pekerjaan K-Sign selama 6 hari dari tanggal 1 s.d. 6 Mei 2026 sesuai BA Kesepakatan Pembayaran denda Nomor BAPD.10/PPK-SDK/PL.450/V/2026 tanggal 7 Mei 2026 dan Surat PPK Satker Serketariat DJPKRL Nomor 1262/DJPK.1/PPK/V/2026 tanggal 7 Mei 2026 hal Penambahan Denda sebesar Rp786.468.332,43.

Sedangkan atas pekerjaan KNMP pada 65 lokasi, terdapat denda keterlambatan dari pekerjaan yang diselesaikan melalui RPATA sebesar Rp14.491.043.857,00 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut.

1. Kapal Penangkapan ikan < 5 GT sebesar Rp18.689.102,00
2. Konstruksi sebesar Rp12.411.183.054,00
3. Meubelair sebesar Rp248.634.240,00
4. Rantai Dingin sebesar Rp1.812.537.461,00

Dari seluruh denda tersebut, terdapat pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan 30 April 2026 dengan jumlah denda sebesar Rp3.549.267.720,00 yang berasal dari lima pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan dengan mekanisme pembayaran melalui RPATA terbesar adalah sebagai berikut:

1. Rancang dan bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K(SIGN) di Kab. Rote Ndao, Prov Nusa Tenggara Timur pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp394.380.000.000,00;
2. Rancang dan bangun Modeling Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) di Karawang, Prov Jawa Barat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp143.315.125.460,00;
3. Pembuatan *Reconnaissance* Kampung Nelayan Merah Putih pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp99.998.855.000,00;
4. Pengadaan Gudang Beku Portable paket I pada Kampung Nelayan Merah Putih pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp55.164.000.000,00;
5. Pembangunan (Konstruksi) Kampung Nelayan Merah Putih di Kab. Bantul Prov DI Yogyakarta, Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, Kab. Karangasem Prov. Bali, Kota Batam Prov. Kep. Riau dan Kota Takalar Prov. Kalimnatan Utara pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp49.292.843.000,00

Penjelasan pembayaran pekerjaan TA 2025 yang melalui mekanisme RPATA pada masing-masing unit Eselon I dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2025 (*Audited*) ini.

### C.6.4.2 Dana di Rekening Penampungan-BLU

Saldo Dana di Rekening Penampungan(BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp983.543.011,00.

Saldo Dana di Rekening Penampungan(BLU per 31 Desember 2024 hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP yang merupakan pembangunan Asrama Permanen sebesar Rp983.543.011,00.

### C.6.5 Aset Lain-lain

*Aset Lain-Lain Rp416.816.583.236,00*

Aset lain-lain merupakan aset yang tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan yang dapat disebabkan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai kebutuhan organisasi, rusak berat atau masa kegunaannya telah berakhir. Aset tetap yang secara permanen dihentikan dari penggunaan aktif harus dieliminasi dari neraca. Jenis eliminasi yang paling banyak dilakukan adalah dengan cara menghapus bukukan aset tersebut, tetapi apabila aset tersebut masih bernilai ekonomis dapat memilih jenis eliminasi lain yang dapat berupa namun tidak terbatas pada transfer keluar atau hibah keluar kepada entitas lain yang membutuhkan.

Sesuai surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Ditjen Kekayaan Negara, Kemkeu nomor S(186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat K/L Tahun 2025, Konstruksi Dalam Pengerjaan yang status pembangunannya dihentikan sementara disajikan pada Aset Lainnya sebesar niai tercatatnya.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp416.816.583.236,00 dan Rp390.301.200.894,00. Rincian saldo aset lain-lain pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.86**
**Rincian Saldo Aset Lain-lain Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Setjen** | 1.421.608.985 | 285.290.470 | 1.136.318.515 | 398,30 |
| **Itjen** | 90.393.523 | 1.896.711.324 | (1.806.317.801) | (95,23) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ditjen PT** | 177.531.048.845 | 154.494.387.263 | 23.036.661.582 | 14,91 |
| **Ditjen PB** | 132.565.448.459 | 149.285.521.241 | (16.720.072.782) | (11,20) |
| **Ditjen PSDKP** | 9.341.576.886 | 15.714.299.564 | (6.372.722.678) | (40,55) |
| **Ditjen PDSPKP** | 553.507.594 | 5.272.956.483 | (4.719.448.889) | (89,50) |
| **Ditjen PK** | 14.541.169.791 | 13.782.435.459 | 758.734.332 | 5,51 |
| **BPPSDM KP** | 80.771.829.153 | 49.569.599.090 | 31.202.230.063 | 62,95 |
| **Total** | **416.816.583.236** | **390.301.200.894** | **26.515.382.342** | **6,79** |

Terdapat kenaikan saldo Aset Lain-lain sebesar 6,79% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan turunnya nilai Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan.

Penjelasan ringkas atas saldo Aset Lain-lain pada beberapa unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Aset Lain-lain pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal antara lain merupakan KDP yang Dihentikan Pembangunannya pada satker Biro Umum berupa pekerjaan jasa konsultan perencanaan galeri foto Menteri Kelauran dan Perikanan Gd. Mina Bahari I lantai *ground floor* sebesar Rp79.209.600,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

   Aset Lain-lain pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap antara lain berupa pencatatan aset eks dana bergulir program pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil (PUPTSK) tahun 2003 s.d. 2005 berdasarkan BAST nomor KPB.1794/DJPT.1/PL.450/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 antara Ditjen Perikanan Tangkap dan Perikanan dengan Ditjen Kekayaaan Negara. Penjelasan terkait aset eks dana bergulir kami jelaskan lebih lanjut pada Pengungkapan Lainnya.

3. Ditjen Perikanan Budidaya

   Aset Lain-lain pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya antara lain berupa BMN Eks pembangunan Keramba Jaring Apung Lepas Pantai (KJA *Offshore*). Pembangunan KJA *Offshore* tersebut diklasifikasikan sebagai Aset Lain-lain karena sebagian besar komponen dari 3 (tiga) unit KJA *Offshore* yang berlokasi di Sabang, Karimun Jawa dan Pangandaran mengalami kerusakan sehingga secara fungsional tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan semula tetapi masih mungkin dimanfaatkan untuk tujuan yang lain dengan pengadaan sarana dan prasarana lain. Penjelasan terkait aset eks KJA Offshore kami jelaskan lebih lanjut pada

Pengungkapan Lainnya. Selain itu juga terdapat KDP yang Dihentikan Pembangunannya pada satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon berupa perencanaan Renovasi Gd. *Hatchery* 4 sebesar Rp44.677.200,00.

4. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP

Aset Lain-lain pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP antara lain merupakan KDP yang Dihentikan Pembangunannya pada satker Pangkalan PSDKP Lampulo berupa perencanaan penataan lingkungan komplek satwas SDKP Kab. Aceh Barat sebesar Rp10.000.000,00; satker Pangkalan PSDKP Benoa berupa pembangunan kantor Saba sebesar Rp98.068.500,00 dan satker Staisun PSDKP Tarakan berupa konsultan perencanaan bangunan kantor Kota Baru sebesar Rp99.991.575,00.

Rincian Aset Lain-lain berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan per golongan barang per per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.87**
**Rincian Aset Tetap Lain-lain Per Golongan Barang**
**Per 31 Desember 2025**

| No. | Golongan Barang | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Tanah | 12.321.000 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 264.058.067.951 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 54.904.158.246 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 75.035.474.849 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 1.758.628.652 |
| 6 | Aset Tak Berwujud | 20.715.985.663 |
| **Total** | | **416.484.636.361** |

Ringkasan mutasi akun Aset Lain-lain per jenis transaksi per per 31 Desember 2025 kami sajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel C.88**
**Ringkasan Mutasi Aset Lain-lain Per Jenis Transaksi**
**Per 31 Desember 2025**

| Kode Transaksi | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| **Saldo Awal Per 1 Januari 2024** | | **390.301.200.894** |
| **Mutasi Tambah** | | **302.577.490.699** |
| **192** | Transfer Masuk (Henti Guna) | 1.753.764.675 |
| **401** | Penghentiaan Aset Dari Penggunaan | 292.296.175.401 |
| **912** | Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan | 8.527.550.623 |
| **Mutasi Kurang** | | **(276.394.055.232)** |

| | | |
|---|---|---|
| **301** | Penghapusan | (405.015.160) |
| **312** | Likuidasi Keluar Henti Guna | (23.425.000) |
| **392** | Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan) | (1.730.339.675) |
| **393** | Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan) | (930.313.250) |
| **402** | Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif | (8.886.120.001) |
| **911** | Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan | (264.418.842.146) |
| **Saldo Akhir Per 31 Desember 2025** | | **416.484.636.361** |

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Transaksi Transfer Masuk (Henti Guna) terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp23.425.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.717.841.675,00 dan unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp12.498.000,00.

2. Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan terdapat pada 9 (sembilan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp70.873.235.389,00; unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp90.393.523,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp78.389.565.198,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp17.614.269.911,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp18.426.347.608,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp17.483.179.217,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp7.804.925.326,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp66.071.565.042,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp15.542.694.187,00.

3. Transaksi Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp432.263.040,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp5.456.244.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp385.423.510,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp2.148.466.073,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp105.154.000,00.

4. Transaksi Penghapusan terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.307.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp400.434.000,00 dan unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp274.160,00.

5. Transaksi Likuidasi Keluar Henti Guna hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp23.425.000,00.

6. Transaksi Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan) terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.717.841.675,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp12.498.000,00.

7. Transaksi Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan) hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp930.313.250,00.

8. Transaksi Penggunaan Kembali BMN yang sudah Dihentikan Penggunaan Aktif terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.366.881.095,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp557.671.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp347.390.900,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp2.447.523.185,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp276.661.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp2.045.475.500,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp844.517.321,00.

9. Transaksi Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan terdapat pada 9 (sembilan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp67.444.938.379,00; unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp1.896.711.324,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp54.827.061.656,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp38.557.285.583,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp22.945.030.686,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp22.202.628.106,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp6.782.027.994,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp34.959.827.552,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp14.803.330.866,00.

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Aset Lain-lain dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2025 (*Audited*) ini.

### C.6.6 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya Rp483.679.420.772,00*

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain merupakan kontra akun aset lain yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp483.679.420.772,00 dan Rp496.394.725.995,00.

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain per akun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.89**
**Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**
**Per Akun Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | (Kenaikan) Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|
| **Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga** | 0 | (46.557.374.318) | 46.557.374.318 | (100,00) |
| **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan** | (330.694.975.683) | (329.578.974.304) | (1.116.001.379) | 0,34 |
| **Akumulasi Amortisasi Hak Cipta** | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Akumulasi Amortisasi Paten** | (4.625.264.837) | (4.458.151.314) | (167.113.523) | 3,75 |
| **Akumulasi Amortisasi Software** | (120.116.200.770) | (91.693.222.822) | (28.422.977.948) | 31,00 |
| **Akumulasi Amortisasi Lisensi** | (4.877.894.888) | (2.141.087.141) | (2.736.807.747) | 127,82 |
| **Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya** | (4.241.400.563) | (2.930.639.986) | (1.310.760.577) | 44,73 |
| **Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan** | (19.123.684.031) | (19.035.276.110) | (88.407.921) | 0,46 |
| **Total** | **(483.679.420.772)** | **(496.394.725.995)** | **12.715.305.223** | **(2,56)** |

Ringkasan nilai peyusutan dan amortisasi Aset Lainnya per akun per bidang barang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.90**
**Ringkasan Nilai Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per Akun Per Bidang Barang**
**Per 31 Desember 2025**

| Nama Akun serta Kode dan Nama Bidang | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | | Nilai Buku |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Awal | Saldo Akhir | |
| **Kemitraan Dengan Pihak Ketiga** | **0** | **46.557.374.318** | **0** | **0** |
| **501-Jalan Dan Jembatan** | 0 | 13.121.507.000 | 0 | 0 |
| **502-Bangunan Air** | 0 | 33.435.867.318 | 0 | 0 |

| Nama Akun serta Kode dan Nama Bidang | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | | Nilai Buku |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Awal | Saldo Akhir | |
| **Paten** | **6.081.970.795** | **4.458.151.314** | **4.625.264.837** | **1.456.705.958** |
| **801-Aset Tak Berwujud** | 6.081.970.795 | 4.458.151.314 | 4.625.264.837 | 1.456.705.958 |
| **Software** | **167.729.915.908** | **91.693.222.822** | **120.116.200.770** | **47.613.715.138** |
| **801-Aset Tak Berwujud** | 167.729.915.908 | 91.693.222.822 | 120.116.200.770 | 47.613.715.138 |
| **Lisensi** | **55.350.607.141** | **2.141.087.141** | **4.877.894.888** | **50.472.712.253** |
| **801-Aset Tak Berwujud** | 55.350.607.141 | 2.141.087.141 | 4.877.894.888 | 50.472.712.253 |
| **Hasil Kajian/Penelitian** | **789.767.000** | **0** | **0** | **789.767.000** |
| **801-Aset Tak Berwujud** | 789.767.000 | 0 | 0 | 789.767.000 |
| **Aset Tak Berwujud Lainnya** | **35.054.915.617** | **2.930.639.986** | **4.241.400.563** | **30.813.515.054** |
| **801-Aset Tak Berwujud** | 35.054.915.617 | 2.930.639.986 | 4.241.400.563 | 30.813.515.054 |
| **Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi** | **395.768.650.698** | **329.578.974.304** | **330.694.975.683** | **65.073.675.015** |
| **201-Tanah** | 12.321.000 | 0 | 0 | 12.321.000 |
| **301-Alat Besar** | 85.204.861.339 | 124.037.397.997 | 85.187.586.655 | 17.274.684 |
| **302-Alat Angkutan** | 55.202.018.660 | 54.014.659.141 | 52.567.324.558 | 2.634.694.102 |
| **303-Alat Bengkel Dan Alat Ukur** | 2.754.659.085 | 2.452.904.431 | 2.752.883.085 | 1.776.000 |
| **304-Alat Pertanian** | 30.293.644.374 | 30.091.793.425 | 30.293.644.374 | 0 |
| **305-Alat Kantor & Rumah Tangga** | 14.495.026.318 | 18.378.718.929 | 14.491.542.526 | 3.483.792 |
| **306-Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar** | 14.252.442.851 | 16.016.996.950 | 13.964.576.006 | 287.866.845 |
| **307-Alat Kedokteran Dan Kesehatan** | 543.918.528 | 557.822.772 | 543.918.528 | 0 |
| **308-Alat Laboratorium** | 34.483.560.221 | 20.580.413.972 | 34.398.939.596 | 84.620.625 |
| **309-Alat Persenjataan** | 209.621.300 | 205.337.500 | 209.621.300 | 0 |
| **310-Komputer** | 20.928.116.264 | 22.713.548.006 | 20.925.866.264 | 2.250.000 |
| **311-Alat Eksplorasi** | 50.552.000 | 109.371.503 | 50.552.000 | 0 |
| **312-Alat Pengeboran** | 2.446.463.924 | 1.928.704.952 | 2.089.244.334 | 357.219.590 |
| **313-Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian** | 67.112.500 | 67.112.500 | 67.112.500 | 0 |
| **314-Alat Bantu Eksplorasi** | 57.442.000 | 62.141.482 | 57.442.000 | 0 |
| **315-Alat Keselamatan Kerja** | 1.802.793.790 | 1.708.851.276 | 1.802.793.790 | 0 |
| **316-Alat Peraga** | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| **317-Peralatan Proses/Produksi** | 979.466.353 | 1.768.946.284 | 966.658.858 | 12.807.495 |
| **318-Rambu - Rambu** | 0 | 8.532.166 | 0 | 0 |
| **319-Peralatan Olah Raga** | 281.368.444 | 302.288.444 | 281.368.444 | 0 |
| **401-Bangunan Gedung** | 52.065.024.576 | 10.359.210.085 | 15.863.737.207 | 36.201.287.369 |
| **403-Bangunan Menara** | 31.650.000 | 156.803.476 | 16.352.500 | 15.297.500 |
| **404-Tugu Titik Kontrol/Pasti** | 2.807.483.670 | 986.386.760 | 1.071.952.222 | 1.735.531.448 |
| **501-Jalan Dan Jembatan** | 36.929.614.213 | 8.576.940.171 | 22.243.398.830 | 14.686.215.383 |
| **502-Bangunan Air** | 31.163.181.714 | 12.681.857.417 | 26.742.780.951 | 4.420.400.763 |
| **503-Instalasi** | 6.297.580.697 | 1.398.177.023 | 3.072.468.306 | 3.225.112.391 |
| **504-Jaringan** | 645.098.225 | 395.057.642 | 496.960.847 | 148.137.378 |
| **601-Bahan Perpustakaan** | 1.146.579.650 | 0 | 0 | 1.146.579.650 |

| Nama Akun serta Kode dan Nama Bidang | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | | Nilai Buku |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Awal | Saldo Akhir | |
| **602-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga** | 612.049.002 | 19.000.000 | 531.250.002 | 80.799.000 |
| **Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan** | **20.715.985.663** | **19.035.276.110** | **19.123.684.031** | **1.592.301.632** |
| **801-Aset Tak Berwujud** | 20.715.985.663 | 19.035.276.110 | 19.123.684.031 | 1.592.301.632 |
| **Total** | **681.491.812.822** | **496.394.725.995** | **483.679.420.772** | **197.812.392.050** |

## C.7 Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka Pendek Rp1.061.830.393.537,00*

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.603.976.316.252,00 dan Rp104.869.850.410,00.

Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per akun Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.91**
**Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per Akun**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Utang Kepada Pihak Ketiga** | 1.043.576.675.989 | 94.174.913.102 | 949.401.762.887 | 1.008,13 |
| **Hibah Langsung Belum Disahkan** | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan** | 0 | 44.885.401 | (44.885.401) | (100,00) |
| **Pendapatan Diterima Dimuka** | 18.158.167.776 | 10.255.464.006 | 7.902.703.770 | 77,06 |
| **Uang Muka Dari KPPN** | 67.600.000 | 215.583.279 | (147.983.279) | (68,64) |
| **Utang Jangka Pendek Lainnya** | 27.949.772 | 179.004.622 | (151.054.850) | (84,39) |
| **Total** | **1.061.830.393.537** | **104.869.850.410** | **956.960.543.127** | **912,52** |

Penjelasan Kewajiban Jangka Pendek per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

### C.7.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada Pihak Ketiga Rp1.043.576.675.989,00*

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.043.576.675.989,00 dan Rp94.174.913.102,00.

Rincian saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per akun adalah sebagai berikut:

**Tabel C.92**
**Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Per Akun**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar | 405.436.395 | 1.241.962.086 | (836.525.691) | (67,36) |
| Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar | 107.732.898.673 | 12.891.580.576 | 94.841.318.097 | 735,68 |
| Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar | 627.972.003 | 0 | 627.972.003 | 0,00 |
| Utang kepada Pihak Ketiga BLU | 0 | 210.963.000 | (210.963.000) | (100,00) |
| Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya | 932.870.760.328 | 68.658.285.944 | 864.212.474.384 | 1.258,72 |
| Dana Pihak Ketiga | 1.488.047.396 | 1.488.047.396 | 0 | 0,00 |
| Dana Pihak Ketiga BLU | 451.561.194 | 9.684.074.100 | (9.232.512.906) | (95,34) |
| **Total** | **1.043.576.675.989** | **94.174.913.102** | **949.401.762.887** | **1.008,13** |

Penjelasan Utang Kepada Pihak Ketiga per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

### C.7.1.1 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

Saldo per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp405.436.395,00 dan Rp1.241.962.086,00.

Rincian saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.93**
**Rincian Saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar**
**Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 22.330.549 | 0 | 22.330.549 | 0,00 |
| Itjen | 0 | 13.085.494 | (13.085.494) | (100,00) |
| Ditjen PT | 205.393.435 | 315.182.361 | (109.788.926) | (34,83) |
| Ditjen PB | 54.588.000 | 228.879.584 | (174.291.584) | (76,15) |
| Ditjen PSDKP | 19.469.137 | 72.258.191 | (52.789.054) | (73,06) |
| Ditjen PDSPKP | 0 | 3.200.000 | (3.200.000) | (100,00) |

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Ditjen PK** | 0 | 38.164.098 | (38.164.098) | (100,00) |
| **BPPSDM KP** | 58.173.058 | 289.382.260 | (231.209.202) | (79,90) |
| **BPPMH KP** | 45.482.216 | 281.810.098 | (236.327.882) | (83,86) |
| **Total** | **405.436.395** | **1.241.962.086** | **(836.525.691)** | **(67,36)** |

Terdapat penurunan saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar sebesar 67,36% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan oleh menurunnya jumlah satker yang mempunyai Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar.

Penjelasan ringkas atas saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal

   Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada Sekretaris Jenderal hanya terdapat pada satker BPISD KP yang merupakan belanja gaji pokok ASN dan tunjangan ASN yang belum dibayar sebesar Rp22.330.549,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

   Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada 3 (tiga) satker yaitu sebagai berikut:

   a. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

      Merupakan uang makan PNS yang belum dibayar sebesar Rp138.569.000,00.

   b. PPS Bungus

      Merupakan Tujangan Kinerja PNS yang belum dibayar sebesar Rp7.385.335,00.

   c. PPN Kejawanan

      Merupakan tunjangan uang makan PNS dan tunjangan kinerja P3K yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp738.150,00 dan Rp58.700.950,00.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada Ditjen Perikanan Budi Daya hanya terdapat pada satker BPBL Ambon yang merupakan uang makan PNS dan P3K periode Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp33.993.000,00 dan sebesar Rp20.595.000,00.

4. Ditjen Perikanan Pengawasan dan Sumber Daya KP

   Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada Ditjen Perikanan Pengawasan dan Sumber Daya KP terdapat pada 4 (empat) satker yaitu sebagai berikut:

   a. Stasiun PSDKP Ambon

      Merupakan tunjangan uang makan P3K yang belum dibayar sebesar Rp777.000,00.

   b. Stasiun PSDKP Biak

      Merupakan tunjangan umum PNS dan tunjangan kinerja PNS yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp555.150,00 dan Rp1.957.925,00.

   c. Pangkalan PSDKP Bitung

      Merupakan gaji dan tunjangan kinerja PNS yang belum dibayar sebesar Rp13.102.370,00.

   d. Pangkalan PSDKP Tual

      Merupakan tunjangan kinerja P3K yang belum dibayar sebesar Rp3.076.692,00.

5. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

   Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 2 (dua) satker yaitu sebagai berikut:

   a. BRPPUPP Palembang

      Merupakan uang makan PNS dan P3K periode Desember 2024 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp34.119.000,00 dan Rp21.334.000,00.

   b. Balai KIPM Denpasar

Merupakan gaji dan tunjangan PNS yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp869.538,00 dan Rp1.850.520,00..

6. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP terdapat pada 4 (empat) satker yaitu sebagai berikut:

c. Balai Besar KIPM Makassar

Merupakan tunjangan kinerja yang belum dibayar sebesar Rp33.254.400,00.

d. Balai KIPM Denpasar

Merupakan tunjangan kinerja P3K yang belum dibayar sebesar Rp4.595.150,00.

e. Balai KIPM Jayapura

Merupakan tunjangan kinerja P3K yang belum dibayar sebesar Rp6.340.850,00.

f. Balai KIPM Semarang

Merupakan belanja pegawai Tahun 2024 yang belum dibayar sebesar Rp1.291.816,00.

### C.7.1.2 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp107.732.898.673,00 dan Rp12.891.580.576,00.

Rincian saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.94**
**Rincian Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar**
**Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Setjen** | 3.857.171.746 | 2.097.877.322 | 1.759.294.424 | 83,86 |
| **Ditjen PT** | 89.676.634.146 | 1.938.147.098 | 87.738.487.048 | 4.526,93 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ditjen PB** | 2.572.003.341 | 2.793.243.161 | (221.239.820) | (7,92) |
| **Ditjen PSDKP** | 9.002.440.305 | 2.033.624.497 | 6.968.815.808 | 342,68 |
| **Ditjen PDSPKP** | 152.660.470 | 570.976.670 | (418.316.200) | (73,26) |
| **Ditjen PK** | 311.600.869 | 736.208.679 | (424.607.810) | (57,67) |
| **BPPSDM KP** | 1.550.295.137 | 2.004.007.533 | (453.712.396) | (22,64) |
| **BPPMH KP** | 610.092.659 | 717.495.616 | (107.402.957) | (14,97) |
| **Total** | **107.732.898.673** | **12.891.580.576** | **94.841.318.097** | **735,68** |

Terdapat kenaikan saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar sebesar 735,68% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan ada tunggakan pengadaan terkait Kampung Nelayan Merah Putih dan tunggakan BBM kapal Pengawas.

Penjelasan ringkas atas saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal terdapat pada 2 (dua) satker yaitu sebagai berikut:

   a. Biro Umum

      Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada satker Biro Umum terdiri dari:

      1) Biaya air, listrik dan telepon kantor pusat KKP bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp1.870.858.941,00; Rp115.643.471,00; dan Rp14.399.750,00;

      2) Tunggakan Belanja Bahan, Belanja Barang, Belanja Sewa dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2025 masing-masing sebesar Rp567.646.622,00; Rp343.514.955,00; Rp99.383.073,00 dan Rp983.888.591,00.

         Atas tunggakan tersebut diatas telah dilakukan reviu pembayaran tunggakan oleh Inspektorat Jenderal dengan laporan nomor T.56/ITJ.1/HP.320/II/2026 tanggal 3 Februari 2026.

   b. Balai Pengelola Informasi Sumber Daya KP

      Merupakan biaya telepon, listrik dan air bulan Desember 2025 masing-masing sebesar Rp85.248,00; Rp54.182.043,00; dan Rp7.229.000,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Perikanan terdapat pada 24 (dua puluh empat) satker yaitu sebagai berikut:

a. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap terdiri dari:

1) Biaya listrik dan internet bulan Desember 2025 sebesar Rp256.851.047,00;

2) Tunggakan biaya konsultan pengawas proyek Koperasi Nelayan Merah Putih di Desa Sungsang IV, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatra Selatan sebesar Rp79.403.200,00

3) Tunggakan biaya konsultan perencana pengembangan PPN Tegalsari sebesar Rp98.799.700,00

4) Tunggakan non biaya utilitas dengan jumlah Rp200 juta s.d Rp2 milyar yaitu sebagai berikut:

a) Tunggakan biaya pengadaan mesin kapal penangkap ikan sebesar Rp526.602.992,00;

b) Tunggakan biaya pembuatan video *podcast* dan perluasan publikasi capaian kinerja Kampung Nelayan Merah Putih sebesar Rp1.190.000.000,00;

c) Tunggakan biaya pembuatan *company profile* dan *web series* Kampung Nelayan Merah Putih sebesar Rp1.190.142.000,00.

Atas tunggakan tersebut diatas telah dilakukan reviu pembayaran tunggakan oleh Inspektorat Jenderal dengan laporan nomor T.188/ITJ.2/HP.380/IV/2026 tanggal 9 April 2026.

5) Tunggakan non biaya utilitas dengan jumlah diatas Rp2 milyar yaitu sebagai berikut:

a) Tunggakan biaya pengadaan *cool box* Kampung Nelayan Merah Putih sebesar Rp3.443.220.000,00;

b) Tunggakan biaya pembuatan gudang beku portable Kampung Nelayan Merah Putih sebesar Rp18.157.713.000,00

c) Tunggakan biaya pembuatan pabrik es portable sebesar Rp63.372.960.000,00.

Atas tunggakan terkait Kampung Nelayan Merah Putih diatas, KKP telah mengajukan permohonan reviu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan nomor B.743/SJ.2/TU.210/III/2026 tanggal 3 Maret 2026.

b. PPN Brondong

Merupakan biaya listrik, air dan telepon bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp96.539.573,00; Rp28.922.900,00; dan Rp4.164.689,00.

c. PPS Bungus

Merupakan biaya listrik dan telepon yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp90.567.368,00 dan Rp13.875.000,00.

d. PPS Nizam Zachman

Merupakan biaya listrik dan air yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp120.059.971,00 dan Rp35.990.129,00.

e. PPN Kejawanan

Merupakan biaya listrik, telepon, air dan jasa lainnya bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp54.943.023,00; Rp40.987,00; Rp53.996.880,00 dan Rp4.926.180,00.

f. Satker Lainnya

Merupakan belanja barang Tahun 2024 yang belum dibayar pada 19 (sembilan belas) satker sebesar Rp856.910.507,00.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat pada 15 (lima belas) satker yaitu sebagai berikut:

a. BBPBAT Sukabumi

Merupakan biaya telepon, listrik dan internet bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp138.639,00; Rp121.340.135,00 dan Rp6.967.480,00.

b. BBPBAP Jepara

Merupakan biaya listrik, telepon dan internet bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp175.264.304,00; Rp77.521,00 dan Rp5.550.000,00.

c. BBPBL Lampung

Merupakan biaya listrik dan telepon bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp149.435.736,00 dan Rp3.097.174,00.

d. BLUPPB Karawang

Merupakan biaya listrik dan internet periode Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp700.210.560,00 dan Rp2.750.000,00.

e. BPIU2K Karangasem

Merupakan biaya listrik dan telepon bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp127.307.999,00 dan Rp379.900,00.

f. BPBAP Situbondo

Merupakan biaya listrik dan telepon bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp192.056.405,00 dan Rp6.286.230,00.

g. BPBL Batam

Merupakan biaya listrik periode Desember 2024 sebesar Rp140.007.777,00.

h. BPBAP Takalar

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada satker BPBAP Takalar terdiri dari:

1) Biaya listrik dan telepon bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp147.832.829,00 dan Rp1.975.800,00;

2) Gaji PPNPN Periode November(Desember 2025 yang belum dibayar sebesar Rp64.329.408,00. Utang gaji tersebut seharusnya

dibukukan pada Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar. Atas kesalahan pembukuan ini akan dikoreksi pada periode selanjutnya.

i. Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya

Merupakan tunggakan pembayaran tagihan kontrak pengadaan plastik HDPE tahap III modeling BINS Karawang sebesar Rp278.718.165,00.

Atas tunggakan tersebut diatas telah dilakukan reviu pembayaran tunggakan oleh Inspektorat Jenderal dengan laporan nomor T.35/ITJ.3/HP.350/I/2026 tanggal 9 Januari 2026

j. Satker Lainnya

Merupakan belanja barang Tahun 2025 yang belum dibayar pada 6 (enam) satker sebesar Rp 438.276.279,00.

4. Ditjen Pengawasan dan Sumber Daya KP

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP terdapat pada 15 (lima belas) satker yaitu sebagai berikut:

a. Pangkalan PSDKP Jakarta

Merupakan biaya listrik, telepon, dan air bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp48.063.313,00; Rp9.357.039,00 dan Rp1.596.963,00.

b. Pangkalan PSDKP Bitung

Merupakan biaya listrik dan telepon bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp43.935.239,00 dan Rp10.490.620,00.

c. Stasiun PSDKP Pontianak

Merupakan biaya listrik dan telepon bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp37.190.621,00 dan Rp5.744.250,00.

d. Pangkalan PSDKP Tual

Merupakan biaya listrik, telepon dan air bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp31.577.545,00; Rp7.699.759,00 dan Rp1.171.893,00.

e. Seditjen PSDKP

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada satker Seditjen PSDKP terdiri dari:

1) Biaya telepon bulan Desember 2025 sebesar Rp590.965,00;

2) Tunggakan non biaya utilitas dengan jumlah Rp200 juta s.d Rp2 milyar yaitu sebagai berikut:

a) Tunggakan biaya *ground handling* pesawat Tahun 2025 sebesar Rp96.109.179,00;

b) Tunggakan sewa pesawat udara sebesar Rp560.744.250,00;

Atas tunggakan tersebut diatas telah dilakukan reviu pembayaran tunggakan oleh Inspektorat Jenderal dengan laporan nomor T.264/ITJ.2/HP.380/V/2026 tanggal 4 Mei 2026.

3) Tunggakan tagihan BBM Kapal Pengawas sebesar Rp8.025.723.000,00.

Atas tunggakan tagihan BBM diatas, KKP telah mengajukan permohonan reviu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan nomor B.743/SJ.2/TU.210/III/2026 tanggal 3 Maret 2026.

f. Satker Lainnya

Merupakan belanja barang Tahun 2025 yang belum dibayar pada 10 (sepuluh) satker sebesar Rp124.941.625,00.

5. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP terdapat pada 2 (dua) satker yaitu sebagai berikut:

a. BBP3KP Cipayung

Merupakan tagihan listrik pdan telepon periode Desember 2025 masing-masing sebesar Rp48.473.681,00 dan Rp830.724,00.

b. Setditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

Merupakan tagihan listrik pdan telepon periode Desember 2025 masing-masing sebesar Rp102.997.703,00 dan Rp358.362,00.

6. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdapat pada 7 (tujuh) satker yaitu sebagai berikut:

a. BPSPL Pontianak

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada satker BPSPL Pontianak terdiri dari:

1) Biaya listrik, telepon dan air bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp14.538.988,00; Rp7.353.530,00 dan Rp249.700,00.

2) Biaya penyelenggaraan penyadartahuan implementasi hasil *COP Cites* ke – 20 sebesar Rp200.000.000,00

b. BKKPN Kupang

Merupakan biaya listrik, internet, telepon dan air bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp10.513.850,00; Rp8.482.089,00; Rp860.216,00 dan Rp266.612,00.

c. Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Merupakan biaya listrik bulan Desember 2025 yang belum dibayar sebesar Rp20.721.630,00.

d. Satker Lainnya

Merupakan belanja barang Tahun 2024 yang belum dibayar pada 6 (enam) satker sebesar Rp79.919.215,00.

7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 37 (tiga puluh tujuh) satker yaitu sebagai berikut:

a. BP3 Tegal

Merupakan biaya listrik, telepon dan air bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp15.517.261,00; Rp135.476,00 dan Rp4.942.000,00.

b. BRPPUPP Palembang

Merupakan biaya listrik, telepon dan air bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp70.745.765,00; Rp1.129.425,00 dan Rp1.556.458,00.

c. BBRBLPP Gondol

Merupakan biaya listrik, telepon dan air bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp106.068.414,00; Rp493.950,00 dan Rp292.000,00.

d. BRPBAPPP Maros

Merupakan biaya listrik, internet, telepon dan air bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp93.610.968,00; Rp4.318.140,00; Rp73.599,00 dan Rp2.285.600,00.

e. BBR Pengolahan Produk Dan Bioteknologi KP

Merupakan biaya listrik, telepon dan air bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp69.671.124,00; Rp448.423,00 dan Rp165.814,00.

f. Politeknik AUP Jakarta

Merupakan biaya air, listrik dan telepon bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp8.831.500,00; Rp86.381.854,00 dan Rp592.164,00.

g. Politeknik KP Sidoarjo

Merupakan biaya listrik, telepon, koran dan air bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp89.581.098,00; Rp165.834,00; Rp300.000,00 dan Rp71.435.980,00.

h. Sekretariat BRSDMKP

Merupakan biaya air dan telepon bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp147.209.635,00 dan Rp100.122,00.

i. Satker Lainnya

Merupakan belanja barang Tahun 2025 yang belum dibayar pada 30 (tiga puluh) satker sebesar Rp712.009.749,00.

8. Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil KP

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 36 (tiga puluh enam) satker yaitu sebagai berikut:

a. Balai KIPM Surabaya I

Merupakan biaya air, telepon, listrik dan internet bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp2.279.902,00; Rp5.288.926,00; Rp70.110.815,00 dan Rp2.993.253,00.

b. Balai KIPM Medan I

Merupakan biaya listrik, telepon, dan air bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp22.355.223,00; Rp130.536,00 dan Rp926.900,00.

c. Balai KIPM Denpasar

Merupakan biaya listrik, internet, telepon dan air bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp27.175.299,00; Rp521.023,00; Rp58.300,00 dan Rp2.338.206,00.

d. Stasiun KIPM Batam

Merupakan biaya listrik, air, telepon dan internet bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp20.074.247,00; Rp584.883,00; Rp111.364,00 dan Rp1.367.500,00.

e. Balai KIPM Manado

Merupakan biaya listrik, internet dan air bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp26.873.614,00; Rp1.458.443,00 dan Rp1.408.500,00.

f. Balai KIPM Mataram

Merupakan biaya air, internet, listrik dan telepon bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp376.700,00; Rp2.122.329,00; Rp19.335.260,00 dan Rp114.441,00.

g. Balai KIPM Jakarta II

Merupakan biaya listrik dan telepon bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp18.683.288,00 dan Rp3.655.910,00.

h. Balai Uji Standar KIPM

Merupakan biaya telepon dan listrik bulan Desember 2025 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp70.485,00 dan Rp23.923.544,00.

i. Satker Lainnya

Merupakan belanja barang Tahun 2024 yang belum dibayar pada 28 (dua puluh delapan) satker sebesar Rp 353.484.928,00.

### C.7.1.3 Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar

Saldo Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp627.972.003,00 dan Rp0,00.

Rincian saldo Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.95**
**Rincian Saldo Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar**
**Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Ditjen PRL | 627.972.003 | 0 | 627.972.003 | 0,00 |
| **Total** | **627.972.003** | **0** | **627.972.003** | **0,00** |

Penjelasan ringkas atas saldo Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Ruang Laut yang merupakan tunggakan pembelian 14 (empat belas) kendaraan motor sebesar Rp466.512.003,00; pembelian *drone* sebesar Rp90.000.000,00 serta pembelian sofa, lemari, camera dan lain-lain sebesar Rp71.460.000,00.

Atas tunggakan tersebut diatas telah direviu oleh Inspektorat Jenderal KKP dengan laporan nomor T.103/ITJ.1/HP.320/II/2026 tanggal 28 Februari 2026.

### C.7.1.4 Utang Kepada Pihak Ketiga BLU

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp210.963.000,00.

Utang Kepada Pihak Ketiga BLU per 31 Desember 2023 terdapat pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP yang merupakan uang muka yang diterima dari calon peserta untuk pelatihan pada satker BP3 Tegal sebesar Rp210.963.000,00.

### C.7.1.5 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan belanja yang telah dicairkan dari kas negara namun belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp979.501.920.201,00 dan Rp0,00.

Rincian saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.96**
**Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya**
**Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 109.750.986.394 | 31.786.224.192 | 77.964.762.202 | 245,28 |
| Ditjen PT | 264.032.299.381 | 5.460.008.097 | 258.572.291.284 | 4.735,75 |
| Ditjen PB | 192.848.228.540 | 8.217.751.805 | 184.630.476.735 | 2.246,73 |
| Ditjen PSDKP | 4.396.303.777 | 4.621.161.841 | (224.858.064) | (4,87) |
| Ditjen PDSPKP | 2.093.340.182 | 10.939.976.273 | (8.846.636.091) | (80,87) |
| Ditjen PK | 353.065.407.357 | 0 | 353.065.407.357 | 0,00 |
| BPPSDM KP | 6.288.209.220 | 7.602.236.257 | (1.314.027.037) | (17,28) |
| BPPMH KP | 395.985.477 | 30.927.479 | 365.057.998 | 1.180,37 |
| **Total** | **932.870.760.328** | **68.658.285.944** | **864.212.474.384** | **1.258,72** |

Seluruh saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan pembukuan berita acara serah terima (BAST) terkait pembayaran atas penyelesaian pekerjaan dengan mekanisme RPATA. Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga bredasarkan jenis BAST pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.97**
**Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Jenis BAST**
**Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025**

| Unit Eselon I | Final Hand Over (FHO) | Provisional Hand Over (PHO) | Total |
|---|---|---|---|
| **Setjen** | 109.750.986.394 | 0 | 109.750.986.394 |
| **Ditjen PT** | 37.334.766.942 | 226.697.532.439 | 264.032.299.381 |
| **Ditjen PB** | 97.304.811.640 | 95.543.416.900 | 192.848.228.540 |
| **Ditjen PSDKP** | 4.396.303.777 | 0 | 4.396.303.777 |
| **Ditjen PDSPKP** | 2.093.340.182 | 0 | 2.093.340.182 |
| **Ditjen PK** | 71.579.967.960 | 281.485.439.396 | 353.065.407.356 |
| **BPPSDM KP** | 6.288.209.220 | 0 | 6.288.209.220 |
| **BPPMH KP** | 395.985.477 | 0 | 395.985.477 |
| **Total** | **329.144.371.592** | **603.726.388.735** | **932.870.760.327** |

### C.7.1.6 Dana Pihak Ketiga

Saldo Dana Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.488.047.396,00 dan Rp1.488.047.396,00.

Saldo Dana Pihak Ketiga Lainnya hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan SDM KP yang merupakan sisa kas program hibah dari *Australian Center for International Agricultural Research* (ACIAR) sebesar Rp949.918.483,00 dan *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation* (CSIRO) yang pelaksanaannya telah berakhir senilai Rp538.128.913,00 pada satker Pusat Riset Perikanan.

### C.7.1.7 Dana Pihak Ketiga BLU

Saldo Dana Pihak Ketiga BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp451.561.194,00 dan Rp9.684.074.100,00.

Rincian saldo Dana Pihak Ketiga BLU pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.98**
**Rincian Saldo Dana Pihak Ketiga BLU Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Setjen** | 362.881.194 | 0 | 362.881.194 | 0,00 |
| **Ditjen PB** | 0 | 9.684.074.100 | (9.684.074.100) | (100,00) |
| **BPPSDM KP** | 88.680.000 | 0 | 88.680.000 | 0,00 |
| **Total** | **451.561.194** | **9.684.074.100** | **(9.232.512.906)** | **(95,34)** |

Terdapat kenaikan saldo Dana Pihak Ketiga BLU sebesar 95,34% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan pengehentian program kerjasama BLU Budidaya Benih Bening Lobster (BBL).

Penjelasan ringkas atas saldo Dana Pihak Ketiga BLU pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal

   Saldo Dana Pihak Ketiga BLU ada unit Eselon I Sekretariat Jenderal hanya terdapat pada satker LPMU KP yang terdiri dari:

   a. Transaksi dalam proses konfirmasi sebesar Rp102.879.530,00;

   b. Kelebihan Pembayaran Angsuran Debitur Lunas sebesar Rp42.453.954,00;

   c. Provisi diterima dimuka sebesar Rp102.353.460,00;

   d. Titipan pembayaran notaris dari Debitur sebesar Rp115.194.250,00

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

   Saldo Dana Pihak Ketiga BLU pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP hanya terdapat pada satker BPPP Tegal yang merupakan uang muka pelatihan Tahun 2026 sebesar Rp88.680.000,00.

### C.7.2 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

*Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0,00*

Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp44.885.401,00.

Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per tanggal 31 Desember 2024 hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal yang merupakan biaya Provisi yang diterima dimuka yang dibayarkan oleh debitur yang mekanisme pencairan Dana Bergulirnya dilakukan secara bertahap dan belum seluruhnya dicairkan berdasarkan kontrak yang sudah ditandatangani antara LPMUKP dengan debitur sebesar Rp44.885.401,00.

### C.7.3 Pendapatan Diterima Dimuka

*Pendapatan Diterima Dimuka Rp18.158.167.776,00*

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.158.167.776,00 dan Rp10.255.464.006,00.

Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per akun adalah sebagai berikut:

**Tabel C.99**
**Rincian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per Akun**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Sewa Diterima Dimuka | 15.258.521.390 | 4.091.411.270 | 11.167.110.120 | 272,94 |
| Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka | 2.806.790.136 | 5.590.274.975 | (2.783.484.839) | (49,79) |
| Pendapatan Diterima Dimuka BLU | 92.856.250 | 573.777.761 | (480.921.511) | (83,82) |
| **Total** | **18.158.167.776** | **10.255.464.006** | **7.902.703.770** | **77,06** |

Penjelasan Pendapatan Diterima Dimuka per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

### C.7.3.1 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Sewa Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.258.521.390,00 dan Rp4.091.411.270,00.

Rincian saldo Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.100**
**Rincian Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 1.239.808.275 | 1.486.150.275 | (246.342.000) | (16,58) |
| Ditjen PT | 12.578.758.621 | 2.142.606.059 | 10.436.152.562 | 487,08 |
| Ditjen PB | 1.209.846.385 | 134.081.644 | 1.075.764.741 | 802,32 |
| Ditjen PDSPKP | 0 | 3.990.046 | (3.990.046) | (100,00) |
| BPPSDM KP | 230.108.109 | 324.583.246 | (94.475.137) | (29,11) |
| **Total** | **15.258.521.390** | **4.091.411.270** | **11.167.110.120** | **272,94** |

Terdapat kenaikan saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar sebesar 272,94% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan pemindahan pembukuan pendapatan penggunaan lahan di Pelabuhan Perikanan dari akun Pendapatan PNBP Diterima Dimuka.

Penjelasan ringkas atas saldo Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal hanya terdapat pada satker Biro Umum dan PBJ yang merupakan pendapatan atas sewa sebagian Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.239.808.275,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

   Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap merupakan pendapatan sewa Barang Milik Negara berupa penggunaan lahan pada Pelabuhan Perikanan pada 18 (delapan belas) satker sebesar Rp12.578.758.621,00.

3. Ditjen Perikanan Budidaya

   Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat pada 3 (tiga) satuan kerja yaitu sebagai berikut:

   a. BBPBAT Sukabumi

      Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan berupa auditorium sebesar Rp192.258.000,00; sewa sebagian tanah dan/atau bangunan untuk Koperasi Karyawan dan pendidikan anak usia dini (PAUD) masing-masing sebesar Rp 18.307.500 dan Rp 8.279.000,00.

   b. BLUPPB Karawang

      Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan oleh Koperasi PRI GM sebesar Rp1.153.958,00.

   c. BPKIL Serang

      Merupakan pendapatan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan oleh PT TKP dan PT STP masing-masing sebesar Rp176.731.650,00 dan Rp848.113.333,00.

4. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

   Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 7 (tujuh) satker yaitu sebagai berikut:

   a. BP3 Banyuwangi

Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan untuk anjungan tunai mandiri (ATM) PT BRI dan PT BSI serta untuk Café D'O total sebesar Rp26.545.492,00.

b. BRPPUPP Palembang

Merupakan sewa tanah dan/atau bangunan (tanah instalasi ikan di Patra Tani) oleh PT DP sebesar Rp88.328.264,00.

c. BRPBATPP Sempur

Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan untuk anjungan tunai mandiri (ATM) PT BRI sebesar Rp17.583.500,00.

d. Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan berupa kolam sebesar Rp51.832.973,00.

e. Politeknik AUP Jakarta

Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan untuk anjungan tunai mandiri (ATM) PT BM dan PT BNI masing-masing sebesar Rp21.193.798,00 sebesar Rp17.719.749,00.

f. SUPM Ladong

Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan berupa dapur sebesar Rp3.208.333,00.

g. BPPA Sukamandi

Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan oleh Kop. PRI TM sebesar Rp3.696.000,00.

#### C.7.3.2 Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.806.790.136,00 dan Rp5.590.274.975,00.

Rincian saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.101**
**Rincian Saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka**

Pada Masing-masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Ditjen PT** | 2.788.590.136 | 5.552.683.421 | (2.764.093.285) | (49,78) |
| **BPPSDM KP** | 18.200.000 | 37.591.554 | (19.391.554) | (51,58) |
| **Total** | **2.806.790.136** | **5.590.274.975** | **(2.783.484.839)** | **(49,79)** |

Terdapat penurunan saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka sebesar 49,79% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan pemindahan pembukuan pendapatan penggunaan lahan di Pelabuhan Perikanan ke akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka.

Penjelasan ringkas atas saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Perikanan Tangkap

   Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap merupakan pendapatan penggunaan lahan di Pelabunan Perikanan sesuai tugas dan fungsi serta pendapatan dari jasa kepelabuhan pada 17 (tujuh belas) satker sebesar Rp2.788.590.136,00.

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

   Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP hanya terdapat pada satker Politeknik AUP Jakarta yang merupakan biaya pendidikan semester genap Tahun 2025/2026 sebesar Rp18.200.000,00.

### C.7.3.3 Pendapatan Diterima Dimuka BLU

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp92.856.250,00 dan Rp573.777.761,00.

Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka BLU pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.102
Rincian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka BLU
Pada Masing-masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Setjen** | 26.774.250 | 122.531.761 | (95.757.511) | (78,15) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DJPB** | 60.230.000 | 0 | 60.230.000 | 0,00 |
| **BPPSDM KP** | 5.852.000 | 451.246.000 | (445.394.000) | (98,70) |
| **Total** | **92.856.250** | **573.777.761** | **(480.921.511)** | **(83,82)** |

Terdapat penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka BLU sebesar 83,82% jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu, yang secara umum disebabkan tidak terdapat pembayaran dimuka biaya pendidikan oleh Taruna pada Tahun 2025.

Penjelasan ringkas atas saldo Pendapatan Diterima Dimuka BLU pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Pendapatan Diterima Dimuka BLU pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal hanya terdapat pada satker LPMU KP yang merupakan pengakuan diterimanya sejumlah Kas dari Debitur atas kelebihan pembayaran pendapatan jasa layanan sebesar Rp26.774.250,00.

2. Ditjen Perikanan Budidaya

   Pendapatan Diterima Dimuka BLU pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya hanya terdapat pada satker BBPBAP Jepara yaitu terdiri dari:

   a. Honor teknisi kegiatan petrokimia Bulan Januari 2026 yang sudah dibayar bulan Desember 2025 sebesar Rp8.150.000,00;

   b. Honor tenaga ahli pendampingan teknis Pengembangan teknis Klaster tambak udang di Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan Bulan Januari 2026 yang sudah dibayar bulan Desember 2025 sebesar Rp52.080.000,00.

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

   Pendapatan Diterima Dimuka BLU pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada BPPP Tegal yang Merupakan Pendapatan diterima dimuka sewa ATM BTN Juli 2025 s.d Juli 2026 sebesar Rp5.852.000,00.

### C.7.4 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari KPPN Rp67.600.000,00*

Uang muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih

berada pada atau dikuasai oleh bendahara pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian saldo Uang Muka KPPN pada masing-masing unit eselon I Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.103**
**Rincian Saldo Uang Muka KPPN Pada Masing-masing Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| No. | Unit Eselon I | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo UP | Saldo TUP | Jumlah | Saldo UP | Saldo TUP | Jumlah |
| 1 | Ditjen PT | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 2 | BPPSDM KP | 0 | 67.600.000 | 67.600.000 | 0 | 213.583.279 | 213.583.279 |
| **Total** | | **0** | **67.600.000** | **67.600.000** | **2.000.000** | **213.583.279** | **215.583.279** |

### C.7.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

*Utang Jangka Pendek Lainnya Rp27.949.772.,00*

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp27.949.772,00 dan Rp179.004.622,00.

Rincian saldo Utang Jangka pendek Lainnya per akun adalah sebagai berikut:

**Tabel C.104**
**Rincian Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Per Akun**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Utang Jangka Pendek sementara karena kesalahan rekening** | 0 | 157.190.207 | (157.190.207) | (100,00) |
| **Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor** | 27.949.772 | 21.814.415 | 6.135.357 | 28,13 |
| **Total** | **27.949.772** | **179.004.622** | **(151.054.850)** | **(84,39)** |

Penjelasan Utang Jangka Pendek Lainnya per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

#### C.7.5.1 Utang Jangka Pendek Sementara Karena Kesalahan Rekening Pihak Ketiga

Saldo Utang Jangka Pendek Sementara Karena Kesalahan Rekening Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp157.190.207,00.

Saldo Utang Jangka Pendek Sementara Karena Kesalahan Rekening Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal yang merupakan sejumlah transaksi penerimaan pada rekening satker LPMUKP yang masih memerlukan konfirmasi sebesar Rp126.208.285,00 dan kelebihan pembayaran jasa layanan oleh debitur yang sudah lunas dan dalam proses pengembalian ke debitur bersangkutan sebesar Rp30.981.922,00.

### C.7.5.2 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor merupakan pungutan pajak dari pelaksanaan APBN yang belum disetor ke kas negara oleh bendahara pengeluaran. Saldo Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp27.949.772,00 dan Rp21.814.415,00.

Rincian saldo Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel C.105**
**Rincian Saldo Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor**
**Pada Masing-masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Unit Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Ditjen PK | 0 | 113.000 | (113.000) | (100,00) |
| BPPSDM KP | 23.524.881 | 21.701.415 | 1.823.466 | 8,40 |
| BPPMH KP | 4.424.891 | 0 | 4.424.891 | 0,00 |
| **Total** | **27.949.772** | **21.814.415** | **6.135.357** | **28,13** |

Penjelasan ringkas atas saldo Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

   Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada unit Eselon I Badan Pengembangan dan SDM KP merupakan pajak yang belum disetor pada satker Balai Riset Pemuliaan Ikan sebesar Rp23.524.881,00. Rincian setoran atas pajak tersebut ke Kas Negara dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2025 (Audited) ini.

2. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP merupakan pajak yang belum disetor pada satker Balai KIPM Tarakan sebesar Rp515.900,00 serta satker Stasiun KIPM Pangkal Pinang sebesar Rp3.908.991,00. Rincian setoran atas pajak tersebut ke Kas Negara dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2025 (Audited) ini.

## C.8 Ekuitas

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

### C.8.1 Ekuitas

*Ekuitas Rp28.365.614.672.979,00*

Saldo Ekuitas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp28.365.614.672.979,00 dan Rp25.220.160.346.839,00,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



# PENJELASAN ATAS POS-POS LO

Catatan atas Laporan Keuangan



## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

### D.1 PENDAPATAN-LO

*Pendapatan LO*
*Rp2.483.005.869.084,00*

Pendapatan adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini Pendapatan-LO Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali yang bukan berasal dari setoran pajak negara. PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan beban negara (Pasal 1 UU 9/2018).

Peningkatan PNBP dari sektor Kelautan dan Perikanan ini berasal dari PNBP Sumber Daya Alam berupa pendapatan pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan pada Ditjen Perikanan Tangkap serta PNBP Non Sumber Daya Alam berupa pendapatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja Eselon I penghasil PNBP lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budi Daya, Ditjen PSDKP, Ditjen PDSPKP, Ditjen PKRL, BPPSDMKP, BPPMHKP dan BLU pada Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saldo akun Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Sumber Daya Alam dan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya. Berikut ini rincian saldo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

**Tabel D.1**
**Rincian Pendapatan-LO Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Sumber Daya Alam | 1.023.503.649.076 | 954.494.968.076 | 69.008.681.000 | 7,23 |
| Pendapatan PNBP Lainnya | 1.178.327.558.962 | 1.060.883.227.384 | 117.444.331.578 | 11,07 |
| Pendapatan BLU | 281.174.661.046 | 192.598.593.229 | 88.576.067.817 | 45,99 |
| **Total** | **2.483.005.869.084** | **2.207.976.788.689** | **275.029.080.395** | **12,46** |

## D.1.1 PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM

*Pendapatan Sumber Daya Alam Rp1.023.503.649.076 ,00*

Pendapatan Sumber Daya Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.023.503.649.076,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp69.008.681.000,00 atau 7,23% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp954.494.968.076,00.

Pendapatan Sumber Daya Alam terdapat pada Ditjen Perikanan Tangkap dengan rincian berdasarkan akun disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel D.2**
**Rincian Saldo Pendapatan Sumber Daya Alam**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap | 31.172.208.000 | 41.585.077.902 | (10.412.869.902) | (25,04) |
| Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | 111.765.000 | 153.870.000 | (42.105.000) | (27,36) |
| Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan | 992.219.676.076 | 912.756.020.174 | 79.463.655.902 | 8,71 |
| **Total** | **1.023.503.649.076** | **954.494.968.076** | **69.008.681.000** | **7,23** |

Pendapatan Sumber Daya Alam yang dipungut oleh Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah dari Pendapatan Pungutan SDA Perikanan yang terdiri dari:

1. Pendapatan pungutan pengusahaan perikanan bidang perikanan tangkap Bulan Januari s.d Desember 2025 sebesar Rp31.172.208.000,00, Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Bidang Perikanan Tangkap (421521) merupakan pendapatan dari:

- Penerbitan surat izin usaha Perikanan (SIUP) Penangkapan Ikan
- Penerbitan SIUP pengangkutan ikan
- Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Dapat dijelaskan sesuai batas ukuran kapal, yang dibagi atas:

a. 5 s.d. 60 GT atas Pungutan Pengusahaan Perikanan Kapal Angkut Reguler terdiri dari Kapal Pengangkut Ikan antar Pelabuhan Pangkalan, Kapal Pengangkut Ikan dari Daerah Penangkapan Ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan Kapal Pengangkut Ikan Segar/Beku ke Negara Tujuan

b. 60 s.d. 1.000 GT atas Pungutan Pengusahaan Perikanan Kapal Angkut Reguler terdiri dari Kapal pengangkut Ikan antar Pelabuhan Pangkalan, Kapal Pengangkut Ikan dari Daerah Penangkapan Ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), Kapal Pengangkut Ikan di Laut Lepas, Kapal Pemgangkut Ikan Segar/Beku ke Negara Tujuan, dan Kapal Pengangkut Ikan Sewa untuk Ikan Hidup dari Check Point Ke Negara Tujuan (Berbendera Asing)

c. Diatas 1.000 GT atas Pungutan Pengusahaan Perikanan Kapal Angkut Reguler berupa Kapal Pengangkut Ikan Sewa untuk Ikan Segar/Beku ke Negara Tujuan (Berbendera Asing)

d. Pungutan Pengusahaan Perikanan Reguler berupa Surat Ijin Usaha Perikanan

2. Pungutan atas Surat Ijin Penempatan Rumpon Pendapatan pungutan pengusahaan perikanan bidang pembudidayaan ikan Bulan Januari s.d Desember 2025 sebesar Rp111.765.000,00, Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Bidang Pembudidayaan Ikan (421522) merupakan pendapatan dari Penerbitan SIKPI untuk ikan hidup/budidaya

   Dapat dijelaskan sesuai batas ukuran kapal, yang dibagi atas:

   a. 5 s.d. 60 GT atas Pungutan Pengusahaan Perikanan Kapal Angkut Reguler terdiri dari Kapal Pengangkut Ikan Hidup Antar Tempat Pembudidayaan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari Tempat Pembudidayaan/Pelabuhan Check Point Ke Negara Tujuan Eksport.

b. 60 s.d. 1.000 GT atas Pungutan Pengusahaan Perikanan Kapal Angkut Reguler terdiri dari Kapal Pengangkut Ikan Hidup Antar Tempat Pembudidayaan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari Tempat Pembudidayaan/Pelabuhan Check Point Ke Negara Tujuan Eksport.

c. Pungutan Pengusahaan Perikanan Reguler berupa Surat Ijin Usaha Perikanan.

3. Pendapatan pungutan hasil perikanan Bulan Januari s.d Desember 2025 sebesar Rp992.219.676.076,00, Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan /PHP (421531) merupakan pendapatan yang didapat dari ikan hasil tangkapan dan dikenakan tarif setiap kali pendaratan ikan, berdasarkan batas ukuran kapal dan alat tangkapannya sesuai tarif dengan PP 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

   Dapat dijelaskan sesuai batas ukuran kapal dan alat tangkap, yang dibagi atas:

   a. Pungutan hasil perikanan 5 s.d. 60 GT terdiri dari:

      - Bagan Berperahu Teri atau Bagan Apung Teri
      - Bouke Ami
      - Bubu
      - Huhate
      - Jala Jatuh Berkapal
      - Jaring Hela Ikan Berkantong
      - Jaring Insang Hanyut
      - Jaring Insang Tetap
      - Jaring Tarik Berkantong
      - Pancing Cumi
      - Pancing Ulur
      - Pancing Ulur Tuna

- Pengangkut
- Pukat Cincin Pelagis Besar dengan Satu Kapal
- Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan Satu Kapal
- Rawai Dasar
- Rawai Tuna

b. Pungutan hasil perikanan pasca 60 s.d. 1.000 GT terdiri dari :

- Bouke Ami
- Huhate
- Jala Jatuh Berkapal
- Jaring Hela Ikan Berkantong
- Jaring Hela Udang Berkantong
- Jaring Insang Hanyut
- Jaring Insang Tetap
- Jaring Tarik Berkantong
- Jaring Tarik Berkantong (Freezer)
- Pancing Berjoran
- Pancing Cumi
- Pancing Ulur
- Pancing Ulur Tuna
- Pengangkut
- Pukat Cincin Pelagis Besar dengan Satu Kapal
- Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan Satu Kapal
- Pukat Cincin Teri dengan Satu Kapal
- Pukat Labuh

- Rawai Dasar
- Rawai Tuna

Total PNBP SDA Perikanan Bulan Januari s.d Desember 2025 adalah sebesar Rp1.023.503.649.076,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp69.008.681.000,00 atau 7,23% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp954.494.968.076,00. Kenaikan tersebut disebabkan oleh:

a. Terjadi peningkatan Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan dimana adanya kenaikan produksi hasil tangkapan dibandingkan tahun sebelumnya.

b. Peningkatan pada pendapatan pungutan hasil perikanan (PHP) sebagai implementasi penarikan PNBP SDA perikanan pascaproduksi secara penuh di tahun 2025, dimana PNBP dibayarkan berdasarkan ikan hasil tangkapan oleh pemilik perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan dikenakan setiap kali melakukan pendaratan ikan.

c. Pengenaan PNBP PHP diberlakukan jika perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan telah diterbitkan dan nilai produksi ikan pada saat didaratkan telah ditetapkan. Dengan besaran nilai pungutan dihitung secara mandiri oleh pelaku usaha perikanan tangkap melalui aplikasi yang disediaan oleh KKP.

### D.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

*Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Rp1.178.327.558.962,00*

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.178.327.558.962,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp117.444.331.578,00 atau 11,07% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp1.060.883.227.384,00 Rincian saldo dari akun Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut.

Rincian atas saldo akun Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan TA 2025 *Audited* disajikan sebagai berikut.

**Tabel D.3**
**Rincian Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, | 11.744.953.313 | 21.041.638.181 | (9.296.684.868) | (44,18) |
| Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya | 74.594.000 | 613.430.700 | (538.836.700) | (87,84) |
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 14.946.776.173 | 6.349.119.867 | 8.597.656.306 | 135,41 |
| Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin | 566.069.123 | 1.780.822.830 | (1.214.753.707) | (68,21) |
| Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan | 39.547.522 | 0 | 39.547.522 | 100,00 |
| Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya | 15.000.000 | 12.000.000 | 3.000.000 | 25,00 |
| Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai | 20.526.389.215 | 26.785.092.480 | (6.258.703.265) | (23,37) |
| Pendapatan Perizinan Lainnya | 888.837.082.203 | 827.828.756.068 | 61.008.326.135 | 7,37 |
| Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan | 18.574.529.300 | 48.910.381.200 | (30.335.851.900) | (62,02) |
| Pendapatan Jasa Karantina Perikanan | 0 | 38.700.000 | (38.700.000) | (100,00) |
| Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan | 8.000.000 | 3.800.000 | 4.200.000 | 110,53 |
| Pendapatan Biaya Pendidikan | 863.900.000 | 1.097.533.333 | (233.633.333) | (21,29) |
| Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan | 220.075.000 | 3.850.212.000 | (3.630.137.000) | (94,28) |
| Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual | 0 | 598.500 | (598.500) | (100,00) |
| Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan | 513.371 | 17.000.000 | (16.486.629) | (96,98) |
| Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan | 76.065.842.609 | 73.938.733.004 | 2.127.109.605 | 2,88 |
| Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya | 20.100.849.052 | 21.270.644.636 | (1.169.795.584) | (5,50) |
| PendapatanJasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi | 16.965.000 | 53.775.000 | (36.810.000) | (68,45) |
| Pendapatan Jasa Lainnya | 0 | 2.493.288 | (2.493.288) | (100,00) |
| Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) | 0 | 320 | (320) | (100,00) |
| Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah | 1.870.924.771 | 3.353.758.153 | (1.482.833.382) | (44,21) |
| Pendapatan Denda Lainnya | 123.852.190.310 | 23.877.548.743 | 99.974.641.567 | 418,70 |
| Pendapatan Anggaran Lain-lain | 3.358.000 | 57.189.081 | (53.831.081) | (94,13) |
| **Total** | **1.178.327.558.962** | **1.060.883.227.384** | **117.444.331.578** | **11,07** |

**Tabel D.4**
**Rincian Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 1.342.480.125 | 1.030.964.770 | 311.515.355 | 30,22 |
| Ditjen PT | 96.609.047.288 | 92.533.670.275 | 4.075.377.013 | 4,40 |
| Ditjen PB | 14.886.152.632 | 20.030.179.618 | -5.144.026.986 | -25,68 |
| Ditjen PSDKP | 123.898.247.215 | 24.106.789.390 | 99.791.457.825 | 413,96 |
| Ditjen PDSPKP | 8.402.811.999 | 8.597.721.855 | -194.909.856 | -2,27 |
| Ditjen PK | 908.985.237.915 | 849.223.580.038 | 59.761.657.877 | 7,04 |
| BPPSDM KP | 8.702.620.308 | 18.866.109.629 | -10.163.489.321 | -53,87 |
| BKIPM | 15.500.961.480 | 46.494.211.809 | -30.993.250.329 | -66,66 |
| **Total** | **1.178.327.558.962** | **1.060.883.227.384** | **117.444.331.578** | **11,07** |

Kenaikan signifikan tahun 2025 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Pendapatan Denda Lainnya dikarenakan:

a. Tingginya pelanggaran bidang kelautan dan perikanan, serta ganti kerugian atas penyelesaian sengketa pada Ditjen PSDKP

b. Tingginya Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya atas Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah pada Biro Umum dan atas Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya KP

### D.1.3 Pendapatan Badan Layanan Umum

*Pendapatan Badan Layanan Umum Rp281.174.661.046,00*

Pendapatan Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp281.174.661.046,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp88.576.067.817,00 atau 45,99% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp192.598.593.229,00. Rincian saldo dari akun Pendapatan Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut.

**Tabel D.5**
**Rincian Saldo Pendapatan Badan Layanan Umum**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan | 28.461.046.696 | 14.269.052.898 | 14.191.993.798 | 99,46 |
| Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, | 522.788.500 | 347.033.750 | 175.754.750 | 50,64 |
| Pendapatan Jasa Pencetakan | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | 0,00 |
| Pendapatan Penyediaan Barang | 1.520.936.038 | 5.613.374.010 | (4.092.437.972) | (72,91) |

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya | 1.409.946.510 | 1.123.410.261 | 286.536.249 | 25,51 |
| Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah | 61.140.000 | 17.300.000 | 43.840.000 | 253,41 |
| Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral | 33.474.636.671 | 36.306.569.687 | (2.831.933.016) | (7,80) |
| Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya | 2.473.912.253 | 7.647.452.715 | (5.173.540.462) | (67,65) |
| Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - | 0 | 27.203.967 | (27.203.967) | (100,00) |
| Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha | 162.885.714.953 | 71.009.136.247 | 91.876.578.706 | 129,39 |
| Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah | 320.345.000 | 0 | 320.345.000 | 0,00 |
| Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU | 15.720.990.460 | 28.479.909.015 | (12.758.918.555) | (44,80) |
| Pendapatan Lain-lain BLU | 32.126.321.710 | 24.710.604.107 | 7.415.717.603 | 30,01 |
| Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah | 87.645.087 | 233.440.220 | (145.795.133) | (62,46) |
| Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung | 1.842.606.378 | 1.098.555.118 | 744.051.260 | 67,73 |
| Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan | 128.777.150 | 1.402.613.997 | (1.273.836.847) | (90,82) |
| Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin | 63.783.640 | 35.654.737 | 28.128.903 | 78,89 |
| Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya | 0 | 16.250.000 | (16.250.000) | (100,00) |
| Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan | 41.135.500 | 0 | 41.135.500 | 0,00 |
| Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin | 29.184.500 | 261.032.500 | (231.848.000) | (88,82) |
| **Total** | **281.174.661.046** | **192.598.593.229** | **88.576.067.817** | **45,99** |

Rincian atas saldo akun Pendapatan Badan Layanan Umum untuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan TA 2024 Audited disajikan sebagai berikut.

**Tabel D.6**
**Rincian Saldo Pendapatan Badan Layanan Umum Berdasarkan Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 44.822.061.851 | 71.623.005.343 | (26.800.943.492) | (37,42) |
| Ditjen PB | 199.041.847.271 | 92.579.845.639 | 106.462.001.632 | 114,99 |
| BPPSDM KP | 39.355.245.375 | 29.371.711.247 | 9.983.534.128 | 33,99 |
| Satker Konsolidasi | (2.044.493.451) | (975.969.000) | (1.068.524.451) | 109,48 |
| **Total** | **281.174.661.046** | **192.598.593.229** | **88.576.067.817** | **45,99** |

Kenaikan signifikan Pendapatan Badan Layanan Umum pada tahun 2025 terdapat pada Ditjen Perikanan Budi Daya satuan kerja Balai Perikanan

Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo dengan pengungkapan sebagai berikut.

1. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha (424312)

   Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama BLU untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp158.828.863.000,00 dan Rp66.073.273.000,00. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU dapat di rinci sebagai berikut :

   a. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga / Badan Usaha Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga / Badan Usaha untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp158.828.863.000,00 dan Rp66.073.273.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel D.7**
**Rincian Saldo Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Uraian | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan BBL dalam Negeri | 412.431.000,00 | 1.411.125.000,00 | (998.694.000) | (70,77) |
| Pendapatan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan BBL Luar Negeri | 158.416.432.000,00 | 64.662.148.000,00 | 93.754.284.000 | 144,99 |
| **Total** | **158.828.863.000,00** | **66.073.273.000,00** | **92.755.590.000,00** | **140,38%** |

   b. Rincian Pendapatan Hasil Kerjasama BLU merupakan Pendapatan Hasil Kerjasama Penyediaan Benih Bening Lobster (BBL) untuk Pengiriman ke Luar Negeri maupun untuk Budidaya di dalam Negeri. Berikut rincian pendapatan Penyediaan Benih Bening Lobster per masing *Joint Venture* yang bekerja sama dengan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo:

**Tabel D.8**
**Pendapatan Penyediaan Benih Bening Lobster Per Masing *Joint Venture***
**Per 31 Desember 2025**

| No. | Nama Perusahaan | Kompensasi Penyediaan BBL BLU (Rp) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Dalam Negeri | Luar Negeri | Dalam dan Luar Negeri |
| 1 | Mutagreen Aquaculture International | 1.290.000 | 3.999.112.000 | 4.000.402.000 |

| No. | Nama Perusahaan | Kompensasi Penyediaan BBL BLU (Rp) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Dalam Negeri | Luar Negeri | Dalam dan Luar Negeri |
| 2 | Gajaya Aquaculture International | 181.482.000 | 63.168.092.000 | 63.349.574.000 |
| 3 | Ratuworld Aquaculture International | 101.646.000 | 47.717.572.000 | 47.819.218.000 |
| 4 | Pacific Maritime Indonesia | 105.142.000 | 40.296.488.000 | 40.401.630.000 |
| 5 | Idovin Aquaculture International | 22.871.000 | 3.235.168.000 | 3.258.039.000 |
| **Total** | | **412.431.000** | **158.416.432.000** | **158.828.863.000** |

2. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (424911)

   Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (Pendapatan Jasa Giro) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.220.153.713,00 dan Rp469.352.858,00.

   Rincian Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel D.9**
**Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU**
**Per 31 Desember 2025**

| No. | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Bunga Deposito | 4.780.885.650 |
| 2 | Pendapatan Bunga Rekening Ops. Penerimaan | 1.026.931.778 |
| 3 | Pendapatan Bunga Rekening Dana Kelolaan | 410.954.167 |
| 4 | Pendapatan Bunga Rekening Ops. Pengeluaran | 1.382.118 |
| **Total** | | **6.220.153.713** |

Kenaikan terbesar ke-2 ada BLUPPB Karawang pada akun Pendapatan Lain-lain BLU (424919) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp25.230.699.135,00 dan Rp15.379.771.739,00 yang terdiri dari:

1. Pendapatan Lain-lain BLU berasal dari pendapatan penjualan komoditas udang vaname (ukuran konsumsi). ikan nila salin (ukuran konsumsi). ikan Patin (ukuran konsumsi). benih ikan nila. calin ikan nila. calin lele dan penjualan pakan mandiri.

2. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah berasal dari pendapatan sewa GM Mart Koperasi Graha Mina dan sewa lahan dan bangunan PT. Adib

3. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung berasal dari pendapatan Penggunaan Asrama.

Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah berasal dari sewa Gedung GM Mart Koperasi Graha Mina dan Sewa Lahan dan Bangunan PT. Adib.

## D.2 BEBAN

*Beban Rp5.390.403.764.087,00*

Beban Operasional adalah penurunan manfaat ekonomi dan/atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban operasional merupakan beban yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional entitas.

Rincian saldo pos akun Beban untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebagai berikut.

**Tabel D.10**
**Rincian Beban**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Pegawai | 1.993.845.112.181 | 1.912.227.733.739 | 81.617.378.442 | 4,27 |
| Beban Persediaan | 91.702.626.670 | 147.530.974.235 | (55.828.347.565) | (37,84) |
| Beban Barang dan Jasa | 1.634.539.511.419 | 2.009.908.942.375 | (375.369.430.956) | (18,68) |
| Beban Pemeliharaan | 250.057.375.591 | 341.035.450.066 | (90.978.074.475) | (26,68) |
| Beban Perjalanan Dinas | 266.436.344.507 | 835.505.791.460 | (569.069.446.953) | (68,11) |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat | 347.004.118.903 | 619.256.772.699 | (272.252.653.796) | (43,96) |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 745.895.188.330 | 758.048.674.328 | (12.153.485.998) | (1,60) |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 60.923.486.486 | 6.078.261.264 | 54.845.225.222 | 902,32 |
| **Total** | **5.390.403.764.087** | **6.629.592.600.166** | **(1.239.188.836.079)** | **(18,69)** |

### D.2.1 Beban Pegawai

*Beban Pegawai Rp1.993.823.014.714,00*

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.993.823.014.714,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp81.595.280.975,00 atau 4,27% dibandingkan periode yang

berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp1.912.227.733.739,00. Rincian saldo dari akun Beban Pegawai adalah sebagai berikut.

**Tabel D.11**
**Rincian Saldo Beban**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Gaji Pokok PNS | 567.565.553.048 | 579.610.729.783 | (12.045.176.735) | (2,08) |
| Beban Pembulatan Gaji PNS | 41.584.300 | 8.107.691 | 33.476.609 | 412,90 |
| Beban Tunj. Suami/Istri PNS | 43.048.780.034 | 43.980.069.744 | (931.289.710) | (2,12) |
| Beban Tunj. Anak PNS | 13.365.905.218 | 13.628.985.411 | (263.080.193) | (1,93) |
| Beban Tunj. Struktural PNS | 6.304.200.000 | 6.080.494.480 | 223.705.520 | 3,68 |
| Beban Tunj. Fungsional PNS | 63.075.424.355 | 64.887.421.982 | (1.811.997.627) | (2,79) |
| Beban Tunj. PPh PNS | 6.349.953.858 | 6.436.422.563 | (86.468.705) | (1,34) |
| Beban Tunj. Beras PNS | 30.938.442.130 | 31.974.037.550 | (1.035.595.420) | (3,24) |
| Beban Tunj. Kemahalan PNS | 11.400.000 | 6.450.000 | 4.950.000 | 76,74 |
| Beban Uang Makan PNS | 78.712.841.502 | 71.962.394.142 | 6.750.447.360 | 9,38 |
| Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS | 83.625.000 | 88.450.000 | (4.825.000) | (5,46) |
| Beban Tunjangan Khusus Papua PNS | 1.728.940.000 | 1.782.375.000 | (53.435.000) | (3,00) |
| Beban Tunjangan Umum PNS | 9.155.854.577 | 9.383.761.335 | (227.906.758) | (2,43) |
| Beban Tunjangan Profesi Guru | 3.209.848.314 | 3.090.666.800 | 119.181.514 | 3,86 |
| Beban Tunjangan Profesi Dosen | 13.132.127.035 | 11.788.500.610 | 1.343.626.425 | 11,40 |
| Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara | 12.048.750 | 23.538.438 | (11.489.688) | (48,81) |
| Beban Tunjangan Lain-lain Pejabat Negara | 478.800.000 | 52.502.580 | 426.297.420 | 811,96 |
| Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara | 0 | 79.800.000 | (79.800.000) | (100,00) |
| Beban Tunjangan Pegawai Non PNS | 463.847.650 | 236.250.000 | 227.597.650 | 96,34 |
| Beban Gaji Pokok PPPK | 104.803.715.788 | 72.953.347.772 | 31.850.368.016 | 43,66 |
| Beban Pembulatan Gaji PPPK | 1.976.160 | 1.480.699 | 495.461 | 33,46 |
| Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK | 6.764.454.046 | 4.578.928.710 | 2.185.525.336 | 47,73 |
| Beban Tunjangan Anak PPPK | 1.969.392.623 | 1.278.604.624 | 690.787.999 | 54,03 |
| Belanja Tunjangan Struktural PPPK | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 0,00 |
| Beban Tunjangan Fungsional PPPK | 11.727.377.800 | 9.562.311.720 | 2.165.066.080 | 22,64 |
| Beban Tunjangan Beras PPPK | 6.490.495.940 | 4.336.531.720 | 2.153.964.220 | 49,67 |
| Beban Tunjangan Lauk Pauk PPPK | 0 | 56.176.000 | (56.176.000) | (100,00) |
| Beban Uang Makan PPPK | 20.047.937.510 | 11.981.213.631 | 8.066.723.879 | 67,33 |
| Beban Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK | 353.040.881 | 419.950.124 | (66.909.243) | (15,93) |
| BebanTunjanganDaerahTerpencil/SangatTerpencil PPPK | 3.000.000 | 1.950.000 | 1.050.000 | 53,85 |
| Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK | 131.525.000 | 87.650.000 | 43.875.000 | 50,06 |
| Beban Tunjangan Umum PPPK | 1.083.910.000 | 32.700.000 | 1.051.210.000 | 3.214,71 |
| Beban Uang Lembur | 13.432.676.827 | 12.600.750.043 | 831.926.784 | 6,60 |
| Beban Uang Lembur PPPK | 3.122.167.600 | 1.616.060.100 | 1.506.107.500 | 93,20 |
| Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) | 834.601.109.490 | 831.107.808.276 | 3.493.301.214 | 0,42 |

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja PPPK | 138.694.543.375 | 96.045.394.079 | 42.649.149.296 | 44,41 |
| Beban Gaji dan Tunjangan | 12.922.113.370 | 20.465.918.132 | (7.543.804.762) | (36,86) |
| **Total** | **1.993.845.112.181** | **1.912.227.733.739** | **81.617.378.442** | **4,27** |

Berikut ini rincian saldo akun Beban Pegawai untuk masing-masing Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 *Audited*.

**Tabel D.12**
**Rincian Saldo Beban Pegawai Berdasarkan Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 110.738.343.328 | 108.447.080.403 | 2.291.262.925 | 2,11 |
| Itjen | 38.939.836.883 | 36.587.189.221 | 2.352.647.662 | 6,43 |
| Ditjen PT | 241.901.369.598 | 230.018.070.782 | 11.883.298.816 | 5,17 |
| Ditjen PB | 193.609.947.024 | 185.887.444.571 | 7.722.502.453 | 4,15 |
| Ditjen PSDKP | 216.053.607.012 | 201.208.774.103 | 14.844.832.909 | 7,38 |
| Ditjen PDSPKP | 68.761.871.211 | 65.321.485.101 | 3.440.386.110 | 5,27 |
| Ditjen PK | 118.914.841.636 | 112.197.428.463 | 6.717.413.173 | 5,99 |
| BPPSDMKP | 849.107.002.007 | 816.756.306.194 | 32.350.695.813 | 3,96 |
| BPPMHKP | 155.818.293.482 | 155.803.954.901 | 14.338.581 | 0,01 |
| **Total** | **1.993.845.112.181** | **1.912.227.733.739** | **81.617.378.442** | **4,27** |

Adapun peningkatan Beban Pegawai per akun yang cukup signifikan, khususnya pada Beban Gaji Pokok PPPK, Beban Pembulatan Gaji PPPK, Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK, Beban Tunjangan Anak PPPK, Beban Tunjangan Fungsional PPPK, Beban Tunjangan Beras PPPK, Beban Uang Makan PPPK, Beban Tunjangan Umum PPPK, Beban Uang Lembur PPPK, dan Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK terjadi sesuai dengan peningkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena pengangkatan PPPK baru pada bulan Oktober 2025 sebanyak 3.222 orang.

Terdapat perbedaan Beban Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel D.13**
**Perbedaan Saldo Beban Pegawai**
**Per 31 Desember 2024 pada LRA dan LO**

| Uraian | | Nilai |
|---|---|---|
| Beban Pegawai (LO)a (a) | | 1.993.845.112.181 |
| Belanja Pegawai (LRA) (b) | | 1.981.998.452.037 |
| Saldo Akhir Belanja Pegawai yang masih harus dibayar (c) | + | 405.436.395 |
| Saldo Awal Belanja Pegawai yang masih harus dibayar (d) | - | 1.241.962.086 |
| Jumlah (e) | | 1.981.161.926.346 |
| **Selisih (a-e)** | | **12.683.185.835** |

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Beban Pegawai merupakan/berasal dari:

**Tabel D.14**
**Rincian Perbedaan Saldo Beban Pegawai**
**Per 31 Desember 2024 pada LRA dan LO**

| Uraian | | Nilai |
|---|---|---|
| Belanja Pegawai pada BLU | | 12.922.113.370 |
| Piutang Lainnya | | (227.395.913) |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | | (10.637.104) |
| Koreksi Lainnya | | (894.518) |
| **Jumlah** | | **12.683.185.835** |

### D.2.2 Beban Persediaan

*Beban Persediaan Rp91.702.626.670,00*

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp91.702.626.670,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp55.828.347.565,00 atau 37,84% dibandingkan periode 31 Desember 2024 sebesar Rp147.530.974.235,00.

Rincian saldo akun Beban Persediaan disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel D.15**
**Rincian Saldo Beban Persediaan**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Persediaan konsumsi | 70.394.082.600 | 116.373.326.800 | (45.979.244.200) | (39,51) |
| Beban Persediaan amunisi | 84.004.708 | 84.695.142 | (690.434) | (0,82) |
| Beban Persediaan bahan baku | 12.008.135.677 | 23.623.703.203 | (11.615.567.526) | (49,17) |

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga | 1.420.441 | 0 | 1.420.441 | 100,00 |
| Beban Persediaan Lainnya | 9.214.983.244 | 7.449.249.090 | 1.765.734.154 | 23,70 |
| **Total** | **91.702.626.670** | **147.530.974.235** | **(55.828.347.565)** | **(37,84)** |

Berikut ini rincian saldo akun Beban Persediaan untuk masing-masing Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 *Audited*.

**Tabel D.16**
**Rincian Saldo Beban Persediaan Berdasarkan Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 3.068.972.797 | 6.028.723.860 | (2.959.751.063) | (49,09) |
| Itjen | 93.458.747 | 273.243.522 | (179.784.775) | (65,80) |
| Ditjen PT | 1.973.570.682 | 8.219.548.806 | (6.245.978.124) | (75,99) |
| Ditjen PB | 65.551.023.222 | 93.743.724.753 | (28.192.701.531) | (30,07) |
| Ditjen PSDKP | 3.374.271.244 | 7.869.509.325 | (4.495.238.081) | (57,12) |
| Ditjen PDSPKP | 302.323.267 | 1.096.464.558 | (794.141.291) | (72,43) |
| Ditjen PK | 646.226.765 | 922.018.513 | (275.791.748) | (29,91) |
| BPPSDMKP | 9.254.749.055 | 18.339.993.447 | (9.085.244.392) | (49,54) |
| BPPMHKP | 7.438.030.891 | 11.037.747.451 | (3.599.716.560) | (32,61) |
| **Total** | **91.702.626.670** | **147.530.974.235** | **(55.828.347.565)** | **(37,84)** |

Penurunan sebesar Rp55.828.347.565,00 atau mencapai 37,84% disebabkan oleh terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 maka anggaran belanja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi menurun.

### D.2.3 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa Rp1.630.971.573.630,00*

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.630.971.573.630,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp378.937.368.745,00 atau 18,85% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp2.009.908.942.375,00.

Kemudian, rincian saldo akun Beban Barang dan Jasa disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel D.17**
**Rincian Saldo Beban Barang dan Jasa**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Keperluan Perkantoran | 197.170.296.616 | 294.434.250.391 | (97.263.953.775) | (33,03) |
| Beban Pengadaan Bahan Makanan | 4.587.358.700 | 34.418.816.539 | (29.831.457.839) | (86,67) |
| Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 4.380.208.508 | 8.174.373.423 | (3.794.164.915) | (46,42) |
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 553.718.601 | 1.397.985.537 | (844.266.936) | (60,39) |
| Beban Honor Operasional Satuan Kerja | 20.069.814.296 | 25.034.089.472 | (4.964.275.176) | (19,83 |
| Beban Barang Operasional Lainnya | 61.742.059.664 | 51.604.078.732 | 10.137.980.932 | 19,65 |
| Beban Bahan | 346.982.932.546 | 551.980.744.223 | (204.997.811.677) | (37,14) |
| Beban Honor Output Kegiatan | 26.588.450.124 | 66.462.794.045 | (39.874.343.921) | (59,99) |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya | 103.362.705.463 | 133.168.385.500 | (29.805.680.037) | (22,38) |
| Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang | 0 | 45.000.000 | (45.000.000) | (100,00) |
| Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel | 784.463.299 | 2.637.259.296 | (1.852.795.997) | (70,25) |
| Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel | 135.281.700 | 323.699.735 | (188.418.035) | (58,21) |
| Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel | 525.000 | 52.992.000 | (52.467.000) | (99,01) |
| Beban Langganan Listrik | 98.621.099.882 | 119.211.114.016 | (20.590.014.134) | (17,27) |
| Beban Langganan Telepon | 4.896.877.994 | 5.779.354.935 | (882.476.941) | (15,27) |
| Beban Langganan Air | 7.552.111.037 | 7.083.962.070 | 468.148.967 | 6,61 |
| Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya | 33.147.294.244 | 48.275.719.978 | (15.128.425.734) | (31,34) |
| Beban Jasa Pos dan Giro | 166.500 | 169.000 | (2.500) | (1,48) |
| Beban Jasa Konsultan | 92.024.311.337 | 40.748.700.847 | 51.275.610.490 | 125,83 |
| Beban Sewa | 101.124.567.945 | 140.628.312.382 | (39.503.744.437) | (28,09) |
| Beban Jasa Profesi | 12.857.907.627 | 31.861.033.879 | (19.003.126.252) | (59,64) |
| Beban Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian | 3.341.520.000 | 0 | 3.341.520.000 | 100,00 |
| Beban Jasa Lainnya | 483.190.212.303 | 419.682.326.732 | 63.507.885.571 | 15,13 |
| Beban Barang | 17.407.046.606 | 12.340.321.281 | 5.066.725.325 | 41,06 |
| Beban Jasa | 12.086.839.265 | 11.768.899.669 | 317.939.596 | 2,70 |
| Beban Ketersediaan Layanan BLU | 100.030.000 | 44.825.040 | 55.204.960 | 123,16 |
| Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya | 1.822.812.162 | 2.469.555.202 | (646.743.040) | (26,19) |
| Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU | 0 | 12.460.000 | (12.460.000) | (100,00) |
| Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU | 0 | 2.749.707 | (2.749.707) | (100,00) |
| Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin | 0 | 264.968.744 | (264.968.744) | (100,00) |

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU | 8.900.000 | 0 | 8.900.000 | 100,00 |
| **Total** | **1.634.539.511.419** | **2.009.908.942.375** | **(375.369.430.956)** | **(18,68)** |

Rincian saldo akun Beban Barang dan Jasa untuk masing-masing Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 *Audited* disajikan sebagai berikut.

**Tabel D.18**
**Rincian Beban Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 183.792.768.577 | 237.885.424.589 | (54.092.656.012) | (22,74) |
| Itjen | 3.548.919.778 | 7.259.223.722 | (3.710.303.944) | (51,11) |
| Ditjen PT | 254.016.198.118 | 294.028.620.691 | (40.012.422.573) | (13,61) |
| Ditjen PB | 178.530.533.688 | 189.602.200.306 | (11.071.666.618) | (5,84) |
| Ditjen PSDKP | 400.893.879.351 | 524.890.419.762 | (123.996.540.411) | (23,62) |
| Ditjen PDSPKP | 65.354.941.499 | 118.491.698.377 | (53.136.756.878) | (44,84) |
| Ditjen PK | 200.902.679.561 | 126.468.152.564 | 74.434.526.997 | 58,86 |
| BPPSDMKP | 276.261.151.073 | 424.840.520.110 | (148.579.369.037) | (34,97) |
| BPPMHKP | 73.282.933.225 | 87.418.651.254 | (14.135.718.029) | (16,17) |
| Satker Konsolidasi | (2.044.493.451) | (975.969.000) | (1.068.524.451) | (109,48) |
| **Total** | **1.634.539.511.419** | **2.009.908.942.375** | **(375.369.430.956)** | **(18,68)** |

Penurunan Beban Barang dan Jasa disebabkan karena terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Untuk kenaikan beban hanya terjadi pada Ditjen PKRL dalam rangka Pekerjaan Survei Hidro-Oseanografi di Teluk Jakarta dan Perairan Semarang sebesar Rp35.535.207.000,00. Sedangkan untuk Beban Barang dan Jasa terbesar terdapat pada Ditjen PSDKP yang sebagian besar berasal dari pengadaan BBM dengan total sebesar Rp204.864.657.000,00 yang terdiri dari 24 kontrak pada 15 Satker.

### D.2.4 Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan Rp250.057.375.591,00*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp250.057.375.591,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar

Rp90.978.074.475,00 atau 26,68% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp341.035.450.066,00.

Rincian saldo akun Beban Pemeliharaan disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel D.19**
**Rincian Saldo Beban Pemeliharaan**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 97.220.825.352 | 126.199.441.937 | (28.978.616.585) | (22,96) |
| Beban Asuransi Gedung dan Bangunan | 1.999.737.930 | 1.999.916.278 | (178.348) | (0,01) |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya | 4.836.695.105 | 6.356.565.821 | (1.519.870.716) | (23,91) |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 114.943.994.268 | 165.731.573.499 | (50.787.579.231) | (30,64) |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4.179.491.560 | 3.718.315.732 | 461.175.828 | 12,40 |
| Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 1.821.126.267 | 3.959.103.279 | (2.137.977.012) | (54,00) |
| Beban Pemeliharaan Irigasi | 1.034.728.659 | 2.302.696.564 | (1.267.967.905) | (55,06) |
| Beban Pemeliharaan Jaringan | 4.325.984.554 | 7.194.944.142 | (2.868.959.588) | (39,87) |
| Beban Pemeliharaan Lainnya | 166.050.960 | 547.497.230 | (381.446.270) | (69,67) |
| Beban Pemeliharaan | 1.298.999.831 | 3.049.576.134 | (1.750.576.303) | (57,40) |
| Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan | 1.759.816.843 | 2.890.073.520 | (1.130.256.677) | (39,11) |
| Beban Persediaan suku cadang | 16.460.467.062 | 17.037.225.480 | (576.758.4180 | (3,39) |
| Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan | 9.457.200 | 48.520.450 | (39.063.250) | (80,51) |
| **Total** | **250.057.375.591** | **341.035.450.066** | **(90.978.074.475)** | **(26,68)** |

Rincian saldo akun Beban Pemeliharaan untuk masing-masing Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 *Audited* disajikan sebagai berikut.

**Tabel D.20**
**Rincian Beban Pemeliharaan Berdasarkan Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 70.876.278.540 | 66.251.385.784 | 4.624.892.756 | 6,98 |
| Itjen | 639.786.947 | 1.168.104.336 | (528.317.389) | (45,23) |
| Ditjen PT | 36.351.410.511 | 43.793.249.955 | (7.441.839.444) | (16,99) |
| Ditjen PB | 29.800.413.256 | 39.531.632.420 | (9.731.219.164) | (24,62) |
| Ditjen PSDKP | 48.914.090.768 | 77.668.126.702 | (28.754.035.934) | (37,02) |
| Ditjen PDSPKP | 3.972.147.829 | 6.615.556.600 | (2.643.408.771) | (39,96) |

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Ditjen PK | 5.174.075.408 | 8.110.707.732 | (2.936.632.324) | (36,21) |
| BPPSDMKP | 28.419.109.846 | 72.848.253.397 | (44.429.143.551) | (60,99) |
| BPPMHKP | 25.910.062.486 | 25.048.433.140 | 861.629.346 | 3,44 |
| **Total** | **250.057.375.591** | **341.035.450.066** | **(90.978.074.475)** | **(26,68)** |

Beban Pemeliharaan pada Unit Eselon I yang mengalami penurunan signifikan ada pada Eselon I BPPSDMKP dengan mutasi aset sebagai berikut.

Mutasi Tambah:

a. 100-Saldo Awal

   1) Software 30.506.400

b. 101-Pembelian

   1) Gedung dan Bangunan 5.071.744.428

   2) Irigasi 197.047.500

   3) Peralatan dan Mesin 3.716.378.886

c. 102-Transfer Masuk

   1) Gedung dan Bangunan 35.356.470.904

   2) Jalan dan Jembatan 144.789.000

   3) Jaringan 75.352.000

   4) Peralatan dan Mesin 8.403.309.080

d. 103-Hibah Masuk

   1) Gedung dan Bangunan 175.000.000

   2) Irigasi 1.000.000

   3) Jalan dan Jembatan 60.000.000

   4) Peralatan dan Mesin 847.239.532

e. 105-Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP

1) Gedung dan Bangunan 14.243.925.784

2) Peralatan dan Mesin 9.991.090.041

f. 106-Pembatalan Penghapusan

1) Peralatan dan Mesin 105.600.000

g. 107-Reklasifikasi Masuk

1) Gedung dan Bangunan 3.507.107.140

2) Peralatan dan Mesin 6.770.416.802

h. 112-Perolehan Lainnya

1) Peralatan dan Mesin 11.666.766.333

i. 202-Pengembangan Nilai Aset (Langsung)

1) Gedung dan Bangunan 692.808.710

j. 204-Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah

1) Gedung dan Bangunan 7.367.277.024

k. 214-Koreksi Susulan

1) Gedung dan Bangunan 49.300.000

l. 402-Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif

1) Gedung dan Bangunan 617.057.000

2) Peralatan dan Mesin 1.428.418.500

Mutasi Kurang:

a. 264-Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang

1) Gedung dan Bangunan 15.118.255

b. 302-Transfer Keluar

1) Gedung dan Bangunan 36.803.701.819
2) Jalan dan Jembatan 1.246.804.000
3) Jaringan 75.352.000
4) Peralatan dan Mesin 8.325.034.891

c. 304-Reklasifikasi Keluar

1) Gedung dan Bangunan 3.507.107.140
2) Jaringan 474.000
3) Peralatan dan Mesin 6.923.547.802

d. 305-Koreksi Pencatatan

1) Gedung dan Bangunan 5.071.744.428
2) Peralatan dan Mesin 11.094.896.041

e. 401-Penghentian Aset Dari Penggunaan

1) Gedung dan Bangunan 9.988.025.350
2) Irigasi 124.825.000
3) Jaringan 3.435.707.000
4) Peralatan dan Mesin 50.412.715.953
5) Software 473.345.000

Serta pada Eselon I DJPSDKP dengan mutasi seperti berikut:

Mutasi Tambah:

a. 100-Saldo Awal

1) Gedung dan Bangunan 92.101.000
2) Peralatan dan Mesin 13.000.000

b. 101-Pembelian

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Gedung dan Bangunan | 30.830.000 |
| 2) | Irigasi | 30.000.000 |
| 3) | Jaringan | 266.748.000 |
| 4) | Peralatan dan Mesin | 905.378.261.133 |
| 5) | Software | 1.975.157.368 |

c. 102-Transfer Masuk

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Gedung dan Bangunan | 1.291.649.197 |
| 2) | Irigasi | 2.445.000 |
| 3) | Jaringan | 120.000.000 |
| 4) | Peralatan dan Mesin | 123.863.554.114 |

d. 105-Penyelesaian Pembangunan dengan KDP

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Gedung dan Bangunan | 363.562.300 |
| 2) | Peralatan dan Mesin | 1.578.818.600 |

e. 106-Pembatalan Penghapusan

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Gedung dan Bangunan | 197.341.000 |
| 2) | Peralatan dan Mesin | 150.389.130 |

f. 107-Reklasifikasi Masuk

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Gedung dan Bangunan | 6.496.477.804 |
| 2) | Jaringan | 341.027.214 |
| 3) | Peralatan dan Mesin | 1.808.261.649 |

g. 112-Perolehan Lainnya

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Peralatan dan Mesin | 1.532.202.000 |

h. 202-Pengembangan Nilai Aset (Langsung)

1) Gedung dan Bangunan 37.000.000

2) Peralatan dan Mesin 1.168.890.000

i. 204-Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah

1) Gedung dan Bangunan 184.824.482

2) Jalan dan Jembatan 39.999.000

3) Peralatan dan Mesin 1.305.406.000

j. 214-Koreksi Susulan

1) Peralatan dan Mesin 733.700.000

k. 402-Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif

1) Gedung dan Bangunan 443.222.380

2) Peralatan dan Mesin 2.004.300.805

Mutasi Kurang:

l. 264-Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang

1) Gedung dan Bangunan 1.500.000

2) Peralatan dan Mesin 18.100.000

m. 302-Transfer Keluar

1) Gedung dan Bangunan 2.208.308.847

2) Peralatan dan Mesin 124.046.515.517

n. 303-Hibah Keluar

1) Gedung dan Bangunan 611.792.000

2) Peralatan dan Mesin 1.436.466.000

o. 304-Reklasifikasi Keluar

1) Gedung dan Bangunan 5.155.249.004

2) Peralatan dan Mesin 3.080.809.383

p. 305-Koreksi Pencatatan

1) Jaringan 24.496.000

2) Peralatan dan Mesin 861.744.675.486

3) Software 1.975.157.368

q. 401-Penghentian Aset Dari Penggunaan

1) Gedung dan Bangunan 249.572.380

2) Jaringan 5.600.000

3) Peralatan dan Mesin 18.099.689.728

### D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas Rp266.436.344.507,00*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp266.436.344.507,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp569.069.446.953,00 atau 68,11% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp835.505.791.460,00.

Kemudian, rincian saldo akun Beban Perjalanan Dinas disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel D.21**
**Rincian Saldo Beban Perjalanan Dinas**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Perjalanan Biasa | 183.041.409.096 | 545.922.101.257 | (362.880.692.161) | (66,47) |
| Beban Perjalanan Tetap | 13.157.900 | 186.054.148 | (172.896.248) | (92,93) |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7.190.201.739 | 24.348.689.680 | (17.158.487.941) | (70,47) |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 16.968.830.886 | 63.379.313.962 | (46.410.483.076) | (73,23) |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 35.001.799.626 | 157.940.576.925 | (122.938.777.299) | (77,84) |
| Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri | 8.283.818.677 | 29.507.144.110 | (21.223.325.433) | (71,93) |
| Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri | 6.686.662.395 | 8.405.241.650 | (1.718.579.255) | (20,45) |

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Perjalanan | 9.250.464.188 | 5.816.669.728 | 3.433.794.460 | 59,03 |
| **Total** | **266.436.344.507** | **835.505.791.460** | **(569.069.446.953)** | **(68,11)** |

Berikut ini Rincian saldo akun Beban Perjalanan Dinas untuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 *Audited*.

**Tabel D.22**
**Rincian Beban Perjalanan Dinas Berdasarkan Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 15.860.566.504 | 97.154.259.165 | (81.293.692.661) | (83,67) |
| Itjen | 6.406.971.346 | 36.457.547.036 | (30.050.575.690) | (82,43) |
| Ditjen PT | 60.161.083.374 | 162.445.383.793 | (102.284.300.419) | (62,97) |
| Ditjen PB | 34.864.136.633 | 91.348.214.338 | (56.484.077.705) | (61,83) |
| Ditjen PSDKP | 21.571.368.017 | 117.372.116.676 | (95.800.748.659) | (81,62) |
| Ditjen PDSPKP | 4.779.594.735 | 65.371.746.073 | (60.592.151.338) | (92,69) |
| Ditjen PK | 99.382.668.757 | 150.661.582.859 | 51.278.914.102 | (34,04) |
| BPPSDMKP | 12.944.958.457 | 74.901.825.009 | (61.956.866.552) | (82,72) |
| BPPMHKP | 10.464.996.684 | 39.793.116.511 | (29.328.119.827) | (73,70) |
| **Total** | **266.436.344.507** | **835.505.791.460** | **(569.069.446.953)** | **(68,11)** |

Beban Perjalanan Dinas mengalami penurunan pada seluruh Unit Eselon I karena Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

### D.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

*Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Rp347.004.118.903,00*

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp347.004.118.903,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp272.252.653.796,00 atau 43,96% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp619.256.772.699,00.

Kemudian, rincian saldo akun Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel D.23**
**Rincian Saldo Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada | 0 | 2.712.816.000 | (2.712.816.000) | (100,00) |
| Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau | 64.336.379.317 | 87.202.864.707 | (22.866.485.390) | (26,22) |
| Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau | 44.984.797.790 | 59.919.253.460 | (14.934.455.670) | (24,92) |
| Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau | 153.950.093.672 | 295.934.251.385 | (141.984.157.713) | (47,98) |
| Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk | 31.588.950.697 | 9.762.894.025 | 21.826.056.672 | 223,56 |
| Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada | 0 | 6.914.436.900 | (6.914.436.900) | (100,00) |
| Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada | 5.126.587.750 | 4.787.047.755 | 339.539.995 | 7,09 |
| Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan | 47.017.309.677 | 152.023.208.467 | (105.005.898.790) | (69,07) |
| **Total** | **347.004.118.903** | **619.256.772.699** | **(272.252.653.796)** | **(43,96)** |

Rincian saldo akun Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 *Audited* disajikan sebagai berikut.

**Tabel D.24**
**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat**
**Berdasarkan Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Ditjen PT | 109.816.091.605 | 121.974.977.373 | (12.158.885.768) | (9,97) |
| Ditjen PB | 98.878.524.590 | 334.615.617.843 | (235.737.093.253) | (70,45) |
| Ditjen PDSPKP | 18.463.653.743 | 91.107.870.190 | (72.644.216.447) | (79,73) |
| Ditjen PK | 119.531.501.160 | 70.985.835.693 | 48.545.665.467 | 68,39 |
| BPPSDMKP | 314.347.805 | 572.471.600 | (258.123.795) | (45,09) |
| **Total** | **347.004.118.903** | **619.256.772.699** | **(272.252.653.796)** | **(43,96)** |

Penurunan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat palling besar terdapat pada Ditjen Perikanan Budi Daya dengan posisi Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp58.129.242.001,00 merupakan bioflok 100 paket pada Setditjen PB.

Terdapat perbedaan Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel D.25**
**Perbedaan Saldo Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat**
**Per 31 Desember 2025 pada LRA dan LO**

| Uraian | | Nilai |
|---|---|---|
| Beban Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (LO) | | 347.004.118.903 |
| Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat (LRA) | | 1.526.211.637.408 |
| Persediaan Awal Tahun untuk diserahkan kepada masyarakat | + | 87.754.621.847 |
| Persediaan Akhir Tahun untuk diserahkan kepada masyarakat | - | 855.243.211.067 |
| Total | | 758.723.048.188 |
| Selisih | | (411.718.929.285) |

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat merupakan/berasal dari data sebagai berikut.

**Tabel D.26**
**Rincian Perbedaan Saldo Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat**
**Per 31 Desember 2025 pada LRA dan LO**

| Uraian | Nilai |
|---|---|
| K02-Transfer Keluar | (11.702.107.501) |
| K03-Hibah Keluar | (1.800.000) |
| K04-Usang | (223.911.800) |
| K05-Rusak | (122.427.000) |
| K06-Keluar Lainnya | (46.996.190.585) |
| K10-Reklasifikasi Keluar | (56.716.586.266) |
| K11-Reklasifikasi ke Aset | (1.237.755.033) |
| K15-Persediaan Dalam Proses Keluar | (141.948.995.743) |
| K98-Koreksi Nilai Kurang | (423.489.400) |
| K99-Koreksi Kuantitas Kurang | (613.649.180) |
| M03-Transfer Masuk | 11.702.107.501 |
| M06-Perolehan Lainnya | 94.854.429.644 |
| M10-Reklasifikasi Masuk | 57.140.171.153 |
| M11-Reklasifikasi Dari Aset | 1.223.895.033 |
| M15-Persediaan Dalam Proses Masuk | 138.967.479.426 |
| M98-Koreksi Nilai Tambah | 16.654.400 |
| M99-Koreksi Kuantitas Tambah | 4.173.000 |
| P01-Hasil Opname Fisik | (223.913.903) |
| Belanja barang yang masih harus dibayar | 84.973.893.000 |
| Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya | 3.296.718.092 |
| RPATA | (539.290.140.058) |

| Uraian | Nilai |
|---|---|
| Jurnal Terpusat | 99.936.900 |
| Jurnal Manual | (4.587.126.326) |
| Lain-Lain | 89.705.361 |
| **Jumlah** | **(411.718.929.285)** |

### D.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp745.895.188.330,00*

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp745.895.188.330,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp12.153.485.998,00 atau 1,60% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp758.048.674.328,00.

Adanya penurunan pada beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah karena adanya pengurangan jumlah aset yang dihapuskan karena kondisinya sudah mengalami rusak berat maupun dengan adanya proses likuidasi keluar dengan nilai paling besar terdapat pada Ditjen PSDKP dan BPPMHKP.

Pada Eselon I Ditjen PSDKP terdapat transaksi keluar seperti berikut:

| | |
|---|---|
| **264-Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang** | |
| Gedung dan Bangunan | (1.500.000) |
| Peralatan dan Mesin | (18.100.000) |
| **302-Transfer Keluar** | |
| Gedung dan Bangunan | (2.208.308.847) |
| Peralatan dan Mesin | (124.046.515.517) |
| **303-Hibah Keluar** | |
| Gedung dan Bangunan | (611.792.000) |
| Peralatan dan Mesin | (1.436.466.000) |
| **304-Reklasifikasi Keluar** | |
| Gedung dan Bangunan | (5.155.249.004) |
| Peralatan dan Mesin | (3.080.809.383) |
| **305-Koreksi Pencatatan** | |
| Jaringan | (24.496.000) |
| Peralatan dan Mesin | (861.744.675.486) |
| Software | (1.975.157.368) |
| **401-Penghentian Aset Dari Penggunaan** | |
| Gedung dan Bangunan | (249.572.380) |
| Jaringan | (5.600.000) |
| Peralatan dan Mesin | (18.099.689.728) |

Sedangkan pada Eselon I BPPMHKP terdapat transaksi keluar seperti berikut:

| | |
|---|---|
| **264-Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang** | |
| Gedung dan Bangunan | (2.160.030.901) |
| Peralatan dan Mesin | (5.444.500) |
| **302-Transfer Keluar** | |
| Gedung dan Bangunan | (42.349.930.495) |
| Irigasi | (329.154.400) |
| Jalan dan Jembatan | (1.149.592.014) |
| Jaringan | (3.673.005.004) |
| Peralatan dan Mesin | (60.043.622.964) |
| Software | (196.394.000) |
| **304-Reklasifikasi Keluar** | |
| Gedung dan Bangunan | (199.370.000) |
| Jaringan | (30.500.000) |
| Peralatan dan Mesin | (9.003.388.657) |
| **305-Koreksi Pencatatan** | |
| Gedung dan Bangunan | (3.124.136.224) |
| Irigasi | (1.652.000) |
| Jalan dan Jembatan | (83.830.000) |
| Jaringan | (41.035.325) |
| Peralatan dan Mesin | (658.076.866) |
| Software | (18.150.000) |
| **315-Reklasifikasi Keluar ke Persediaan** | |
| Peralatan dan Mesin | (11.264.000) |
| **401-Penghentian Aset Dari Penggunaan** | |
| Gedung dan Bangunan | (4.242.421.900) |
| Irigasi | (5.233.000) |
| Jaringan | (84.712.150) |
| Peralatan dan Mesin | (10.696.004.901) |
| Software | (25.000.000) |

Kemudian, rincian saldo akun Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel D.27**
**Rincian Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 352.608.908.241 | 359.841.045.969 | (7.232.137.728) | (2,01) |

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 134.787.421.578 | 134.250.036.063 | 537.385.515 | 0,40 |
| Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan | 130.637.411.051 | 135.514.188.403 | (4.876.777.352) | (3,60) |
| Beban Penyusutan Irigasi | 62.876.886.260 | 65.832.935.164 | (2.956.048.904) | (4,49) |
| Beban Penyusutan Jaringan | 11.379.726.238 | 11.161.386.263 | 218.339.975 | 1,96 |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 180.194.074 | 279.477.660 | (99.283.586) | (35,52) |
| Beban Penyusutan Properti Investasi | 11.896.718.376 | 11.789.598.708 | 107.119.668 | 0,91 |
| Beban Amortisasi Hak Cipta | 0 | 178.571 | (178.571) | (100,00) |
| Beban Amortisasi Paten | 267.415.891 | 413.893.537 | (146.477.646) | (35,39) |
| Beban Amortisasi Software | 29.172.702.761 | 24.082.410.977 | 5.090.291.784 | 21,14 |
| Beban Amortisasi Lisensi | 2.736.807.747 | 149.791.996 | 2.587.015.751 | 1,727,07 |
| Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya | 1.310.760.577 | 1.120.309.671 | 190.450.906 | 17,00 |
| Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan | 138.516.260 | 96.807.023 | 41.709.237 | 43,08 |
| Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 2.388.276.237 | 6.267.632.815 | (3.879.356.578) | (61,90) |
| Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak | 5.513.443.039 | 7.248.981.508 | (1.735.538.469) | (23,94) |
| **Total** | **745.895.188.330** | **758.048.674.328** | **(12.153.485.998)** | **(1,60)** |

Rincian saldo akun Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 *Audited* disajikan sebagai berikut.

**Tabel D.28**
**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 85.655.409.684 | 74.722.295.123 | 10.933.114.561 | 14,63 |
| Itjen | 2.135.011.397 | 2.290.101.538 | (155.090.141) | (6,77) |
| Ditjen PT | 230.084.155.402 | 230.972.040.573 | (887.885.171) | (0,38) |
| Ditjen PB | 106.345.192.136 | 109.487.602.990 | (3.142.410.854) | (2,87) |
| Ditjen PSDKP | 166.324.783.917 | 175.616.060.748 | (9.291.276.831) | (5,29) |
| Ditjen PDSPKP | 11.456.753.215 | 10.993.123.836 | 463.629.379 | 4,22 |
| Ditjen PK | 26.255.123.004 | 21.068.599.317 | 5.186.523.687 | 24,62 |
| BPPSDMKP | 96.408.854.818 | 102.828.078.065 | (6.419.223.247) | (6,24) |
| BPPMHKP | 21.229.904.757 | 30.070.772.138 | (8.840.867.381) | (29,40) |
| **Total** | **745.895.188.330** | **758.048.674.328** | **(12.153.485.998)** | **(1,60)** |

### D.2.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp60.923.486.486,00*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah nilai setelah perhitungan tarif penyisihan dari piutang yang diproyeksikan tidak akan tertagih pada periode pelaporan. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp60.923.486.486,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp54.845.225.222,00 atau 902,32% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp6.078.261.264,00. Kemudian, rincian saldo akun Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel D.29**
**Rincian Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Penyisihan Piutang PNBP | 55.192.053.692 | (1.131.981.556) | 56.324.035.248 | (4.975,70) |
| Beban Penyisihan Piutang Lainnya | -38.542.476 | 6.416.546.187 | (6.455.088.663) | (100,60) |
| Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya | 1.251.000 | (161.615) | 1.412.615 | (874,06) |
| Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ? Piutang BLU Pelayanan Pendidikan | 0 | 59.000 | (59.000) | (100,00) |
| Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia | 0 | 831.217 | (831.217) | (100,00) |
| Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU | 2.854.619.170 | 0 | 2.854.619.170 | 0,00 |
| Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan | 1.996.324 | 53.625 | 1.942.699 | 3.622,75 |
| Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional | 0 | 98.901 | (98.901) | (100,00) |
| Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Kementerian | 0 | 803.509.151 | (803.509.151) | (100,00) |
| Belanja Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya | 70.437.547 | 0 | 70.437.547 | 0,00 |
| Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - | (25.000) | 2.102.634 | (2.127.634) | (101,19) |
| Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - | 2.841.696.229 | (12.796.280) | 2.854.492.509 | (22.307,21) |
| **Total** | **60.923.486.486** | **6.078.261.264** | **54.845.225.222** | **902,32** |

Rincian saldo akun Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk masing-masing Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 *Audited* disajikan sebagai berikut.

**Tabel D.30**
**Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 2.926.565.312 | 9.066.893.262 | (6.140.327.950) | (67,72) |
| Ditjen PT | 2.528.255.148 | 143.265.849 | 2.384.989.299 | 1.664,73 |
| Ditjen PB | 112.135 | 24.302.442 | (24.190.307) | (99,54) |
| Ditjen PSDKP | 55.245.487.563 | 2.371.939.104 | 52.873.548.459 | 2.229,13 |
| Ditjen PDSPKP | 2.171.832 | 5.917.906 | (3.746.074) | (63,30) |
| Ditjen PK | 218.199.389 | 29.810.528 | 188.388.861 | 631,95 |
| BPPSDMKP | 2.724.155 | 2.691.942.632 | (2.689.218.477) | (99,90) |
| BPPMHKP | 75.972 | 2.168.035 | (2.092.063) | (96,50) |
| Satker Konsolidasi | (105.020) | (8.257.978.494) | 8.257.873.474 | (100,00) |
| **Total** | **60.923.486.486** | **6.078.261.264** | **54.845.225.222** | **902,32** |

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih terbesar paling signifikan terdapat pada Sekretariat Ditjen PSDKP atas PNBP Denda Administratif Sdr. A dan Sdr. T (Pagar Laut) sebesar Rp55.248.266.880,00. Piutang telah dikategorisasikan sebagai piutang macet 1 bulan sejak Surat Tagihan PNBP Ketiga diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2025. Piutang belum dilimpahkan penagihannya ke KPKNL karena masih dalam proses penagihan sesuai PermenKP 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Selisih LRA dan LO pada Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih didetilkan pada tabel berikut.

**Tabel D.31**
**Perbedaan Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**
**Per 31 Desember 2025 pada LRA dan LO**

| | | |
|---|---|---|
| Beban Penyisihan Piutang (LO) | | 60.923.486.486 |
| Penyisihan Piutang akhir tahun | | (135.789.151.786) |
| Penyisihan Piutang awal tahun | - | (66.676.767.028) |
| Jumlah | | 69.112.384.758 |
| **Selisih** | | **(8.188.898.272)** |

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan/berasal dari data sebagai berikut.

**Tabel D.32**
**Rincian Perbedaan Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**
**Per 31 Desember 2025 pada LRA dan LO**

| Uraian | Nilai |
|---|---|
| Penjelasan Selisih | |
| 1. Jurnal Balik Penyisihan piutang tak tertagih menggunakan akun Koreksi Lainnya (LPE) | (8.273.562.194) |
| 1. Jurnal Balik Beban Penyisihan piutang tak tertagih menggunakan akun Koreksi Lainnya (LPE) | 13.869.769 |
| 3. penyesuaian nilai piutang lainnya pada SUPM Waeheru | 367.840 |
| Koreksi Lain-Lain | 70.426.313 |
| **Jumlah** | **(8.188.898.272)** |

## D.3 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

*Defisit Dari Kegiatan Operasional Rp2.907.397.895.003,00*

Surplus/Defisit dari saldo pos akun Pendapatan dikurangi Beban yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebagai berikut.

**Tabel D.33**
**Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Sumber Daya Alam | 1.023.503.649.076 | 954.494.968.076 | 69.008.681.000 | 7,23 |
| Pendapatan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | 1.178.327.558.962 | 1.060.883.227.384 | 117.444.331.578 | 11,07 |
| Pendapatan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | 281.174.661.046 | 192.598.593.229 | 88.576.067.817 | 45,99 |
| **Subtotal** | **2.483.005.869.084** | **2.207.976.788.689** | **275.029.080.395** | **12,46** |
| Beban Pegawai | 1.993.845.112.181 | 1.912.227.733.739 | 81.617.378.442 | 4,27 |
| Beban Persediaan | 91.702.626.670 | 147.530.974.235 | (55.828.347.565) | (37,84) |
| Beban Barang dan Jasa | 1.634.539.511.419 | 2.009.908.942.375 | (375.369.430.956) | (18,68) |
| Beban Pemeliharaan | 250.057.375.591 | 341.035.450.066 | (90.978.074.475) | (26,68) |
| Beban Perjalanan Dinas | 266.436.344.507 | 835.505.791.460 | (569.069.446.953) | (68,11) |
| Beban Barang untu Diserahkan Kepada Masyarakat | 347.004.118.903 | **619.256.772.699** | (272.252.653.796) | (43,96) |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 745.895.188.330 | 758.048.674.328 | (12.153.485.998) | (1,60) |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 60.923.486.486 | 6.078.261.264 | 54.845.225.222 | 902,32 |
| **Subtotal** | **5.390.403.764.087** | **6.629.592.600.166** | **(1.239.188.836.079)** | **(18,69)** |
| **Total** | **(2.907.397.895.003)** | **(4.421.615.811.477)** | **1.514.217.916.474** | **(34,25)** |

## D.4 SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

*Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Rp133.415.807.061,00*

Akun Pendapatan/Beban Pelepasan Aset Non Lancar adalah akun yang temasuk ke dalam pos Laporan Operasional untuk pos Surplus/Defisit Non Operasional. Defisit dari saldo akun Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dikurangi Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp133.415.807.061,00.

Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp19.137.191.387,00 atau 16,75% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar defisit Rp114.278.615.674,00.

Kemudian, rincian saldo akun Defisit Pelepasan Aset Non Lancar disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel D.34**
**Rincian Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | (Kenaikan) Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | 7.783.840.760 | 7.126.547.042 | 657.293.718 | 9,22 |
| **Dikurangi:** | | | | |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | 141.199.647.821 | 121.405.162.716 | 19.794.485.105 | 16,30 |
| **Total** | **(133.415.807.061)** | **(114.278.615.674)** | **(19.137.191.387)** | **16,75** |

### D.4.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.783.840.760,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp657.293.718,00 atau 9,22% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp7.126.547.042,00. Kemudian, rincian saldo akun Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel D.35**
**Rincian Saldo Beban Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan | 222.370.000 | 101.476.436 | 120.893.564 | 119,13 |
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | 7.433.230.013 | 6.861.872.613 | 571.357.400 | 8,33 |

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya | 128.240.747 | 163.197.993 | (34.957.246) | (21,42) |
| **Total** | **7.783.840.760** | **7.126.547.042** | **657.293.718** | **9,22** |

Rincian saldo akun Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk masing-masing Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 *Audited* disajikan sebagai berikut.

**Tabel D.36**
**Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar**
**Berdasarkan Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 74.531.000 | 180.468.715 | (105.937.715) | (58,70) |
| Itjen | 65.645.140 | 0 | 65.645.140 | 0,00 |
| Ditjen PT | 2.356.521.700 | 2.212.203.768 | 144.317.932 | 6,52 |
| Ditjen PB | 916.626.100 | 2.080.792.147 | (1.164.166.047) | (55,95) |
| Ditjen PSDKP | 522.484.834 | 312.631.038 | 209.853.796 | 67,13 |
| Ditjen PDSPKP | 1.474.098.396 | 691.600.248 | 782.498.148 | 113,14 |
| Ditjen PKRL | 426.791.056 | 427.360.838 | (569.782) | (0,13) |
| BPPSDMKP | 1.233.457.020 | 901.929.734 | 331.527.286 | 36,76 |
| BPPMHKP | 713.685.514 | 319.560.554 | 394.124.960 | 123,33 |
| **Total** | **7.783.840.760** | **7.126.547.042** | **657.293.718** | **9,22** |

Penurunan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar paling signifikan terdapat pada Ditjen PB karena adanya penurunan pendapatan atas lelang pelepasan Aset pada Eselon I tersebut.

### D.4.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp141.199.647.821,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp19.794.485.105,00 atau 16,30% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp121.405.162.716,00. Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan transaksi-transaksi Kerugian Pelepasan Aset yang disajikan lebih detail ke dalam Unit Eselon I lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel D.37**
**Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar Berdasarkan Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 57.877.854.121 | 7.171.911.314 | 50.705.942.807 | 707,01 |
| Itjen | 2.343.300 | 0 | 2.343.300 | 0,00 |
| Ditjen PT | 1.262.023.538 | 19.896.308.261 | (18.634.284.723) | (93,66) |
| Ditjen PB | 68.066.543.012 | 85.391.101.888 | (17.324.558.876) | (20,29) |
| Ditjen PSDKP | 2.332.436.913 | 1.501.160.450 | 831.276.463 | 55,38 |
| Ditjen PDSPKP | 1.559.713.076 | 108.111.246 | 1.451.601.830 | 1.342,69 |
| Ditjen PKRL | 1.274.204.200 | 2.925.514.455 | (1.651.310.255) | (56,45) |
| BPPSDMKP | 5.257.164.384 | 3.713.031.978 | 1.544.132.406 | 41,59 |
| BPPMHKP | 3.567.365.277 | 698.023.124 | 2.869.342.153 | 411,07 |
| **Total** | **141.199.647.821** | **121.405.162.716** | **19.794.485.105** | **16,30** |

Kenaikan Beban Pelepasan Aset Non Lancar paling signifikan terjadi pada Setjen karena adanya penurunan jumlah asset yang dihapuskan pada BPISDKP berupa Data Citra Satelit sebesar Rp57.874.396.389,00.

## D.5 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

*Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp119.935.331.013,00*

Surplus/Defisit dari saldo akun Pendapatan Non Operasional Lainnya dikurangi Beban Non Operasional Lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebagai berikut.

**Tabel D.38**
**Rincian Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | (Kenaikan) Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 146.406.156.792 | 250.932.742.618 | (104.526.585.826) | (41,66) |
| Dikurangi | | | | |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 26.470.825.779 | 65.251.941.564 | (38.781.115.785) | (59,43) |
| **Total** | **119.935.331.013** | **185.680.801.054** | **(65.745.470.041)** | **(35,41)** |

### D.5.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp146.406.156.792,00.

Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp104.526.585.826,00 atau 41,66% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp250.932.742.618,00.

Kemudian, rincian saldo akun Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel D.39**
**Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang | 115.508.032 | 0 | 115.508.032 | 0,00 |
| Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN | 247.538.461 | 0 | 247.538.461 | 0,00 |
| Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap | 8.500.000 | 594.686.184 | (586.186.184) | (98,57) |
| Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap | 39.760.092 | 1.000.000 | 38.760.092 | 3.876,01 |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang | 315.370.589 | 901.500.265 | (586.129.676) | (65,02) |
| Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang | 1.213.372.647 | 5.908.362.953 | (4.694.990.306) | (79,46) |
| Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang | 11.124.915 | 104.020.300 | (92.895.385) | (89,31) |
| Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan | 64.812.239 | 111.526.035 | (46.713.796) | (41,89) |
| Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi | 4.446.754.333 | 111.620.770 | 4.335.133.563 | 3.883,81 |
| Pendapatan Perolehan Aset Lainnya | 139.150.097.209 | 239.012.099.894 | (99.862.002.685) | (41,78) |
| Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan | 793.318.275 | 4.187.926.217 | (3.394.607.942) | (81,06) |
| **Total** | **146.406.156.792** | **250.932.742.618** | **(104.526.585.826)** | **(41,66)** |

Rincian saldo akun Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 *Audited* disajikan sebagai berikut.

**Tabel D.40**
**Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**
**Berdasarkan Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 4.809.863.185 | 8.416.966.124 | (3.607.102.939) | (42,86) |
| Itjen | 5.029.794 | 0 | 5.029.794 | 100,00 |
| Ditjen PT | 2.137.137.787 | 103.185.244.615 | (101.048.106.828) | (97,93) |
| Ditjen PB | 133.318.236.253 | 133.526.391.364 | (208.155.111) | (0,16) |
| Ditjen PSDKP | 1.784.875.849 | 583.621.038 | 1.201.254.811 | 205,83 |
| Ditjen PDSPKP | 160.641.752 | 429.222.418 | (268.580.666) | (62,57) |
| Ditjen PK | 2.462.116.046 | 1.249.356.722 | 1.212.759.324 | 97,07 |
| BPPSDMKP | 1.691.667.780 | 2.775.623.230 | (1.083.955.450) | (39,05) |
| BPPMHKP | 36.588.346 | 766.317.107 | (729.728.761) | (95,23) |
| **Total** | **146.406.156.792** | **250.932.742.618** | **(104.526.585.826)** | **(41,66)** |

Nilai paling signifikan terdapat pada BLUPPB Karawang berupa pencatatan aset dari BINS berupa Benih Nila 3-5 cm, Benih Nila 5-7 cm, Larva Nila Hasil Pemijahan Nila, dan Nila BINS 3-5 cm sebesar Rp38.647.238.644,00.

### D.5.5 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp26.470.825.779,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp38.781.115.785,00 atau 59,43% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp65.251.941.564,00.

Kemudian, rincian saldo akun Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel D.41**
**Rincian Saldo Beban dari Kegiatan Non Operasonal Lainnya**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Beban Selisih Kurs Terealisasi | 0 | 4.354.241.000 | (4.354.241.000) | (100,00) |
| Beban Penyesuaian Nilai Persediaan | 991.252.055 | 46.462.251.872 | (45.470.999.817) | (97,87) |
| Beban Persediaan Rusak/Usang | 1.968.201.151 | 833.717.518 | 1.134.483.633 | 136,08 |
| Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi | 23.511.372.573 | 13.601.731.174 | 9.909.641.399 | 72,86 |
| **Total** | **26.470.825.779** | **65.251.941.564** | **(38.781.115.785)** | **(59,43)** |

Rincian saldo akun Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 *Audited* disajikan sebagai berikut.

**Tabel D.42**
**Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**
**Berdasarkan Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 0 | 18.002.355.357 | (18.002.355.357) | (100,00) |
| Ditjen PT | 11.340.000 | 42.784.860.488 | (42.773.520.488) | (99,97) |
| Ditjen PB | 3.316.728.218 | 3.767.523.284 | (450.795.066) | (11,97) |
| Ditjen PSDKP | 21.598.775.640 | 34.820.500 | 21.563.955.140 | 61.928,91 |
| Ditjen PDSPKP | 225.471.300 | 265.994.701 | (40.523.401) | (15,23) |
| Ditjen PK | 0 | 232.986.000 | (232.986.000) | (100,00) |
| BPPSDMKP | 135.281.885 | 13.766.900 | 121.514.985 | 882,66 |
| BPPMHKP | 1.183.228.736 | 149.634.334 | 1.033.594.402 | 690,75 |
| **Total** | **26.470.825.779** | **65.251.941.564** | **(38.781.115.785)** | **(59,43)** |

Penurunan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya paling signifikan terdapat ada pada Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp42.773.520.488,00 karena sudah tidak ada koreksi nilai persediaan pada SKPT Moa sebesar Rp42.787.497.856,00.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang terbesar ada pada Ditjen PSDKP yang merupakan beban selisih kurs sebesar Rp7.646.333.569,00 dari Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) Nomor 251400000001420 tanggal 31 Desember 2025 sebesar 16.357.543,20 EUR atau senilai Rp323.346.917.329,00 (Kurs 1 EUR = Rp19.767,45) atas SP4HLN Nomor SP4H-0123/PR.8/2026 untuk lender BBVA dan 251400000001482 31 Desember 2025 sebesar 29.676.946,35 EUR atau senilai Rp586.637.553.126,00 (Kurs 1 EUR = Rp19.767,45) atas SP4HLN Nomor SP4H-0128/PR.8/2026 untuk lender ICO.

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



# PENJELASAN ATAS POS-POS LPE

Catatan atas Laporan Keuangan



# E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal Rp25.220.160.346.839,00*

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp25.220.160.346.839,00 dan Rp25.529.221.392.262,00. Rincian nilai ekuitas awal pada masing-masing eselon I per 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel E.1**
**Rincian Saldo Awal Ekuitas pada Masing-Masing Eselon I**
**Per 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024**

| Eselon I | 1 Januari 2025 | 1 Januari 2024 |
|---|---|---|
| Setjen | 2.320.994.186.025 | 2.581.548.736.255 |
| Itjen | 6.172.329.601 | 5.762.264.041 |
| Ditjen PT | 5.883.172.592.765 | 5.802.866.832.042 |
| Ditjen PB | 5.462.922.038.268 | 5.406.458.171.217 |
| Ditjen PSDKP | 1.384.998.306.029 | 1.359.158.574.563 |
| Ditjen PDSPKP | 818.344.135.993 | 823.452.826.731 |
| Ditjen PKRL | 856.829.743.540 | 837.822.061.097 |
| BPPSDMKP | 7.872.838.249.001 | 7.899.796.695.676 |
| BPPMHKP | 545.884.690.125 | 745.154.664.299 |
| Satker Konsolidasi | 68.004.075.492 | 67.200.566.341 |
| **TOTAL** | **25.220.160.346.839** | **25.529.221.392.262** |

Penurunan Ekuitas Awal disebabkan unsur yang menambah nilai ekuitas yaitu Defisit LO yang mengalami kenaikan, sedangkan koreksi yang menambah nilai ekuitas dan transaksi antar entitas mengalami penurunan.

## E.2 Surplus (Defisit) LO

*(Defisit) LO Rp2.865.595.537.673,00*

Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luarbiasa. Perbandingan jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel E.2**
**Perbandingan Surplus/Defisit LO**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 |
|---|---|---|
| **Kegiatan Operasional** | | |
| Pendapatan Operasional | 2.483.005.869.084 | 2.207.976.788.689 |
| Beban Operasional | 5.390.403.764.087 | 6.629.592.600.166 |
| **Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional** | **(2,907,397,895,003)** | **(4.421.615.811.477)** |
| **Kegiatan Non Operasional** | | |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar | (133.415.807.061) | (114.278.615.674) |
| Surplus/Defisit Kegiatan Non Opr. Lainnya | 119.935.331.013 | 185.680.801.054 |
| **Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional** | (13,480,476,048) | 71.402.185.380 |
| **Total** | **(2,920,878,371.064)** | **(4.278.811.440.717)** |

Dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022, terdapat penurunan Surplus/defisit LO sebesar Rp1.429.335.255.046.00. Penurunan Surplus/ Defisit LO per 31 Desember 2025 disebabkan karena penurunan Surplus/Defisit Kegiatan Operasional yang cukup signifikan yakni Rp1,429,335,255,046,00 atau sebesar 32,85%.

## E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

*Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas (Rp81,396,663,892)*

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar (Rp81,396,663,892,00) dan (Rp25.028.983.106,00).

### E.3.1 Koreksi Nilai Persediaaan

*Koreksi Nilai Persediaan (Rp2.983.385.417,00)*

Saldo Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp2.983.385.417) dan Rp44.567.008.171.

Rincian saldo Koreksi Nilai Persediaan pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel E.3**
**Rincian Saldo Koreksi Nilai Persediaan pada Masing-Masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Ditjen PT | 1 | 42.787.497.856 | (42.787.497.855) | (100,00) |
| Ditjen PB | (2.370.100) | 1.617.942.116 | (1.620.312.216) | (100,15) |
| Ditjen PSDKP | 0 | 2.009.000 | (2.009.000) | (100,00) |

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Ditjen PDSPKP | 0 | (349.310.330) | 349.310.330 | (100,00) |
| Ditjen PKRL | (2.981.456.318) | 0 | (2.981.456.318) | 0,00 |
| BPPSDMKP | 441.000 | 508.869.529 | (508.428.529) | (99,91) |
| **Total** | **(2.983.385.417)** | **44.567.008.171** | **(47.550.393.588)** | **(106,69)** |

Dibandingkan dengan periode sebelumnya, Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan senilai Rp47.550.393.588,00. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya koreksi nilai persediaan pada Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut senilai Rp2.981.516.318,00.

### E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi

*Koreksi Atas Reklasifikasi Rp207733.800,00*

Koreksi Atas Reklasifikasi adalah koreksi yang diakibatkan perubahan jenis penggolongan dan kodefikasi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan dan kodefikasi BMN yang lain. Koreksi atas Reklasifikasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp207.733.800 dan Rp360.018.554,00.

Rincian saldo koreksi atas reklasifikasi pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel E.4**
**Rincian Saldo Koreksi atas Reklasifikasi pada Masing-Masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 25.812.000 | 29.520.487 | (3.708.487) | (12,56) |
| Ditjen PB | (4.482.000) | 154.864.732 | (159.346.732) | (102,89) |
| Ditjen PSDKP | 155.475.400 | 44.370.800 | 111.104.600 | 250,40 |
| Ditjen PDSPKP | | 212.717.293 | (212.717.293) | (100,00) |
| Ditjen PKRL | 0 | (7.865.132) | 7.865.132 | (100,00) |
| BPPSDMKP | 3.802.900 | (70.699.000) | 74.501.900 | (105,38) |
| BPPMHKP | 27.125.500 | (2.890.626) | 30.016.126 | (1.038,40) |
| **Total** | **207.733.800** | **360.018.554** | **(152.284.754)** | **(42,30)** |

Koreksi atas Reklasifikasi yang signifikan terdapat pada Ditjen PDSPKP senilai Rp155.475.400,00.

### E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi (Rp22.701.866.192,00)*

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berasal dari koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena penilaian kembali yang dapat berupa pembukuan persediaan yang diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan. pembukuan transaksi dengan dokumen sumber sebelum tahun berjalan, koreksi nilai/kuantitas, koreksi pencatatan dan lain-lain. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai (Rp22.701.866192,00) dan (Rp64.588.272.232,00).

Rincian saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per akun adalah sebagai berikut:

**Tabel E.5**
**Rincian Saldo Koreksi Aset Non Revaluasi Per Akun**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | (10.912.429.619) | (56.971.131.917) | 46.058.702.298 | (80.85) |
| Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi | (11.789.436.573) | (7.617.140.315) | 4.172.296.258 | 54,78 |
| **Total** | **(22.701.866.192)** | **(64.588.272.232)** | **41.886.406.040** | **64,85** |

Rincian saldo koreksi aset non revaluasi pada masing-masing Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel E.6**
**Rincian Saldo Koreksi Aset Non Revaluasi pada Masing-Masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | | | 31 Des 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi | Jumlah | Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi | Jumlah |
| Setjen | 6.006.034.037 | (9.757.886.636) | (3.751.852.599) | 225.107.099 | (7.899.778.299) | (7.674.671.200) |
| Itjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ditjen PT | 1.755.996.906 | 494.546.750 | 2.250.543.656 | (80.960.612.579) | 0 | (80.960.612.579) |
| Ditjen PB | 2.599.941.663 | (1.720.722.000) | 879.219.663 | 614.458.132 | 0 | 614.458.132 |
| Ditjen PSDKP | (19.421.038.655) | (367.562.409) | (19.788.601.064) | (4.988.448.272) | 286.332.484 | (4.702.115.788) |
| Ditjen PDSPKP | (193.225.114) | (213.351.713) | (406.576.827) | (118.430.208) | 0 | (118.430.208) |
| Ditjen PKRL | 2.138.383.820 | | 2.138.383.820 | 18.496.254.440 | (949.500) | 18.495.304.940 |
| BPPSDMKP | (4.358.317.205) | (224.460.565) | (4.582.777.770) | 9.696.360.781 | (2.745.000) | 9.693.615.781 |
| BPPMHKP | 559.794.929 | 0 | 559.794.929 | 64.178.690 | 0 | 64.178.690 |
| **Total** | **(10.912.429.619)** | **(11.789.436.573)** | **(22.701.866.192)** | **(56.971.131.917)** | **(7.617.140.315)** | **(64.588.272.232)** |

Koreksi Aset Non Revaluasi timbul karena adanya transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Transaksi terbesar koreksi non revaluasi ada pada Eselon I Sekretariat Jenderal, Ditjen PSDKP, BPPSDMKP dengan penjelasan transaksi signifikan sebagai berikut:

a. Sekretariat Jenderal senilai Rp3.751.852.599,00

   Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi yang terbesar terdapat pada satuan kerja Biro Umum dan PBJ senilai Rp3.751.852.599,00 yang antara lain merupakan transaksi pembukuan BMN eks proyek USAID sebesar Rp1.033.355.000,00; kapitalisasi tambah BMN dari belanja pemeliharaan sebesar Rp3.047.100.000,00 dan koreksi pencatatan nilai berkurang BMN berupa KDP untuk perbaikan pembukuan menjadi beberapa jenis barang.

b. Ditjen PSDKP senilai Rp5.916.112.493,00

   Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi yang terbesar terdapat pada satuan kerja Sekretariat Ditjen PSDKP senilai Rp7.061.010.424,00 yaitu pencatatan Saldo Awal Pakaian Pelindung, Saldo Awal Gedung Pos Jaga Permanen, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Kapal Pengawas Perikanan, Koreksi Pencatatan Pakaian Pelindung, Koreksi Pencatatan Speed Boat, Koreksi Pencatatan Handy Talky, dan Koreksi Pencatatan Inflatable Life Craft.

c. BPPSDMKP senilai Rp4.601.124.821,00

   Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi yang terbesar terdapat pada Politeknik KP Sorong senilai Rp3.715.557.500.

### E.3.4 Koreksi Lain – lain

*Koreksi Lain-Lain (101.322.878.467,00)*

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara antara lain. koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Koreksi Lain-Lain yang bersaldo negatif menunjukan bahwa saldo Koreksi Lain-Lain akan mengurangi Ekuitas Akhir. Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai (Rp101.322.878.467,00) dan (Rp5.367.737.599,00).

Rincian saldo koreksi lain-lain pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel E.7**
**Rincian Saldo Koreksi Lain-Lain pada Masing-Masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | (8.930.357.111) | 809.013.186 | (9.739.370.297) | (1.203,86) |
| Itjen | 0 | 119.391 | (119.391) | (100,00) |
| Ditjen PT | (195.526.637) | 1.991.659.101 | (2.187.185.738) | (109,82) |
| Ditjen PB | (24.872.877) | 359.365.993 | (384.238.870) | (106,92) |
| Ditjen PSDKP | (188.226.467) | (32.175.056) | (156.051.411) | 485,01 |
| Ditjen PDSPKP | 13.300.132 | 283.594.733 | (270.294.601) | (95,31) |
| Ditjen PKRL | 100.212.215.683 | (1.169.084.070) | 101.381.299.753 | (8.671,86) |
| BPPSDMKP | 456.233.473 | (200.977.733) | 657.211.206 | (327,01) |
| BPPMHKP | (732.057) | 45.216.199 | (45.948.256) | (101,62) |
| Satkon | 9.980.844.328 | (7.454.469.343) | 17.435.313.671 | (233,89) |
| **Total** | **(101.322.878.467)** | **(5.367.737.599)** | **106.690.616.066** | **(1.987,63)** |

Penjelasan Koreksi Lain-Lain terdapat pada masing-masing satker adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Transaksi terbesar Koreksi Lainnya Unit Eselon I Sekretariat Jenderal terdapat pada satker Biro Umum dan dan Pengadaan Barang/Jasa merupakan persetujuan belanja hibah langsung tunai sebesar Rp1.057.009.000,00 dan pada satker LPMU KP merupakan pembukuan Dana Bergulir Diragukan Tidak Tertagih sebesar Rp9.980.943.229,00.

2. Satker Konsolidasi

   Transaksi terbesar Koreksi Lainnya pada satker konsolidasi jurnal eliminasi sisa nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Dana Bergulir Diragukan Tertagih selama Tahun 2025.

## E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar Entitas Rp6.147.729.361.083,00*

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL antar KL, antar BUN, maupun KL dengan BUN, yang unsur-unsurnya meliputi:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain Akun 313111

2. Diterima dari Entitas Lain Akun 313121

3. Transfer Keluar Akun 313211

4. Transfer Masuk Akun 313221

5. Pengesahan Hibah Langsung Akun 391131

6. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Akun 391132

7. Pengesahan Hibah Langsung TAYL Akun 391133

Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp6.147.729.361.083,00 dan Rp4.066.181.563.780,00.

Rincian saldo Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel E.8**
**Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Ditagihkan ke Entitas Lain | 7.792.483.417.298 | 5.949.830.679.868 | 1.842.652.737430 | 30,97 |
| Diterima dari Entitas Lain | (2.128.190.124.418) | (2.025.668.632.304) | (102.521.492.114) | 5,06 |
| Transfer Keluar | (2.362.433.551.063) | (848.951.570.805) | (1.513.481.980.258) | 178,28 |
| Transfer Masuk | 2.734.869.509.117 | 818.837.653.821 | 1.916.031.855.296 | 233,99 |
| Pengesahan Hibah Langsung | 68.548.608.198 | 162.512.311.529 | (93.963.703.331) | (57,82) |
| Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung | 0 | (6.972.940) | 6.972.940 | (100,00) |
| Pengesahan Hibah Langsung TAYL | 42.451.501.951 | 9.979.698.811 | 32.471.803.140 | 325,38 |
| Setoran Surplus BLU | 0 | (351.604.200) | 351.604.200 | (100,00) |
| **Total** | **6.147.729.361.083** | **4.066.181.563.780** | **2.081.547.797.303** | **51,19** |

Perbandingan Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Unit Eselon I disajikan pada tabel berikut:

**Tabel E.9**
**Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas per Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Setjen | 477.978.950.995 | 289.760.511.202 | 188.218.439.793 | 64,96 |
| Itjen | 49.505.101.467 | 84.445.355.544 | (34.940.254.077) | (41,38) |
| Ditjen PT | 613.337.939.158 | 118.337.456.182 | 495.000.482.976 | 418,30 |
| Ditjen PB | 1.022.090.670.858 | 938.899.392.145 | 83.191.278.713 | 8,86 |
| Ditjen PSDKP | 1.570.758.193.535 | 1.114.057.528.414 | 456.700.665.121 | 40,99 |
| Ditjen PDSPKP | 161.562.710.029 | 344.522.161.841 | (182.959.451.812) | (53,11) |

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Ditjen PKRL | 2.524.965.904.281 | (355.608.334.769) | 2.880.574.239.050 | (810,04) |
| Ditjen PRL | (627.972.003) | | (627.972.003) | - |
| BPPSDMKP | (554.658.982.572) | 1.428.701.560.240 | (1.983.360.542.812) | (138,82) |
| BPPMHKP | 282.816.845.335 | 103.065.932.981 | 179.750.912.354 | 174,40 |
| **Total** | **6.147.729.361.083** | **4.066.181.563.780** | **2.081.547.797.303** | **51,19** |

Saldo Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 senilai Rp6.147.729.361.083,00 mengalami kenaikan sebesar 51,19% dibanding dengan saldo Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024 senilai Rp4.066.181.563.780,00.

Rincian dari Saldo Transaksi Antar Entitas dijelaskan sebagai berikut:

### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

*Diterima dari Entitas Lain (DDEL) Rp2.128.190.124.418,00*

Merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara BUN. Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL yang secara keseluruhan merupakan realisasi belanja sebesar Rp2.128.190.124.418,00.

**Tabel E.10**
**Rincian Saldo Diterima dari Entitas Lain Per Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Eselon I | DDEL | |
|---|---|---|
| | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 |
| Setjen | 3.626.240.525 | 2.224.907.322 |
| Itjen | 70.674.934 | 23.878.250 |
| Ditjen PT | 1.130.545.512.488 | 1.053.010.386.957 |
| Ditjen PB | 20.238.353.486 | 24.643.253.666 |
| Ditjen PSDKP | 69.579.902.916 | 23.459.756.799 |
| Ditjen PDSPKP | 9.649.493.873 | 9.354.525.348 |
| Ditjen PKRL | 866.933.629.851 | 843.308.374.261 |
| BPPSDMKP | 11.281.126.533 | 22.315.600.001 |
| BPPMHKP | 16.265.189.812 | 47.327.949.700 |
| **TOTAL** | **2.128.190.124.418** | **2.025.668.632.304** |

Ditjen Perikanan Tangkap merupakan Eselon I yang memiliki nilai paling signifikan sebesar Rp1.130.545.512.488,00.

### E.4.2 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

*Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) Rp7.792.483.417.298,00*

Merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara BUN. Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL

sebesar Rp7.792.483.417.298,00. Pada umumnya DKEL diperoleh dari pendapatan pengembalian belanja, denda penyelesaian pekerjaan, perizinan, dan lelang aset yang menggunakan dana APBN (Rupiah Murni).

Nilai bersih dari kedua akun tersebut adalah sebesar Rp5.016.524.827.107,00. Rincian DDEL dan DKEL yang bersaldo negatif akan menambah saldo Ekuitas Akhir dan sebaliknya akan mengurangi Ekuitas Akhir jika bersaldo positif.

**Tabel E.11**
**Rincian Saldo Ditagihkan ke Entitas Lain Per Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Eselon I | DKEL | |
|---|---|---|
| | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 |
| Setjen | 471.952.954.749 | 556.350.498.605 |
| Itjen | 49.585.196.401 | 84.427.641.894 |
| Ditjen PT | 1.701.818.841.882 | 834.829.659.593 |
| Ditjen PB | 1.036.484.279.681 | 959.241.092.143 |
| Ditjen PSDKP | 1.631.917.981.196 | 995.498.070.995 |
| Ditjen PDSPKP | 152.383.791.590 | 324.896.904.773 |
| Ditjen PKRL | 1.302.358.576.032 | 470.651.334.172 |
| BPPSDMKP | 1.147.214.265.801 | 1.399.061.514.605 |
| BPPMHKP | 298.767.529.966 | 324.873.963.088 |
| **TOTAL** | **7.792.483.417.298** | **5.949.830.679.868** |

Berdasarkan tabel di atas, Ditjen Perikanan Tangkap merupakan eselon I dengan realisasi belanja terbesar dibanding yang lain senilai Rp1.690.687.929.235,00.

### E.4.3 Transfer Keluar/Transfer Masuk

*Transfer Keluar/ Transfer Masuk (Rp 372.435.958.054,00)*

Transfer keluar/transfer masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk yang bersaldo positif akan menambah saldo Ekuitas Akhir sedangkan Transfer Keluar yang bersaldo negatif akan mengurangi Ekuitas Akhir, sebagai bagian dari transfer keluar senilai Rp2.362.433.551.063 di debet sedangkan untuk transfer masuk (Rp2.734.869.509.117) di kredit jadi bernilai negatif, maka nilai yg tertera di transfer keluar/masuk senilai (Rp372.436.958.054,00)

Rincian saldo Transfer keluar/transfer masuk per akun adalah sebagai berikut:

**Tabel E.12**
**Rincian Saldo Transfer Keluar Transfer Masuk Per Akun**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Transfer Keluar | 2362.433.551.063 | 848.951.570.805 | 1.514.109.952.261 | 178,35 |
| Transfer Masuk | 2.734.869.509.117 | 818.837.653.821 | 1.916.659.827.299 | 234,07 |
| **Total** | **(372.436.958.054)** | **30.113.916.984** | **(402.549.875.038)** | **(1.336,76)** |

Rincian saldo transfer keluar/transfer masuk pada masing-masing Unit Eselon I per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel E.13**
**Rincian Saldo Transfer Keluar Transfer Masuk**
**Pada Masing-Masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025**

| Nama Eselon I | Transfer Keluar | Transfer Masuk | Selisih |
|---|---|---|---|
| Setjen | 12.022.209.626 | 10.401.850.825 | 1.620.358.801 |
| Itjen | 9.420.000 | | 9.420.000 |
| Ditjen PT | 9.130.723.710 | 12.807.591.295 | (3.676.867.585) |
| Ditjen PB | 58.498.531.759 | 58.498.531.759 | - |
| Ditjen PSDKP | 21.054.519.998 | 24.014.406.366 | (2.959.886.368) |
| Ditjen PDSPKP | 1.728.946.645 | 11.311.993.546 | (9.583.046.901) |
| Ditjen PKRL | 116.498.247 | 2.087.831.858.470 | (2.087.715.360.223) |
| BPPSDMKP | | (627.972.003) | 627.972.003 |
| BPPMHKP | 2.181.093.243.269 | 456.388.850.491 | 1.724.704.392.778 |
| **TOTAL** | **2.362.433.551.063** | **2.734.869.509.117** | **(372.435.958.054)** |

Selisih TK-TM antar masing-masing Eselon I senilai Rp372.435.958.054,00. Selisih TK-TM terbesar terdapat pada Ditjen PKRL senilai Rp2.087.715.360.223,00 yang antara lain merupakan transaksi transfer masuk sebidang Tanah di Kota Semarang dari Kementerian Keuangan.

Selisih transfer keluar dan transfer masuk pada Kementerian Kelautan dan Perikanan juga disebabkan karena adanya Transfer Keluar dan Masuk aset dari Kementerian/Lembaga lain.

Adapun rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk dari Kementerian Lain disajikan sebagai berikut.

**Tabel E.14**
**Rincian Saldo Transfer Keluar Transfer Masuk dari Kementerian Lainnya**
**Pada Masing-Masing Eselon I**
**Per 31 Desember 2025**

| Kode Akun | Nama Akun | Nilai Perolehan | Akm Penyusutan | Nilai Buku | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| **Transfer Keluar** | | **2.179.056.777** | **601.883.704** | **1.577.173.073** | |
| **Kementerian Pertahanan** | | **2.159.454.467** | **601.883.704** | **1.557.570.763** | |
| 132111 | Peralatan dan Mesin | 318.280.000 | 289.056.000 | 29.224.000 | Transfer aset kepada Pangkalan Ranai |
| 133111 | Gedung dan Bangunan | 1.841.174.467 | 312.827.704 | 1.528.346.763 | Transfer aset kepada Pangkalan Ranai |
| **Badan Karantina Indonesia** | | **19.602.310** | **0** | **19.602.310** | |
| 117131 | Bahan Baku | 19.602.310 | 0 | 19.602.310 | Tranfer persediaan dalam rangka operasional Badan Karantina Indonesia |
| **Transfer Masuk** | | **374.523.546.828** | **510.415.701** | **374.013.131.127** | |
| **Badan Riset dan Inovasi Nasional** | | **370.101.912.871** | **430.790.604** | **369.671.122.267** | |
| 131111 | Tanah | 368.601.526.000 | 0 | 368.601.526.000 | Transfer Balai Teknologi Hidro Dinamika dalam rangka mendukung kegiatan belajar mengajar Poltke KP Sidoarjo |
| 132111 | Peralatan dan Mesin | 136.585.786 | 136.338.286 | 247.500 | Transfer Balai Teknologi Hidro Dinamika dalam rangka mendukung kegiatan belajar mengajar Poltke KP Sidoarjo |
| 133111 | Gedung dan Bangunan | 1.219.012.085 | 193.538.773 | 1.025.473.312 | Transfer Balai Teknologi Hidro Dinamika dalam rangka mendukung kegiatan belajar mengajar Poltke KP Sidoarjo |
| 134111 | Jalan dan Jembatan | 144.789.000 | 100.913.545 | 43.875.455 | Transfer Balai Teknologi Hidro Dinamika dalam rangka mendukung kegiatan belajar mengajar Poltke KP Sidoarjo |
| **Kementerian PUPR** | | **1.592.501.957** | **79.625.097** | **1.512.876.860** | |
| 134113 | Jaringan | 1.592.501.957 | 79.625.097 | 1.512.876.860 | Transfer Instalasi Air Bersih untuk mendukung operasional PPN Sungailiat |
| **Bendahara Umum Negara (BA. 999)** | | **2.829.132.000** | **0** | **2.829.132.000** | |
| 131111 | Tanah | 2.829.132.000 | 0 | 2.829.132.000 | Transfer aset unutk mendukung operasional Loka PSPL Serang |
| | **Total** | **376.702.603.605** | **1.112.299.405** | **375.590.304.200** | |

### E.4.4 Pengesahan Hibah

*Pengesahan Hibah Rp111.000.110.149*

Pengesahan hibah langsung merupakan hibah-hibah yang disahkan di tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu.

Rincian saldo Pengesahan hibah langsung per akun adalah sebagai berikut:

**Tabel E.15**
**Rincian Saldo Pengesahan Hibah Langsung Per Akun**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Akun | 31 Des 2025 | 31 Des 2024 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|
| Pengesahan Hibah Langsung | 68.548.608.198 | 162.512.311.529 | (93.963.703.331) | (57,82) |
| Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung | 0 | (6.972.940) | 6.972.940 | (100,00) |
| Pengesahan Hibah Langsung TAYL | 42.451.501.951 | 9.979.698.811 | 32.471.803.140 | 325,38 |
| **Total** | **111.000.110.149** | **172.485.037.400** | **(61.484.927.251)** | **(35,65)** |

Rincian saldo pengesahan hibah langsung pada masing-masing Unit Eselon I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel E.16**
**Rincian Saldo Pengesahan Hibah Langsung pada Masing-Masing Unit Eselon I**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Nama Eselon I | 31 Des 2025 | | | 31 Des 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pengesahan Hibah Langsung | Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung | Pengesahan Hibah Langsung TAYL | Pengesahan Hibah Langsung | Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung | Pengesahan Hibah Langsung TAYL |
| Setjen | 11.272.595.572 | 0 | 0 | 14.738.501.690 | 0 | 0 |
| Itjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ditjen PT | 38.387.742.179 | 0 | 0 | 82.936.538.758 | 0 | 574.489.000 |
| Ditjen PB | 3.862.926.149 | 0 | 1.981.818.514 | 849.047.246 | 0 | 0 |
| Ditjen PSDKP | 5.460.228.887 | 0 | 0 | 3.438.015.368 | 0 | 79.985.000 |
| Ditjen PDSPKP | 9.245.365.411 | 0 | 0 | 10.713.741.849 | 0 | 0 |
| Ditjen PKRL | 0 | 0 | 1.825.597.877 | 17.157.971.043 | (6.972.940) | 36.698.203 |
| BPPSDMKP | 319.750.000 | 0 | 33.792.520.938 | 32.678.495.575 | 0 | 9.288.526.608 |
| BPPMHKP | 0 | 0 | 4.851.564.622 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **68.548.608.198** | **0** | **42.451.501.951** | **162.512.311.529** | **(6.972.940)** | **9.979.698.811** |

Pengesahan Hibah Langsung yang ada pada periode Desember 2025 merupakan hibah yang terdiri dari:

1. Pengesahan Hibah Langsung pada Sekretariat Jenderal senilai Rp11.272.595.572 merupakan hibah langsung pada Biro Umum, masing-masing sebagai berikut:

    a. Pengesahan jasa giro rekening terkait proyek *Program for Development of The Integrated Marine And Fisheries Center and Market In Outer Islands* sebesar Rp1.093.607.967,00;

    b. Pengesahan jasa giro rekening terkait proyek *The Programme for The Development of Fisheries Sector In Outer Islands* (*Phase 2*) sebesar Rp875.237.605,00;

    c. Pengesahan pendapatan selisih kurs terkait proyek *The Programme for The Development of Fisheries Sector In Outer Islands* (*Phase 2*) sebesar Rp6.202.500.000,00;

    d. Pengesahan pendapatan selisih kurs terkait terkait proyek *Program for Development of The Integrated Marine And Fisheries Center And Market In Outer Islands* sebesar Rp3.101.250.000,00.

2. Pengesahan Hibah Langsung pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap senilai Rp38.387.742.179,00 merupakan Hibah Langsung Luar Negeri dalam bentuk Jasa pada tahun 2025 sesuai Perjanjian Hibah Nomor: 497-AA-040 tanggal 16 Februari 2021 dan Hibah Langsung Luar Negeri Dalam Bentuk Jasa T.A 2025 sesuai surat perjanjian hibah No: TCA.26.09.2023 Tanggal 26 September 2023, serta JICA.

3. Pengesahan Hibah Langsung senilai Rp3.862.926.149,00 dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL senilai Rp1.981.818.514,00 pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, masing-masing merupakan:

    a. Hibah Luar Negeri dalam bentuk Jasa Tahun 2025 Sesuai dengan Surat Perjanjian Hibah Nomor TCP/INS/3904 Tanggal Perjanjian Hibah 28 April 2023 dan Nomor TCP/INS/3903 Tanggal Perjanjian 28 April 2023 senilai Rp3.862.926.149,00

    b. Pengesahan Hibah Langsung Pelaksanaan Kegiatan GEF 5 Enebling Transboundary Coorporation for Sustainable Management of the Indonesian Seas senilai Rp22.506.368,00.

    c. Pengembalian Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Tanah di Kab. Mesuji sesuai Surat Perjanjian Hibah/NPHD/NPHLN No.B/6898/IV/.08/HK/NPHD/MSJ/ 2022 tanggal 3-11-2022 senilai Rp1.305.598.000,00

d. Hibah Luar Negeri dalam bentuk Jasa TA 2024 sesuai dengan Surat Perjanjian Hibah Nomor 230124 Tanggal Perjanjian Hibah 14 Agustus 2013 senilai Rp296.349.901,00

e. Hibah Langsung *Enabling Transboundary Cooperation for Sustainable Management of the Indonesia Seas* senilai Rp357.364.245,00

4. Pengesahan Hibah Langsung pada Direktorat Jenderal PSDKP senilai Rp5.460.228.887,00 sebagai berikut:

a. Stasiun PSDKP Tarakan senilai Rp1.639.461.315,00 merupakan hibah barang milik negara berupa tanah dan bangunan dari Pemerintah Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 002.2.3.2/416/NPHD/ASET.BPKAD Nomor 44/SJ.2/PL.720/I/2025 tanggal 20 Februari 2025.

- SP3HL Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah yang diterima berupa barangriasa/surat berharga dengan nomor Register Hibah 26373JQA.

- Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dari KPPN nomor 048 – Tarakan tanggal 24 Juni 2025 dengan nomor 8243140011012187071.

b. Sekretariat Ditjen PSDKP senilai Rp3.820.767.572,00 merupakan hibah jasa luar negeri dari *United States Agency for International Development* (USAID) atas pelaksanaan program “Bersama Kelola Perikanan (USAID Ber-IKAN)” sesuai register hibah nomor 23D5SAMA tanggal 16 Februari 2021, untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2024. Pencatatan hibah dilaksanakan berdasarkan BAST Hibah USAID Nomor 240/USAID-INA/BAST-Service/ENV tanggal 10 April 2025.

- SP3HL Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah yang diterima berupa barang/iasa/surat berharga dengan nomor Register Hibah 23D5SAMA.

- Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dari KPPN nomor 048 – Tarakan tanggal 30 September 2025 dengan nomor 8260365421031675114.

5. Pengesahan Hibah Langsung pada Ditjen PDSPKP senilai Rp9.245.365.411,00

   a. Hibah Jasa Luar Negeri dari *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO) untuk kegiatan *Global Quality Standard Programme* (GQSP) Indonesia Nomor Hibah 230124 senilai Rp4.329.055.684,00

   b. Hibah Jasa Luar Negeri dari USAID untuk kegiatan *USAID Bilateral Development Cooperation Framework (BDCF) 497-AA-040 (The Implementation of The USAID Marine and Fisheries Portofolio)* senilai Rp4.916.309.727,00.

6. Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut senilai Rp1.825.597.877,00 merupakan Hibah Langsung Berbentuk Jasa, No Register 2Z5GG3BA dan Hibah Dalam Negeri dalam bentuk Barang TA 2024 sesuai Perjanjian Hiibah No 885/SJ/PL.750/X/2024 Tanggal 30 Oktober 2024.

7. Pengesahan Hibah Langsung senilai Rp319.750.000,00 dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL senilai Rp33.792.520.938,00 pada BPPSDMKP sebagai berikut:

   a. Pengesahan Hibah Langsung senilai Rp319.750.000,00 pada BPPP Bitung merupakan hibah langsung dalam bentuk barang dari PT Pathemaang Raya kepada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung untuk mendukung tugas dan fungsi BPPP bitung.

   b. Pengesahan Hibah Langsung TAYL senilai Rp33.792.520.938,00 merupakan:

      - Pengesahan Hibah Langsung TAYL senilai Rp970.168.500,00 pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan berupa *Mainstreaming Biodiversity Conservation and Sustainable Use into Inland Fisheries (IFish)* sesuai dokumen perjanjian hibah Nomor GCP/INS/303/GFF Tanggal 20 Juni 2023 dengan nomor 823177464997170783 tanggal 21 April 2025 oleh KPPN Jakarta VI.

- Pengesahan Hibah Langsung TAYL senilai Rp1.484.600.000,00 pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan yang telah mendapatkan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL) dengan nomor 823202348997857176 tanggal 23 April 2025 oleh KPPN Palembang.

- Pengesahan Hibah Langsung TAYL senilai Rp20.710.018.052,00 pada Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

- Pengesahan Hibah Langsung TAYL senilai Rp10.627.734.386,00 pada Sekretariat BPPSDMKP berupa *Mainstreaming Biodiversity Conservation and Sustainable Use into Inland Fisheries Practices in Freshwater Ecosystem of High Conservation Value (IFish)"* dengan register nomor 2Z5GG3BA.

8. Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada BPPMHKP senilai Rp4.851.564.622,00.

   a. Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada Sekretariat BPPMHKP senilai Rp.3.291.564.622,00 merupakan hibah jasa luar negeri dengan rincian sebagai berikut:

      - Hibah jasa luar negeri pelaksanaan kegiatan *Global Quality and Standards Programme* (GQSP) Indonesia tahun 2024 sebesar Rp.444.199.435 (untuk penguatan pendirian penyedia jasa yaitu berperan sebagai narasumber dan peserta *remote audit workshop* di Vietnam, pelatihan penyegaran bagi inspektur mutu, narasumber sosialisasi dan FGD penjaminan mutu produk kelautan dan perikanan dalam rangka penetapan otorisasi kompetensi sistem penjaminan mutu dan keamanan, pelatihan SNI ISO 35001, study banding buspm ke laboratorium kimia snsu serpong, penyusunan rekomendasi sistem jaminan mutu perikanan nasional.

      - Hibah Jasa Luar Negeri Pelaksanaan Kegiatan *Increasing Trade Capacities of Selected Value Chains within the Fisheries Sector in Indonesia* Tahun 2023 sebesar Rp.2.847.365.187 (untuk Penyusunan Panduan Mutu, Dukungan Pelaksanaan Remote Inspection untuk sertifikat HACCP, Dukungan Peningkatan kapasitas Inspektur Mutu Perikanan tentang sertifikat HACCP dan Sistem Jaminan Mutu Produk Perikanan, Fasilitas keikutsertaan BKIPM pada Forum *Food Safery* di Austria, dukungan teknis Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik bagi

pedagang/pengepul, Dukungan pendampingan teknis terkait sertifikat HACCP, Penyusunan rekomendasi kebijakan terkait Sistem Jaminan Mutu untuk HACCP, Dukungan promosi dan registrasi Laboratorium Uji BKIPM untuk terdaftar di platform LabNet.

- Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan pada Balai KIPM Tarakan sebesar Rp1.560.000.000,00.

## E.5 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir Rp27.761.154.139.521,00*

Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari penjumlahan saldo awal Ekuitas. Surplus/Defisit LO. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar. Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas dan Transaksi Antar Entitas.

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp28.365.614.672.979,00 dan Rp25.220.160.346.839,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel E.17**
**Perbandingan Saldo Ekuitas Akhir**
**Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|
| Ekuitas Awal | 25.220.160.346.839 | 25.529.221.392.262 | (309.061.045.423) | (1,21) |
| Surplus/ Defisit LO | (2.920.878.371.051) | (4.350.213.626.097) | 1.429.335.255.046 | (34,13) |
| Koreksi yang menambah Ekuitas | (81.396.663.892) | (25.028.983.106) | (56.367.680.786) | 273,05 |
| Transaksi Antar Entitas | 6.147.729.361.083 | 4.066.181.563.780 | 2.081.547.797.303 | 35,26 |
| **TOTAL** | **28.365.614.672.979** | **25.220.160.346.839** | **3.145.454.326.140** | **10,08** |

Dibandingkan tahun sebelumnya, Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.145.454.326.140,00 atau 12,47% yang disebabkan unsur-unsur pembentuk LPE mengalami kenaikan.